



PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Pelalawan Tahun 2021-2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Pelalawan
Tahun 2021-2024*



BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 telah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 merupakan bagian dari proses penyempurnaan Revisi RPJMD. Dimana secara teknis, penyusunan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Dimana secara umum, maksud pembuatan KLHS dalam RPJMD yang diatur dalam Permendagri ini adalah untuk mewujudkan RPJMD yang disusun telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga penetapan isu diawali dengan identifikasi pencapaian TPB pada daerah yang bersangkutan. Pencapaian dilihat berdasarkan target capaian daerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan secara nasional dalam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 kami ucapkan terima kasih

Pangkalan Kerinci, November 2020
BUPATI PELALAWAN

M. HARRIS



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika Pembuatan KLHS Revisi RPJMD	4
BAB II DASAR TEORI	II-1
2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	1
2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	4
2.2.1 Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4
2.2.2 Indikator TPB	4
2.2.3 Pelaksanaan SDGs/TPB di Indonesia.....	5
2.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	6
2.4 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Risiko Lingkungan Hidup	8
2.4.1. Kondisi Wilayah Rawan Bencana.....	8
2.5 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	13
2.5.1 Pertanian	13
2.5.2 Perkebunan	15
2.5.3 Peternakan	16
2.5.4 Perikanan	17
2.5.5 Kehutanan	18
2.6 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	20
2.7 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	21
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN	III-1
3.1. Aspek Geografis dan Demografis	1
3.1.1. Kondisi Geografis	1
3.1.2. Kondisi Demografis	10
3.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	12
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum	41
3.1.5. Aspek Daya Saing Daerah.....	63
3.1.6. Aspek Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Pelalawan.....	67
3.2. Analisis Ekonomi dan Fiskal Daerah	98
3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	98
3.3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB	114
BAB IV ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PELALAWAN	IV-1
4.1.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional.....	4
4.1.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional.....	7



4.1.3 Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	10
4.1.4 Indikator yang belum/tidak ada data (NA)	11

BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) V-1

5.1 Capaian Indikator Tpb Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....	1
5.1.1. Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial...	1
5.1.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi.....	2
5.1.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan	3
5.1.4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	4
5.2 Identifikasi Isu Strategis	5
5.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial	6
5.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi.....	7
5.2.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	9
5.2.4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola	10
5.3 Analisis Pencapaian Tpb Berdasarkan Pertimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	13
5.4 Analisis Kerangka Pendanaan	20

BAB VI PERUMUSAN SKENARIO VI-1

6.1 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Daerah	1
6.2 Indikator TPB Yang Perlu Upaya Tambahan	21
6.3 Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan	36

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI VII-1

7.1 Kesimpulan.....	1
7.2 Saran dan Tindak Lanjut.....	4

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Jumlah Tujuan, Target Dan Indikator Kabupaten Pelalawan.....	5
Tabel 2.2.	Jumlah Indikator Dalam Pilar TPB Kabupaten Pelalawan	5
Tabel 2.3.	Tiga Konsep dan Data Utama Dalam Penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	7
Tabel 2.4.	Rekapitulasi peta ancaman/bahaya banjir Kabupaten Pelalawan	9
Tabel 2.5.	Rekapitulasi Peta Ancaman/Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pelalawan	10
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Peta Ancaman/Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Kabupaten Pelalawan	12
Tabel 2.7.	Luas Panen Tanaman Sayuran Dan Produksi Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Pelalawan, 2018.....	13
Tabel 2.8.	Indikator Pertanian Kabupaten Pelalawan	14
Tabel 2.9.	Potensi Lahan Kabupaten Pelalawan.....	14
Tabel 2.10.	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (Ribu Ha) Di Kabupaten Pelalawan.....	15
Tabel 2.11.	Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan, 2017	15
Tabel 2.12.	Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan, 2018 (ekor) ..	16
Tabel 2.13.	Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Per Kecamatan, 2018 (Ekor).....	16
Tabel 2.14.	Nilai Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum, Tambak, Kolam Dan Keramba Menurut Jenis Ikan	17
Tabel 2.15.	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2016	18
Tabel 2.16.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan..	21
Tabel 2.17.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan	22
Tabel 3.1.	Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan	1
Tabel 3.2.	Jenis Tanah Menurut Peta Tanah Eksplorasi Di Wilayah Kabupaten Pelalawan	8
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	10
Tabel 3.4.	Jumlah penduduk kabupaten pelalawan	11
Tabel 3.5.	Indikator Kependudukan Kabupaten Pelalawan 2015 – 2019.....	12
Tabel 3.6.	Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019, (Rp juta).....	13
Tabel 3.7.	Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (juta)....	14
Tabel 3.8.	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015 – 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Pelalawan	16
Tabel 3.9.	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (%)	17
Tabel 3.10.	Data DTKS Kabupaten Pelalawan Tahun 2019	24
Tabel 3.11.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya, Provinsi Riau Dan Indonesia Tahun 2010 - 2019.....	25



Tabel 3.12.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 - 2019	26
Tabel 3.13.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Rls) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019.....	27
Tabel 3.14.	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019	28
Tabel 3.15.	Sebaran Covid 19 Kabupaten Pelalawan Per 06 Agustus 2020.....	30
Tabel 3.16.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	31
Tabel 3.17.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	31
Tabel 3.18.	Penduduk Kabupaten Pelalawan Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2019	32
Tabel 3.19.	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019	33
Tabel 3.20.	Kemiskinan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019	34
Tabel 3.21.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan I – 2020 Dibandingkan Dengan Triwulan IV-2019	35
Tabel 3.22.	Skenario Dampak Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Nasional Dan Kabupaten Pelalawan	36
Tabel 3.23.	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2019	39
Tabel 3.24.	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan	39
Tabel 3.25.	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun 2018 s.d 2019	40
Tabel 3.26.	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	41
Tabel 3.27.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019	41
Tabel 3.28.	Perkembangan Rasio Guru Dan Murid Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	42
Tabel 3.29.	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Pelalawan Sampai Dengan Tahun 2019	45
Tabel 3.30.	Persentase Luas Permukiman Kabupaten Pelalawan Yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2017 (Ha)	46
Tabel 3.31.	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	47
Tabel 3.32.	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan	48
Tabel 3.33.	Perkembangan Indikator-Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019	48
Tabel 3.34.	Perkembangan Indikator-Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 -2019	50
Tabel 3.35.	Perkembangan Rasio Produksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung Dan Kedelai Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	51
Tabel 3.36.	Rasio Poduksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung Dan Kedelai Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	52
Tabel 3.37.	Perkembangan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017	53
Tabel 3.38.	Jumlah Volume Sampah Dan Produksi Sampah Tahun 2017 Di Kabupaten Pelalawan	54
Tabel 3.39.	Data Pelayanan Penanganan Persampahan Tahun 2017.....	55
Tabel 3.40.	Bank Sampah Di Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.....	55
Tabel 3.41.	Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif Dan Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2017 Kabupaten Pelalawan	56



Tabel 3.42.	Jumlah Industri Kecil, Investasi Dan Tenaga Kerja Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Pelalawan.....	57
Tabel 3.43.	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Serta Group Kesenian Dan Gedung Kesenian Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	58
Tabel 3.44.	Pusat Kebudayaan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	58
Tabel 3.45.	Sungai dan Potensi Perikanan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	59
Tabel 3.46.	Danau dan Potensi Perikanan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	59
Tabel 3.47.	Produksi Perikanan Menurut Jenis Dan Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	60
Tabel 3.48.	Perkembangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	61
Tabel 3.49.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyedia Pangan Kabupaten Pelalawan.....	68
Tabel 3.50.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Pelalawan.....	70
Tabel 3.51.	Distribusi Luas Wilayah Yang Mampu Mendukung Jasa Ekosistem penyediaan Serat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan	71
Tabel 3.52.	Distribusi Luas Wilayah Yang Mampu Mendukung Jasa Ekosistem penyediaan Energi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan	73
Tabel 3.53.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan	74
Tabel 3.54.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan..	76
Tabel 3.55.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Pelalawan	77
Tabel 3.56.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam Kabupaten Pelalawan	78
Tabel 3.57.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Pelalawan.....	80
Tabel 3.58.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pengolahan Dan Penguraian Limbah Kabupaten Pelalawan	81
Tabel 3.59.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pelalawan	83
Tabel 3.60.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan.....	84
Tabel 3.61.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit Menurut Kecamatan	86
Tabel 3.62.	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup Kabupaten Pelalawan.....	87
Tabel 3.63.	Distribusi Dan Luas Kelas Jasa Budaya Rekreasi Dan Tourism Kabupaten Pelalawan	88
Tabel 3.64.	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Budaya Estetika Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan.....	90
Tabel 3.65.	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Kesuburan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan ..	91
Tabel 3.66.	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Pendukung Siklus Hara Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan.....	93
Tabel 3.67.	Distribusi luas jasa ekosistem produksi primer menurut kecamatan	94
Tabel 3.68.	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Menurut Kecamatan.....	95
Tabel 3.69.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	97



Tabel 3.70.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/Opd Dan Jenis Pendapatan Daerah Di Kabupaten Pelalawan Dari Tahun 2015-2019	100
Tabel 3.71.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/Opd Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	104
Tabel 3.72.	Estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD tahun 2021-2025 (rp. juta).....	107
Tabel 3.73.	Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD TAHUN 2021-2025 (RP. JUTA)	110
Tabel 3.74.	Peran Para Pihak Kabupaten Pelalawan Dan Pencapaian TPB	113
Tabel 4.1.	Capaian Indikator TPB Di Kabupaten Pelalawan	IV-2
Tabel 4.2.	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional	4
Tabel 4.3.	Indikator Tpb Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional	8
Tabel 4.4.	Indikator TPB Yang Belum Dilakukan Dan Belum Mencapai Target Nasional.....	11
Tabel 4.5.	Indikator TPB Yang Belum/Tidak Ada Data (Na)	12
Tabel 5.1.	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial.....	V-1
Tabel 5.2.	Capaian Indikator TPB b Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi.....	2
Tabel 5.3.	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan.....	3
Tabel 5.4.	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum Dan Tata Kelola	4
Tabel 5.5.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial	6
Tabel 5.6.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi	7
Tabel 5.7.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	9
Tabel 5.8.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum Dan Tata Kelola	11
Tabel 5.9.	Kesesuaian Isu Strategis Dokumen Rpjmd Terhadap TPB Kabupaten Pelalawan	11
Tabel 5.10.	Persentase Luasan Dddtlh Berbasis Jasa Ekosistem Di Kabupaten Pelalawan	13
Tabel 5.11.	Rumusan Isu Strategis Tiap Jasa Ekosistem Di Kabupaten Pelalawan	16
Tabel 5.12.	Isu Strategis Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Indikator Pencapaian TPB	18
Tabel 5.13.	Isu Strategis Kabupaten Pelalawan	19
Tabel 5.14.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2021	21
Tabel 5.15.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD dan Jenis Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2015-2019.....	24
Tabel 5.16.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	27
Tabel 5.17.	Estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)	30
Tabel 5.18.	Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)	33
Tabel 6.1.	Penentuan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Pelalawan	VI-3



Tabel 6.2.	Penentuan Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Pelalawan	7
Tabel 6.3.	Rekomendasi Isu Utama dan Pencapaian TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan tetapi Belum Terakomodasi Permendagri 90	8
Tabel 6.4.	Sepuluh Penyakit dengan Penderita Terbanyak di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	13
Tabel 6.5.	Pengelolaan Air Bersih Unit Pengelola Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	15
Tabel 6.6.	Perkembangan Rasio Produksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung dan Kedelai di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017	17
Tabel 6.7.	Perkiraan Timbulan Sampah dan Sampah (kg) dikelola di Kabupaten Pelalawan	19
Tabel 6.8.	Pengurangan Sampah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019	20
Tabel 6.10.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024	22
Tabel 6.11.	Indikator TPB Yang Perlu Upaya Tambahan	25
Tabel 6.12.	Indikator TPB Yang Dapat Dilaksanakan Dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021-2024 Tanpa Upaya Tambahan	37



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD.....	2
Gambar 2.2.	Tahapan Penyusunan KLHS	3
Gambar 2.3.	Peta Bahaya Banjir Kabupaten Pelalawan	9
Gambar 2.4.	Perkembangan Jumlah Titik Api Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017.....	10
Gambar 2.5.	Peta Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Pelalawan.....	11
Gambar 2.6.	Peta Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Kabupaten Pelalawan ...	12
Gambar 2.7.	Peta Rawan Bencana Di Kabupaten Pelalawan	13
Gambar 2.8.	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2009	19
Gambar 2.9.	Kerentanan Provinsi Riau	20
Gambar 2.10.	Presentase Luas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan	21
Gambar 2.11.	Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan	23
Gambar 3.1.	Peta Wilayah Adminditrasi Kabupaten Pelalawan	2
Gambar 3.2.	Peta Topografi Kabupaten Pelalawan.....	3
Gambar 3.3.	Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Pelalawan	4
Gambar 3.4.	Peta Geologi Kabupaten Pelalawan.....	5
Gambar 3.5.	Peta Wilayah Sungai Kabupaten Pelalawan.....	6
Gambar 3.6.	PETA JENIS TANAH DI KABUPATEN PELALAWAN.....	7
Gambar 3.7.	Curah Hujan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 - 2016.....	9
Gambar 3.8.	Hari Hujan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 - 2016	10
Gambar 3.9.	Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019.....	13
Gambar 3.10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 - 2019	18
Gambar 3.11.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015–2019.....	19
Gambar 3.12.	Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.....	19
Gambar 3.13.	Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2011–2019.....	20
Gambar 3.14.	PDRB Per Kapita Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019.....	21
Gambar 3.15.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015 – 2019	22
Gambar 3.16.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019	22
Gambar 3.17.	IPM Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019	25
Gambar 3.18.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017... ..	27
Gambar 3.19.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015– 2019	28
Gambar 3.20.	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019... ..	29
Gambar 3.21.	perkembangan persentase balita gizi buruk kabupaten pelalawan tahun 2013 – 2017	37
Gambar 3.22.	Perkembangan Persentase Balita Kurang Gizi Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017.....	37
Gambar 3.23.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019	38



Gambar 3.24.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya Dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019	38
Gambar 3.25.	Angka Kematian Bayi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019.....	43
Gambar 3.26.	Jumlah Kematian Ibu Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan.....	44
Gambar 3.27.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2017 Kabupaten Pelalawan	46
Gambar 3.28.	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2012-2017 Kabupaten Pelalawan	56
Gambar 3.29.	Peta Pertambangan Di Kabupaten Pelalawan.....	63
Gambar 3.30.	Peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Minerba Di Kabupaten Pelalawan.....	63
Gambar 3.31.	Perkembangan Produksi Minyak Sawit (CPO) Dan Karet (KKK)	64
Gambar 3.32.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Pelalawan	69
Gambar 3.33.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Pelalawan	70
Gambar 3.34.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Pelalawan.....	72
Gambar 3.35.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Kabupaten Pelalawan	73
Gambar 3.36.	Presentase Luas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan.....	75
Gambar 3.37.	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Iklim Kabupaten Pelalawan.....	76
Gambar 3.38.	Presentase Luas Jasa Pengatur Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Pelalawan.....	77
Gambar 3.39.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana	79
Gambar 3.40.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Pelalawan.....	80
Gambar 3.41.	Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan Dan Penguraian Limbah Kabupaten Pelalawan.....	82
Gambar 3.42.	Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pelalawan.....	83
Gambar 3.43.	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami.....	85
Gambar 3.44.	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit	86
Gambar 3.45.	Peta Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup Kabupaten Pelalawan.....	88
Gambar 3.46.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Budaya Rekreasi Dan Tourism	89
Gambar 3.47.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Nilai Estetika Kabupaten Pelalawan.....	90
Gambar 3.48.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Kesuburan Kabupaten Pelalawan.....	92
Gambar 3.49.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Siklus Hara Kabupaten Pelalawan	93
Gambar 3.50.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Pelalawan.....	94
Gambar 3.51.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Pelalawan.....	95



Gambar 4.1	Persentase Capaian TPB Kabupaten Pelalawan	IV-3
Gambar 4.2	Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Pelalawan	3
Gambar 4.3	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional.....	4
Gambar 4.4	Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional.....	8
Gambar 4.5	Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target Nasional.....	11
Gambar 4.6	Indikator Tpb Yang Belum/Tidak Ada Data (Na).....	12
Gambar 5.1.	Kontribusi OPD Dalam Capaian Indikator Pilar Sosial	V-2
Gambar 5.2.	Kontribusi OPD Dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi.....	3
Gambar 5.3.	Kontribusi OPD Dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan.....	4
Gambar 5.4.	Kontribusi OPD Dalam Capaian Indikator Pilar Hukum Dan Tata Kelola.....	5
Gambar 5.5.	Nilai Ambang Batas Jasa Ekosistem DDDTLH Kabupaten Pelalawan .	14
Gambar 5.6.	Penentuan Isu Strategis Berdasarkan DDDTLH Yang Relevan	15
Gambar 6.1.	Alur Analisis Perumusan Skenario.....	1
Gambar 6.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015 – 2019	12
Gambar 6.3.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019.....	13
Gambar 6.4.	Rumah Sehat Tahun 2017	14
Gambar 6.5.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2019.....	15
Gambar 6.6.	Causal Loop Pengelolaan Sampah	18
Gambar 6.7.	Model Dinamik Timbulan Sampah Di Kabupaten Pelalawan.....	19



DAFTAR SINGKATAN

A

AAAA	: Addis Ababa Action Agenda
ADK	: Anak dengan Kedisabilitas
AHH	: Angka Harapan Hidup
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AMDAL	: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ANC	: Antenatal care
ART	: Anggota Rumah Tangga
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM	: Angka Partisipasi Murni
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APPEL	: Aliansi Pemuda Pelalawan
APR	: Aliansi Pemuda Riau
APS	: Angka Partisipasi Sekolah

B

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BGM	: Bawah Garis Merah
BKG	: Balita Kurang Gizi
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BWBLP	: Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan
B3	: Bahan Berhaya Beracun

C

CAT	: Cekungan Air Tanah
CPO	: <i>Cruid Palm Oil</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CSD	: <i>Commission Sustainable Development</i>

D

DAS	: DAS
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBD	: Demam Berdara Dengue
DDDTLH	: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIR	: Daerah Irigasi
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E



EHRA : En Health Risk Ass

F

FKPPI : Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri

G

GenRE : Generasi Berencana

Gerda Pelalawan : Generasi Muda Pelalawan

GPPP : Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan

GSDR : *Global Sustainable Development Report*

H

HGB : Hak Guna Bangunan

HGU : Hak Guna Usaha

HLPF : *High Level Political Forum*

HLS : Harapan Lama Sekolah

HP : *Hand Pone*

HPH : Hak Pengusaha Hutan

I

IAEG : Inter-Agency Expert Group

IMR : Infant Mortality Rate

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKM : Indeks Kepuasan Konsumen

IPK : Ikatan Pemuda Karya

IPM : Index Pembangunan Manusia

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

IPTTM : Ikatan Pemuda Pemudi Peduli Teluk Meranti

ISO : *International Organization for Standardization*

ISPO : Indonesian Sustainable Palm Oil System

J

JPOI : *Johannesburg Plan of Implementation*

K

KAT : Komunitas Adat Terpencil

KB : Keluarga Berencana

KDH : Kepala Daerah

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KHG : Kesatuan Hidrologis Gambut

KLG : Kawasan Lindung Kubah Gambut

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KM : Kilo Meter

KM² : Kilo Meter Persegi

KK : Kepala Keluarga

KRP : Kebijakan, Rencana dan/atau Program



KTP : Kartu Tanda Penduduk
KUB : Kelompok Usaha Bersama
KUKM : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

L

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA : Madrasa Aliyah
MEA : *Millenium Ecosystem Assessment*
MDGs : *Millennium Development Goals*
MDPL : Meter dari Permukaan Laut
MI : Madrasa Ibtidaiyah
MM : Mili Meter
MTs : Madrasah Tsanawiyah
MYS : Mean Years of Schooling

N

NA : Not Applicable, Not Available Atau No Answer
NAPZA : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
NIK : Nomor Induk Kepegawaian
NTN : Nilai Tukar Nelayan
NTP : Nilai Tukar Perikanan
NTPi : Nilai Tukar Pembudidaya

O

ODHA : Orang dengan HIV/AIDS
OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDRB : Pendapatan Daerah Regional Bruto
PEKAT : Penyakit Masyarakat
PERBUP : Peraturan Bupati
PERDA : Peraturan Daerah
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PMA : Penanaman Modal Asing



PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMBS	: Pekerja Migran Bermasalah Sosial
PMM	: Pemuda Panca Marga
PMMP	: Persatuan Pemuda Melayu Pesisir
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pol-AIR	: Polisi Air
POKMASWAS	: kelompok POK MASyarakat pengaWAS
PPIDK	: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
PPES	: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera
PP	: Peraturan Pemerintah
PRB	: pengurangan risiko bencana
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUS	: Pasangan Usia Subur
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

R

RAD	: Rencana Aksi Daerah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RT	: Rukun Tetangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RW	: Rukun Warga

S

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDG'S	: <i>Sustainable Development Goal's</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SIR	: Standard Indonesian Rubber
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan



T

TBC	: Tuberculosis
TNTN	: Taman Nasional Tesso Nilo
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPK	: Tingkat Penghunian Kamar Hotel
TPS	: Tempat Penampungan Sementara
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPTT	: Tingkat Penghunian Tempat Tidur

U

UCI	: Universal Child Immunization
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

W

WP	: Wilayah Pertambangan
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WS	: Wilayah Sungai
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

3

3R	: Reduce, Reuse, Recycle
----	--------------------------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Disamping itu pembangunan daerah juga berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah. Hal ini menjadi tantangan agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga terciptanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia jangka pendek dengan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup namun juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada bulan September Tahun 2020, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan wajib melakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024. Dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD, terdapat regulasi yang harus diperhatikan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai "rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip



pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilakukan karena adanya perubahan anggaran dan perubahan kebijakan nasional (ayat 1). Berkaitan dengan substansi ini, Pasal 9 menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: a). Holistik-tematik; b). Integratif; dan c). Spasial. Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian di ayat 2-nya dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta pentingnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa muatan pada kebijakan rencana, program (KRP) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021-2024 telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat rencana yang ditetapkan dapat diminimalisir.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 – 2039.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan KLHS adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 melalui:

1. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024;
3. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024;
4. Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan KLHS.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan ini mencakup:

1. Kondisi Umum daerah, memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.
2. Capaian Indikator TPB, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pembagian Peran, berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.



1.4 Sistematika Pembuatan KLHS Revisi RPJMD

Pembuatan KLHS Revisi RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS Revisi RPJMD
Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan BAPPEDA dan dengan Dinas Lingkungan Hidup serta dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS Revisi RPJMD melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengkajian pembangunan berkelanjutan
Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh tim terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dan pembagian peran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
Perumusan skenario mengacu pada analisis perkembangan pencapaian indikator TPB di daerah, proyeksi capaian indikator TPB Daerah tahun 2030, analisis gap antara target TPB dengan proyeksi capaian TPB di daerah, menentukan isu strategis berdasarkan indikator TPB, analisis permasalahan dalam pencapaian indikator TPB, serta menentukan sasaran pencapaian.
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS Revisi RPJMD.
Penjaminan kualitas KLHS Revisi RPJMD dilakukan oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah tersebut. Laporan KLHS RPJMD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Validasi KLHS RPJMD dilakukan oleh Gubernur Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 (Pasal 15, ayat 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ketiga mekanisme utama di atas perlu didukung dengan beberapa kegiatan atau langkah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merancang proses KLHS, agar proses dan hasil KLHS dapat benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan KLHS. Dalam merancang proses KLHS ini, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah pentingnya memahami konteks penyusunan dan evaluasi KRP, sehingga proses KLHS nya nanti dapat diintegrasikan dalam proses KRP dengan baik. Dalam memahami konteks penyusunan dan evaluasi KRP ini, salah satu yang penting adalah mengetahui jenis KRP-nya sendiri.

Penyelenggaraan KLHS dituntut partisipatif, maka proses KLHS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu diidentifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk setiap proses penyusunan dan evaluasi KRP, dan berdasarkan identifikasi ini, kemudian dapat ditentukan siapa saja pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses KLHS.

Setelah pemangku kepentingan dan masyarakat ini ditentukan, maka mereka dapat kita libatkan dalam proses lebih lanjut yaitu identifikasi dan penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan di wilayah dimana KRP tersebut akan disusun. Proses ini perlu didukung dengan databased yang baik, agar proses penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan ini dapat secara rasional dilakukan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

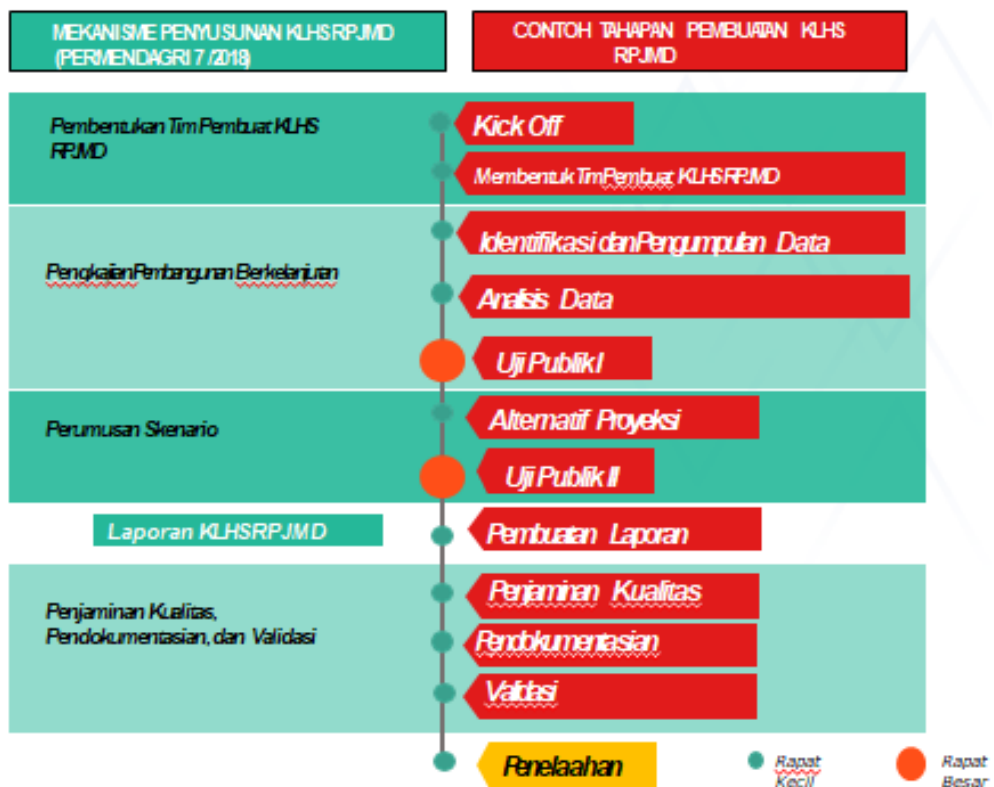
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan



Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat kajian antara lain: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

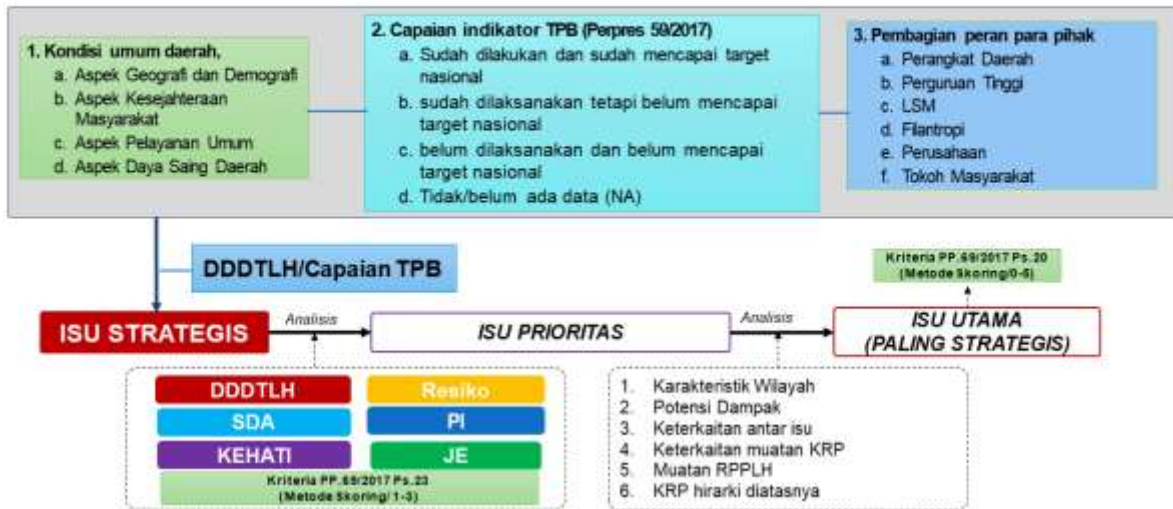
Adapun mekanisme penyusunan KLHS berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD

Tahapan pengkajian pada KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan meliputi identifikasi, pengumpulan dan analisis data serta perumusan skenario disajikan pada Gambar 2.2.

Tahap Pengkajian (identifikasi, pengumpulan dan analisis data)



Perumusan Skenario Kabupaten Pelalawan



Gambar 2.2. Tahapan Penyusunan KLHS

(Sumber : Permendagri No 7, 2018)

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan sistem dinamik. Pendekatan ini memiliki keuntungan dalam memformulasikan situasi masalah dengan membagi berdasarkan pemilahan dan pengelompokan terkecil, sehingga dapat membantu dalam pendataan, perincian masalah, gap dan tekanan dari masing-masing sub model. Permasalahan yang kompleks dikaji setelah melihat sistem dari bagian sub-sub model yang dibangun.



2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.2.1 Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada *stakeholder* nonpemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar *stakeholder* dan *my world survey*, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. *My world survey* adalah *global survey* bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok – kelompok yang paling termarginalkan.

2.2.2 Indikator TPB

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan berdasarkan pada serangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk Inter-Agency Expert Group (IAEG) on *SDGs Indicators* pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 241 indikator global.

Secara keseluruhan dokumen indikator dibagi menjadi tiga kategori tier: 1) Tier I merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara rutin dikeluarkan oleh negara; 2) Tier II merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan data secara rutin; dan 3) Tier III, yang merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki metodologi dan/atau standar atau masih dalam tahap penyusunan ataupun percobaan. Meskipun telah disetujui, indikator global ini masih memungkinkan mengalami perubahan terutama dalam pembahasan metodologis pada indikator global yang berada di Tier III. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesepakatan atas definisi dan standar di tingkat internasional dalam pembahasan indikator global. Selain itu IAEG juga masih memiliki tugas untuk memberikan usulan mekanisme pelaporan kerangka indikator SDGs.



Jumlah Indikator dalam Pilar TPB sebanyak 241 Indikator, 169 Target, dan 17 Tujuan, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Tujuan, Target dan Indikator Kabupaten Pelalawan

TPB	GLOBAL	NASIONAL	KAB. PELALAWAN
Tujuan	17 Tujuan	17 Tujuan	15 Tujuan
Target	169 Target	169 Target	67 Target
Indikator	241 indikator	319 indikator	220 Indikator

Jumlah indikator dalam pilar TPB Kabupaten Pelalawan meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Indikator dalam Pilar TPB Kabupaten Pelalawan

PILAR PEMBANGUNAN	INDIKATOR
Lingkungan	42
Ekonomi	61
Sosial	96
Hukum dan Tata Kelola	21
JUMLAH	220

2.2.3 Pelaksanaan SDGs/TPB di Indonesia

SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara. Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun dari pengesahannya di tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998.

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. Perpres tersebut memuat: (1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; dan (3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap stakeholder non-



pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, stakeholder kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha.

2.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Terdapat beberapa metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di atas, diantaranya adalah yang telah dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera adalah penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape base proxy dan landcover/ landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi di atas, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki kesamaan substansi dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:



1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem tersebut di atas, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem).

Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/landcover* dan ekoregion dan satu konsep output yaitu jasa ekosistem. Selengkapannya data dan indikator ketiga konsep tersebut disajikan dalam klasifikasi berikut (Tabel 2.3). Sistem klasifikasi ekoregion mengikuti Verstappen dan klasifikasi liputan lahan menggunakan SNI 7645-1 2014 dan *one map policy*. Ketiga data tersebut diilustrasikan pada tabel berikut dengan mengambil contoh skala 1:50.000.

Tabel 2.3. Tiga konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Ekoregion*	Liputan Lahan*	Jasa Ekosistem
1. Kerucut Gunung api	1. Bangunan Bukan Permukiman	1. Pangan
2. Lereng Gunung api	2. Bangunan	2. Air bersih
3. Kaki Gunung api	2. Bangunan Permukiman/Campuran	3. Serat (<i>fiber</i>)
4. Pegunungan Patahan	3. Danau/Telaga	4. Bahan bakar (<i>fuel</i>), Kayu dan Fosil
5. Pegunungan Lipatan	4. Hutan Lahan Rendah (Hutan lahan basah)	5. Sumberdaya genetic
6. Perbukitan Patahan	5. Hutan Lahan Tinggi (HutanLahan Kering)	6. Pengaturan iklim
7. Perbukitan Lipatan	6. Hutan Mangrove	7. Pengaturan tata aliran air dan banjir
8. Lereng kaki Patahan	7. Hutan Rawa/Gambut	8. Pencegahan dan perlindungan dari bencanaalam
9. Lereng kaki Lipatan	8. Hutan Tanaman	9. Pemurnian air
10. Lembah antar Patahan	9. Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan semusim)	10. Pengolahan dan penguraian limbah
11. Lembah antar Lipatan	10. Kolam air asin/payau	11. Pemeliharaan kualitasu dara
12. Dataran Fluvio Gunung api	11. Lahan Terbuka (hamparan pasir, lava)	12. Pengaturan penyerbukan alami (pollination)
13. Dataran Aluvial	12. Lahan Terbuka Diusahakan	13. Pengendalian hama dan penyakit
14. Dataran Fluviomarin	13. Perkebunan	14. Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)
15. Pegunungan Solusional	14. Pertambangan	15. Rekreasi dan <i>ecotourism</i>
16. Perbukitan Solusional	15. Rawa Pesisir	16. Estetika (Alam)
17. Lembah antar Perbukitan /PegununganSolusional	16. Rawa Pedalaman	17. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan
18. Pegunungan Denudasional	17. Savana/Padang rumput	18. Siklus hara (<i>nutrient cycle</i>)
19. Perbukitan Denudasional	18. Semak dan belukar	19. Produksi primer
20. Lereng kaki Perbukitan/Pegunungan Denudasional	19. Sungai	20. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)
21. Lembah antar Perbukitan /Pegunungan Denudasional	20. Tanaman Semusim LahanBasah (Sawah)	
22. Gumuk Pasir	21. Tanaman Semusim LahanKering (Tegalan/Ladang)	
23. Padang Pasir	22. Waduk dan Danau Buatan	
24. Pantai (<i>Shore</i>)	23. Tambak/Empang	
25. Pesisir (<i>Coast</i>)		
26. Pegunungan Glasial		
27. Perbukitan Glasial		
28. Lembah antar Perbukitan / Pegunungan Glasial		



Ekoregion*	Liputan Lahan*	Jasa Ekosistem
29. Dataran Gambut 30. Dataran Terumbu 31. Dataran Reklamasi		

Sumber : KLHK, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera

*) Untuk di Ekoregion Sumatera tidak semua jenis klasifikasi penutup lahan dan ekoregion ada.

Sebagaimana Pasal 17 Undang-undang No 32 Tahun 2009, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.4 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Risiko Lingkungan Hidup

Potensi rawan banjir di Kabupaten Pelalawan adalah pada bagian wilayah yang berdekatan atau berhampiran dengan tepian Sungai Kampar dan beberapa anak sungainya, yaitu di kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Ukui, Pelalawan, Kerumutan, dan Teluk Meranti.

2.4.1. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan kejadian bencana alam sebelumnya yang pernah terjadi adalah: bencana banjir, dan bencana kebakaran hutan/lahan yang menimbulkan kabut asap. Selain itu ada potensi juga bagi bencana geologi berupa bencana gerakan tanah (longsor, amblas) pada beberapa tempat tertentu.

A. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Potensi rawan banjir di Kabupaten Pelalawan adalah pada bagian wilayah yang berdekatan atau berhampiran dengan tepian Sungai Kampar dan beberapa anak sungainya, yaitu di kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Ukui, Pelalawan, Kerumutan, dan Teluk Meranti.

Berdasarkan data dan Informasi bencana indonesia (DIBI) BNPB 2017 terlihat bahwa bencana yang paling sering terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir di Kabupaten Pelalawan adalah bencana banjir yang terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kejadian, kemudian bencana cuaca ekstrim dengan 7 (tujuh) kali kejadian, serta bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi masing-masingnya sebanyak 2 (dua) kali kejadian. Bencana yang mengakibatkan jumlah korban terluka paling banyak adalah bencana banjir yang terjadi pada 24 maret 2008 dengan jumlah korban terluka sebanyak 274 jiwa. Disamping itu, bencana banjir juga merupakan satu- satunya bencana yang tercatat berdampak terhadap 3 orang meninggal dunia.

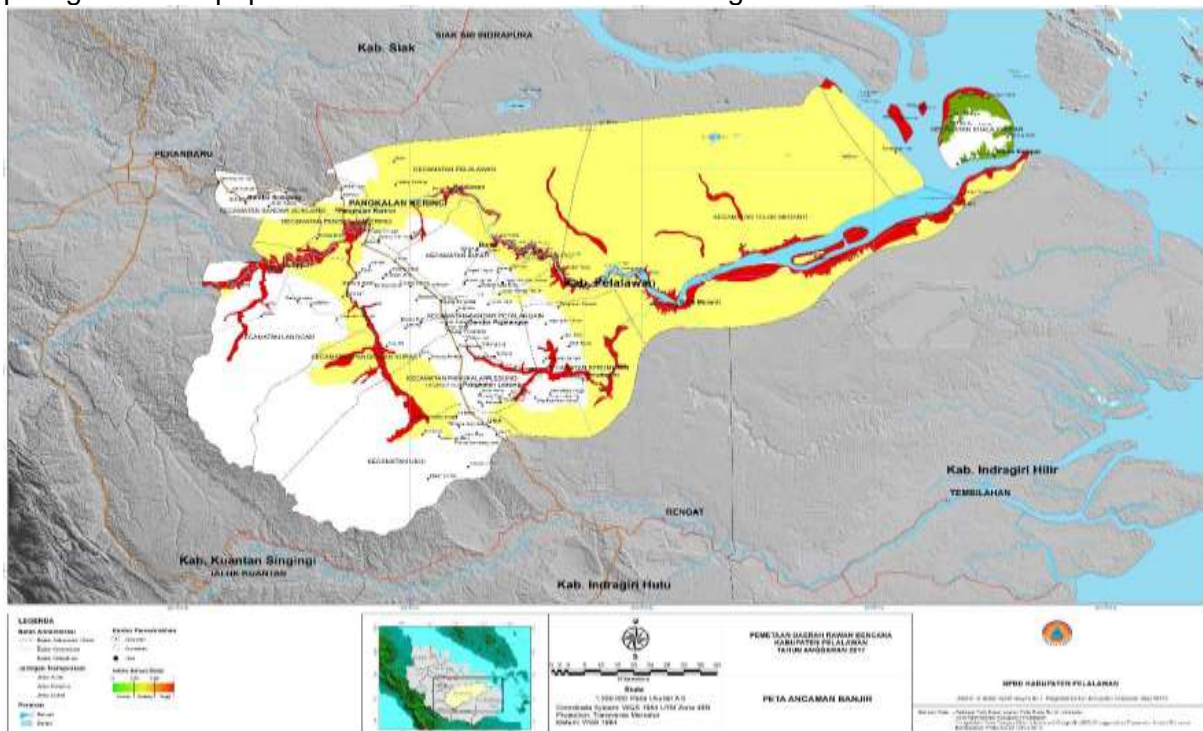


Tabel 2.4. Rekapitulasi Peta Ancaman/Bahaya Banjir Kab. Pelalawan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)			Jumlah (ha)	Indeks (rata-rata)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		(0-0.3)	(0.3-0.6)	(0.6-1)	
1	Bandar Petalangan	0	4826.25	172.52	4998.76	0.8887			Tinggi
2	Bandar Seikijang	0	13113.03	13.43	13126.46	0.8330			Tinggi
3	Bunut	0	9905.19	361.54	10266.74	0.8887			Tinggi
4	Kerumutan	0	57439.98	7443.03	64883.01	0.8330			Tinggi
5	Kuala Kampar	12540.59	28740.54	9828.29	51109.42	0.8331			Tinggi
6	Langgam	0	18906.81	11389.90	30296.71	0.8242			Tinggi
7	Pangkalan Kerinci	0	11752.53	2987.84	14740.37	0.8748			Tinggi
8	Pangkalan Kuras	0	18844.42	6676.19	25520.61	0.7773			Tinggi
9	Pangkalan Lesung	0	15077.72	4624.57	19702.29	0.8330			Tinggi
10	Pelalawan	0	124602.88	6318.74	130921.62	0.9393			Tinggi
11	Ukui	0	7674.49	2613.40	10287.89	0.7773			Tinggi
12	Teluk Meranti	0	350650.10	36266.57	386916.67	0.9687			Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan bahwasanya seluruh kecamatan di Kabupaten pelalawan berpotensi ancaman bahaya banjir. Dengan luasan yang paling besar terpapar adalah Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Langgam. Sedangkan yang paling sedikit terpapar ialah Kecamatan Bandar Petalangan.

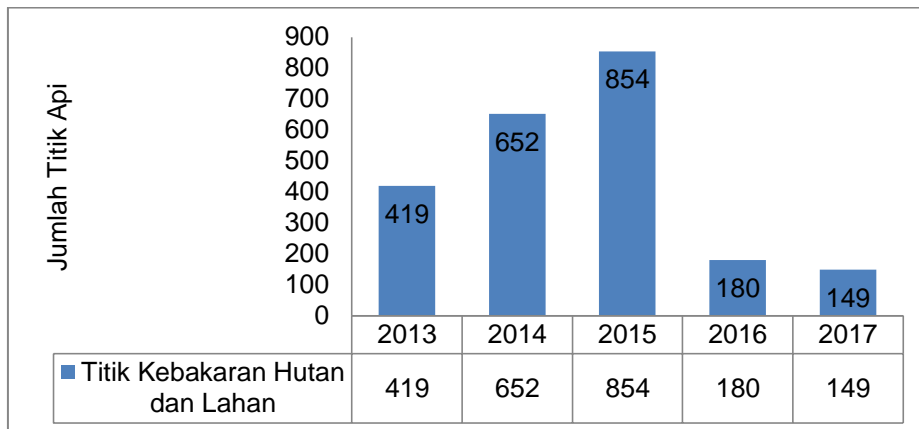


Gambar 2.3. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Pelalawan
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan Tahun 2017



B. Wilayah Rawan Kebakaran Hutan/Lahan

Wilayah rawan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut yang menimbulkan kabut asap terutama berkaitan dengan adanya pembukaan lahan dengan pembakaran, kebakaran pada hutan/lahan gambut di bagian hilir wilayah, yang umumnya terjadi pada musim kering/kemarau. Kawasan rawan kebakaran hutan atau lahan gambut, yang menimbulkan kabut asap diindikasikan pada kawasan hutan dan/atau lahan gambut yang terletak di kecamatan: Langgam, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Kuala Kampar, Kerumutan, Teluk Meranti, Bandar Seikijang, dan Bandar Petalangan. Untuk lebih jelasnya jumlah titik kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2013-2017) dapat dilihat pada grafik Gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Titik Api di kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017

Sumber : Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pelalawan 2018

Selama periode Tahun 2013 – 2015, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat secara berfluktuatif. Pada Tahun 2013, jumlah titik api yang membakar hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan sebanyak 419 titik api. Pada Tahun 2014, jumlah titik api meningkat tajam menjadi 652 titik api yang membakar hutan dan lahan sehingga menimbulkan kabut asap. Pada Tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan berakibat kepada kabut asap hingga sampai ketahap pencemaran udara yang terkategori sangat berbahaya. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan titik api di Kabupaten Pelalawan meningkat sebesar 24,16%/tahun. Pada Tahun 2015 jumlah titik api di Kabupaten Pelalawan lebih banyak dengan dampak kabut asap yang jauh lebih parah dibanding kejadian Tahun 2014. Pada Tahun 2016 dan 2017 titik api dan lahan semakin menurun tajam, pada tahun 2017 jumlah titik kebakaran api dan lahan hanya sebesar 149 titik api saja.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Peta Ancaman/Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pelalawan

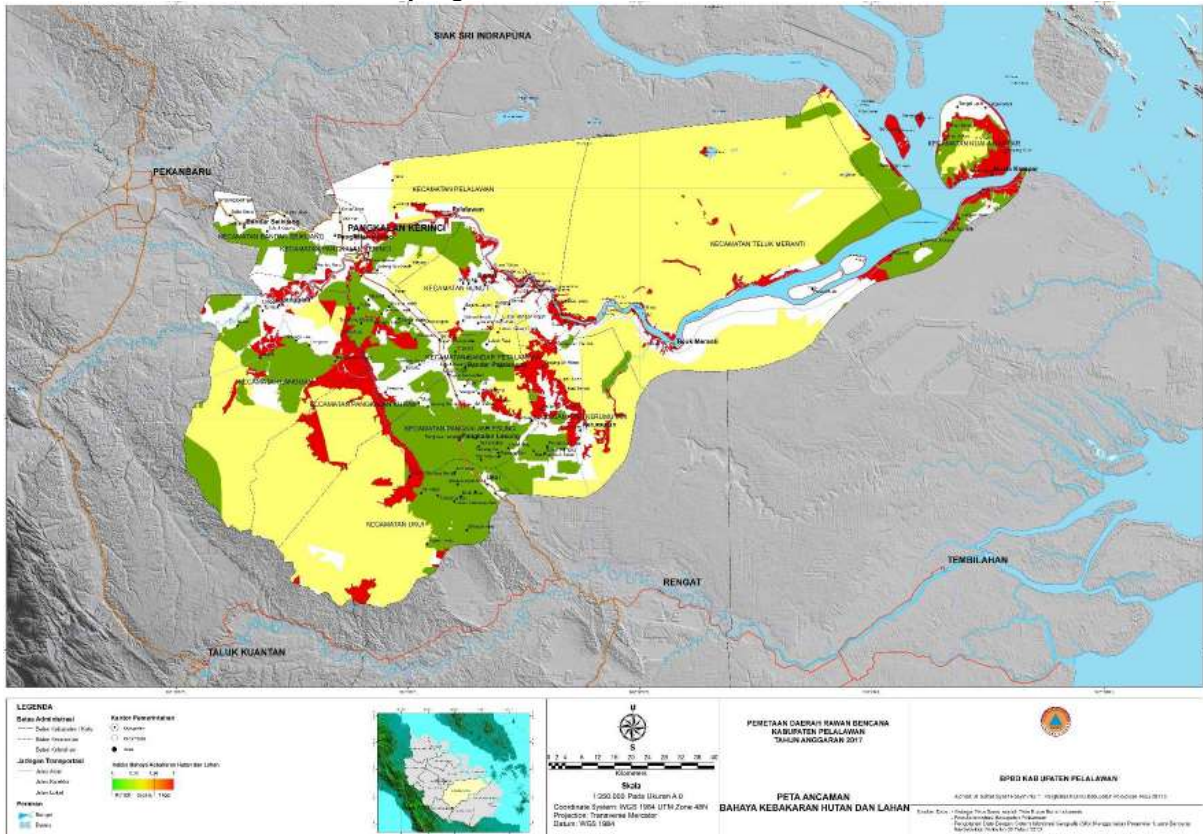
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)			Jumlah (ha)	Indeks (rata-rata) (0-0,3) (0,3-0,6) (0,6-1)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1	Bandar Petalangan	0,00	27359.15	7723.57	35082.72	0.5506	Sedang
2	Bandar Seikijang	0,00	30593.07	93.51	30686.58	0.5155	Sedang
3	Bunut	0,00	28861.44	12858.08	41719.52	0.5584	Sedang
4	Kerumutan	0,00	75784.35	14512.13	90296.48	0.5608	Sedang
5	Kuala Kampar	0,00	40980.94	20785.38	61766.32	0.7565	Tinggi
6	Langgam	0,00	114161.23	27276.22	141437.4	0.5347	Sedang
7	Pangkalan Kerinci	0,00	9679.18	6076.05	15755.23	0.5382	Sedang
8	Pangkalan Kuras	0,00	84059.62	15933.74	99993.36	0.5305	Sedang
9	Pangkalan Lesung	0,00	41663.99	3695.32	45359.31	0.5637	Sedang
10	Pelalawan	0,00	130707.82	8091.10	138798.9	0.5883	Sedang



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)			Jumlah (ha)	Indeks (rata-rata) (0-0,3) (0,3-0,6) (0,6-6-1)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
11	Ukui	0,00	116539.26	18701.56	135240.8	0.5438	Sedang
12	Teluk Meranti	0,00	116539.26	8182.11	124721.3	0.6594	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan 2019

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan bahawa kecamatan Langgam dan Teluk Meranti berpotensi ancaman bahaya Karlahut paling tinggi. Dengan luasan yang paling besar terpapar adalah Kecamatan Langgam. Sedangkan yang paling sedikit terpapar ialah Kecamatan Bandar Sei Kijang.



Gambar 2.5. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pelalawan
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan 2019

C. Wilayah Berpotensi Gerakan Tanah (longsor dan Amblas) dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Wilayah di Kabupaten Pelalawan yang memiliki potensi rawan gerakan tanah berupa longsor dan amblas adalah pada bagian wilayah dengan topografi yang membentuk bentang wilayah (morfologi) berbukit dan bergelombang. Bagian wilayah yang potensial (rawan) gerakan tanah berupa longsor dan amblas ini adalah di diindikasikan terdapat setempat-setempat seperti di kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, dan Pelalawan.

Abrasi bisa terjadi ketika terjadi gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melanda daerah pantai dan semakin parah jika pantai mengalami kerusakan. Secara alami gelombang dan arus laut terjadi akibat perbedaan tekanan yang ekstrem di permukaan laut. kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga mempengaruhi terjadinya abrasi pantai. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (current), tutupan vegetasi di

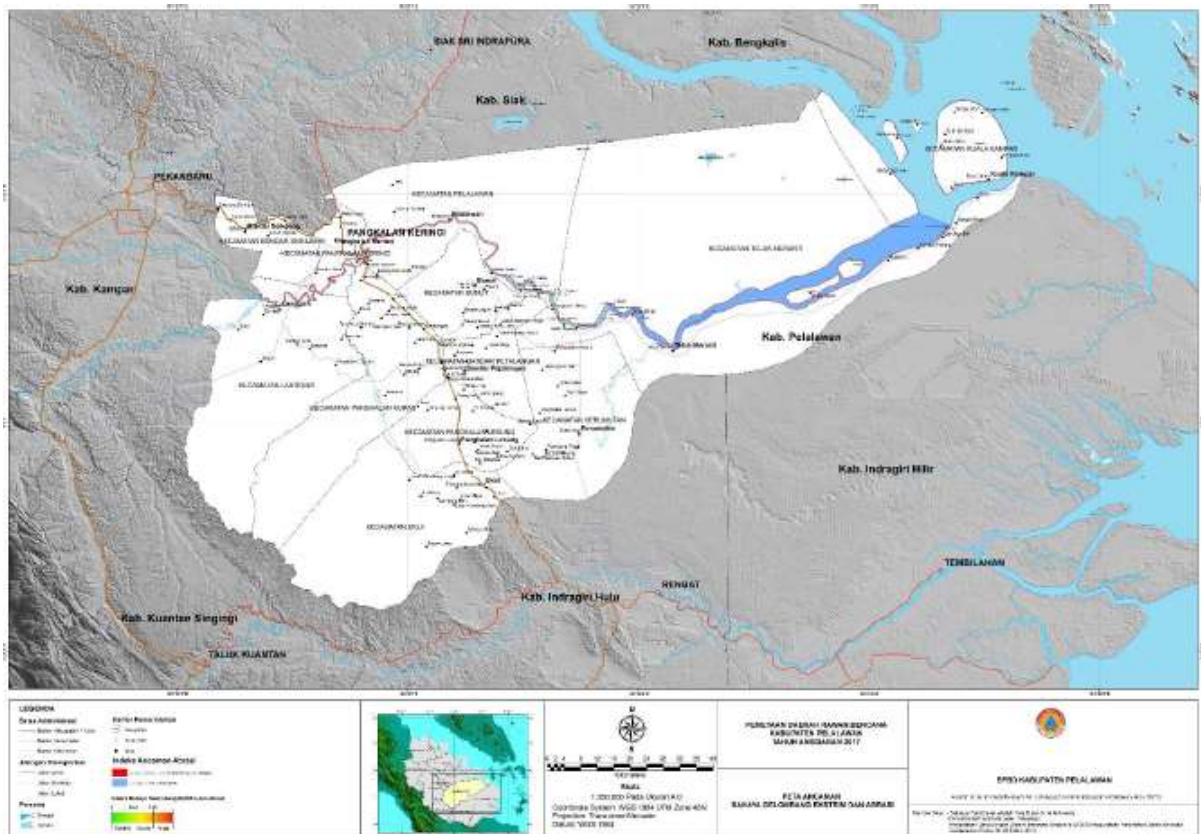


wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Peta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Pelalawan dapat di lihat pada Gambar.2.3, dan analisis rekapitulasinya pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Peta Ancaman/Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Pelalawan

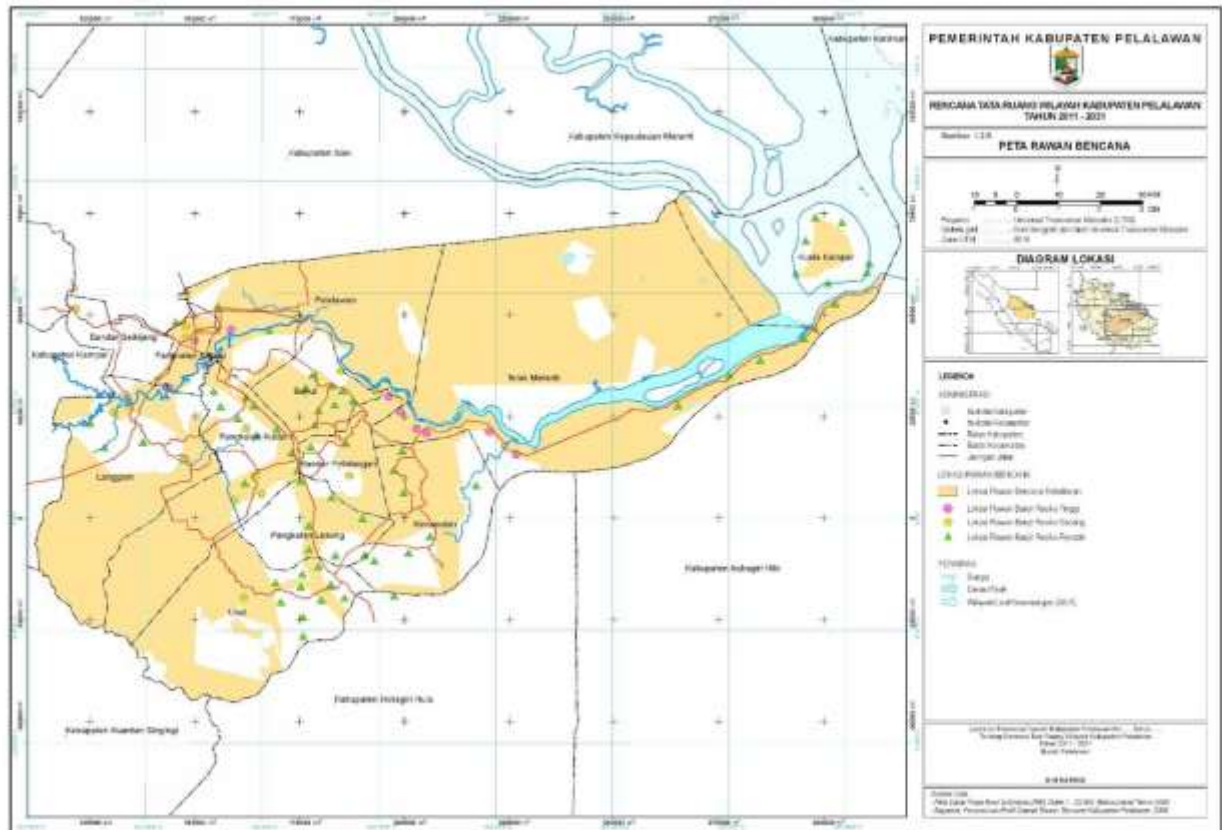
No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	Tinggi Gelombang	Kelas Gelombang	SKOR	Arus	Kelas Arus	SKOR	Tutupan Vegetasi	Kelas Vegetasi	SKOR	Bentuk Garis Pantai	Kelas Garis Pantai	SKOR	Tipologi Pantai	Kelas Tipologi Pantai	SKOR	TOTAL SKOR	KELAS
1	Langgam	555.69	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi
2	Teluk Meranti	2280.27	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi
3	Kuala Kampar	841.32	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi
4	Pangkalan Kerinci	439.4	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi
5	Pangkalan Kuras	25.29	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi
6	Pelalawan	1614.74	2.92	1	0.30	22.3	1	0.30	90%	0.3	0.05	Berteluk-Lurus	0.66	0.10	Berlumpur	1	0.10	0.74	tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan 2019



Gambar 2.6. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Pelalawan
 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan 2019

Lokasi atau bagian wilayah yang rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Pelalawan
 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pelalawan, Tahun 2011-2031

2.5 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

2.5.1 Pertanian

Kawasan pertanian dikelompokkan menjadi; tanaman pangan dan hortikultura. Hortikultura merupakan bagian dari agronomi. Namun, berbeda dari agronomi, hortikultura justru memfokuskan peranan budidaya pada jenis tanaman buah, bunga, sayuran, obat-obatan, dan lanskap atau yang disebut taman.

Sektor pertanian tanaman pangan, palawija dan sayur-sayuran menjadi salah satu komoditas yang potensial di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2.7. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Produksi Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pelalawan, 2018

No.	Kecamatan	Luas Lahan Cabai (Ha)		Jumlah Produksi Cabai (Kuintal)	
		2017	2018	2017	2018
1	Langgam	34	38	186	248
2	Pangkalan Kerinci	28	22	825	610
3	Bandar Sei Kijang	13	16	1.194	1.531
4	Pangkalan Kuras	17	20	134	235
5	Ukui	17	19	160	193
6	Pangkalan Lesung	18	12	379	317
7	Bunut	22	29	136	172
8	Pelalawan	7	4	86	80
9	Bandar Petalangan	18	7	72	61
10	Kuala Kampar	12	8	107	86
11	Kerumutan	21	12	11	77



No.	Kecamatan	Luas Lahan Cabai (Ha)		Jumlah Produksi Cabai (Kuintal)	
		2017	2018	2017	2018
12	Teluk Meranti	7	15	114	288
	Jumlah	214	202	3.504	3.934

Komoditas padi banyak diproduksi di Pangkalan Kuras dan di sepanjang daerah aliran sungai Kampar serta pulau Mendhol (Kuala Kampar). Jagung merupakan tanaman palawija yang mempunyai potensi besar di Kabupaten Pelalawan. Lahan jagung tersebar di Kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti, dengan luas panen 6.221 Ha dan produksi 15.874 ton. Beberapa tanaman sayuran diproduksi seperti ubi, kacang panjang dan cabe. Namun untuk memenuhi kebutuhan di dalam kabupaten Pelalawan, beberapa komoditas sayuran masih harus di peroleh dari luar kabupaten

Tabel 2.8. Indikator Pertanian Kabupaten Pelalawan

No.	Uraian	Luas dan Produksi
A	Padi (sawah Ladang)	
1	Luas Panen (Ha)	4.800
2	Produksi (Ton)	18.111
B	Jagung	
1	Luas Panen (Ha)	6.221
2	Produksi (Ton)	15.874
C	Uni Kayu	
1	Luas Panen (Ha)	147
2	Produksi (Ton)	3.993
D	Kacang Panjang	
1	Luas Panen (Ha)	179
2	Produksi (Ton)	4.028
E	Cabe Besar	
1	Luas Panen (Ha)	81
2	Produksi (Ton)	2607

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Pelalawan 2019

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan sebagian besar berupa lahan kering (98,99 persen). Sementara jumlah potensi lahan sawah tahun 2015 sebesar 7.385 Ha. Luas panen tanaman padi seluas 4.800 Ha dengan produksi 18.111 ton (padi sawah dan padi ladang).

Tabel 2.9. Potensi Lahan Kabupaten Pelalawan

No.	Uraian	2015
A	Potensi Lahan Sawah (Ha)	
1	Pasang Surut	6.324
2	Tadah Hujan	1.061
3	Lebak dan Lainnya	0
	Jumlah	7.385
B	Potensi Lahan Kering (Ha)	
1	Tegalan	51.914
2	Ladang	23.771
3	Perkebunan	424.640
4	Lainnya	224.634
	Jumlah	724.960

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Pelalawan 2019



2.5.2 Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Komoditas yang termasuk komoditas sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit, Karet, Kakao, dan Kelapa.

Areal perkebunan sawit terluas berada di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2018 seluas 73,52 ribu Ha, areal pekrbunan kelapa terluas berada di Kecamatan Kuala Kampar.

pada tahun 2018 seluas 14,69 ribu Ha, dan areal perkebunan karet terluas berada di Kecamatan Pangkalan Kuras seluas 5,18 ribu Ha. Adapun Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ribu Ha) di Kabupaten Pelalawan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ribu Ha) di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Langgam	11,86	76,19	0,05	0,05	2,55	2,55
2	Pangkalan Kerinci	4,70	5,33	0,03	0,04	0,22	0,22
3	Bandar Sei Kijang	13,27	28,24	0,02	0,03	0,68	0,68
4	Pangkalan Kuras	17,97	73,52	0,11	0,11	5,18	5,18
5	Ukui	14,50	63,17	0,05	0,06	0,86	0,86
6	Pangkalan Lesung	11,37	26,37	0,04	0,04	1,98	1,97
7	Bunut	7,20	17,31	0,03	0,03	3,29	3,29
8	Pelalawan	9,55	15,55	0,03	0,03	2,30	2,30
9	Bandar Petalangan	7,13	28,60	0,04	0,05	2,02	2,02
10	Kuala Kampar	0,23	0,23	14,55	14,69	1,46	1,46
11	Kerumutan	14,26	44,61	0,09	0,09	2,58	2,58
12	Teluk Meranti	7,53	14,21	1,72	1,72	3,67	3,67
	Jumlah	119,57	393,33	16,76	16,93	26,97	26,97

Sumber : Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2019

Tabel 2.11. Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Per Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 2017

Kecamatan	Produksi (Ton)		
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit
Langgam	3.297,42	45,15	42.099,92
Pangkalan Kerinci	308,78	55,89	17.198,00
Bandar Sei Kijang	956,73	30	50.968,68
Pangkalan Kuras	7.274,32	149	69.494,32
Ukui	1.204,00	68	56.062,96
Pangkalan Lesung	2.774,17	52	45.533,41
Bunut	4.449,44	37	25.739,88
Pelalawan	3.152,81	37	33.717,00
Bandar Petalangan	2.778,37	58	26.012,24
Kuala Kampar	600,48	12.257,00	7.809,08
Kerumutan	3439,6	114,62	53.442,32
Teluk Meranti	4.538,87	2.378,00	24.938,03
Jumlah	34.774,99	15.281,66	453.015,84

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, Tahun 2018



2.5.3 Peternakan

Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi. Sub sektor peternakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya peternak, serta memperluas kesempatan kerja. Salah satu komoditi peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein adalah daging. Kebutuhan masyarakat terhadap daging seperti halnya produk ternak lainnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah telah berupaya meningkatkan hasil produksi yang bersumber dari usaha ternak. Adapun jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Pelalawan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan, 2018 (Ekor)

No.	Kecamatan	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
1	Langgam	633	-	261	302	70	-
2	Pangkalan Kerinci	625	48	276	202	92	800
3	Bandar Sei Kijang	424	-	20	417	66	-
4	Pangkalan Kuras	1.459	-	-	290	152	650
5	Ukui	2.093	-	31	1.337	154	10
6	Pangkalan Lesung	1.877	-	-	538	-	-
7	Bunut	181	-	15	721	15	-
8	Pelalawan	842	-	384	1.027	70	-
9	Bandar Petalangan	589	-	121	1.433	-	-
10	Kuala Kampar	903	-	-	2.483	-	-
11	Kerumutan	946	36	-	320	6	-
12	Teluk Meranti	796	-	202	758	9	-
	Jumlah	11.368	84	1.310	9.828	634	1.490

Sumber : Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2019

Populasi ternak sapi tahun 2018 mengalami kenaikan 5,80 persen, kerbau mengalami kenaikan 8,71 persen, serta kambing/ domba juga mengalami peningkatan 13,24 persen dibandingkan tahun 2017. Pengadaan ternak diperoleh dari hasil budidaya dan beberapa diantaranya berupa bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta keikutsertaan pihak swasta. Sementara itu, jumlah populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Pelalawan tahun 2018 sebanyak 6.326.000 ekor dan ayam buras sebanyak 339.393 ekor. Adapun jumlah populasi ternak unggas menurut jenis per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Per Kecamatan, 2018 (Ekor)

No.	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
1	Langgam	28.100	85.000	2.850
2	Pangkalan Kerinci	30.240	470.000	3.709
3	Bandar Sei Kijang	16.600	3.630.000	3.130
4	Pangkalan Kuras	7.250	420.000	4.115
5	Ukui	24.450	240.000	5.572
6	Pangkalan Lesung	4.285	110.000	890
7	Bunut	50.165	340.000	1.392
8	Pelalawan	16.600	56.000	2.180
9	Bandar Petalangan	17.653	670.000	6.937



No.	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
10	Kuala Kampar	39.050	-	3.056
11	Kerumutan	67.000	425.000	2.749
12	Teluk Meranti	38.000	-	2.045
	Jumlah	339.393	6.326.000	38.634

Sumber : Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2019

2.5.4 Perikanan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu wilayah produsen ikan air tawar yang dibudidayakan baik di sungai dan danau. Perikanan budidaya untuk jenis-jenis ikan bernilai jual tinggi seperti baung dan tapah telah berkembang baik dan hasilnya dipasarkan ke wilayah sekitarnya.

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, terutama perikanan budidaya, hal ini disebabkan karena Kabupaten Pelalawan mempunyai sungai-sungai dengan panjang mencapai 1.821 km dan luas 34.924 ha.

Di Pelalawan terdapat 14.982,13 ton produksi perikanan budidaya yang terdiri dari perikanan laut & budidaya (3.597,67 ton), perairan umum (2.764,55 ton), tambak (0,28 ton), kolam (6.695,93 ton), keramba (399,33 ton), dan keramba jaring apung (1.524,37 ton). Sedangkan perikanan laut & budidaya hanya diusahakan di Kecamatan Kuala Kampar, dengan produksi tahun 2017 mencapai 3.598,45 ton.

Tabel 2.14. Nilai Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum, Tambak, Kolam dan Keramba Menurut Jenis Ikan

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
a.	Perikanan Laut	
1	Lomek	1.464,71
2	Udang	98,77
3	Biang	1.437,63
4	Lainnya	604,99
b.	Ikan Perairan Umum	
1	Selais	275,42
2	Gurami	102,52
3	Sepat Rawa	262,88
4	Lele	150,15
5	Selincih	198,64
6	Gabus	240,98
7	Belut	26,67
8	Patin	197,64
9	Toman	248,53
10	Baung	214,45
11	Tambakan	277,24
12	Juaro	155,23
13	Tuakang	357,11
14	Betutu	65,31
15	Udang galah	93,65
c.	Kolam	
1	Nila	1.775,72
2	Patin	3.785,03
3	Lele	1.386,97
4	Baung	-
5	Gurami	5,75
6	Gabus	0,40
7	Bawal	-
d.	Keramba	
1	Patin	69,02
2	Baung	280,00
3	Lainnya	40,30
e.	Keramba Jaring Apung	
1	Patin	706,84
2	Baung	812,83



No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
3	Gurami	1,00
4	Gabus	2,10
5	Lele	-
	Jumlah	15.338,46

Sumber : Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2019

2.5.5 Kehutanan

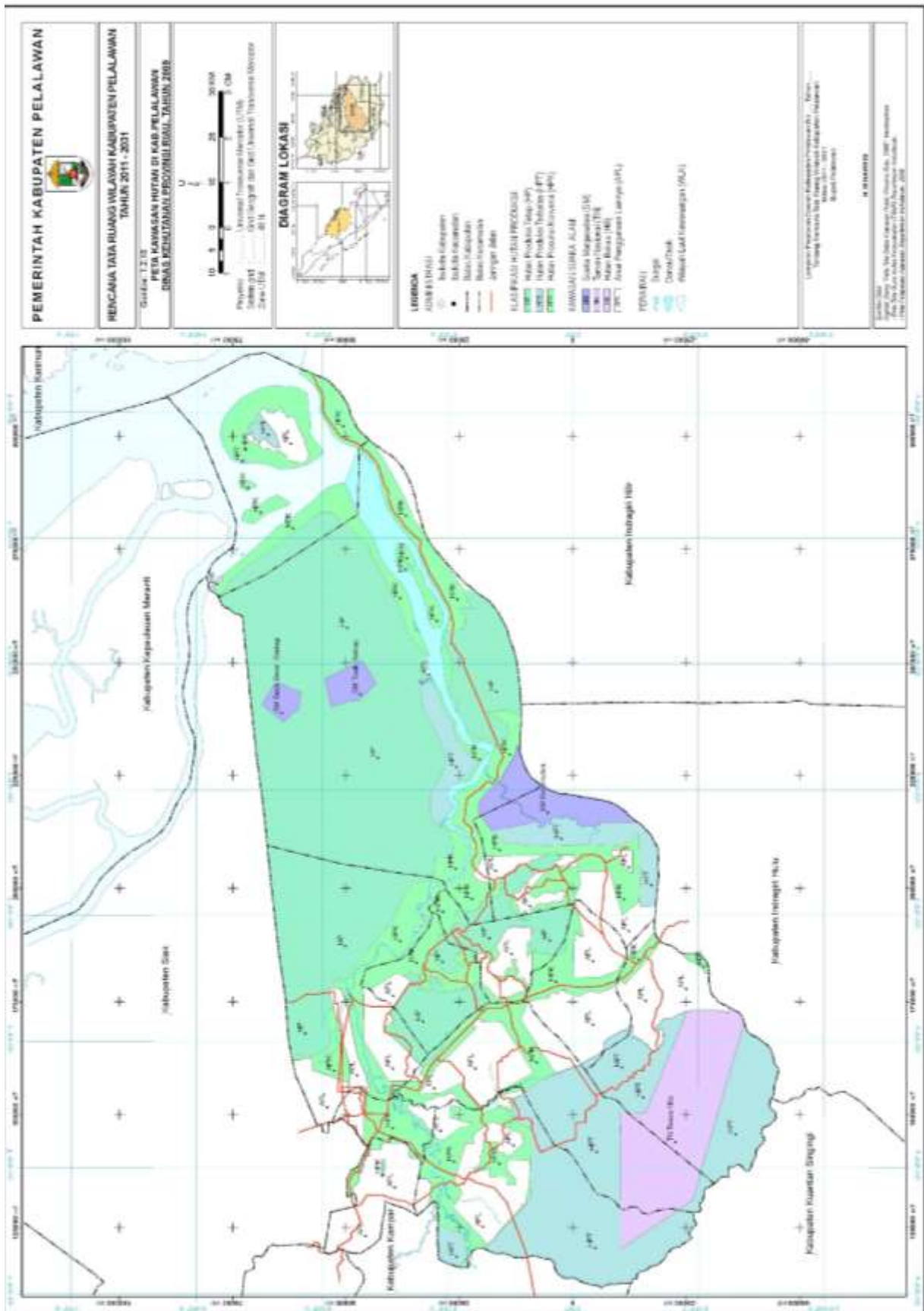
Hutan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari hutan produksi, hutan bakau, taman nasional Tesso Nilo, dan suaka margasatwa. Selama periode 2010 – 2017, luas hutan telah mengalami penyusutan seluas 13.770, yaitu dari 764.014 hektar pada Tahun 2010 menjadi 750.244 pada Tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan penyusutan luas hutan menurun sebesar -0,36%/tahun. Hutan yang terbesar penyusutannya adalah taman nasional Tesso Nilo, yang rata-rata pertumbuhan penyusutan luasnya menurun sebesar 2,40%/tahun diikuti hutan produksi yang menurun sebesar 0,19%/tahun. Sebaliknya hutan suaka marga satwa meningkat luasannya sebesar 1,35%/tahun.

Tabel 2.15. Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Bakau (Ha)	Tesso Nilo (Ha)	Suaka Marga Satwa (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Langgam	75.983	-	5.810	-	81.793
2	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-	-
3	Bandar Sei Kijang	-	-	-	-	-
4	Pangkalan Kuras	38.649	-	25.841	-	64.490
5	Ukui	55.097	-	45.739	-	100.836
6	Pangkalan Lesung	1.012	-	-	-	1.012
7	Bunut	22.290	-	-	-	22.290
8	Pelalawan	85.155	-	-	-	85.155
9	Bandar Petalangan	16.096	-	-	-	16.096
10	Kuala Kampar	12.133	461	-	-	12.594
11	Kerumutan	28.677	-	-	18.053	46.730
12	Teluk Meranti	300.159	-	-	19.089	319.248
	2016	635.251	461	77.390	37.142	750.244
	2015	635.251	461	77.390	37.142	750.244
	2014	635.251	461	77.390	37.142	750.245
	2013	635.251	461	77.390	37.142	750.244
	2012	635.251	461	77.390	37.142	750.245

Sumber: KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Hutan produksi meliputi hampir semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan kecuali kecamatan Pangkalan Kerinci dan bandar Sei Kijang. Hutan bakau hanya terdapat di Kecamatan Kuala kampar. Taman nasional Tesso Nilo terluas berada di Kecamatan Ukui diikuti Kecamatan Pangkalan Kuras dan Langgam. Hutan Suaka Marga satwa terdapat di Kecamatan Kerumutan dan Teluk Meranti.



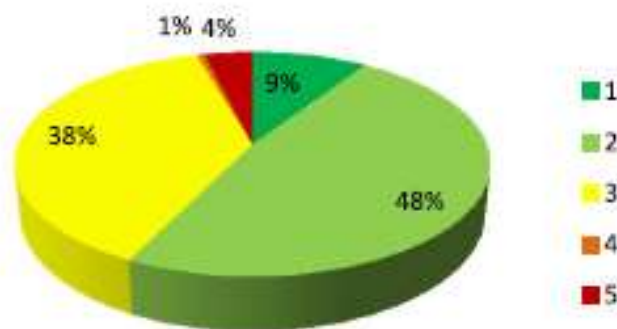
Gambar 2.8. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2009



2.6 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan menggambarkan sejauh mana system tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

Perhitungan untuk menentukan kelas kerentanan berdasarkan perhitungan nilai IKS (Indek Keterpaparan dan Sensitifitas), dan IKA (Indek Kapasitas Adaptif), Nilai IKS dan IKA merupakan jumlah terboboti dari semua indikator yang sudah dinormalisasi. Penentuan Kelas Kerentanan: Kelas kerentanan sebagai fungsi dari IKA dan IKS yang sudah dikonversi ke interval. Berdasarkan data persebaran jumlah desa yang rentan di Provinsi riau Provinsi Riau erletak di posisi geografis (2°LU - 3°LU dan 100° - 109°BT). Luas wilayah seluas 94.561 km^2 . dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2010 sebanyak 4.409.458 jiwa. Beberapa hasil sumberdaya alam diantaranya pertambangan Minyak Bumi, Emas, Perak, Bauksit. Komoditi perkebunan diantaranya Kelapa sawit, Karet. Data Kerentanan Nasional Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK maka pada Provinsi Riau termasuk kategori daerah yang tidak rentan. Gambar berikut merupakan persentase kerentanan provinsi Riau.



Gambar 2.9. Kerentanan Provinsi Riau
Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan

Dari total 118 desa di Kabupaten Pelalawan terdapat 2 desa yang sangat rentan, 1 desa rentan, 59 desa dengan kondisi cukup rentan, 46 desa kurang rentan, dan 10 desa yang tidak rentan.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan iklim meliputi: 30,6% tergolong Sangat Tinggi, 25,4% tergolong Rendah, dan 22,14% tergolong Tinggi. Data ini menunjukkan bahwa potensi lahan dalam pengaturan iklim di Kabupaten Pelalawan bervariasi, sebaran pada masing-masing kecamatan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Sangat Tinggi dalam

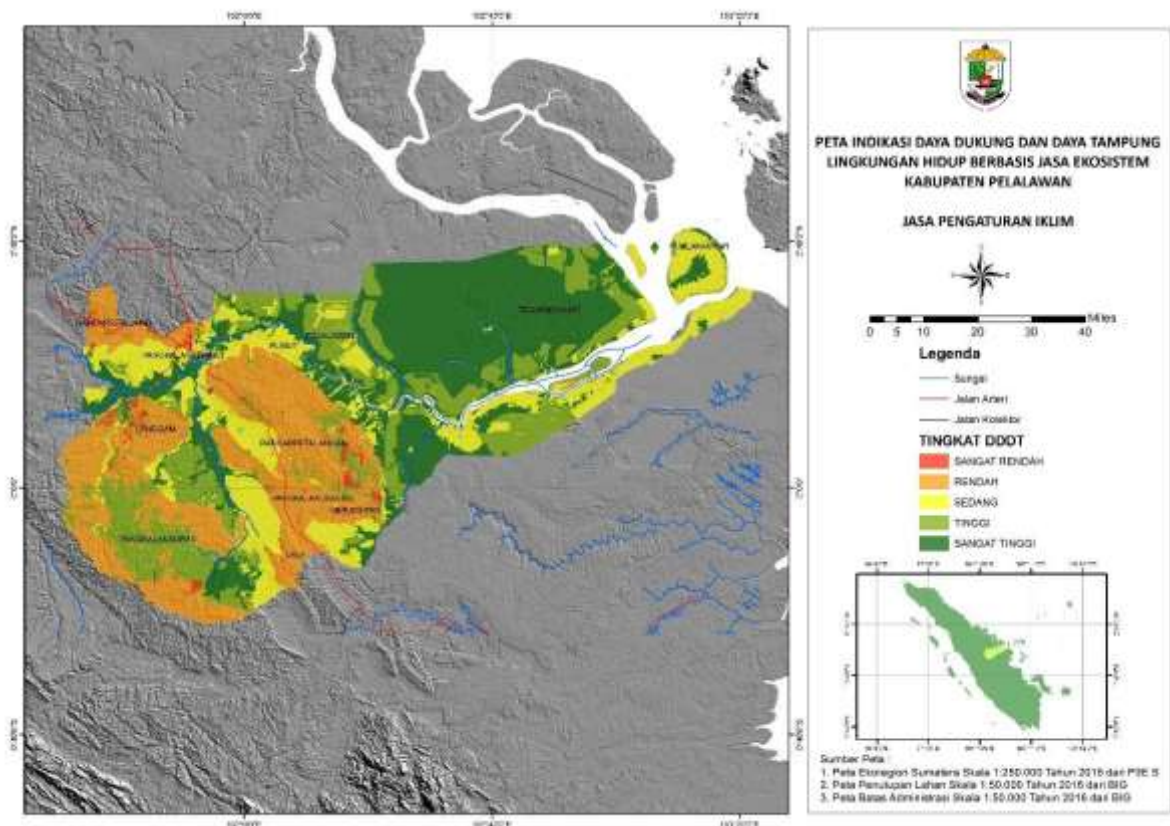


pengaturan iklim (62,6%), sementara itu sebagian besar (79,7%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sedang. Hal ini karena Kecamatan Teluk Meranti memiliki tutupan lahan berupa hutan yang luas. Selengkapnya disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.16. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	317,8	1,2	22.164,9	86,2	1.428,6	5,6	1.807,0	7,0	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	1.614,4	3,4	19.597,1	40,9	18.165,1	37,9	2.115,6	4,4	6.455,0	13,5	47.947,3
3	Bunut	229,2	0,5	32.953,5	74,9	7.251,0	16,5	660,8	1,5	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	4.856,0	5,1	29.172,6	30,6	19.630,3	20,6	19.207,1	20,2	22.349,8	23,5	95.215,8
5	Kuala Kampar	187,7	0,4	36,5	0,1	39.429,7	79,7	2.022,8	4,1	7.785,7	15,7	49.462,3
6	Langgam	5.036,8	4,0	69.153,5	54,8	14.716,0	11,7	22.678,1	18,0	14.541,1	11,5	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.169,2	6,0	5.991,6	30,7	8.321,9	42,7	784,2	4,0	3.241,7	16,6	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	2.518,8	1,2	71.766,9	35,1	41.007,8	20,0	73.459,8	35,9	15.975,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	941,4	2,9	24.295,4	74,7	6.062,2	18,6	1.239,2	3,8	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	328,7	0,3	5.660,0	5,3	29.343,4	27,4	39.618,7	36,9	32.308,4	30,1	107.259,1
11	Teluk Meranti	443,9	0,1	4.095,6	1,0	49.845,4	12,0	100.972,4	24,3	260.527,2	62,6	415.884,4
12	Ukui	892,7	1,3	29.243,4	43,2	16.390,6	24,2	8.524,4	12,6	12.709,7	18,8	67.760,8
Grand Total		18.536,5	1,5	314.131,0	25,4	251.591,9	20,4	273.090,2	22,1	378.807,6	30,6	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Gambar 2.10. Presentase Luas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan

2.7 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya



genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *mega-diversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik. Berdasarkan proporsi persentase jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan. Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan.

Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan sumber daya genetik meliputi : 36,4% tergolong Sedang, 35,2% tergolong Rendah, dan hanya 11,0% yang tergolong Tinggi dan 11,0% tergolong Sangat Tinggi. Sebagian besar (68%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah dalam penyediaan sumber daya genetik karena sebagian besar hutan di wilayah telah berubah penggunaannya untuk perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan, Bunut, dan Pangkalan Lesung sehingga >74% wilayahnya masing-masing termasuk dalam kelas Rendah.

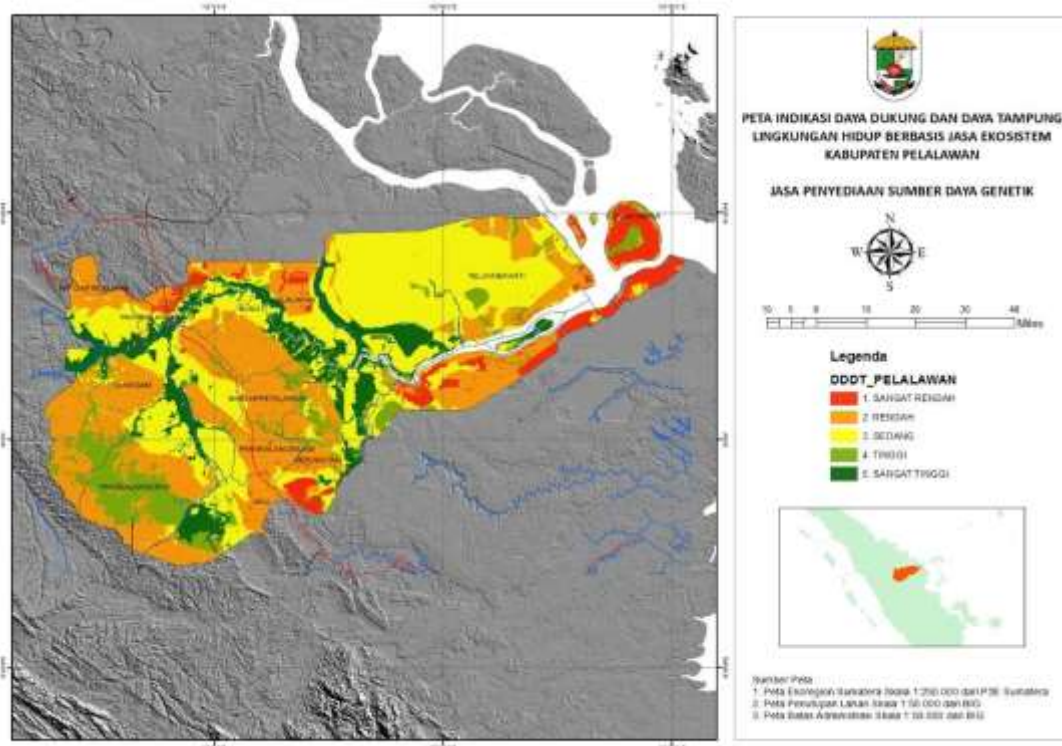
Tabel 2.17. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	121,0	0,5	22.243,1	86,5	1.251,4	4,9	2.102,7	8,2	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	51,0	0,1	19.474,1	40,6	21.345,0	44,5	111,1	0,2	6.966,0	14,5	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	32.963,5	74,9	7.450,2	16,9	531,7	1,2	2.945,9	6,7	44.007,6
4	Kerumutan	9.341,9	9,8	30.303,6	31,8	26.996,0	28,4	13.432,8	14,1	15.141,5	15,9	95.215,8
5	Kuala Kampar	33.414,1	67,6	6.729,0	13,6	3.217,2	6,5	6.102,1	12,3	-	-	49.462,3
6	Langgam	134,5	0,1	71.201,4	56,5	16.419,5	13,0	22.944,1	18,2	15.426,1	12,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.599,7	13,3	6.267,1	32,1	6.836,3	35,0	310,1	1,6	3.495,4	17,9	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	569,5	0,3	72.254,1	35,3	65.168,6	31,8	50.563,6	24,7	16.173,4	7,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	452,7	1,4	24.367,3	74,9	6.085,9	18,7	1.632,3	5,0	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	8.246,9	7,7	31.797,0	29,6	37.582,2	35,0	2.947,2	2,7	26.685,9	24,9	107.259,1
11	Teluk Meranti	23.697,1	5,7	88.065,8	21,2	239.365,1	57,6	28.532,6	6,9	36.223,8	8,7	415.884,4
12	Ukui	639,5	0,9	29.452,8	43,5	17.839,9	26,3	7.099,5	10,5	12.729,2	18,8	67.760,8
Grand Total		79.384,2	6,4	435.118,7	35,2	449.557,5	36,4	136.309,7	11,0	135.787,2	11,0	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Proporsi persentase jasa penyedia sumberdaya genetik kabupaten pelalawan pada jasa ekosistem dari kelas sangat rendah hingga sangat tinggi yaitu 4%, 14%, 16%, 28% dan 2%. Secara umum jasa penyediaan sumberdaya genetik Kabupaten Pelalawan tergolong dalam kategori tinggi yaitu 28% dari luas wilayah kabupaten Pelalawan. Ketersediaan jasa penyediaan sumberdaya genetik tergantung pada luas wilayah berhutan, semakin banyak tutupan lahan berupa hutan akan semakin tinggi nilai ketersediaan sumber daya genetik. Selengkapnya disajikan pada Gambar 2.11 dibawah.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
Gambar 2.11. Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan

BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1. KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

3.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

3.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih **13.427,9456 km²** atau **1.342.794,56 Ha**. Secara Administrasi Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan, 118 desa/kelurahan, 654 RW dan 1.840 RT. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan menurut kecamatan, jumlah desa dan kelurahan ditunjukkan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan

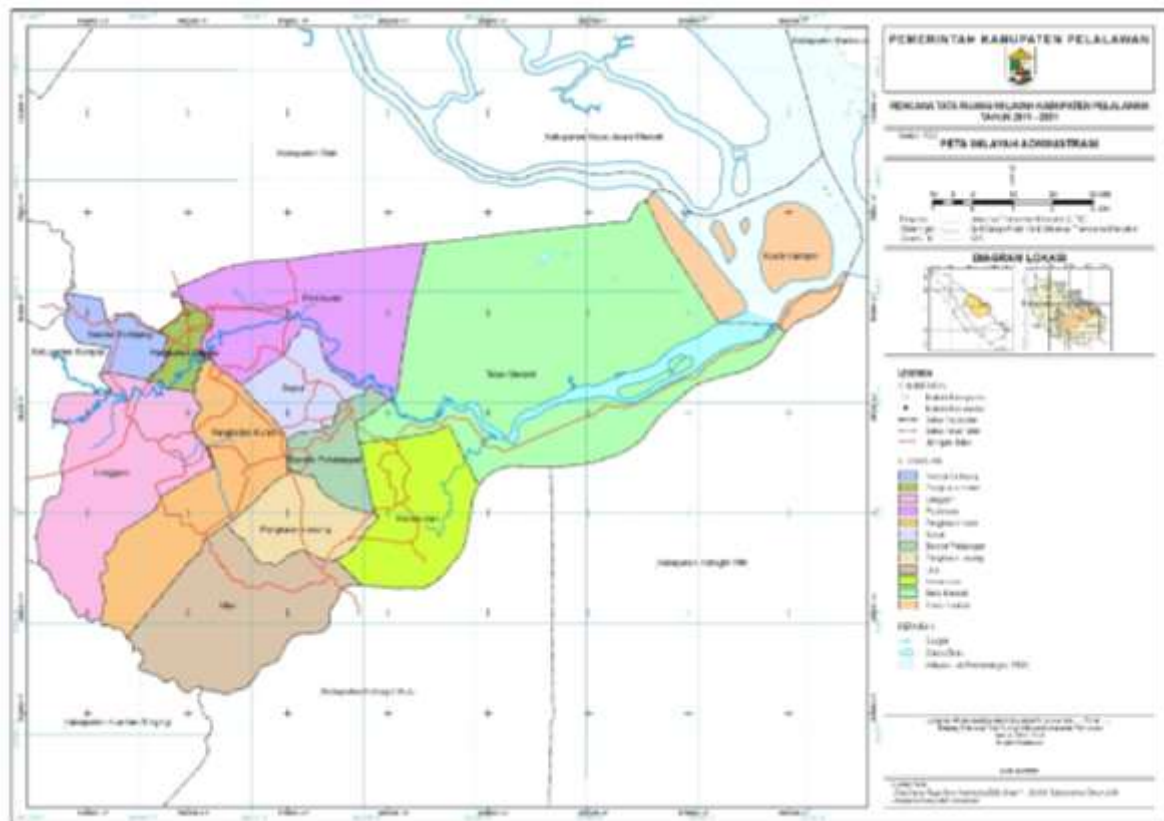
No	Kecamatan	Luas	Status		Jumlah
		Hektar	Kelurahan	Desa	
1	Langgam	153.526,36	1	7	8
2	Pangkalan Kerinci	22.345,08	3	4	7
3	Bandar Sei. Kijang	40.823,56	1	4	5
4	Pangkalan Kuras	119.358,50	1	16	17
5	Ukui	129.317,60	1	11	12
6	Pangkalan Lesung	50.928,95	1	9	10
7	Bunut	42.300,11	1	9	10
8	Pelalawan	136.877,41	1	8	9
9	Bandar Petalangan	37.230,51	1	10	11
10	Kuala Kampar	75.721,10	1	9	10
11	Kerumutan	1 00.278,84	1	9	10
12	Teluk Meranti	4 32.164,54	1	8	9
Jumlah		1.340.872,56	14	104	118

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pelalawan (2019-2039)

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur.

Wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenaku) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu) dan Kota Pekanbaru (Kecamatan Tenayan Raya).
- Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.1. Peta Wilayah Adminditrasi Kabupaten Pelalawan

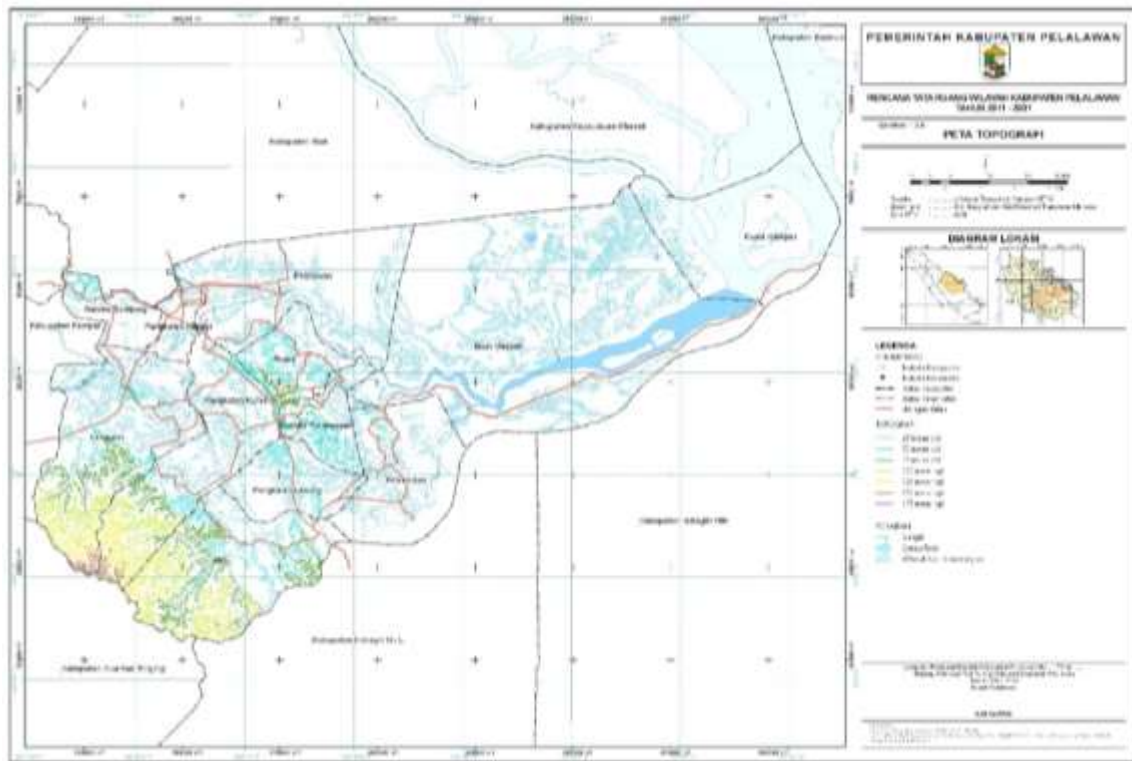
Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan 2016-2021

3.1.1.2. Topografi dan Morfologi

Rona fisik dasar wilayah Kabupaten Pelalawan sangat diwarnai oleh keberadaan Sungai Kampar yang mengalir dari arah barat ke timur yang melintasi bagian tengah wilayah ini. Ketinggian yang diidentifikasi dengan garis kontur selang 25 meter, dari yang terendah 25 m dpl (di atas permukaan laut) hingga yang tertinggi 175 m dpl. Peta Topografi Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada Gambar 3.2.

Identifikasi kelompok ketinggian menurut selang ketinggian yang penting dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Ketinggian lebih kecil dari 25 m: Ketinggian lebih kecil dari 25 m merupakan yang paling dominan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu terdapat di sepanjang tepian Sungai Kampar dan anak-anak sungainya, sehingga terdapat di semua kecamatan.
- Ketinggian 25 m – 100 m: Ketinggian antara 25 m – 100 m terletak di bagian tengah (Pangkalan Bunut, Bandar Petalangan), bagian barat laut wilayah (Bandar Seikijang, serta sedikit di Pelalawan dan Pangkalan Kerinci), dan di bagian selatan – barat daya (Ukui, Pangkalan Kuras dan Langgam).
- Ketinggian 100 m – 200 m: Ketinggian antara 100 m – 200 m terletak di bagian barat daya wilayah Kabupaten Pelalawan menyambung ketinggian 25 m – 100 meter di atas, yang mengarah ke perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan hulu dari anak-anak sungai seperti Sungai (Batang) Tesso dan Sungai (Batang) Nilo yang bermuara ke Sungai Kampar, yaitu di kecamatan: Pangkalan Kuras, Langgam, dan Ukui



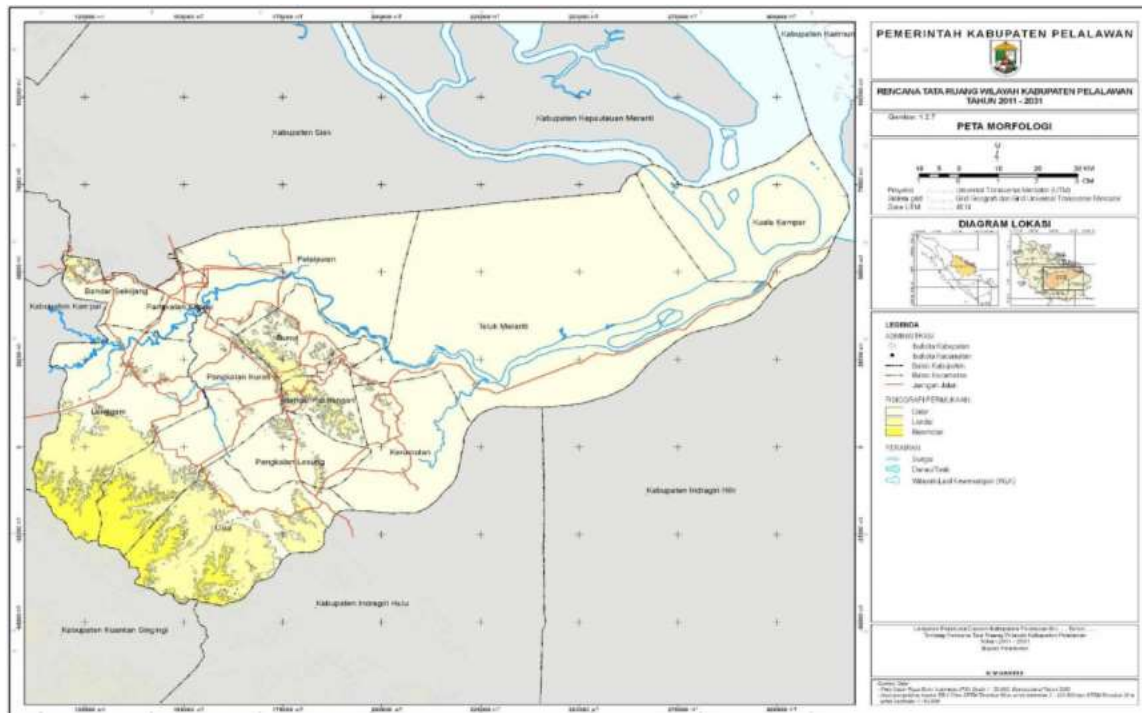
Gambar 3.2. Peta Topografi Kabupaten Pelalawan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan 2016-2020

Selain sungai utama yaitu Sungai Kampar, terdapat juga anak-anak sungai, antara lain: Sungai Kampar Kiri, Sungai Segati, Sungai Nilo, Sungai Kerumutan (yang mengalir dari arah selatan Sungai Kampar), serta Sungai Pelalawan, Sungai Selampaya, dan Sungai Serkap (yang mengalir dari arah utara Sungai Kampar).

Klasifikasi kelerengn wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri atas:

- Kelerengn 0% – 2%, bagian wilayah dengan kelerengn 0 – 2 % dominan terletak pada ketinggian antara 0 – 50 meter dpl, yang terdapat di semua wilayah kecamatan;
- Kelerengn 2% – 5%, bagian wilayah dengan kelerengn 2 – 5 % dominan terletak pada ketinggian antara 50 – 100 meter dpl, yang terdapat di kecamatan: Bunut, Bandar Petalangan, Pangkalan Lesung, Ukui, Pangkalan Kuras, Langgam, dan Bandar Seikijang;
- Kelerengn 5% – 15%, di atas 100 meter dpl, yang terdapat di kecamatan: Ukui, Pangkalan Kuras dan Langgam.



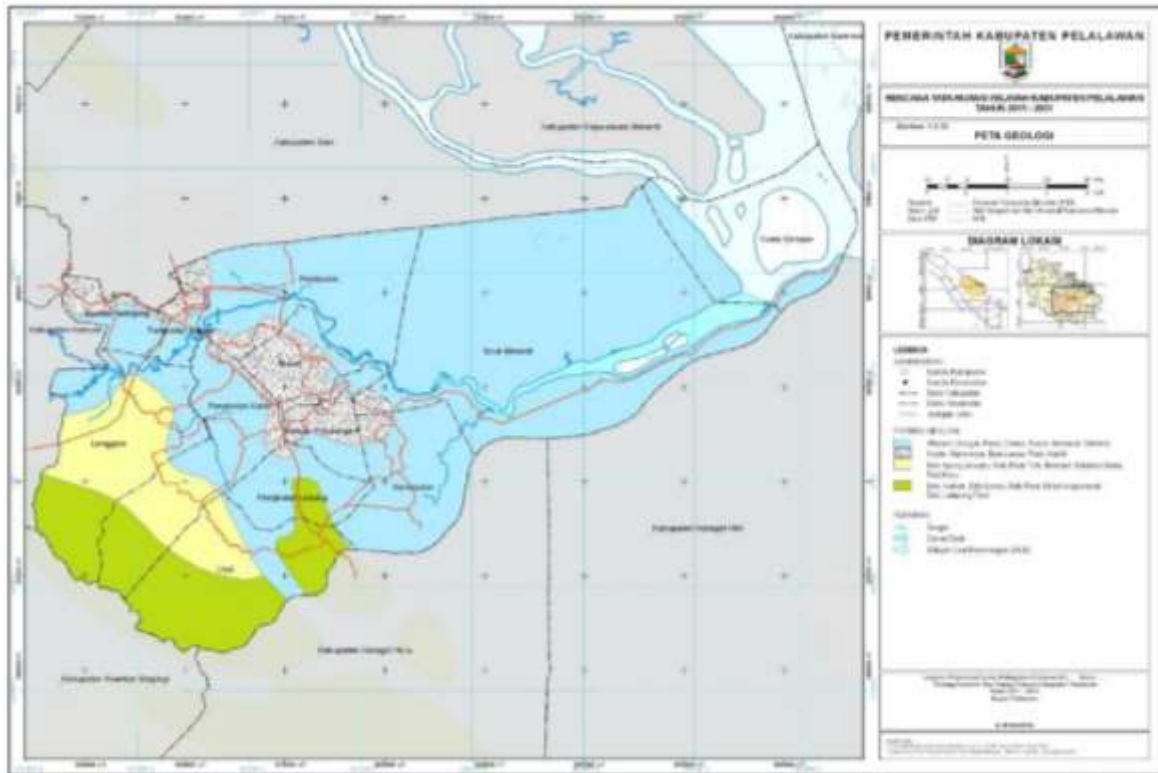
Gambar 3.3. Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

3.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pelalawan dengan formasi geologi yang terdiri atas:

- Alluvium (sungai, rawa, danau, aluvial, termasuk gambut); tersebar dominan di wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu terdapat di semua kecamatan.
- Kaolin, batu lumpur, batu lanau, pasir, kerikil; terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu di kecamatan: Bunut, Bandar Petalangan, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Pangkalan Kerinci, dan Bandar Seikijang.
- Batu apung abu-abu, batu pasir tufa, bentonit, batubara muda, fosil kayu; terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu di kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Uku.
- Batu karbon, batu lanau, batu pasir, batu konglomerat, batu lempung pasir; terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu di kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Uku.

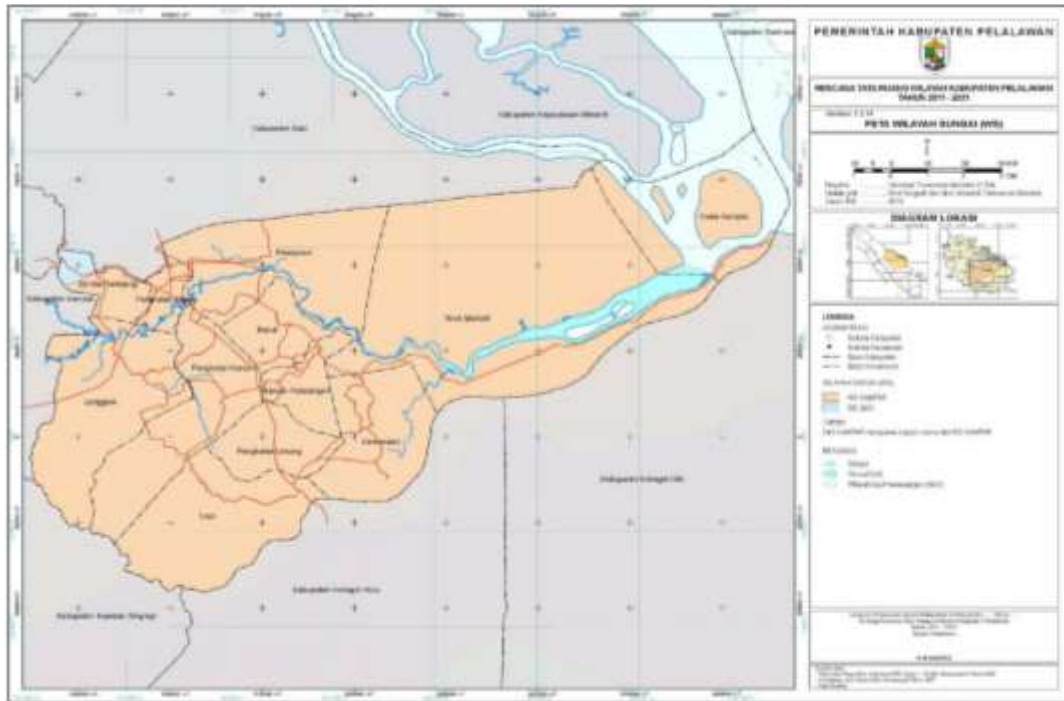


Gambar 3.4. Peta Geologi Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pelalawan, Tahun 2011-2031

3.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Wilayah Sungai Kampar dengan sungai utamanya adalah Sungai Kampar, di wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan bagian hilir. Anak-anak sungainya yang terkena dan/atau berada di wilayah Kabupaten Pelalawan antara lain Sungai Kampar Kiri, Sungai Segati, Sungai Nilo, Sungai Kerumutan (yang mengalir dari arah selatan Sungai Kampar), serta Sungai Pelalawan, Sungai Selampaya, dan Sungai Serkap (yang mengalir dari arah utara Sungai Kampar). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006 menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Pelalawan sebagian besar atau dominan terkena dengan Wilayah Sungai (WS) Kampar yang merupakan WS Lintas Provinsi, yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagian kecil wilayah Kecamatan Bandar Sei. Kijang berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru terkena dengan WS Siak. Kondisi Hidrologi Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada Gambar 3.5.



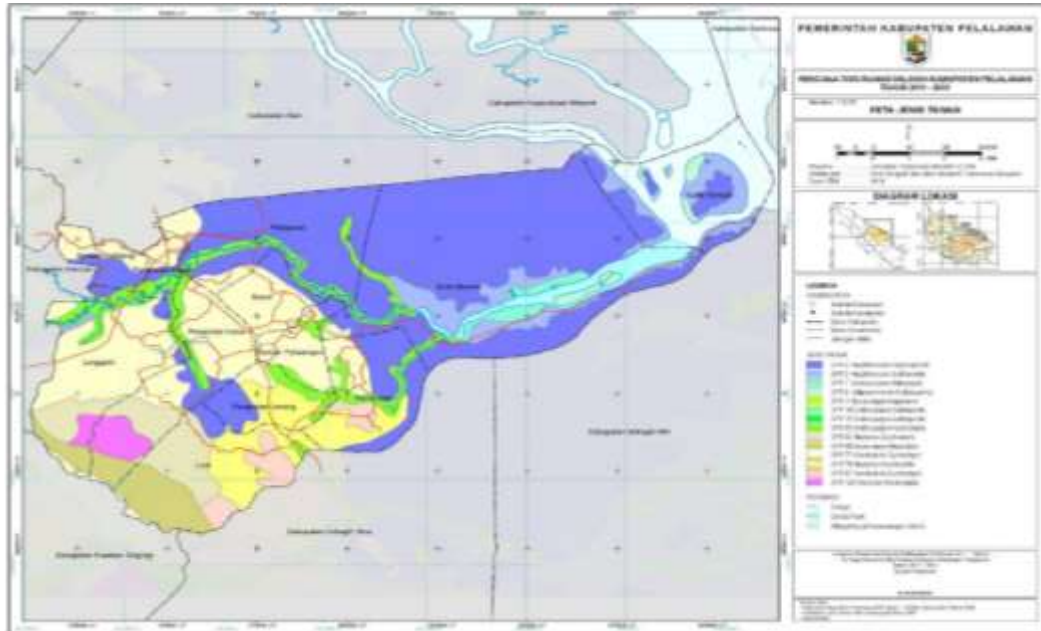
Gambar 3.5. Peta Wilayah Sungai Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2038

3.1.1.5. Jenis Tanah

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada Gambar 3.6. Jenis tanah menurut *Soil Survey Staff* 1998, di wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Histosol adalah tanah yang kaya bahan organik, terdiri atas bahan saprik (matang), hemik (tengahan), atau fibrik (mentah), tergantung tingkat dekomposisinya. Tanah ini umumnya terdapat di daerah rawa dan lebih dikenal sebagai tanah gambut. Gambut yang tipis biasanya berupa gambut topogen dan bersifat subur (eutropik). Tanah gambut yang terlalu tebal biasanya berbentuk kubah (dome), bersifat masam, dan sangat miskin hara (terutama hara mikro).



Gambar 3.6. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2038

2. Entisol adalah tanah yang tidak mempunyai horison kambik, argilik, kandik, atau matrik di dalam kedalaman 100 cm dari permukaan tanah mineral. *Entisols* tergolong tanah yang masih sangat muda, terdapat di dataran aluvial, pantai, lereng vulkan aktif (misalnya gunung berapi), dan lereng curam yang mengalami erosi berat. Bahan tanah yang relatif tua dan bersifat resisten terhadap pelapukan juga tergolong dalam *Entisols*, di antaranya pasir kuarsa dan mineral lain yang resisten. Sifat tanah ini sangat bervariasi, demikian juga dengan kesuburan, kesesuaian dan potensinya tergantung dari bahan induk, topografi, lingkungan, dan tingkat erosinya.
3. Inceptisol adalah tanah yang mempunyai horison kambik, yang batas atasnya di dalam 100 cm dan batas bawahnya pada kedalaman 25 cm atau lebih dari permukaan tanah mineral, atau tidak terdapat bahan sulfidik di dalam 50 cm dari permukaan tanah mineral. Tanah ini tergolong masih muda, sifat tanahnya bervariasi tergantung bahan induknya, di antaranya: tekstur lebih halus dari pasir halus berlempung, sangat masam sampai netral, tergantung sifat bahan asal dan keadaan lingkungannya. Banyak data menunjukkan penampang tanahnya dangkal dan berbatu terutama di pegunungan atau perbukitan berlereng curam. Terdapat juga Inceptisol yang berbahaya untuk tanaman karena mengandung pirit atau aluminium yang tinggi.
4. Ultisol adalah tanah yang mempunyai horison argilik atau kandik, dan memiliki kejenuhan basa kurang dari 35 % pada kedalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas horison argilik atau kandik. Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat pada bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminium-silika dengan iklim basah. Sifat utamanya mencerminkan kondisi telah mengalami pencucian intensif, di antaranya: miskin unsur hara N, P, dan K, sangat masam sampai masam, miskin bahan organik, lapisan bawah kaya aluminium (Al), dan peka terhadap erosi. Biasanya digunakan untuk tanaman keras.
5. Oxisol adalah tanah yang mempunyai horison oksik dengan batas atas di dalam 150 cm dari permukaan tanah mineral, dan tidak terdapat horison kandik yang memiliki batas atas di dalam kedalaman tersebut, atau mengandung liat sebesar 40 % atau lebih

(berdasarkan berat) dalam fraksi tanah halus dan horison kandik yang memiliki sifat-sifat mineral dapat lapuk seperti horison oksik, dan batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. *Oxisols* adalah tanah telah lapuk sangat lanjut, penampang tanahnya dalam, bertekstur liat, porositasnya tergolong tinggi, daya menahan air kecil, dan didominasi mineral liat kaolinit, oksida besi, dan aluminium. Tanah ini relatif resisten terhadap erosi, tergolong sangat miskin unsur hara dan cadangan mineral, kapasitas tukar kation rendah, dan retensi fosfat tinggi. Pada tingkat sub-ordo, diperoleh grup yang terdapat di Kabupaten Pelalawan, hanya satu grup, yaitu *Hapludox* adalah tanah yang mempunyai horison oksik dengan batas atas di dalam 150 cm dari permukaan tanah mineral dan tidak terdapat horison kandik, yang memiliki batas atas di dalam kedalaman tersebut. Rezim kelembaban tanahnya tergolong udik.

Jenis tanah menurut klasifikasi tanah pada sub-ordo yang dikemukakan di atas, menurut masing-masing Satuan Peta Tanah (SPT). Pada Tabel dibawah ini dikemukakan untuk masing-masing SPT mengenai klasifikasi tanah, bahan induk, sub-landform, dan relief. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Jenis Tanah Menurut Peta Tanah Eksplorasi di Wilayah Kabupaten Pelalawan

No.	SPT	Klasifikasi Tanah (SSS 1998)	Bahan Induk	Sub-landform	Relief
1.	2	Haplohemists Haplosaprists	Organik	Kubah gambut	Datar
2.	3	Haplohemists Sulfihemists	Organik	Kubah gambut	Datar
3.	7	Endoaquepts Halaquepts	Aluvium	Dataran pasang surut	Datar
4.	8	Udipsamments Endoaquents	Aluvium	Pesisir pantai	Datar
5.	11	Dystrudepts Hapludults	Aluvium	Teras marin	Berombak-bergelombang
6.	14	Endoaquepts Sulfaquents	Aluvium	Delta atau dataran estuarian	Datar
7.	15	Endoaquepts Sulfaquents	Aluvium	Rawa belakang	Datar
8.	20	Endoaquepts Dystrudepts	Aluvium	Jaur aliran sungai	Datar
9.	62	Hapludox Dystrudepts	Volkanik	Dataran tektonik	Datar-berombak
10.	64	Dystrudepts Hapludults	Sedimen	Dataran tektonik	Berombak-bergelombang
11.	72	Kandiudults Dystrudepts	Sedimen	Dataran tektonik	Berombak-bergelombang
12.	74	Hapludox Kandiudults	Sedimen	Dataran tektonik	Berombak-bergelombang
13.	97	Kandiudults Dystrudepts	Volkanik	Perbukitan tektonik	Berbukit
14.	126	Hapludox Dystrudepts	Volkanik	Dataran volkan	Datar-berombak

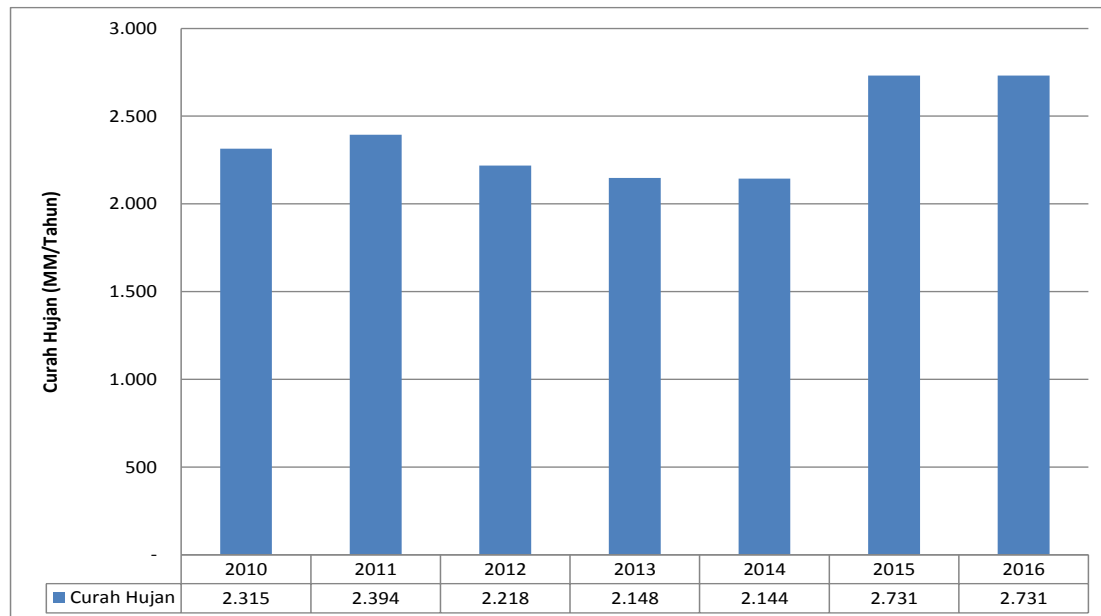
Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2018-2038

3.1.1.5. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Pelalawan relatif sama dengan Provinsi Riau umumnya yaitu mempunyai tipe iklim Af (Klasifikasi iklim Koppen). Menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Kabupaten Pelalawan berkisar antara A-B-C. Daerah Pelalawan beriklim tropis basah dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-

ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

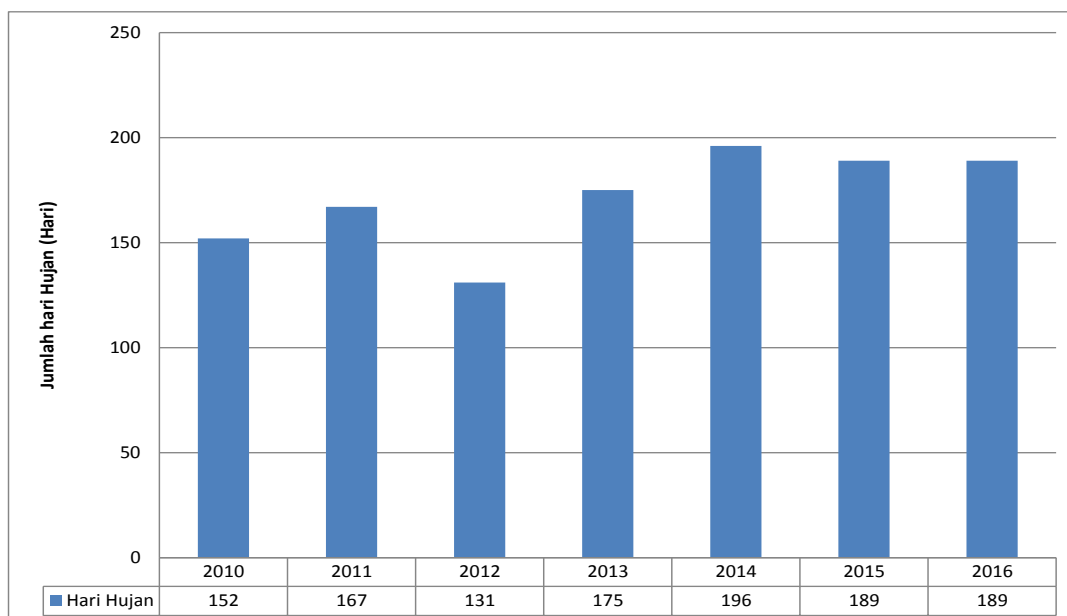
Bila dianalisis menurut bulan menunjukkan bahwa curah hujan yang dibawah normal pada tahun 2016 adalah bulan Januari dan Februari; Juni hingga September. Pada bulan Januari dan Februari curah hujan berkisar antara 82,90 mm/bulan – 129 mm/bulan. Pada bulan Juni – September, curah hujan berkisar antara 94,00 mm/bulan – 145,7 mm/bulan. Curah hujan dibawah normal ini juga menandakan periode musim kemarau.



Sumber: BPS Pelalawan (*Kabupaten pelalawan Dalam Angka, 2011 – 2018*)

Gambar 3.7. Curah Hujan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 - 2016

Selama periode 2010 – 2016, rata-rata hari hujan di Kabupaten Pelalawan berkisar antara 131 - 196 hari hujan per tahunnya. Rata-rata hari hujan di Kabupaten Pelalawan relatif lebih tinggi dibanding Indragiri Hilir yang berkisar antara 93 – 149 hari hujan per tahunnya. Namun bila dibanding dengan hari hujan Provinsi Riau relatif lebih rendah. Pada periode 2011 – 2015, rata-rata hari hujan di Provinsi Riau berkisar antara 137 – 217 hari hujan per tahunnya. Bila hari hujan dianalisis menurut bulan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hari hujan yang dibawah rata-rata (15 hari hujan per bulan) terjadi pada bulan Januari yang ditandai dengan musim kemarau. Jumlah hari hujan yang dibawah rata-rata juga terjadi selama periode juni – September yang juga ditandai dengan musim kemarau.



Gambar 3.8. Hari Hujan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS Pelalawan (Kabupaten pelalawan Dalam Angka, 2011 – 2018)

3.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan terus mengalami peningkatan yaitu dari 396.990 jiwa pada tahun 2015, meningkat menjadi 483.622 jiwa pada tahun 2019. Selama periode 2010 – 2019, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat sebesar 6,71% per tahun. Rata-rata pertumbuhan ini adalah yang terbesar bila dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota sekitarnya.

Jumlah penduduk dan Kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Langgam	29.797	30.511	31.971	33.440	34.927	8,09
Pangkalan Kerinci	111.385	115.764	124.974	134.672	144.915	11,35
Bandar Sei Kijang	31.908	33.599	37.233	41.184	45.490	12,62
Pangkalan Kuras	57.770	58.856	61.055	63.221	65.370	7,10
Ukui	38.764	39.263	40.258	41.204	42.110	5,95
Pangkalan Lesung	31.147	31.624	32.582	33.509	34.412	6,26
Bunut	15.071	15.355	15.929	16.496	17.058	6,93
Pelalawan	19.214	19.530	20.165	20.784	21.391	6,49
Bandar Petalangan	14.106	14.195	14.368	14.517	14.646	4,44
Kuala Kampar	18.019	18.055	18.126	18.198	18.271	0,40
Kerumutan	23.287	23.699	24.546	25.423	26.332	3,18
Teluk Meranti	16.786	17.047	17.581	18.132	18.700	2,68

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah	407.254	417.498	438.788	460.780	483.622	6,71

Sumber: RKPD Kab. Pelalawan Tahun 2021

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Pelalawan belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Kantong-kantong pemukiman masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan terdekat. Pemerataan penduduk perlu segera mendapatkan solusi pembangunan dan pengadaan akses baik jalan darat maupun sungai sudah mulai dilakukan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan cukup tinggi sebesar 6,71 persen, laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Bandar Sekijang yaitu sebesar 12,62% dan Pangkalan Kerinci 11,35%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terkecil berada pada Kecamatan Kuala Kampar, yakni 0,40%. Sebagai daerah penopang ibu kota provinsi, tumbuhnya sektor industri dan perkebunan, serta meningkatnya akses jalan yang semakin baik menjangkau desa-desa sehingga memudahkan sarana dan prasarana ekonomi berkembang di Pelalawan. Hal ini menjadi faktor penarik bagi berkembangnya penduduk Pelalawan.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Jenis kelamin dari tahun 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Total
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
1	2015	203.753 (51,52%)	193.237 (48,68%)	396.990
2	2016	214.268 (51,32%)	203.230 (48,68%)	417.498
3	2017	225.234 (51,33%)	213.554 (48,67%)	438.788
4	2018	236.404 (51,31%)	224.376 (48,69%)	460.780
5	2019	247.994 (51,28%)	235.628 (48,72%)	483.622

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pelalawan tidak mengalami perkembangan yang signifikan meskipun pertumbuhannya cenderung lebih cepat penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 51,28 % berbanding 48,72% menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan harus berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil serta keterwakilan perempuan dalam pemerintahan maupun parlemen.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan yang dibagi menurut kelompok umur tahun 2019, diketahui jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 66,45% dan

penduduk usia tidak produktif (0 – 14 tahun dan 65 ke atas) sebanyak 34,55%. Kondisi ini menggambarkan bahwa setiap 66 jiwa usia produktif di Kabupaten Pelalawan menanggung sebanyak 34 jiwa penduduk tidak produktif atau 2 berbanding 1. Banyaknya angka usia produktif dalam pembangunan harus meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan maupun lapangan pekerjaan.

Tabel 3.5. Indikator Kependudukan Kabupaten Pelalawan 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	396.990	427.498	438.788	460.780	483.622
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	30,00	30,00	32,00	36,00	37,00
Sex Ratio (L/P)	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Jumlah Rumah Tangga (ruta)	100.566	105.761	111.154	122.450	122.511
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4	4	4	4	4
% Penduduk menurut Kelompok Umur					
0 - 14 tahun	32,52	32,26	32,00	32,88	31,47
15 - 64 tahun	65,73	65,92	66,11	65,46	66,45
> 65 tahun	1,75	1,81	1,89	1,66	2,08

Sumber: RKPd Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

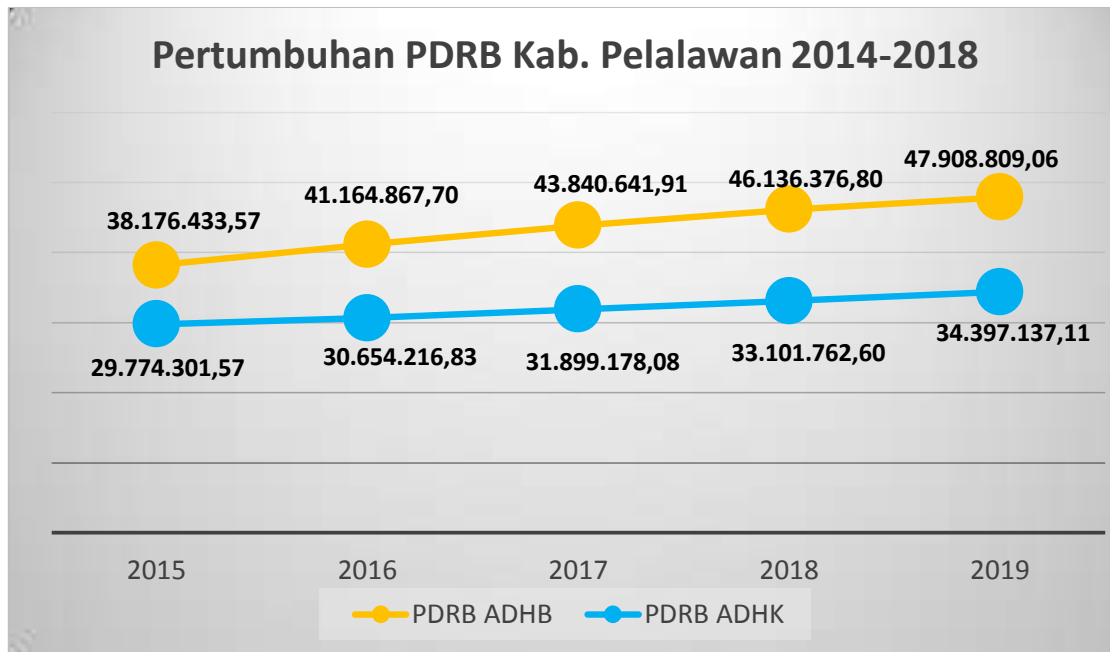
3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita harga konstan tahun 2010, dan kemiskinan.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga berlakumerupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB harga konstan dihitung dengan menggunakan harga tertentu menggunakan tahun dasar dimana saat ini menggunakan tahun dasar 2010. Selama periode 2015 – 2019, nilai PDRB Kabupaten Pelalawan atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha memiliki trend meningkat yaitu dari Rp 29.774,30 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 34.397,14 juta pada tahun 2019. Peningkatan nilai PDRB Pelalawan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pelalawan terus menggeliat maju.



Sumber: BPS Pelalawan (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019)

Gambar 3.9. Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

Selama periode 2015 – 2019, lapangan usaha industri pengolahan, nilai maupun kontribusinya memiliki trend terus meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp 15.422.798,99 juta dengan kontribusi sebesar 48,78% dari total PDRB, meningkat menjadi Rp18.032.323,43 juta dengan kontribusi sebesar 49,01%. Industri pengolahan ini umumnya merupakan umumnya disumbangkan oleh industri pengolahan produk-produk pertanian/perkebunan dan kehutanan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang nilai PDRB terbesar kedua setelah industri pengolah dengan trend nilai yang meningkat juga. Pada tahun 2015, nilai PDRB lapangan usaha pertanian sebesar Rp 11.073.786,37 juta dengan kontribusi sebesar 39% dari total PDRB, meningkat menjadi Rp 12.687.734,88 juta dengan kontribusi sebesar 38,8% dari total PDRB. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 87,81%. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pelalawan sudah mulai memasuki posisi sebagai Kabupaten “Industri Pertanian”. Nilai dan kontribusi industri pengolahan ini akan lebih besar lagi bila industri hilir khususnya industri hilir Kelapa sawit dan karet didorong perkembangannya di Kabupaten Pelalawan

Tabel 3.6. Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019, (Rp Juta)

Lapangan Usaha (PDRB)	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	11.073.786,37	11.355.693,69	11.850.030,58	12.288.033,60	12.687.734,88
Pertambangan dan Penggalan	650.800,18	648.595,18	632.652,85	622.643,87	594.551,71
Industri Pengolahan	15.422.798,99	15.922.829,63	16.567.469,10	17.235.395,05	18.032.323,43

Lapangan Usaha (PDRB)	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Listrik dan Gas	7.165,46	8.486,30	9.104,81	9.799,01	10.306,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.203,90	2.194,72	2.233,85	2.259,67	2.273,81
Konstruksi	655.093,03	681.434,75	724.486,23	745.804,64	780.244,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	774.466,24	810.577,66	851.187,57	895.559,79	935.717,65
Transportasi dan Pergudangan	66.412,84	68.509,22	70.114,63	71.810,49	73.125,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.847,43	49.571,75	51.192,94	52.977,87	54.638,49
Informasi dan Komunikasi	163.815,17	171.418,80	181.089,53	191.605,30	202.282,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	152.299,34	165.395,47	169.874,12	176.781,39	176.892,47
Real Estate	188.605,49	191.366,60	198.202,36	203.922,45	210.514,73
Jasa Perusahaan	371,80	380,02	389,51	403,41	416,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	356.521,36	359.934,38	362.561,98	364.617,94	381.267,58
Jasa Pendidikan	92.214,35	93.067,46	95.847,47	98.985,91	102.576,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.247,41	40.420,60	41.911,31	43.226,10	46.718,23
Jasa Lainnya	79.652,21	84.340,60	90.829,24	97.936,11	105.551,00
PDRB	29.774.301,57	30.654.216,83	31.899.178,08	33.101.762,60	34.397.137,11

Sumber: BPS Pelalawan (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015– 2020)

Tabel 3.7. Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (Juta)

Lapangan Usaha (PDRB)	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019

Lapangan Usaha (PDRB)	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	14.886.970,32	16.089.030,02	17.176.849,44	17.850.619,41	18.586.928,12
Pertambangan dan Penggalian	1.084.669,77	1.075.781,97	1.082.411,38	1.265.778,96	1.132.203,43
Industri Pengolahan	18.623.167,64	20.138.830,86	21.441.176,45	22.607.449,68	23.479.433,59
Pengadaan Listrik dan Gas	9.668,89	12.776,26	15.278,21	16.776,54	18.573,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.658,70	2.728,66	2.862,87	2.913,35	2.934,76
Konstruksi	862.939,83	944.146,25	1.043.478,58	1.121.895,91	1.203.584,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.173.877,40	1.263.680,78	1.348.240,50	1.448.240,22	1.554.714,57
Transportasi dan Pergudangan	88.830,71	95.292,61	100.903,64	107.017,94	111.448,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.596,73	79.028,54	84.207,94	88.656,23	92.295,38
Informasi dan Komunikasi	184.395,30	195.801,43	210.908,65	227.129,01	245.321,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	206.167,62	232.117,40	244.070,26	263.956,21	268.371,72
Real Estate	244.074,74	259.680,91	279.637,45	292.167,32	307.318,27
Jasa Perusahaan	484,96	517,79	544,04	577,80	615,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	435.114,07	453.292,52	462.772,37	470.283,10	499.508,87
Jasa Pendidikan	131.840,77	138.629,80	146.178,43	153.918,48	163.106,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.420,18	59.966,23	64.599,91	68.318,61	76.722,84
Jasa Lainnya	111.555,94	123.565,67	136.521,79	150.678,03	165.728,68
PDRB	38.176.433,57	41.164.867,70	43.840.641,91	46.136.376,80	47.908.809,06

Sumber: BPS Pelalawan (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019)

PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 47.908,81 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 34.397,14 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pelalawan seri 2010 pada tahun 2019 sebesar 3,91 persen. Jika dilihat dari nilai absolutnya, baik atas harga konstan maupun atas harga berlaku, pertumbuhan ekonomi sektor primer masih berada dibawah pertumbuhan sektor sekunder dan tersier. Hal ini mengakibatkan peran sektor primer dalam pembentukan PDRB mulai mengalami pergeseran ke sektor sekunder dan tersier.

Tabel 3.8. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 – 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pelalawan

Lapangan Usaha (PDRB)	2015		2016		2017		2018		2019	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	39	37,19	39,08	37,04	39,18	37,15	38,69	37,12	38,8	36,89
Pertambangan dan Penggalian	2,84	2,19	2,61	2,12	2,47	1,98	2,75	1,88	2,36	1,73
Industri Pengolahan	48,78	51,80	48,92	51,94	48,91	51,94	49	52,07	49,01	52,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	2,26	2,20	2,29	2,22	2,38	2,27	2,43	2,25	2,51	2,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,07	2,60	3,07	2,64	3,07	2,67	3,14	2,71	3,25	2,72
Transportasi dan Pergudangan	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,16	0,19	0,16	0,19	0,16	0,19	0,16	0,19	0,16
Informasi dan Komunikasi	0,48	0,55	0,49	0,56	0,48	0,57	0,49	0,58	0,51	0,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,54	0,51	0,56	0,54	0,56	0,53	0,57	0,53	0,56	0,51
Real Estate	0,64	0,63	0,63	0,62	0,64	0,62	0,63	0,62	0,64	0,61
Jasa Perusahaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	1,20	1,1	1,17	1,06	1,14	1,02	1,10	1,04	1,11
Jasa Pendidikan	0,35	0,31	0,34	0,30	0,33	0,30	0,33	0,30	0,34	0,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,14	0,15	0,13	0,15	0,13	0,15	0,13	0,16	0,14
Jasa Lainnya	0,29	0,27	0,3	0,28	0,31	0,28	0,33	0,30	0,35	0,31
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Pelalawan (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019)

Kontribusi sektor industry pengolahan dan sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi di kurun waktu lima tahun terakhir. Penigkatan penyerapan usia produktif pada bidang ini harus bisa dimaksimalkan serta kebijakan pembangunan daerah bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya dengan memanfaatkan kekuatan sektor industry dan pertanian ini. Selama periode 2014 – 2019, rata-rata pertumbuhan kontribusi

sektor mengalami pergerakan yang fluktuatif. Namun kontribusi sektor industry dan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sangat dominan maka kenaikan maupun penurunan laju pertumbuhan disektor ini sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

Tabel 3.9. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (%)

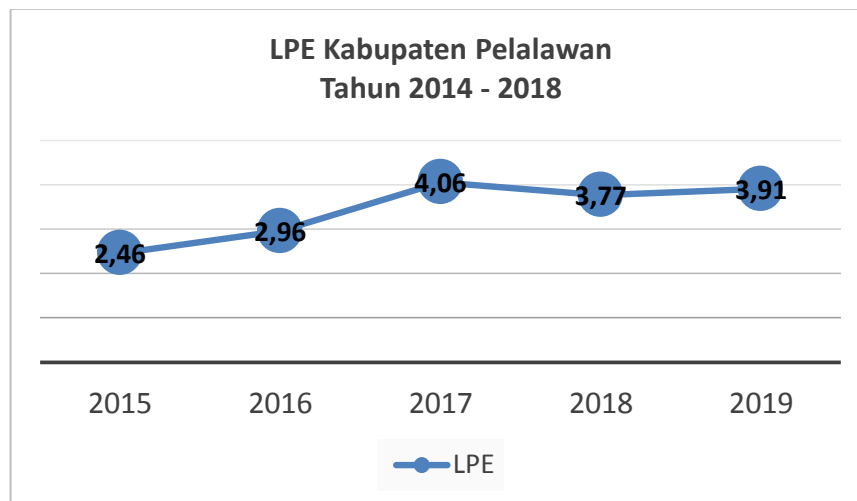
Lapangan Usaha (PDRB)	PERTUMBUHAN (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	0,04	2,55	4,35	3,7	3,25
Pertambangan dan Penggalian	0,92	-0,34	-2,46	-1,58	-4,51
Industri Pengolahan	3,91	3,24	4,05	4,03	4,62
Pengadaan Listrik dan Gas	10,04	18,43	7,29	7,62	5,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,25	-0,42	1,78	1,16	0,63
Konstruksi	9,11	4,02	6,32	2,94	4,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,94	4,66	5,01	5,21	4,48
Transportasi dan Pergudangan	6,58	3,16	2,34	2,42	1,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,45	3,6	3,27	3,49	3,13
Informasi dan Komunikasi	7,87	4,64	5,64	5,81	5,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	-8,93	8,6	2,71	4,07	0,06
Real Estate	8,03	1,46	3,57	2,89	3,23
Jasa Perusahaan	6,44	2,21	2,5	3,57	3,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	0,96	0,73	0,57	4,57
Jasa Pendidikan	8,6	0,93	2,99	3,27	3,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	0,43	3,69	3,14	8,08
Jasa Lainnya	8,46	5,89	7,69	7,82	7,78
PDRB	2,46	2,96	4,06	3,77	3,91

Sumber: BPS Pelalawan (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019)

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

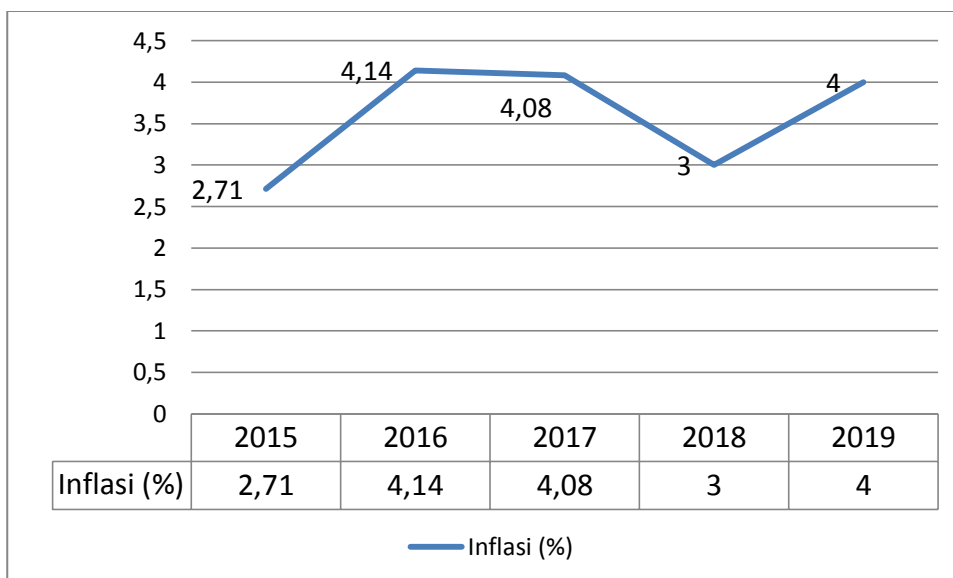
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi pada kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 yaitu sekitar 4,06% dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar 2,46 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 sekitar 3,4 %.



Gambar 3.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 - 2019

b. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa didalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang sehingga inflasi dapat juga diartikan penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan yaitu di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang yaitu antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat yaitu antara 30 – 100% setahun dan hiperinflasi yaitu diatas 100% setahun.



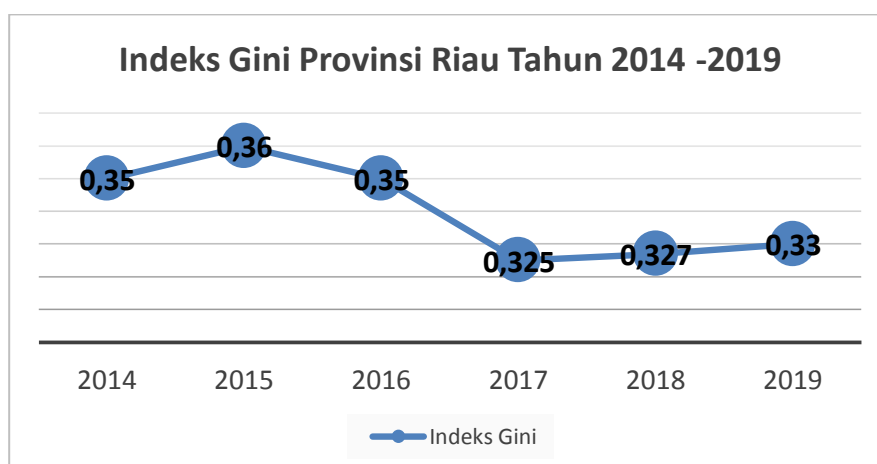
Gambar 3.11. Perkembangan Inflasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015–2019

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Inflasi Kabupaten Pelalawan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Riau. Capaian inflasi Kabupaten Pelalawan dibanding dengan inflasi Kabupaten/Kota.

c. Indeks Gini

Indeks Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Indeks Gini Kabupaten Pelalawan tidak ada data yang dapat digunakan sebagai dasar sehingga untuk melihat Indeks Gini dilihat dari indeks gini Provinsi Riau. Indeks Gini pada Tahun 2018 mengalami kenaikan 0,02 point pada Tahun 2018 yaitu 0,327 yang semula pada tahun 2017 sebesar 0,325. Dan Tahun 2019 indeks gini Provinsi Riau adalah 0.33. Secara rinci indeks gini Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut.



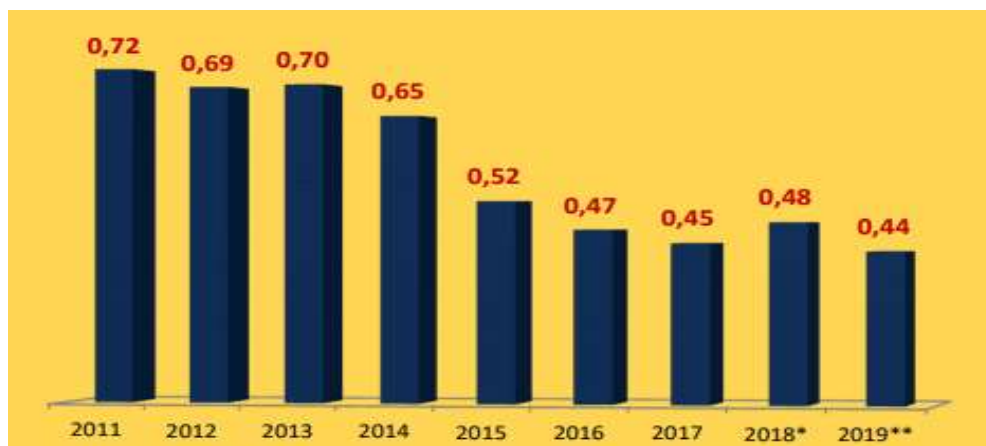
Gambar 3.12. Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

Dari gambar di atas Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata. Pergerakan kategori relatif merata menjadi tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau kedepan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut. Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 0,33 sudah termasuk kategori relatif merata. Namun jika dilihat Indeks gini ratio antara perkotaan dan pedesaan maka tingkat pemertaan pendapatan penduduk kota dan desa di provinsi Riau pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang berbeda dimana IGR perkotaan lebih tinggi dengan nilai 0,433 sedangkan pedesaan dengan nilai 0.299 namun dalam kategori relatif merata.

d. Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kabupaten dan kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Sama halnya dengan indeks gini, Indeks ketimpangan Williamson Kabupaten Pelalawan menggunakan data indeks Provinsi Riau.

Jika indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata, sehingga dapat dikelompokkan pada a. Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$; b. Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; c. Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$.



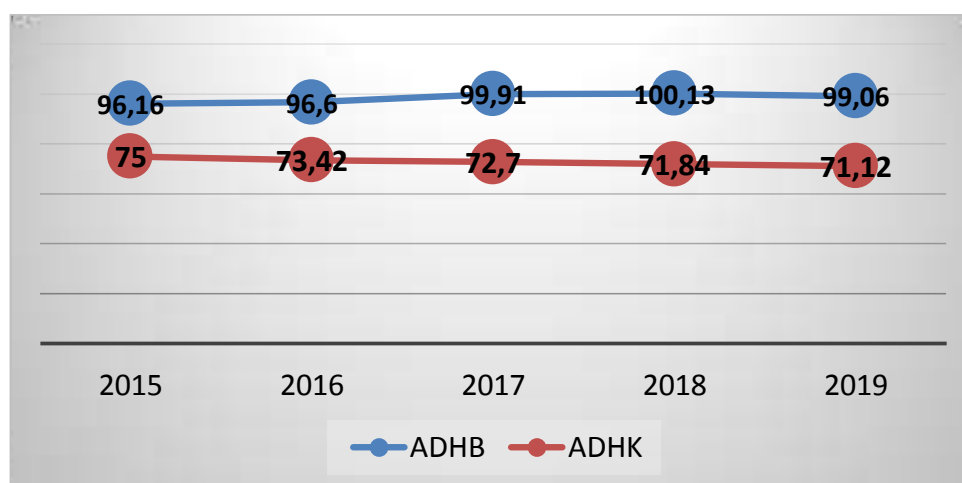
Sumber: Publikasi Ketimpangan Wilayah Provinsi Riau 2019 – BPS Provinsi Riau

Gambar 3.13. Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2011–2019

Indeks Williamson Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 0,44 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,48. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup tinggi atau pertumbuhan ekonomi antardaerah masih belum merata. Dari tahun 2011 sampai dengan 2019 dapat diketahui bahwa pemerataan pembangunan di Provinsi Riau terus mengalami perbaikan, hal ini dilihat dari terus menurunnya indeks Williamson..

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Apabila data PDRB per kapita disajikan secara berkala akan tampak adanya perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan kemakmuran yang semakin membaik atau sebaliknya. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besar kecilnya jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai pendapatan per kapita tersebut.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019.

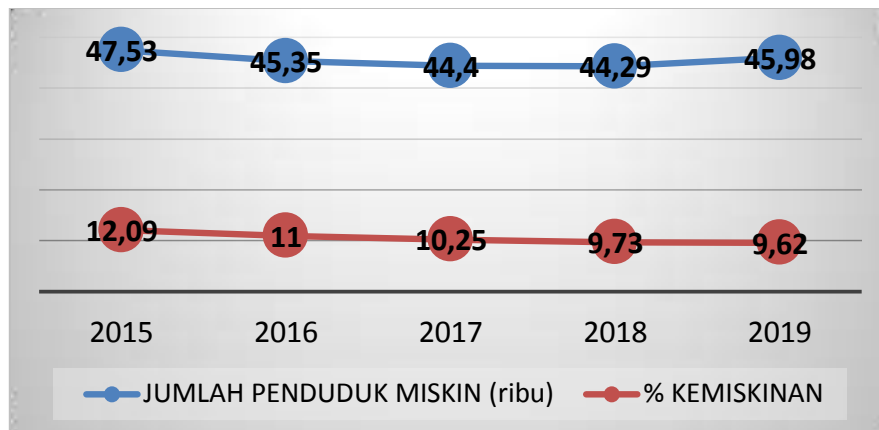
Gambar 3.14. PDRB Per Kapita Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019

Selama periode 2015 – 2019, PDRB Perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Pelalawan terus menurun yaitu dari Rp 75 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 71,12 juta pada tahun 2019. Perlu disusun program pembangunan yang berkaitan langsung dibidang perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Pelalawan kedepannya.

B. Kemiskinan

Selama periode 2015–2019, jumlah penduduk miskin relatif stagnan yaitu dari 47,53 ribu jiwa pada tahun 2015, menurun menjadi 45,98 ribu jiwa tahun 2019. Jumlah penduduk miskin yang relatif stagnan selama 5 tahun terakhir dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penanganannya. Hal ini dimungkinkan karena kemiskinan yang dihadapi jauh lebih parah

dan lebih dalam sehingga perlu penanganan khusus atau juga karena besarnya arus migrasi penduduk miskin dari luar Pelalawan. Pada Tahun 2020, data penerima Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial sebanyak 4.259 Jiwa, Bantuan Pemerintah Non Tunai sebanyak 3.875 KPM serta Bantuan Langsung Tunai dari Provinsi Riau sebanya 6.498 KK.

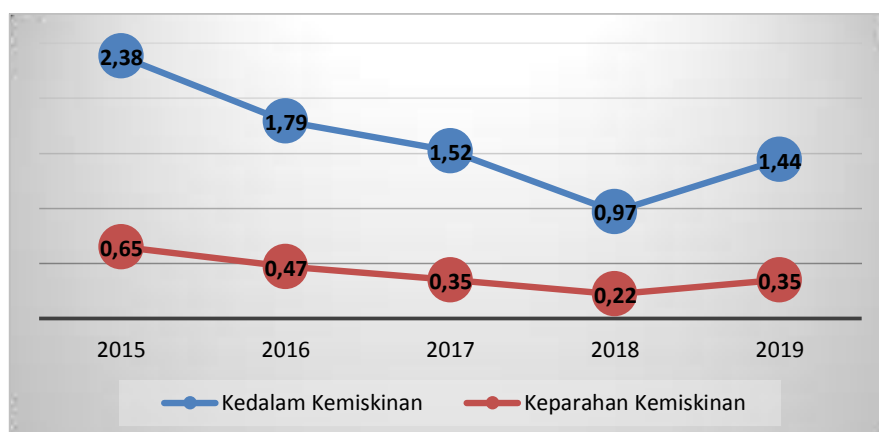


Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.15. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015 – 2019

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan mengalami tren yang positif dari tahun 2015 s.d 2019. Jumlah mengalami peningkatan, namun secara persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Permasalahan peningkatan penduduk yang cukup tinggi sebesar yakni 6,71 pertahunnya disebabkan karena adanya migrasi penduduk yang rata-rata tingkat perekonomiannya rendah dengan tujuan untuk mengadu nasib di Kabupaten Pelalawan. Besarnya pertumbuhan penduduk ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan masih sangat tinggi, diatas 1 yakni sebesar 1,44 pada Tahun 2019. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,35.



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019.

Gambar 3.16. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019

Melihat kondisi tahun 2019 serta pandemi di tahun 2020, anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya perlu ditingkatkan serta program perlindungan jaminan sosial seperti BOS, BLT, PKH, KUBE dan lain sebagainya harus tetap dipertahankan.

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas). Selain dengan pendekatan moneter, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi publik, kepemilikan barang berharga, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah, sedang, dan akan berupaya melalui berbagai programnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh, saat ini konsep pertumbuhan dan penganggaran yang memihak orang miskin (pro-poor growth dan pro-poor budgeting) sedang diwacanakan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga sedang mengalakan program-program berskala Daerah yang telah dan sedang dilaksanakan seperti Program Jaminan Perlindungan Sosial, Pendampingan PKH, dan Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial.

Tabel berikut ini memperlihatkan perkembangan kemiskinan di Kabupaten pelalawan Tahun 2019 yang tertuang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai berikut :

Tabel 3.10. Data DTKS Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah DTKS (Jiwa)	Jumlah DTKS (KK)	%
1	Langgam	6.733	1.787	
2	Pangkalan Kerinci	14.988	3.409	
3	Bandar Sei Kijang	4.973	1.267	
4	Pangkalan Kuras	15.918	4.290	
5	Ukui	8.536	2.296	
6	Pangkalan Lesung	5.683	1.566	
7	Bunut	5.273	1.415	
8	Pelalawan	4.284	1.176	
9	Bandar Petalangan	3.693	105	
10	Kuala Kampar	10.123	2.824	
11	Kerumutan	7.832	2.234	
12	Teluk Meranti	7.322	1.967	
Jumlah		95.358	25.236	

**Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan 2020*

3.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berikut komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per Kapita, APK SD/MI, APK SMP/MTs dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

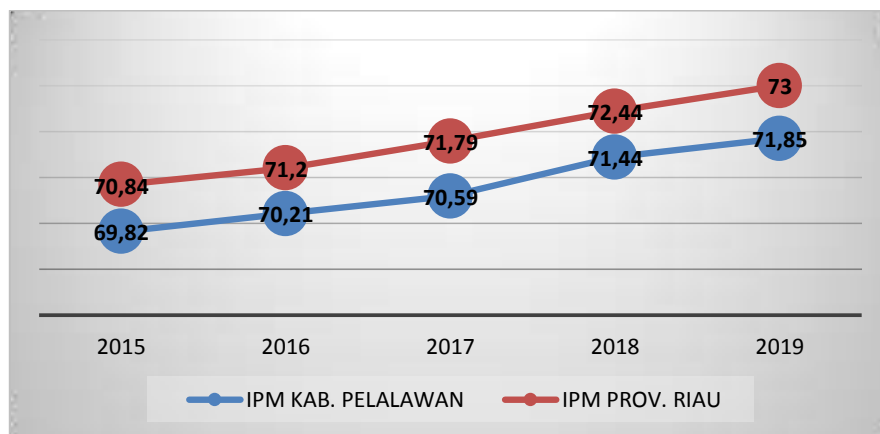
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2015 – 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend yang terus meningkat yaitu dari 69,82 pada tahun 2015 menjadi 71,85 pada tahun 2019 yang capaian IPM nya terkategori tinggi. Capaian IPM Kabupaten Pelalawan tahun 2019 relatif lebih rendah dibanding capaian Provinsi Riau (73) dan Indonesia (71,92) yang mengindikasikan bahwa capaian pembangunan kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan Provinsi Riau relatif lebih berhasil dari capaian pembangunan manusia di Kabupaten Pelalawan. Relatif rendahnya capaian IPM Kabupaten Pelalawan dibanding Indonesia, Provinsi Riau dan sebagian Kabupaten/Kota sekitarnya disebabkan rendahnya capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang lebih rendah dari capaian Provinsi Riau. Upaya percepatan peningkatan IPM Kabupaten Pelalawan dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan ketiga komponen pembentuk IPM yang lebih rendah dari Provinsi Riau tersebut.

Tabel 3.11. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2010 - 2019

Kabupaten/Kota	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	68.32	68.66	69.53	69.96	70.78
Indragiri Hulu	68	68.67	68.97	69.66	70.05
Indragiri Hilir	64.8	65.35	66.17	66.51	66.84
Pelalawan	69.82	70.21	70.59	71.44	71.85
Siak	72.17	72.7	73.18	73.73	74.07
Kampar	71.28	71.39	72.19	72.5	73.15
Rokan Hulu	67.29	67.86	68.67	69.36	69.93
Bengkalis	71.29	71.98	72.27	72.94	73.44
Rokan Hilir	66.81	67.52	67.84	68.73	69.4
Kepulauan Meranti	63.25	63.9	64.7	65.23	65.93
Pekanbaru	79.32	79.69	80.01	80.66	81.35
Dumai	72.2	72.96	73.46	74.06	74.64
RIAU	70.84	71.2	71.79	72.44	73

<https://riau.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019.

Gambar 3.17. IPM Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

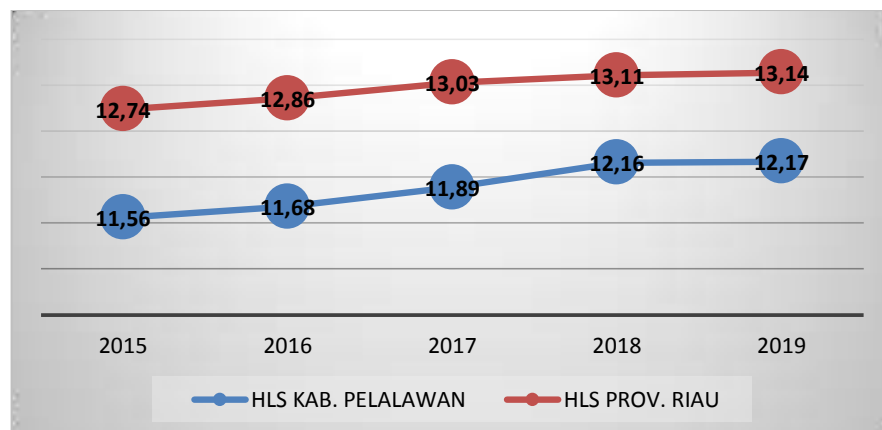
Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*) adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 3.12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 - 2019

Kabupaten/Kota	HLS (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	12.64	12.81	13.26	13.27	13.32
Indragiri Hulu	11.92	12.24	12.29	12.32	12.35
Indragiri Hilir	11.38	11.58	11.88	11.89	11.9
Pelalawan	11.56	11.68	11.89	12.16	12.17
Siak	12.26	12.56	12.72	12.73	12.75
Kampar	12.86	12.87	13.2	13.21	13.45
Rokan Hulu	12.39	12.59	12.81	12.82	12.83
Bengkalis	12.39	12.72	12.73	12.83	12.86
Rokan Hilir	11.75	12.06	12.25	12.63	12.67
Kepulauan Meranti	12.41	12.74	12.77	12.78	12.81
Pekanbaru	14.86	14.87	14.93	15.34	15.37
Dumai	12.46	12.75	12.97	12.98	13.1
RIAU	12.74	12.86	13.03	13.11	13.14

<https://riau.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>

Selama periode 2015 – 2019, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend terus meningkat dari 11,56 tahun pada tahun 2015 menjadi 12,17 tahun pada tahun 2019. Capaian HLS Kabupaten Pelalawan ini lebih rendah dibanding capaian AHH Provinsi Riau (13,03 tahun). Komponen HLS Kabupaten Pelalawan tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain. Anak-anak di Kabupaten pelalawan baru mampu menyelesaikan tingkat pendidikan SMA dan masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Program bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat kurang mampu perlu ditingkatkan serta keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan seperti ST2P serta AKNP bisa meningkatkan nilai HLS.



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019.

Gambar 3.18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

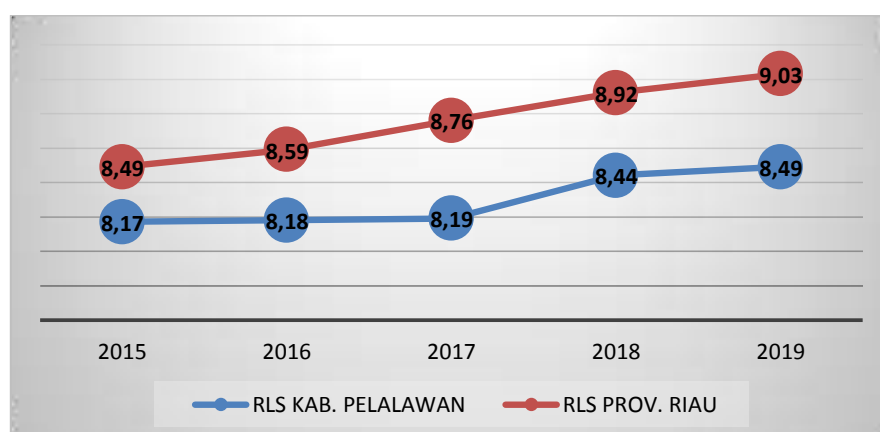
C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Selama periode 2015–2019, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend terus meningkat yaitu dari 8,17 tahun pada tahun 2015 menjadi 8,49 tahun pada tahun 2019, belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Capaian RLS Kabupaten pelalawan ini lebih rendah dibanding capaian RLS Provinsi Riau (9,03 tahun). RLS Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pelalawan usia 25 tahun keatas rata-rata belum menamatkan pendidikan SMA atau lulusan SMP. Rendahnya nilai ini menggambarkan masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal sehingga perlu disiasati dengan dilakukannya pendidikan ataupun pelatihan keterampilan kerja.

Tabel 3.13. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/Kota	RLS (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	8.18	8.19	8.2	8.31	8.58
Indragiri Hulu	7.82	7.83	7.89	8.16	8.17
Indragiri Hilir	6.82	6.94	7.18	7.19	7.22
Pelalawan	8.17	8.18	8.19	8.44	8.49
Siak	9.2	9.21	9.4	9.64	9.65
Kampar	8.84	8.85	9.09	9.1	9.25
Rokan Hulu	7.84	7.97	8.18	8.37	8.38
Bengkalis	8.82	8.83	8.89	9.21	9.41
Rokan Hilir	7.62	7.88	7.89	8.15	8.24
Kepulauan Meranti	7.45	7.46	7.47	7.48	7.51
Pekanbaru	10.97	11.2	11.21	11.22	11.43
Dumai	9.57	9.58	9.67	9.84	9.85
RIAU	8.49	8.59	8.76	8.92	9.03

<https://riau.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019.

Gambar 3.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015– 2019

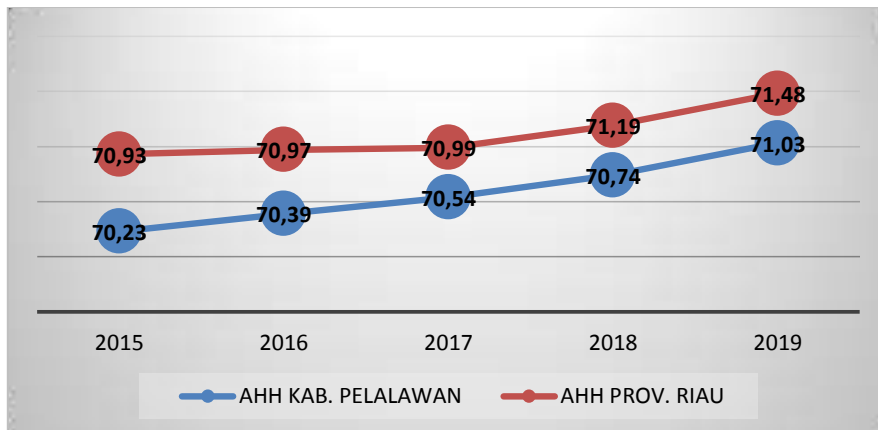
D. Angka Harapan Hidup (AHH)

Selama periode 2015–2019, AHH Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend yang terus meningkat yaitu dari 70,23 tahun pada tahun 2015 menjadi 71,03 tahun. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun terakhir yakni sebesar 0,29 tahun. Capaian AHH Kabupaten pelalawan ini relatif lebih rendah dibanding capaian AHH Provinsi Riau yang mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat Provinsi Riau lebih tinggi dibanding derajat kesehatan Kabupaten Pelalawan. Program/kegiatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten pelalawan harus terus diupayakan agar komponen ini meningkat lebih cepat sehingga akan mendorong percepatan meningkatkan IPM.

Tabel 3.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	67.86	67.92	67.99	68.17	68.44
Indragiri Hulu	69.74	69.79	69.83	69.97	70.2
Indragiri Hilir	66.84	66.95	67.07	67.32	67.66
Pelalawan	70.23	70.39	70.54	70.74	71.03
Siak	70.54	70.59	70.64	70.79	71.03
Kampar	70	70.08	70.16	70.35	70.64
Rokan Hulu	69.03	69.17	69.31	69.55	69.89
Bengkalis	70.58	70.63	70.69	70.85	71.11
Rokan Hilir	69.47	69.57	69.66	69.87	70.17
Kepulauan Meranti	66.72	66.85	66.99	67.21	67.53
Pekanbaru	71.65	71.7	71.75	71.94	72.22
Dumai	70.25	70.31	70.37	70.55	70.82
RIAU	70.93	70.97	70.99	71.19	71.48

<https://riau.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.20. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

Pandemi COVID -19

Tidak dapat dipungkiri mobilitas dan interaksi penduduk dengan wilayah yang telah terpapar Covid 19 menjadi sumber penyebaran Covid 19 di Kabupaten Pelalawan. Covid 19 dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui percikan dari batuk, bersin atau berbicara dari orang yang telah terinfeksi Covid 19. Oleh karena itu, upaya pengawasan dan pembatasan terhadap interaksi penduduk dilakukan untuk pencegahan penyebaran wabah Covid 19. Penduduk yang sempat melakukan perjalanan ke wilayah zona merah penyebaran Covid 19 akan dilakukan pemantauan walaupun mereka belum menunjukkan gejala sakit, kelompok ini disebut sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Penduduk yang menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek dan sesak napas serta dirawat oleh tenaga Kesehatan masuk kedalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sementara, orang yang diduga kuat terjangkit infeksi COVID-19, dengan menunjukkan gejala virus corona dan pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif corona masuk dalam kategori suspect dan akan dilakukan pemeriksaan apakah hasilnya positif atau negatif.

Di Kabupaten Pelalawan sampai dengan 06 Agustus 2020 dari hasil pemantauan dan pengawasan terdapat sebanyak 3904 orang yang tersuspek. Isolasi mandiri sebanyak 105 orang, isolasi rumah sakit 0, selesai isolasi 3786 dan meninggal 13 orang.

Tabel 3.15. Sebaran Covid 19 Kabupaten Pelalawan Per 06 Agustus 2020

No.	Wilayah	Suspek	Konfirmasi
1	Bandar Seikijang	8	0
2	Pangkalan Kerinci	64	22
3	Langgam	11	0
4	Pangkalan Kuras	11	0
5	Ukui	0	2
6	Pangkalan Lesung	0	1
7	Bandar Petalangan	0	1
8	Bunut	0	1
9	Pelalawan	0	0
10	Kerumutan	11	0
11	Teluk Meranti	0	0
12	Kuala Kampar	0	0
	Jumlah	105	27

Sumber : Rekap Data Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas tidak hanya menciptakan krisis Kesehatan namun juga telah memberikan efek domino pada aspek sosial dan ekonomi. Langkah untuk menekan laju cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam yang disebabkan oleh kegiatan konsumsi terganggu, investasi terhambat, dan ekspor-impor berkontraksi. JP Morgan memproyeksi perekonomian global ditahun 2020 berkontraksi diperkirakan tumbuh - 1,1 persen, sedangkan *The Economist Intelligence Unit* memperkirakan berkontraksi lebih dalam lagi tumbuh -2,2 persen. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan tekanan pada perekonomian seluruh negara dengan dampak mencapai 3% - 16% dari GDP. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun dalam menjadi 2,3% pada skenario berat dan berlanjut menjadi -0,4% pada skenario sangat berat.

Sebelum pandemic Covid 19 terjadi (tahun 2015-2019) ekonomi Kabupaten Pelalawan mampu tumbuh antara 2,46 persen hingga tumbuh sebesar 4,06 persen. Pada tahun 2015 lapangan usaha dengan laju pertumbuhan relative tinggi adalah Pengadaan Listrik tumbuh 10,04 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 9,96 persen dan Konstruksi tumbuh 9,11 persen. Beberapa lapangan usaha di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 yang memiliki laju pertumbuhan relative tinggi ditahun 2019 pertumbuhannya relative melambat. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan relative tinggi ditahun 2019 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 8,08 persen, Jasa Lainnya tumbuh 7,78 persen, dan Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,57 persen.

Tabel 3.16. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	0,04	2,55	4,35	3,70	3,25
Pertambangan dan Penggalian	0,92	-0,34	-2,46	-1,58	-4,51
Industri Pengolahan	3,91	3,24	4,05	4,03	4,62
Pengadaan Listrik dan Gas	10,04	18,43	7,29	7,62	5,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,25	-0,42	1,78	1,16	0,63
Konstruksi	9,11	4,02	6,32	2,94	4,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,94	4,66	5,01	5,21	4,48
Transportasi dan Pergudangan	6,58	3,16	2,34	2,42	1,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,45	3,60	3,27	3,49	3,13
Informasi dan Komunikasi	7,87	4,64	5,64	5,81	5,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	-8,93	8,60	2,71	4,07	0,06
Real Estate	8,03	1,46	3,57	2,89	3,23
Jasa Perusahaan	6,44	2,21	2,50	3,57	3,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	0,96	0,73	0,57	4,57
Jasa Pendidikan	8,60	0,93	2,99	3,27	3,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	0,43	3,69	3,14	8,08
Jasa Lainnya	8,46	5,89	7,69	7,82	7,78
PDRB	2,46	2,96	4,06	3,77	3,91

Sumber : BPS Kab. Pelalawan, 2020

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan ditahun 2019 sebesar 95,48 persen ditentukan oleh tiga sector kunci yaitu Industri Pengolahan, Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Resparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ekonomi Kabupaten Pelalawan ditahun 2019 yang tumbuh 3,91 persen bersumber dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,41 persen, Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,21 persen, dan Perdagangan Besar, dan Eceran Resparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,12 persen, serta sisanya bersumber lapangan usaha lainnya.

Tabel 3.17. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	0,0137	0,9468	1,6126	1,3731	1,2075
Pertambangan dan Penggalian	0,0205	-0,0074	-0,0520	-0,0314	-0,0849
Industri Pengolahan	1,9976	1,6794	2,1029	2,0939	2,4075
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0023	0,0044	0,0020	0,0022	0,0015
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,0002	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	0,1883	0,0885	0,1404	0,0668	0,1040
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,0762	0,1213	0,1325	0,1391	0,1213
Transportasi dan Pergudangan	0,0141	0,0070	0,0052	0,0053	0,0040
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0070	0,0058	0,0053	0,0056	0,0050
Informasi dan Komunikasi	0,0411	0,0255	0,0315	0,0330	0,0323
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,0514	0,0440	0,0146	0,0217	0,0003
Real Estate	0,0482	0,0093	0,0223	0,0179	0,0199
Jasa Perusahaan	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0471	0,0115	0,0086	0,0064	0,0503
Jasa Pendidikan	0,0251	0,0029	0,0091	0,0098	0,0108
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0125	0,0006	0,0049	0,0041	0,0105
Jasa Lainnya	0,0214	0,0157	0,0212	0,0223	0,0230
PDRB	2,4640	2,9553	4,0613	3,7700	3,9133

Sumber : Diolah Dari Data BPS Kab. Pelalawan, 2020

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta di Kabupaten Pelalawan telah mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap kesempatan kerja adalah Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 98.821 orang dan ditahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 116.602 orang. Lapangan usaha berikutnya yang banyak menyerap kesempatan kerja adalah Perdagangan Besar dan Eceran Resparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana pada tahun 2018 sebanyak 23.876 orang dan meningkat menjadi sebanyak 31.618 orang ditahun 2019. Lapangan usaha ketiga yang banyak menyerap kesempatan kerja adalah Industri Pengolahan, dimana ditahun 2018 sebanyak 18.935 orang dan turun menjadi sebanyak 12.825 orang ditahun 2019.

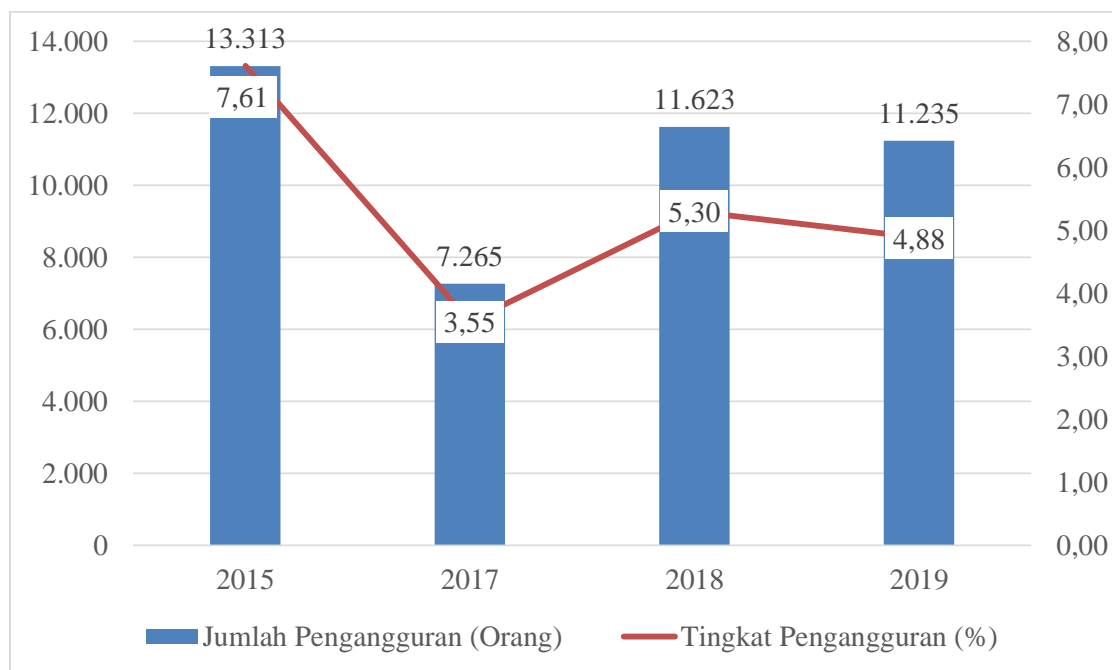
Tabel 3.18. Penduduk Kabupaten Pelalawan Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	98.821	116.602
Pertambangan dan Penggalian	1.306	0
Industri Pengolahan	18.935	12.825
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	435	809
Konstruksi	7.846	9.868
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.876	31.618

Lapangan Usaha	2018	2019
Transportasi dan Pergudangan	6.721	6.441
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.004	9.905
Informasi dan Komunikasi	936	2.037
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan	4.460	5.287
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.991	5.594
Jasa Pendidikan	13.371	10.996
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.180	1.476
Jasa Lainnya	7.857	5.728
Jumlah	207.739	219.186

Sumber : BPS Riau, 2020

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkorelasi positif dengan peningkatan penyerapan Angkatan kerja di daerah. Selanjutnya terciptanya kesempatan kerja di daerah diharapkan akan berkorelasi negative terhadap jumlah dan tingkat pengangguran di daerah. Jumlah Pengangguran di Kabupaten Pelalawan selama periode 2015-2019 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2015 jumlah Angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka di Kabupaten Pelalawan sebanyak 13.313 orang dan menjadi sebanyak 11.235 orang ditahun 2019. Seiring dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pelalawan, tingkat pengangguran di Kabupaten Pelalawan juga telah turun dari 7,61 persen ditahun 2015 menjadi sebesar 4,88 persen ditahun 2019.



Tabel 3.19. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019 (Sumber : BPS Riau, 2020)

Relatif stabilnya kondisi ekonomi Kabupaten Pelalawan selama periode 2015-2019 yang diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran telah berdampak pada upaya penurunan kemiskinan. Jumlah penduduk

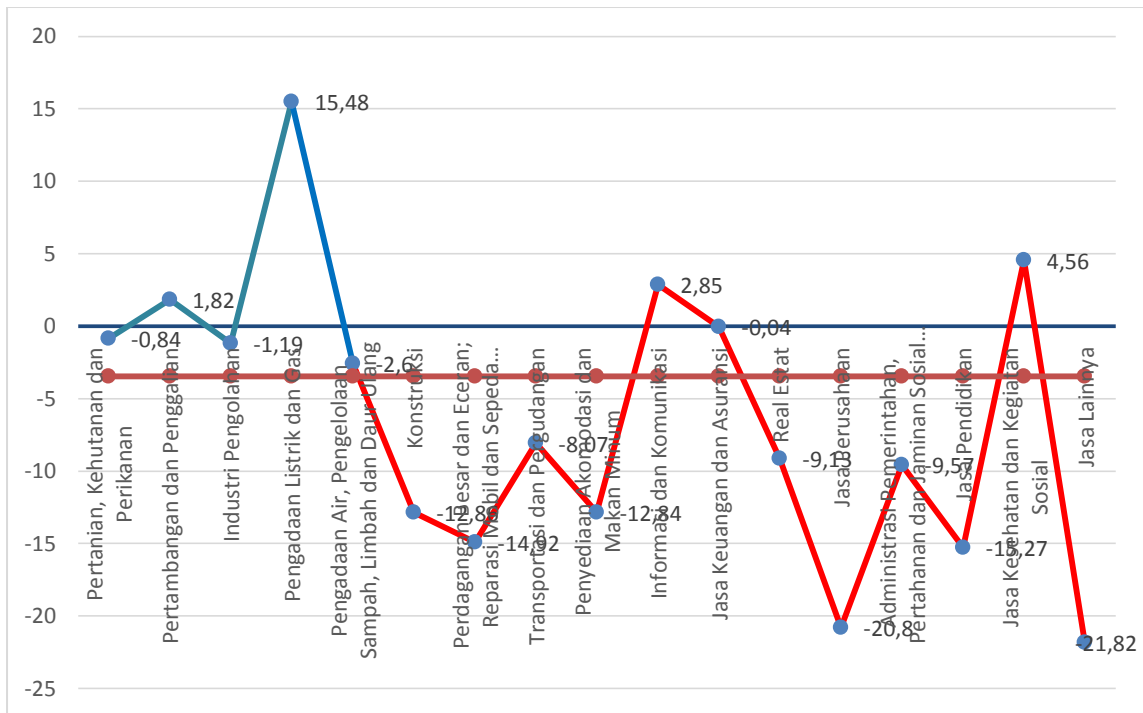
miskin di Kabupaten Pelalawan turun dari 47,53 ribu jiwa ditahun 2015 dan menjadi sebanyak 45,98 ribu jiwa ditahun 2019. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan tersebut telah menurunkan tingkat kemiskinan dari sebesar 12,09 persen ditahun 2015 menjadi sebesar 9,62 persen ditahun 2019. Meningkatnya berbagai harga kebutuhan dasar turut meningkatkan angka garis kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 451.528 / kapita/ bulan meningkat menjadi sebesar Rp. 534.078 /kapita/bulan ditahun 2019. Tingkat kedalaman kemiskinan cenderung menurun namun ditahun 2019 relatif meningkat menjadi sebesar 1,44 poin. Demikian juga tingkat keparahan kemiskinan yang sebelumnya cenderung menurun ditahun 2019 relatif meningkat menjadi sebesar 0,35 poin. Bila terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi kelompok yang merasakan dampaknya adalah kelompok yang berada dibawah garis kemiskinan, di garis kemiskinan, dan mereka yang berada diatas garis kemiskinan yang berpotensi untuk menjadi miskin.

Tabel 3.20. Kemiskinan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	47,53	45,35	44,4	44,29	45,98
2	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,09	11	10,25	9,73	9,62
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	451.528	473.240	487.648	515.581	534.078
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,38	1,79	1,52	0,97	1,44
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,65	0,47	0,35	0,22	0,35

Sumber : BPS Riau, 2020

Dampak awal dari Covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan dapat berkaca dari kinerja perekonomian Provinsi Riau triwulan I-2020. Pada awal pandemic Covid 19 Perekonomian Riau triwulan I-2020 terhadap triwulan IV 2019 tumbuh sebesar -3,47 persen. Sebagian besar lapangan usaha tumbuh negative, lapangan usaha yang paling terkontraksi pertumbuhannya adalah Jasa lainnya tumbuh -21,82 persen, diikuti Jasa Perusahaan tumbuh -20,80 persen, Jasa Pendidikan tumbuh -15,27 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -14,92 persen, Konstruksi tumbuh -12,86 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar -12,84 persen. Sedangkan lapangan usaha yang tumbuh positif ditengah pandemic covid 19 adalah Pertambangan dan Penggalian tumbuh 1,82 persen, Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 15,48 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh 2,85 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 4,56 persen. Perekonomian Kabupaten Pelalawan selama ini di pengang oleh tiga sector kunci yaitu Industri Pengolahan sebesar 49,01 persen, Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,80 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,25 persen atau peranan ketiga sector kunci dalam perekonomian Kabupaten Pelalawan sekitar 91,05 persen. Kinerja ketiga sector kunci Kabupaten Pelalawan tersebut berkaca pada kinerja perekonomian Provinsi Riau pada awal pandemic Covid 19 diperkirakan pertumbuhannya akan mengalami kontraksi.



Tabel 3.21. Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan I – 2020 dibandingkan dengan Triwulan IV-2019 (Sumber : BPS Riau, 2020)

Secara nasional pandemic Covid 19 telah merubah asumsi dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Nasional berdasarkan RAPBN tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen namun dengan adanya pandemic covid 19 target tersebut sulit untuk dicapai. Berdasarkan scenario dampak Covid 19 pada tingkat yang berat pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 2,3 persen dan pada tingkat yang sangat berat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh -0,4 persen. Sejalan dengan asumsi nasional, pada RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 ditahun 2020 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen. Target tersebut dengan adanya pandemic Covid 19 di Kabupaten Pelalawan diperkirakan sulit untuk diwujudkan. Sejalan dengan scenario nasional, pada dampak Covid 19 yang berat diperkirakan ekonomi Kabupaten Pelalawan tumbuh 1,95 persen dan sangat berat tumbuh -0,34 persen.

Dampak Covid 19 yang menyebabkan kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi akan memiliki efek domino terhadap peningkatan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia ditahun 2019 sekitar 7,05 juta orang dan diperkirakan pada scenario dampak Covid 19 yang berat jumlah pengangguran akan bertambah sebanyak 2,29 juta orang. Jumlah tersebut akan lebih banyak lagi jika scenario dampak Covid 19 menjadi sangat berat diperkirakan jumlah pengangguran akan bertambah sebanyak 5,23 juta orang. Sejalan dengan scenario dampak covid 19 nasional, jumlah pengangguran Kabupaten Pelalawan ditahun 2019 sebanyak 11,24 ribu orang dalam scenario dampak Covid 19 yang berat diperkirakan pengangguran akan bertambah sebanyak 3,65 ribu orang dan pada scenario dampak Covid 19 yang sangat berat diperkirakan jumlah pengangguran akan bertambah sebanyak 8,33 ribu orang.

Bertambahnya jumlah pengangguran akan berkorelasi positif dengan bertambahnya jumlah orang yang miskin. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Nasional sebanyak 24,79 juta orang. Adanya pandemic Covid 19 diperkirakan akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin, pada scenario dampak Covid 19 yang berat diperkirakan jumlah

penduduk miskin bertambah sebanyak 1,16 juta orang dan sangat berat diperkirakan jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3,78 juta orang. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 sebanyak 45,98 ribu orang. Sejalan dengan scenario nasional dengan adanya Covid 19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan pada scenario dampak Covid 19 berat diperkirakan akan bertambah sebanyak 2,15 ribu orang dan sangat berat diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah sebanyak 7,01 ribu orang.

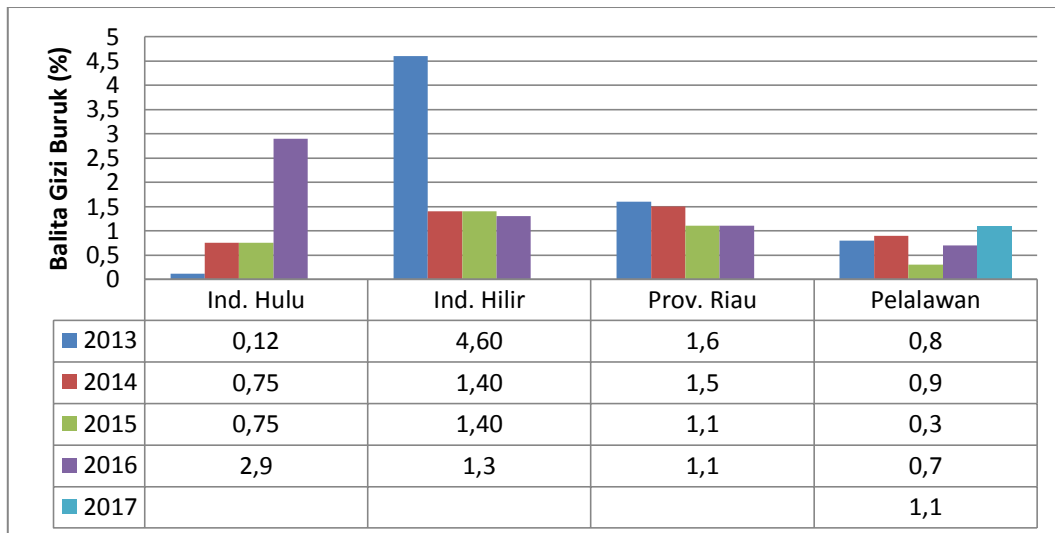
Tabel 3.22. Skenario Dampak Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Nasional dan Kabupaten Pelalawan

Keterangan	Asumsi Awal	Skenario Dampak Covid 19	
		Berat	Sangat Berat
Pertumbuhan Ekonomi			
- Nasional (%)	5,3	2,3	-0,4
- Pelalawan (%)	4,5	1,95	-0,34
Pengangguran			
- Nasional (Juta Orang)	7,05	+2,29	+5,23
- Pelalawan (Ribu Orang)	11,24	+3,65	+8,33
Kemiskinan			
- Nasional (Juta Orang)	24,79	+1,16	+3,78
- Pelalawan (Ribu Orang)	45,98	+2,15	+7,01

Sumber : Diolah dari Data Kementerian Keuangan : APBN 2020, BPS 2020, RPJMD Kab. Pelalawan Tahun 2016-2021

E. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk selama periode 2013 – 2017 menunjukkan trend berfluktuatif meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 0,8% menurun menjadi 0,3 pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 1,1% pada tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan upaya penurunan persentase balita gizi buruk relatif belum berhasil. Namun demikian, bila dibandingkan dengan capaian penurunan persentase balita gizi buruk Provinsi Riau, capaian penurunan Kabupaten Pelalawan lebih baik. Kondisi yang sama bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, dimana capaian penurunan persentase balita gizi buruk Kabupaten Pelalawan relatif lebih baik.

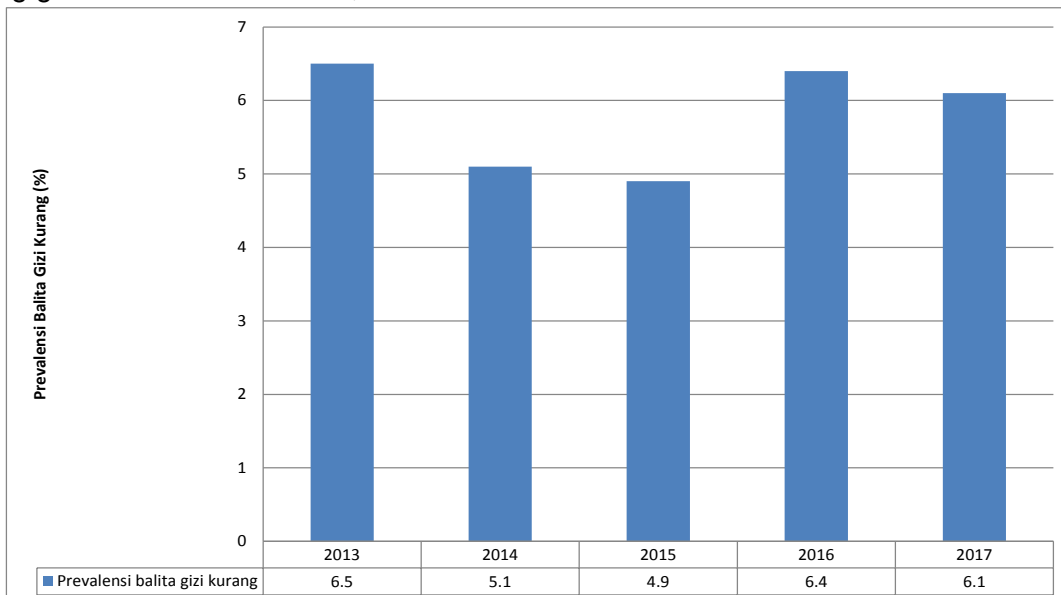


Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.21. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017

F. Prevalensi Balita Kurang Gizi

Prevalensi balita kurang gizi di Kabupaten Pelalawan selama periode 2013 – 2017, menunjukkan trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, prevalensi balita kurang gizi di Kabupaten Pelalawan sebesar 6,50% menurun menjadi 4,9% pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 6,1%. Selama periode ini, rata-rata penurunan prevalensi balita kurang gizi menurun sebesar -1,26%.



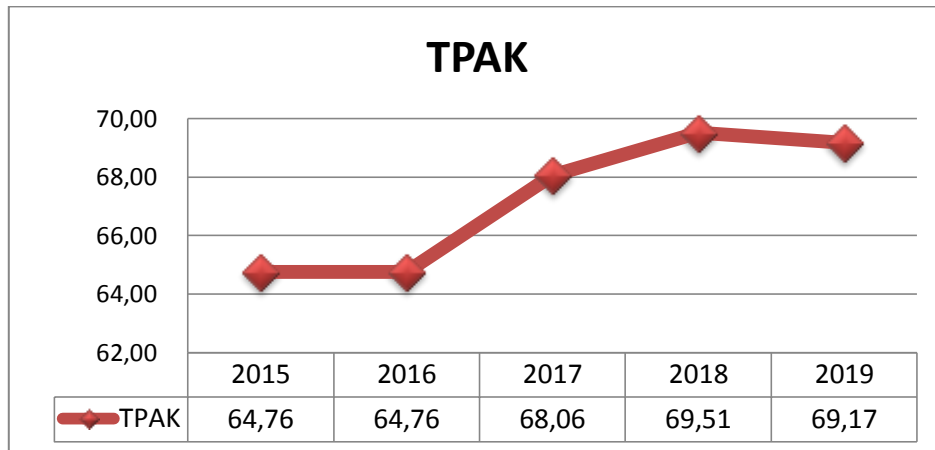
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.22. Perkembangan Persentase Balita Kurang Gizi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selama periode 2015 – 2019, TPAK Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 2015, TPAK Kabupaten Pelalawan sebesar 64,76% menjadi 69,17% pada tahun 2019. Capaian TPAK Kabupaten Pelalawan tahun 2019 termasuk kategori tinggi

mengindikasikan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif bekerja sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan produksi barang atau jasa di Kabupaten Pelalawan.

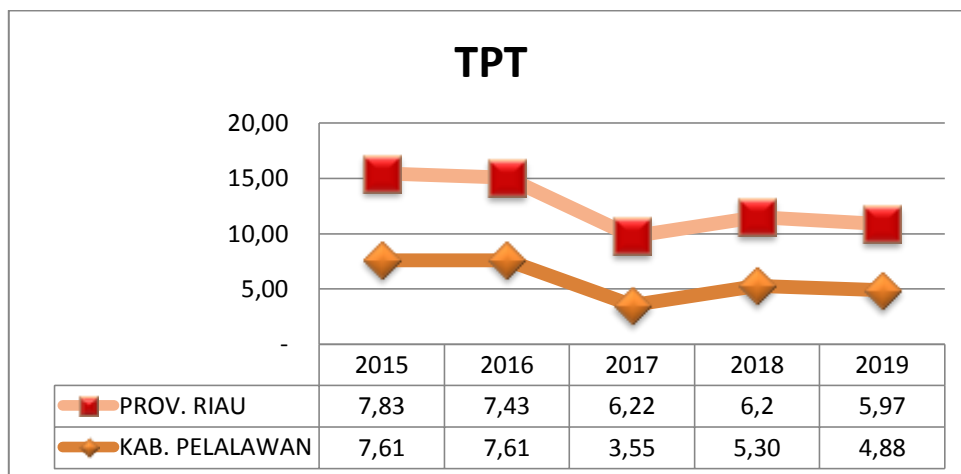


Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019

Gambar 3.23. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2015 – 2019, TPT Kabupaten Pelalawan menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten pelalawan sebesar 7,61%, menurun menjadi 4,88% pada tahun 2019. Capaian TPT Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 lebih baik (lebih rendah) dibanding capaian TPT Provinsi Riau yang sebesar 5,97%.



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019

Gambar 3.24. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

3.1.3.3 Masalah Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan hidup manusia. Kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi manusia sejak lahir hingga meninggal, sehingga perlu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

08 Tahun 2012 membagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atas 26 jenis. Secara rinci jenis PMKS dan jumlahnya masing-masing di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.23. Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

NO	JENIS PMKS	SATUAN	2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	anak			
2	Anak Terlantar	anak	350		
3	Anak yang Berhadapan dengan hukum	anak	-	41	60
4	Anak Jalanan	anak	-		
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	anak	95		
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	anak	16	1	1
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	anak		41	60
8	Lanjut Usia Terlantar	orang	578	7046	7046
9	Penyandang Disabilitas	orang	225	395	551
10	Tuna Susila	orang	12		
11	Gelandangan	orang			
12	Pengemis	orang			
13	Pemulung	orang	-		
14	Kelompok Minoritas	orang	-		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasayrakan (BWBLP)	orang			
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	orang			
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	orang			
18	Korban Trafficking	orang	-		
19	Korban Tindak Kekerasan	orang			
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	orang	20		
21	Korban Bencana Alam	KK	482		
22	Korban Bencana Sosial	orang	19		
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	orang			
24	Fakir Miskin	KK	12,070		
25	Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	KK	10		
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	150	36	

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Selama kurun waktu 2019, Bantuan terhadap PMKS di Kabupaten Pelalawan tahun sebesar 10,39% yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.24. Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan

No	Kecamatan	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Yang memperoleh Bantuan	%
1	Langgam	5	2	40
2	Pangkalan Kerinci	40	2	5
3	Bandar Sei Kijang	3	2	66,67

4	Pangkalan Kuras	12	2	16,67
5	Ukui	3	2	66,67
6	Pangkalan Lesung	3	2	66,67
7	Bunut	7	2	28,57
8	Pelalawan	111	2	1,8
9	Bandar Petalangan	5	2	40
10	Kuala Kampar	31	2	6,45
11	Kerumutan	5	2	40
12	Teluk Meranti	6	2	33,33
Jumlah		231	24	10,39

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Persentase PMKS yang Tertangani

Tahun 2018 – 2019, persentase PMKS yang tertangani yaitu sebesar 87,5% pada tahun 2018 dan menurun menjadi 42,3% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan jumlah PMKS pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun jumlah bantuan tetap seperti tahun 2018.

Tabel 3.25. Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Tahun 2018 s.d 2019

No	Kecamatan	Jumlah PMKS		Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan	
		2018	2019	2018	2019
1	Langgam	92	92	5	5
2	Pangkalan Kerinci	28	39	40	40
3	Bandar SeiKijang	28	30	3	3
4	PangkalanKuras	16	81	12	12
5	Ukui	16	116	3	3
6	Pangkalan Lesung	20	24	3	3
7	Bunut	20	33	7	7
8	Pelalawan	14	21	111	111
9	Bandar Petalangan	8	10	5	5
10	Kuala Kampar	5	7	31	31
11	Kerumutan	8	32	5	5
12	TelukMeranti	9	61	6	6
Jumlah		264	546	231	231

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 yaitu sebesar 21,62%.

Tabel 3.26. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

No	Kecamatan	JUMLAH PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan	%
1	Langgam	1	2	200,0
2	Pangkalan Kerinci	32	2	6,3
3	Bandar Sei Kijang	5	2	40,0
4	Pangkalan Kuras	10	2	20,0
5	Ukui	1	2	200,0
6	Pangkalan Lesung	1	2	200,0
7	Bunut	4	2	50,0
8	Pelalawan	19	2	10,5
9	Bandar Petalangan	3	2	66,7
10	Kuala Kampar	29	2	6,9
11	Kerumutan	3	2	66,7
12	Teluk Meranti	3	2	66,7
Jumlah		111	24	21,6

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

3.1.4.1 Layanan Umum Wajib Dasar

Layanan umum urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator pada bidang urusan meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

A. Pendidikan

Aspek pelayanan umum pada urusan pendidikan dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

Tabel 3.27. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Murni (APM); SD/MI, (%)	97,18	98,09	99,05	86,93	99,09
Angka Partisipasi Murni (APM); SMP/MTs, (%)	85	85	86,13	78,00	87,86
Angka Partisipasi Murni (APM); SMA/MA/SMK. (%)	79,06	80	81,05		

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan; SD/MI, (%)	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan; SMP/MTs, (%)	99,5	100	100	100	100
Angka Kelulusan; SMA/MA/SMK. (%)	99,05	100	100		
Perguruan Tinggi di Kabupaten Pelalawan, (jumlah)	2	2	2	2	2
Angka rata-rata lama sekolah, (tahun)	8,17	8,18	8,19	8,20	8,21
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A(%)	119,87	120,5	120,5	92,70	102,15
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B (%)	77,5	78,6	78,8	76,60	90,57
Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/Paket C (%)	78,91	80,63	82		
Angka pendidikan yang ditamatkan/tingkat SD dan SLTP	41,24	41,54	42,27	55,70	56,38
Angka pendidikan yang ditamatkan/tingkat SLTA Keatas	25,34	25,76	26,17		
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI/Paket A ke SMP/MTs /Paket B (%)	99,88	100	99,08	100	100
Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA /Paket C (%)	97,7	98,18	98,2	100	100
Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%)	9,5	10	10		
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	81	83	85	86	88
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	83	85	87	89	90
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0	0	0	0,03
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0	0	0,01	0,38
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,2	-	-		
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A (%)	99,5	100	100	100	100
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B (%)	99,15	100	100	100	100

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan 2019

Berdasarkan Tabel di atas, angka partisipasi kasar (Usia 7-12 tahun) di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2017 adalah sebesar 120,50 persen artinya bahwa penduduk pada usia 7-12 yang belum dan atau tidak sekolah lagi sebesar 0 persen. Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD/MI/Paket A adalah sebesar 99,05 persen pada Tahun 2017 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 98,09 persen. Untuk APM SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2017 sebesar 81,05 persen meningkat 1,05 persen dari Tahun 2016. Sedangkan angka rasio guru dan murid dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.28. Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan Dasar:					
Rasio guru PNS/murid SD/MI	01:20	01:15	01:15	01:32	01:38

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio guru PNS/murid SMP/MTs	01:15	01:11	01:11	01:35	01:35
Rasio guru PNS + Non PNS/murid SD/MI	01:18	01:17	01:16	01:17	01:17
Rasio guru PNS + Non PNS/murid SMP/MTs	01:13	01:13	01:12	01:13	01:13
Pendidikan Menengah:					
Rasio guru terhadap murid	01:20	01:20	01:20		

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 2019.

B. Kesehatan

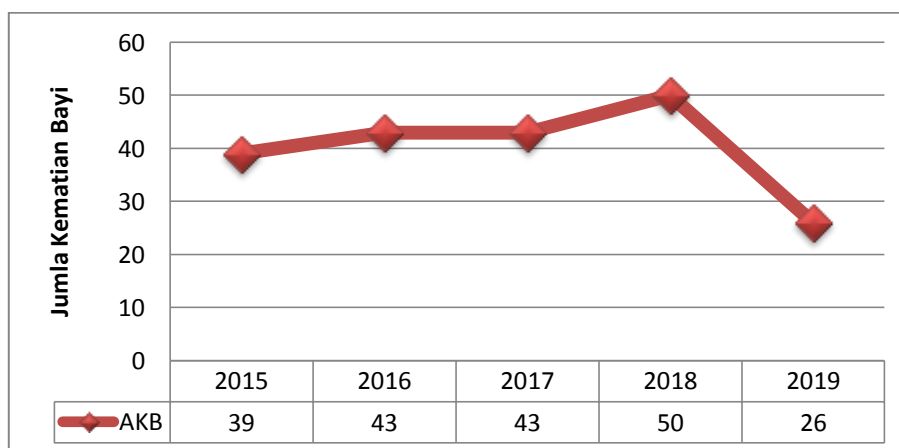
Indikator kinerja urusan layanan urusan wajib dasar bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kematian yang terjadi di masyarakat dari kurun waktu ke waktu. Kejadian kematian dapat juga digunakan sebagai indikator dalam hal penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan serta program-program pembangunan kesehatan. Angka kematian dapat dihitung melalui survei ataupun penelitian.

Dari 10.841 kelahiran pada tahun 2019, terdapat 46 bayi yang lahir mati. Hal ini dapat memberikan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan dimasyarakat dan adanya kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Disamping itu meningkatnya kinerja petugas puskesmas di Kabupaten Pelalawan sehingga seluruh kematian bayi terpantau dan dilaporkan.

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sensitif untuk melihat tingkat derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu angka kematian bayi juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu maupun gizi keluarga.

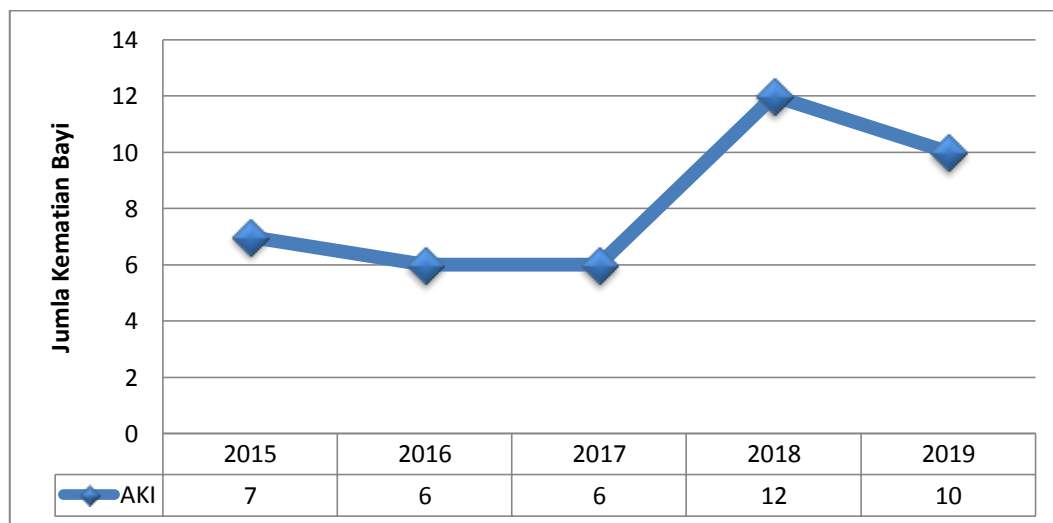


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan 2020

Gambar 3.25. Angka Kematian Bayi Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan (2020)

Gambar 3.26. Jumlah Kematian Ibu Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang jalan keseluruhan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten) di Kabupaten Pelalawan adalah 1.941,22 Km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 157,28 Km (8,10%), jalan provinsi sepanjang 342,60 Km (17,65%) dan jalan kabupaten sepanjang 1.441,34 Km (74,25%). Kondisi jalan nasional seluruhnya dalam kondisi baik. Jalan Provinsi yang dalam kondisi baik sepanjang 17 Km (4,96%), kondisi sedang sepanjang 140,50 Km (41,01%) dan kondisi rusak ringan sepanjang 185,10 Km (54,03%). Jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 583,65 Km (40,49%), kondisi sedang (sepanjang 381,69 Km (26,48%) dan panjang jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 476,00 Km (33,02%).

Selama periode 2015 – 2019, panjang jalan Kabupaten Pelalawan meningkat dari 1.414,67 Km pada tahun 2015, menjadi 1.441,34 Km pada tahun 2019. Selama 5 tahun ini, penambahan panjang jalan kabupaten Pelalawan sepanjang 26,67 Km. Fokus bidang jalan ini adalah peningkatan jalan menjadi kondisi baik yaitu dari 471,06 Km pada tahun 2015 menjadi 583,65 Km tahun 2019. Selama periode ini, rata-rata penambahan panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 22,52 Km per tahunnya.

Selama periode 2013 – 2019, panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Pelalawan memiliki trend meningkat yaitu dari 933,62 Km pada tahun 2015 menjadi 965,35 Km pada tahun 2019. Selama periode ini persentase jalan kabupaten

dalam kondisi mantap memiliki trend meningkat yaitu dari 66,00% pada tahun 2015 menjadi 66,98% pada tahun 2019.

Tabel 3.29. Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Pelalawan Sampai Dengan Tahun 2019

No.	KECAMATAN	Jenis Permukaan Jalan					
		JALAN					Semenisasi Jalan Lingkungan
		Aspal (km)	Rigid (km)	Kerikil (km)	Tanah (km)	Panjang Jalan	
1	Pelalawan	39,63	6,60	25,73	26,75	98,71	12,038
2	Teluk Meranti	-	3,28	21,73	110,35	135,35	13,541
3	Pangkalan Lesung	48,52	3,56	15,26	8,80	76,13	1,314
4	Kerumutan	49,61	-	6,10	54,34	110,05	7,128
5	Kuala Kampar	-	-	-	73,24	73,24	82,795
6	Pangkalan Kuras	67,75	0,12	77,75	7,54	153,16	16,179
7	Bandar Petalangan	45,46	-	-	11,90	57,36	-
8	Bunut	49,05	-	94,19	42,36	185,60	6,325
9	Langgam	84,14	2,37	82,90	66,36	232,90	5,858
10	Pangkalan Kerinci	127,60	7,12	17,87	56,67	209,25	53,965
11	Bandar Seikijang	15,00	-	2,50	17,40	34,90	0,731
12	Ukui	33,20	0,65	37,67	3,17	74,69	3,050
TOTAL		559,96	23,69	381,69	476,00	1.441,34	202,924
		583,65					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

Dari tabel diatas, sampai dengan tahun 2019 ini terlihat panjang jaringan jalan kabupaten adalah 1441,34 Km. Terdiri dari 4 jenis permukaan, yaitu permukaan aspal dengan panjang 559,96 Km dan permukaan rigid dengan panjang 23,69 Km (kedua jenis permukaan ini dianggap jalan dengan kondisi baik) dengan total panjang jalan kondisi baik adalah 583,65 Km atau sebesar 40,49%, permukaan kerikil (merupakan badan jalan yang sudah dilakukan konstruksi perbaikan lapis dasar (base) jalan, dianggap jalan dengan kondisi sedang) dengan panjang 381,69 Km atau sebesar 26,98% dan jalan permukaan tanah (jalan yang masih berupa badan jalan dengan atau tanpa konstruksi urugan atau timbunan tanah), yang masih berbentuk badan jalan tanah dengan panjang 476,00 Km atau sebesar 33,02%.

D. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

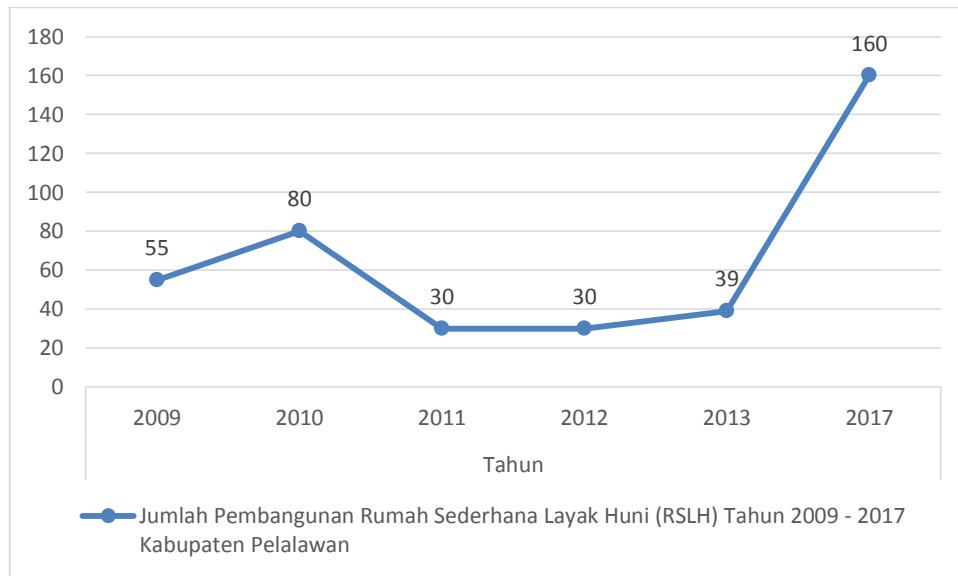
Luas permukiman Perkotaan di kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 mencapai 32.222 hektar. Kecamatan dengan luas permukiman terluas adalah di Kecamatan Pangkalan Kuras yang mencapai 2.752 hektar. Sedangkan permukiman terkecil berada di Kecamatan Langgam sekitar 591 Hektar. Persentase luas permukiman Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.30. Persentase Luas Permukiman Kabupaten Pelalawan yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2017 (Ha)

NO	Kecamatan	Luas Area Permukiman Perkotaan	Luas Area Permukiman Perdesaan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase
-1	-2	-3	-4	-5	$(6=5/(3+4))$
1.	Bandar Seikijang	1,125	288	NA	
2.	Pangkalan Kerinci	5,714	145	NA	
3.	Langgam	591	374	NA	
4.	Pelalawan	1,059	1,733	NA	
5.	Pangkalan Kurus	2,752	3,025	NA	
6.	Bunut	761	122	NA	
7.	Bandar Petalangan	1,911	100	NA	
8.	Pangkalan Lesung	1,157	431	NA	
9.	Ukui	2,979	1,445	NA	
10.	Kerumutan	1,147	388	NA	
11.	Teluk Meranti	1,755	840	NA	
12.	Kuala Kampar	722	1,658	NA	
	Jumlah	2090,599	2691,861		

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun selama ini di Kabupaten Pelalawan mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada Tahun 2009 jumlah pembangunan rumah layak huni sebanyak 55 rumah. Sempat meningkat menjadi 80 rumah pada tahun 2010 kemudian kembali turun pada tahun berikutnya menjadi 30 rumah. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana pembangunan rumah layak huni mencapai 160 rumah.



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2018

Gambar 3.27. Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2017 Kabupaten Pelalawan

E. Urusan Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan hidup manusia. Kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi manusia sejak lahir hingga meninggal, sehingga perlu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 membagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atas 26 jenis. Secara rinci jenis PMKS dan jumlahnya masing-masing di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.31. Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

NO	JENIS PMKS	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	anak					
2	Anak Terlantar	anak			350		
3	Anak yang Berhadapan dengan hukum	anak			-	41	60
4	Anak Jalanan	anak			-		
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	anak			95		
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	anak			16	1	1
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	anak				41	60
8	Lanjut Usia Terlantar	orang			578	7046	7046
9	Penyandang Disabilitas	orang			225	395	551
10	Tuna Susila	orang			12		
11	Gelandangan	orang					
12	Pengemis	orang					
13	Pemulung	orang			-		
14	Kelompok Minoritas	orang			-		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasayakatan (BWBLP)	orang					
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	orang					
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	orang					
18	Korban Trafficking	orang			-		
19	Korban Tindak Kekerasan	orang					
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	orang			20		
21	Korban Bencana Alam	KK			482		
22	Korban Bencana Sosial	orang			19		
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	orang					
24	Fakir Miskin	KK			12,070		
25	Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	KK			10		
26	Komunitas Adat Terpencil	KK			150	36	

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Pelalawan 2021

Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta ke depan Dinas Sosial secara konsisten dan kontinyu melakukan review terhadap Indikator Kinerja

Utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Selama kurun waktu 2019, Bantuan terhadap PMKS di Kabupaten Pelalawan tahun sebesar 10,39% yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.32. Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan

No	Kecamatan	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Yang memperoleh Bantuan	%
1	Langgam	5	2	40
2	Pangkalan Kerinci	40	2	5
3	Bandar Sei Kijang	3	2	66,67
4	Pangkalan Kuras	12	2	16,67
5	Ukui	3	2	66,67
6	Pangkalan Lesung	3	2	66,67
7	Bunut	7	2	28,57
8	Pelalawan	111	2	1,8
9	Bandar Petalangan	5	2	40
10	Kuala Kampar	31	2	6,45
11	Kerumutan	5	2	40
12	Teluk Meranti	6	2	33,33
Jumlah		231	24	10,39

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan 2020

F. Tenaga kerja

Urusan layanan wajib non dasar tenaga kerja dianalisis melalui indikator-indikator berikut, yaitu: (i) angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, (ii) besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian, (iii) besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, (iv) keselamatan dan perlindungan, (v) besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat, (vi) Rasio lulusan S1/S2/S3.

Tabel 3.33. Perkembangan Indikator-Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2019

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun	25	50	74	61	65
2	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	16	28	32	22	29
3	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	624	257	448	261	281
4	Keselamatan dan Perlindungan	235	262	NA	-	-
5	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	16	NA	67	28	32

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Persentase Penduduk usia 25 Tahun keatas menurut Pendidikan yang ditamatkan (S1/S2/S3)	3,36	5,63	5,53	7,35	4,94

Sumber: Disnaker Kab. Pelalawan (2020)

Selama Periode 2015 – 2019, angka sengketa pengusaha - pekerja di Kabupaten Pelalawan memiliki trend berfluktuatif meningkat menjadi 74 kasus pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan menurun menjadi 61 kasus, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 65 kasus. Sengketa pengusaha - pekerja yang paling dominan terjadi adalah sengketa dalam PHK dan permasalahan hak dan kepentingan lainnya. Angka sengketa yang berfluktuatif dari tahun ketahun ini, sangat dipengaruhi oleh perangkat Lembaga serikat kerja yang dimiliki oleh perusahaan, dimana jika perangkat serikat kerja berfungsi dengan baik, maka perselisihan yang ada bisa diselesaikan secara internal tanpa harus di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.

Pada periode yang sama, besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama juga memiliki trend. Secara umum capaian besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama relatif kecil, kecuali pada tahun 2017 yang relatif cukup tinggi yaitu sebanyak 32 kasus yang dapat diselesaikan oleh mediator melalui perjanjian Bersama antara para pihak yang bersengketa. Jika dilihat pada tahun 2018, seiring dengan menurunnya jumlah kasus yang terdaftar, jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 22 kasus. Demikian juga pada tahun 2019, sebanyak 29 kasus dapat diselesaikan melalui Persetujuan Bersama oleh para pihak. Kondisi ini tidak terlepas dari kapasitas dan kapabilitas aparat ketenagakerjaan yaitu mediator dalam menjembatani setiap kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat dan penegakan aturan perlu terus ditingkatkan.

Selama periode 2015 – 2019, besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan memiliki trend berfluktuatif meningkat dan tahun 2019 menjadi 281 orang. Berfluktuatifnya besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu peluang kerja yang memang cenderung terbatas sebagai akibat kondisi perkembangan ekonomi disamping kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja yang belum dapat dipenuhi oleh pencari kerja.

G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode 2013 – 2019, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah memiliki trend berfluktuatif menurun, yaitu dari 29,01% pada tahun 2013 menurun menjadi 6.27 % pada tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 3.86 % pada tahun 2019. Penurunan persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerinthan di Kabupaten Pelalawan yang cenderung menurun lebih bersifat alami dan sesuai tuntutan perkembangan. Namun demikian, upaya terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai rasio 30% sebagaimana halnya kuota perempuan di DPRD perlu terus diupayakan.

Tabel 3.34. Perkembangan Indikator-Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 -2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	27.09	29.02	6.27	6.27	3.86
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5.71	5.71	5.71	5.71	0
3	Rasio KDRT	0.24	0.27	0.21	0.21	0.000056
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45.43	45.43	82.69	82.69	92.97

Sumber : DP3AP2KB Kab. Pelalawan (2020)

Pada periode 2015-2019, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten pelalawan relatif konstan pada level 5,71% atau 2 orang anggota DPRD dari total 35 orang anggota DPRD Kabupaten pelalawan tahun 2014 – 2019. Kedua anggota legislatif ini berasal dari Fraksi Golkar. Capaian proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD pada periode 2014 – 2019 ini relatif di bawah kuota yang ditetapkan yaitu sebesar 30%. Pada periode 2019-2024, tidak ada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, upaya mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten pelalawan perlu terus ditingkatkan, mengingat salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selama periode 2015 – 2019, rasio KDRT di kabupaten Pelalawan cenderung meningkat. Pada tahun 2013, rasio KDRT sebesar 0,02 yang bermakna terjadi KDRT sebesar 0,02% dari total rumah tangga di kabupaten Pelalawan (93.146 RT) atau 1.863 kasus KDRT. Pada tahun 2015, rasio KDRT meningkat menjadi 0,24% dari total rumah tangga di Kabupaten Pelalawan (103.164 RT) atau sebanyak 24.759 kasus KDRT dan menurun rasionya menjadi 0,21% dengan kasus KDRT sebanyak 23.342 kasus. Sedangkan pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah kasus KDRT.

Hal yang cukup penting dari indikator pemberdayaan perempuan adalah partisipasi angkatan kerja. Selama periode 2015 – 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat. Capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 yaitu sebesar 82,69% jauh melebihi angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 68,06% pada tahun 2017. Sedangkan Tahun 2019, terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Kondisi ini memberi makna bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibanding partisipasi angkatan kerja laki-laki.

H. Pangan

1) Perkembangan Rasio Beras, Jagung dan Kedelai

Perkembangan rasio pangan yang diuraikan meliputi perkembangan rasio beras, jagung, Kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, daging dan ikan. Rasio dihitung dari perbandingan antara produksi dengan kebutuhan di Kabupaten Pelalawan dan menurut Kecamatan.

Pada Tabel dibawah menerangkan bahwa produksi beras di Kabupaten Pelalawan memiliki trend menurun yaitu dari 27.540 ton pada Tahun 2012 menjadi 21.697,16 ton pada Tahun 2017. Kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 4,07% per tahun selama periode 2010 – 2014 dengan target konsumsi berkisar antara 94,40/kg/tahun – 99,3 kg/kg/tahun. Selama periode 2012 – 2017, kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan sebesar 34.909 ton pada Tahun 2012, meningkat menjadi 46.217 ton Tahun 2017. Selama

periode ini, Kabupaten Pelalawan mengalami defisit beras dengan tren terus membesar yaitu dari 34.909 ton pada Tahun 2012 menjadi 46.217 ton Tahun 2017. Selama periode ini rasio produksi terhadap konsumsi beras di Kabupaten Pelalawan bergerak dari 0,79 – 0,39 dengan kategori defisit. Rasio beras sebesar 0,79 berarti bahwa produksi beras Kabupaten Pelalawan hanya mencukupi sebesar 21% dari kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Pelalawan, sisanya sebesar 0,79 (79%) harus didatangkan dari luar Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan yang memiliki potensi lahan sawah dan lahan kering yang cukup luas untuk budidaya tanaman padi. Pengembangan lahan potensial untuk tanaman padi sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk berswasembada pangan bahkan berkedaulatan pangan.

Tabel 3.35. Perkembangan Rasio Produksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung dan Kedelai di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Komoditas	Tahun (Ton)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi						
	a. Beras	27,540	26,684	23,905	21,515	30,113	18,186
	b. Jagung	1,542	1,566	1,543	1,358	7,013	3,496
	c. Kedelai	0.10	2.30	1.00	1.00	-	2.10
2	Kebutuhan						
	a. Beras	34,909	35,412	36,156	37,079	41,865	46,217
	b. Jagung	821	883	968	1,006	366	334
	c. Kedelai	2,856	3,162	3,561	3,891	2,524	2,880
3	Rasio						
	a. Beras	0.79	0.75	0.66	0.58	0.71	0.39
		defisit	defisit	defisit	defisit	defisit	defisit
	b. Jagung	1.88	1.77	1.59	1.35	19.16	10.46
		surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus
	c. Kedelai	0.00004	0.00073	0.00028	0.00026	-	-

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Meski Kabupaten Pelalawan selama periode 2012 – 2017 defisit beras, namun menurut kecamatan ternyata ada 1 kecamatan yang sangat surplus beras yaitu kecamatan Kuala Kampar. Pada Tahun 2017, kecamatan Kuala kampar memproduksi beras sebesar 19.948,01 ton dengan konsumsi sebesar 1.998,69 ton sehingga terdapat kelebihan sebesar 17.949,31 ton. Pada Tahun 2017, rasio produksi terhadap konsumsi beras di Kecamatan Kuala Kampar sebesar 9,98 dengan kategori surplus. Kelebihan produksi beras di Kecamatan Kuala Kampar inilah yang menutupi defisit beras di Kabupaten Pelalawan.

Apabila komoditas beras dan kedelai di Kabupaten Pelalawan terkategori defisit, namun untuk komoditas jagung justru sebaliknya. Selama periode 2012 – 2017, produksi jagung di Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat yaitu dari 1.542 ton pada Tahun 2012 menjadi 3.496 ton pada Tahun 2017. Sebaliknya, meski konsumsi jagung relatif kecil namun trennya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, yaitu sebesar 821 ton pada Tahun 2012 menjadi 1.006 ton pada Tahun 2015 (target 2,2 kg/kap/tahun pada Tahun 2011 – 2,6 kg/kap/tahun pada Tahun 2015), dan tren menurun menjadi 334 ton pada tahun 2017 target 2,2 kg/kap/tahun pada Tahun 2011 – 2,6 kg/kap/tahun pada Tahun 2017). Selama periode ini, Kabupaten Pelalawan surplus jagung sebesar 721 ton pada Tahun 2012 dan naik menjadi 3.162 ton pada Tahun 2017, hal ini

dikarenakan konsumsi jagung dimasyarakat berkurang selama periode tersebut. Selama periode ini, rasio jagung di Kabupaten Pelalawan sebesar 1,88 - 10,46 dengan kategori Surplus sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.36. Rasio Poduksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Kebutuhan (Ton)		
1	Langgam	-	47.50	-	3,377.57	24.41	27.46
2	Pangkalan Kerinci	-	8.75	-	12,815.07	92.61	104.19
3	Bandar Seikijang	-	45.00	-	3,719.41	26.88	30.24
4	Pangkalan Kuras	197.75	-	2.00	6,515.36	47.08	52.97
5	Ukui	9.83	27.50	0.10	4,346.41	31.41	35.34
6	Pangkalan Lesung	-	-	-	3,500.78	25.30	28.46
7	Bunut	162.44	7.50	-	1,699.80	12.28	13.82
8	Pelalawan	139.44	12.50	-	2,161.97	15.62	17.58
9	Bandar Petalangan	170.74	10.00	-	1,571.39	11.36	12.78
10	Kuala Kampar	19,948.01	3,000.00	-	1,998.69	14.44	16.25
11	Kerumutan	-	55.00	-	2,623.48	18.96	21.33
12	Teluk Meranti	1,068.95	282.83	-	1,887.10	13.64	15.34
Total		21,697.16	3,496.58	2.10	46,217.03	334.00	375.75

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan (2018)

Meski komoditas jagung di Kabupaten Pelalawan terkategori surplus, ternyata produksi jagung hanya terkonsentrasi didua kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar. Kedua kecamatan ini memproduksi jagung lebih besar dari konsumsi di kecamatan tersebut, dimana rasio produksi jagung di Kecamatan Teluk Meranti sebesar 20,74 dan 207,70 di Kecamatan Kuala Kampar. Rasio antara produksi dengan konsumsi jagung di kedua kecamatan ini terkategori surplus dan mensuplai jagung ke kecamatan lainnya di Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya.

Kedelai merupakan salah satu komoditas yang belum diusahakan di Kabupaten Pelalawan meski konsumsi kedelai terus meningkat. Selama periode 2012 – 2017, produksi kedelai di Kabupaten Pelalawan tercatat hanya sebesar 0,10 ton pada Tahun 2012 dan naik menjadi 2,10 ton pada Tahun 2017. Disisi lain, pada periode yang sama, konsumsi kedelai terus meningkat yaitu dari 2.856 ton pada Tahun 2012 menjadi 2.880 ton pada Tahun 2017 sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan target konsumsi (kebutuhan) kedelai yaitu 7,5 kg/kap/tahun Tahun 2011 menjadi 9,8 kg/kap/tahun. Rasio produksi terhadap konsumsi kedelai di Kabupaten Pelalawan terus mengecil yaitu dari 0,00004 pada Tahun 2012 menjadi 0,00072 pada Tahun 2017, yang kesemuanya terkategori defisit.

I. Pertanian

Wilayah Kabupaten Pelalawan seluas 1.392.494,29 hektar yang terdiri dari daratan seluas 1.282.181,47 hektar (92,08%) dan sungai/danau/laut/situ seluas 110.312,82 hektar (7,92%). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Teluk Meranti yaitu 30,45% dari total luas Kabupaten Pelalawan diikuti oleh Kecamatan Kuala kampar 10,79%, Kecamatan Pelalawan (10,76%) dan Kecamatan Langgam (10,36%). Kecamatan yang memiliki luas daratan terluas adalah Kecamatan juga Kecamatan Meranti yaitu 30,51% dari total luas daratan Kabupaten Pelalawan diikuti Kecamatan Langgam (11,11%), kecamatan

Kuala Kampar (11,47%) dan Kecamatan Pelalawan (10,08%). Selama periode 2011 – 2015, luas wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kecamatannya berdasarkan pengelompokan daratan dan sungai/danau/laut/situ tidak mengalami perubahan. Secara rinci kondisi luas wilayah Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.37. Perkembangan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 – 2017

	Kecamatan	Daratan (Ha)	Sungai/Dana/ Laut/Situ (Ha)	Total (Ha)	(%)
1	Langgam	142.396	1.849	144.245,09	10,36
2	Pangkalan Kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39
3	Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
4	Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50
5	Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33
6	Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
7	Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
8	Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
9	Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
10	Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
11	Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
12	Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45
	2017	1.315.579,44	110.312,82	1.382.210,00	100,00
	2016	1.315.579,44	110.312,82	1.382.210,00	100,00
	2015	1.315.579,44	110.312,82	1.382.210,00	100,00
	2014	1.315.579,44	110.312,82	1.382.210,00	100,00
	2013	1.315.579,44	110.312,82	1.382.210,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan (2018)

Selama periode 2012 – 2016, penggunaan tanah di Kabupaten Pelalawan adalah hutan rawa yaitu seluas 641.801,97 hektar atau 52,04% dari total luas wilayah Kabupaten Pelalawan diikuti penggunaan tanah untuk kebun kelapa sawit (24,02%), hutan lebat (12,37%), hutan belukar (4,83%), kebun karet (2,82%), hutan akasia (1,50%) dan kebun kelapa (1,82%). Penggunaan tanah untuk kampung, kebun campuran dan hutan bakau dibawah 1%. Selama periode ini, berdasarkan data BPS Pelalawan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam penggunaan tanah di kabupaten Pelalawan. Bila penggunaan tanah ini dikomparasi dengan luas areal tanaman kelapa sawit, karet dan kelapa maka akan terlihat sekali perubahan penggunaannya.

Pada Tahun 2016, areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan seluas 366.928,24 hektar (perkebunan rakyat dan perkebunan besar) atau meningkat bertambah seluas 70.698,99 hektar dari penggunaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun yang sama (296.238,25 hektar). Disisi lain luas perkebunan karet menurun menjadi 26.415,90 hektar dari penggunaan tanah untuk karet yaitu seluas 34.799,81 hektar atau menurun seluas 8.383,91 hektar. Luas perkebunan kelapa menurun menjadi 16.668,14 hektar dari luas penggunaan tanah untuk kebun kelapa yaitu seluas 22.476,25 hektar atau menurun seluas 5.808,11 hektar. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 70.698,99 hektar dengan mengkonversi areal karet dan kelapa seluas 14.192,02 hektar. Perluasan lahan kelapa sawit ini selain mengkonversi lahan karet dan kelapa juga memanfaatkan tanah hutan rawa dan hutan belukar serta hutan belukar milik masyarakat dan hutan eks HPH. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar hutan produksi

terbatas HPH yang ada di Kabupaten Pelalawan telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit

J. Lingkungan Hidup

Kabupaten Pelalawan sampai dengan Tahun 2018 ini belum memiliki dokumen RPPLH dikarenakan dokumen RPPLH Provinsi Riau belum ada. Dokumen KLHS yang sudah sebanyak 3 dokumen yakni KLHS Penyusunan RPJPD Kabupaten Pelalawan, KLH Penyusunan RPJMD Kabupaten Pelalawan, dan KLHS RTRW Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan juga belum melakukan penilaian terhadap indeks kualitas lingkungan dikarenakan untuk melakukan kegiatan tersebut belum terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021.

Penanganan sampah di Pelalawan baru ditangani untuk wilayah perkotaan, Analisa timbulan sampah yang dapat dilayani berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah angkutan yang ada untuk Kota Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan SNI Untuk kota kecil (Pangkalan Kerinci), sampah yang dihasilkan : $81.393 \text{ jiwa} \times 0.6 \text{ kg/jiwa/hari} = 48.836 \text{ kg/hari}$ atau $48,84 \text{ ton/hari}$ atau $48,84 \text{ ton/hari} = 195,34 \text{ m}^3/\text{hari}$ $0,25 \text{ ton/ m}^3$. Jumlah volume sampah dan produksi sampah di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.38. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2017 di Kabupaten Pelalawan

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi Sampah / Hari (kg)	Produksi Sampah/ Tahun (Kg)
Pangkalan Kerinci Kota	35.451	21.270,60	7.763.769,00
Pangkalan Kerinci Timur	50.320	30.192,00	11.020.080,00
Pangkalan Kerinci Barat	5.830	3.498,00	1.276.770,00
Sorek Satu	15.118	9.070,80	3.310.842,00
Pangkalan Lesung	7.496	4.497,60	1.641.624,00
Ukui Satu	6.060	3.636,00	1.327.140,00

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

TPA di Kabupaten Pelalawan ada 3 lokasi yaitu TPA Kemang dengan luas 6 Ha dengan wilayah pelayanan IKK Pangkalan Kerinci, TPA Sorek dengan luas 2 Ha dengan wilayah pelayanan IKK Pangkalan Kuras serta TPA Ukui dengan luas 1,5 Ha dengan wilayah pelayanan IKK Ukui dan IKK Pangkalan Lesung.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan masih pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe). Dari timbulan sampah dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara), bin container, tong/tempat sampah, lalu diangkut dengan dumptruck dan amroll langsung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan sistem open dumping. Sistem Sanitary Landfill di TPA Kemang belum dioperasikan secara optimal, karena masih proses melengkapi infrastruktur pelengkapannya. Data pelayanan penanganan persampahan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.39. Data Pelayanan Penanganan Persampahan Tahun 2017

No.	Wilayah Pelayanan Persampahan	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan	Timbulan Sampah/ Tahun	Timbulan Sampah Terangkut/ Tahun	%	Nama TPA
		(Jiwa)	(kg)	(kg)		
1.	Pangkalan Kerinci	91.601	20.896.478,13	12.002.677,00	57,44	TPA Kemang
2.	Pangkalan Kuras	15.118	3.310.842,00	2.112.000,00	63,79	TPA Sorek
3.	Ukui	6.060	1.327.140,00	1.056.000,00	79,56	TPA Ukui
4.	Pangkalan Lesung	7.496	1.641.624,00	-	-	TPA Ukui
	Jumlah	120.275	26.340.225	15.170.677	57,60	

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Hal ini disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahun, ketersediaan armada pengangkut sampah, personil dan sarana pendukung lainnya sehingga untuk 1 (satu) tahun timbulan sampah untuk wilayah Pangkalan Kerinci adalah 20.896.478,13 kg/tahun atau 20.896,47 ton/tahun yang mana sampah yang terangkut 12.002.677 kg/tahun atau 12.002,67 ton/tahun atau sebesar 57,44%, sedangkan untuk wilayah Pangkalan Kuras adalah 3.310.842 kg/tahun atau 3.310,84 ton/tahun yang mana sampah yang terangkut 2.112.000 kg/tahun atau 2.112 ton/tahun atau sebesar 63,79%, dan untuk wilayah Ukui adalah 1.327.140 kg/tahun atau 1.327,14 ton/tahun yang mana sampah yang terangkut 1.327.140 kg/tahun atau 1.327,14 ton/tahun atau sebesar 79,56%, serta untuk wilayah Pangkalan Lesung adalah 1.641.624. kg/tahun atau 1.641,62 ton/tahun yang mana sampah yang terangkut tidak karena ketiadaan armada, personil dan sarana pendukung lainnya atau sebesar adalah 1.327.140 kg/tahun atau 1.327,14 ton/tahun yang mana sampah yang terangkut 1.327.140 kg/tahun atau 1.327,14 ton/tahun atau sebesar 0,00%. Bank sampah di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.40. Bank Sampah di Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Kegiatan 3R (Reuse,Reduce,Recycle)	Lokasi	Volume Sampah yang Dikurangi Melalui Kegiatan 3R (Kg)
1	Reuse dan Recycle Waste di TPA Kemang	Desa Kemang	355.538
2	Komposter Perkotaan	Kel.Pkl.Kerinci Barat	10.800
3	Bank Sampah Permata Bunda	Kel.Pkl.Kerinci Timur	5.304
4	Bank Sampah Asri	Desa Air Mas	25.00
5	Bank Sampah Mandiri	Desa Sari Makmur Kec.Pkl,Lesung	18,427
6	Bank Sampah Green Medika	Kel.Pkl.Kerinci Kota	10.564
7	Bank Sampah Mandi	DEsa Air Hitam Kec.Ukui	5.231
8	Bank Sampah Drynata Sehati	Kel.Ukui.Satu Kec.Ukui	5.000
9	Bank Sampah Pelita Harapan	DEsa Kampung Baru	5.000
10	Recycle Domestic Waste PT.RAPP	Kel.Pkl.Kerinci Timur	504.234

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa realisasi pengurangan sampah didapat dari data volume sampah yang di kurangi melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) seperti Bank Sampah, Rumah Kompos, Fasilitas Daur Ulang Sampah (Recycle), dan Proses Guna Ulang (Reuse). Jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah maka pengurangan sampah yang dapat dicapai sebesar 945.098,00 kg atau 945,1 ton atau sebesar 3,59%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya Bank Sampah dalam mengelola kegiatan 3R, belum meratanya cakupan pelayanan Bank Sampah di seluruh wilayah permukiman masyarakat, serta sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi untu operasina Bank Sampah.

a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

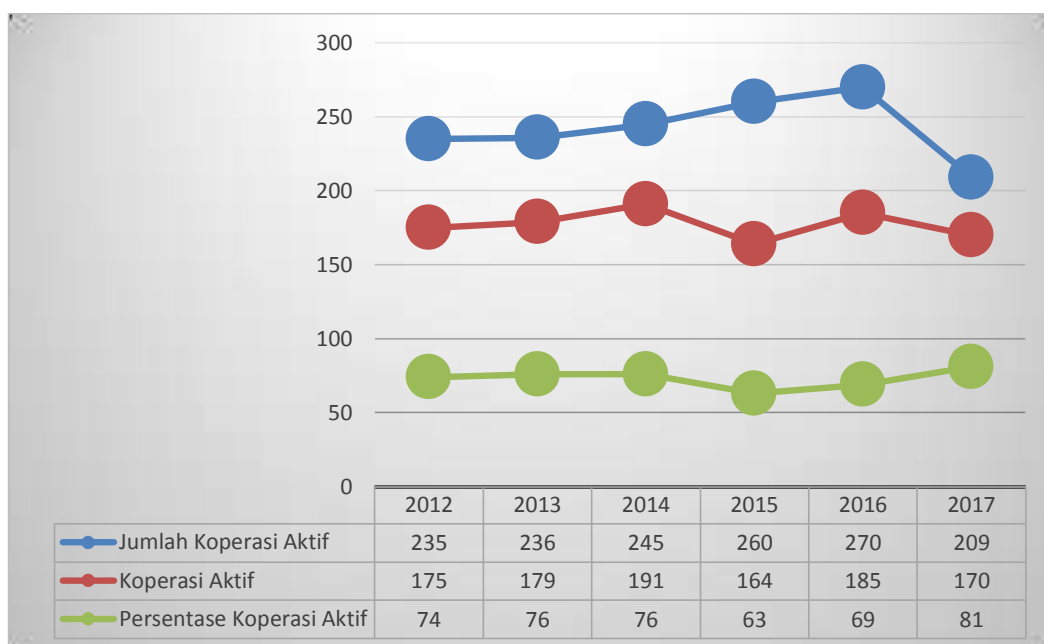
Eksistensi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) telah terbukti ketangguhannya ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi Tahun 2008. Pada masa itu sebagian besar usaha menengah dan besar *collaps*, sedangkan KUKM masih tumbuh dan menjadi penopang perekonomian Nasional.

Kondisi koperasi dan usaha mikro dan kecil dapat sebagai gambaran tentang tingkat kekokohan pondasi ekonomi Kabupaten Pelalawan. Tabel berikut menyajikan jumlah koperasi, koperasi aktif, persentase koperasi aktif 2012-2017 Kabupaten Pelalawan.

Tabel 3.41. Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2017 Kabupaten Pelalawan

Data Koperasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi	235	236	245	260	270	209
Koperasi Aktif	175	179	191	164	185	170
Persentase Koperasi Aktif	74	76	76	63 %	69%	81%

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.28. Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2012-2017 Kabupaten Pelalawan

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dan koperasi aktif di Kabupaten Pelalawan meningkat secara persisten. Jumlah koperasi meningkat dari 235 unit pada Tahun 2012 menjadi 270 unit pada Tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017 Jumlah koperasi aktif turun menjadi 209 unit.. Berdasarkan data fakta ini dapat dinyatakan bahwa terjadi perkembangan jumlah koperasi dan koperasi aktif di Kabupaten Pelalawan, namun jumlah koperasi tidak aktif masih cukup tinggi, yakni 22%.

Disamping koperasi, di Kabupaten Pelalawan juga tumbuh dan berkembang industri kecil. Perkembangan jumlah industri kecil tidak sepesat perkembangan koperasi. Dari Tabel berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah industri kecil di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dari 348 unit pada Tahun 2011 menjadi 437 pada Tahun 2013. Seiring dengan peningkatan jumlah industri kecil, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Nilai investasi industri kecil meningkat dari 7,08 milyar pada Tahun 2011 menjadi 8,52 milyar pada Tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja industri kecil meningkat dari 1.450 orang menjadi 1.735 orang.

Tabel 3.42. Jumlah Industri Kecil, Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2011-2013 di Kabupaten Pelalawan

Tahun	Jumlah Industri (Unit)	Investasi (Rp Ribu)	Jumlah Tenaga (Orang)
2011	348	7,083,811	1,450
2012	409	7,336,866	1,609
2013	437	8,522,788	1,735

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

K. Persandian

Perkembangan Persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih belum maksimal. Persandian hanya digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan.

L. Kebudayaan

Untuk capaian indikator sasaran terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa, dari seluruh indikator hanya jumlah penyelenggaraan festival selama Tahun 2014 adalah sebanyak 7 kali penyelenggaraan yang memenuhi target RPJMD. Sementara itu untuk prestasi budaya melayu yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah 1 kali dara pelalawan menjadi juara pemilihan dara tingkat Provinsi Riau. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini hanya 1 atau 25% dari target RPJMD yang ditetapkan sebanyak 4 kali. Di masa datang untuk meningkatkan capaian adalah dengan lebih banyak masyarakat Pelalawan difasilitasi mengikuti kegiatan/kejuaran baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Sedangkan jumlah grup/sanggar kesenian yang terdaftar di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sampai 2014 tercatat 13 grup. Jumlah tersebut masih jauh dari target sebanyak 336 sanggar. Jumlah panggung kesenian yang ada di Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 unit (target akhir RPJMD sebanyak 2 unit. Untuk benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan pendataan situs dan cagar budaya di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pendataan tersebut terdapat 48 situs yang dilestarikan, sementara target akhir RPJMD adalah sebanyak 57 situs. Pelayanan pada aspek kebudayaan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut.

Tabel 3.43. Penyelenggaraan festival seni dan budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya serta Group Kesenian dan Gedung Kesenian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	Realisasi					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kebudayaan						
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	5,00	7	6	4	4
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0,00	0,00	6	7	7	9
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	14,19	46,00	48	22	22	22
Jumlah Grup Kesenian (kelompok)	17,00	20,00	13	38	38	38
Jumlah gedung kesenian (unit)	2,00	2,00	1	3	3	3

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Di Kabupaten Pelalawan ada 4 pusat kebudayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut yakni Pusat Budaya Danau Betung; Gedung Sanggar Seni Perawitas Ngesti Budoyo Desa Surya Indah (di Pangkalan Kuras), dan Pentas dan Budaya Piso Suret; Balai Pelatihan Seni (Pangkalan Kerinci). Sarana kebudayaan lainnya adalah 2 gedung budaya, yaitu Datuk Demang Serail (DDS) di Pangkalan Kuras dan Gedung Budaya/Kesenian Maharajo Dindo di Bunut. Ada juga Ruang Publik Kreatif Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci dan Lapangan Bola Kaki di Pangkalan Kerinci. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya yang setiap tahun rutin diadakan sejak 2014 adalah Seni Budaya Etnis di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Tabel 3.44. Pusat Kebudayaan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Pusat Kebudayaan	Kecamatan
1	Danau Betung	Pangkalan Kuras
2	Pentas dan Budaya Piso Suret	Pangkalan Kerinci
3	Gedung Sanggar Seni Perawitas Ngesti Budoyo Desa Surya Indah	Pangkalan Kuras
4	Balai Pelatihan Seni	Pangkalan Kuras

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

3.1.4.2 Layanan Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pelalawan salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan yang besar. Kabupaten Pelalawan memiliki sekitar 197 sungai dengan luas 24.628 hektar dan panjang 1.821,70 Km. Sungai-sungai yang ada ini memiliki potensi sebagai daerah penangkapan ikan seluas 9.233,90 hektar dan potensi sebagai kawasan budidaya perikanan seluas 189,31 hektar. Potensi sungai sebagai kawasan budidaya ini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi kawasan sungai sebagai tempat penangkapan ikan terluas ada di Kecamatan Kerumutan, diikuti di Kecamatan Pelalawan, Langgam dan Pangkalan Kerinci. Potensi sungai sebagai kawasan budidaya (keramba) terbesar ada di Kecamatan Teluk Meranti diikuti di Kecamatan Langgam, Pelalawan, Kerumutan dan Pangkalan Kerinci. Perlu dicatat bahwa kawasan penangkapan ikan ini telahpun diakses oleh penduduk luar Pelalawan baik sekedar hobbi maupun sebagai mata pencaharian.

Tabel 3.45. Sungai dan Potensi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Kecamatan	Jumlah	Luas	Panjang	Potensi (Ha)	
					Penangkapan	Budidaya (Keramba)
1	Langgam	39	386,45	348,00	135,00	44,99
2	Pangkalan Kerinci	16	334,40	75,70	100,50	13,40
3	Bandar Sei Kijang	-	-	-	-	-
4	Pangkalan Kuras	13	298,00	225,00	82,20	9,40
5	Ukui	19	167,40	169,00	61,60	6,70
6	Pangkalan Lesung	5	51,10	77,00	16,00	0,50
7	Bunut	9	65,40	98,00	15,00	1,00
8	Pelalawan	39	785,90	253,50	126,60	16,00
9	Bandar Petalangan	-	-	-	-	-
10	Kuala Kampar	35	8.206,10	99,50	82,20	0,20
11	Kerumutan	7	1,12	103,00	392,70	14,90
12	Teluk Meranti	15	24.628,95	373,00	8.222,10	82,22
	2017	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31
	2016	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31
	2015	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31
	2014	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31
	2013	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31
	2012	197	34.924,82	1.821,70	9.233,90	189,31

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Disamping kawasan sungai, Kabupaten Pelalawan juga memiliki potensi perikanan dari kawasan danau. Jumlah danau yang memiliki potensi perikanan sebanyak 54 danau dengan luas 904,42 hektar. Danau yang memiliki potensi sebagai kawasan penangkapan seluas 800,60 hektar, dimana terluas ada di Kecamatan Teluk Meranti diikuti di Kecamatan langgam, Pangkalan Kerinci dan Pelalawan. Danau yang memiliki potensi sebagai kawasan budidaya keramba seluas 29,50 hektar dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti diikuti kecamatan Langgam, dan Pangkalan Kerinci.

Tabel 3.46. Danau dan Potensi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Kecamatan	Jumlah	Luas	Potensi (Ha)	
				Penangkapan	Budidaya (Keramba)
1	Langgam	21	66,50	60,00	7,00
2	Pangkalan Kerinci	8	54,92	59,80	5,50
3	Bandar Sei Kijang	-	-	-	-
4	Pangkalan Kuras	7	11,50	1,40	1,20
5	Ukui	7	5,50	1,50	0,20
6	Pangkalan Lesung	3	3,00	0,50	0,30
7	Bunut	2	6,50	4,00	0,20
8	Pelalawan	1	25,00	15,00	1,50
9	Bandar Petalangan	-	-	-	-
10	Kuala Kampar	-	-	-	-
11	Kerumutan	-	-	-	-
12	Teluk Meranti	5	731,50	658,40	13,60
	2017	54	904,42	800,60	29,50

No	Kecamatan	Jumlah	Luas	Potensi (Ha)	
				Penangkapan	Budidaya (Keramba)
	2016	54	904,42	800,60	29,50
	2015	54	904,42	800,60	29,50
	2014	54	904,42	800,60	29,50
	2013	54	904,42	800,60	29,50
	2012	54	904,42	800,60	29,50

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Potensi perikanan yang besar baik di kawasan laut, sungai dan danau ini, penangkapan ikan menggunakan sebanyak 1.297 pompong dan 1.716 sampan/perahu. Armada pompong terbesar ada di Kecamatan Teluk Meranti diikuti di Kecamatan Pelalawan, Langgam dan Kuala Kampar. Armada sampan/perahu terbanyak ada di Kecamatan Teluk meranti diikuti di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pelalawan.

Tabel 3.47. Produksi Perikanan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Kecamatan	Perikanan Laut + Budidaya	Perairan Umum	Tambak	Kolam	Keramba	Jumlah
1	Langgam	-	321,13	-	812,27	651,10	1.784,50
2	Pangkalan Kerinci	-	292,56	-	1.003,75	583,56	1.879,87
3	Bandar Sei Kijang	-	-	-	219,87	-	219,87
4	Pangkalan Kuras	-	237,06	-	1.950,69	259,83	2.447,58
5	Ukui	-	213,65	-	1.179,85	-	1.393,50
6	Pangkalan Lesung	-	29,82	-	381,69	-	411,51
7	Bunut	-	29,02	-	325,69	-	354,71
8	Pelalawan	-	435,22	-	329,89	392,2	1.157,31
9	Bandar Petalangan	-	107,34	-	220,73	-	328,07
10	Kuala Kampar	3.597,67	-	0,28	0,50	-	3.598,45
11	Kerumutan	-	229,80	-	173,00	-	402,80
12	Teluk Meranti	-	869,00	-	98,00	37,00	1.004,00
	2017	3.597,67	2.764,60	0,28	6.695,93	1.923,69	14.982,17
	2016	3.847,00	2.812,98	0,38	6.466,31	1.923,69	15.050,36
	2015	3.507,55	2.803,91	0	5.762,89	1.181,76	13.256,11
	2014	3.919,50	2.319,00	-	5.762,89	1.181,76	13.183,15
	2013	3.645,60	2.133,30	-	3.790,22	2.467,43	12.036,55
	2012	3.818,70	2.006,70	1.429,00	3.374,00	2.423,00	11.751,40

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Produksi perikanan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 sebesar 14.982,17. Produksi perikanan terdiri atas produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya sebesar 8.619,90 ton tahun dan produksi perikanan tangkap sebesar 6.362,27. Produksi perikanan budidaya tahun 2017 sebesar 8.619,90 ton, tahun atau 99,94 % mendekati target yang ditetapkan sebesar 8.825,00 ton/tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 6.362,27 ton/tahun atau 99,41 % mendekati target yang ditetapkan sebesar 6.400,00 ton/ tahun.

Perikanan laut dan budidaya diproduksi oleh nelayan di Kuala Kampar saja. Perikanan perairan umum dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti, Kerumutan dan Pelalawan. Perikanan kolam diproduksi oleh nelayan oleh semua nelayan dikecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Ikan keramba diproduksi oleh nelayan di Kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Pangkalan Kuras dan Teluk Meranti.

Tabel 3.48. Perkembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Produksi perikanan (Ton)	11.751,40	12.090,55	13.183,85	14.001,46	15.050,36	14.982,17
2	Produksi perikanan budidaya (Ton)	5.926,00	6.311,65	6.944,65	7.690,00	8.390,38	8.619,90
3	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	5.825,40	5.778,90	6.239,20	6.311,46	6.659,98	6.362,27
4	Proporsi tangkapan ikan di Perairan Umum	2.006,68	2.133,30	2.319,70	2.803,91	2.812,98	2.764,60
5	Proporsi tangkapan ikan di perairan laut	3.818,72	3.645,60	3.919,50	3.507,55	3.847,00	3.597,67
6	Konsumsi ikan (Kg / Kapita / Tahun)	31,62	32,53	34,28	34,59	40,84	40,96
7	Cakupan bina kelompok nelayan (Kelompok)	48,00	86,00	129,00	187,00	217,00	0,00
8	Nilai Tukar Perikanan (NTP)	90,19	102,05	104,43	105,64	109,49	112,94
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)				109,80	117,43	120,34
10	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)				101,48	101,54	105,53

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa capaian produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 memperlihatkan trend positif, dimana pada tahun 2012 Produksi Perikanan sebesar 11.751,40 Ton dan pada tahun 2016 sebesar 14.981,50 Ton.

Produksi perikanan tersebut terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap terdiri dari proporsi tangkapan ikan di perairan umum dan perairan laut. Produksi perikanan budidaya dari tahun 2012 sampai

tahun 2017 terlihat terjadi peningkatan produksi, sementara produksi perikanan tangkap dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan produksi, tetapi di tahun 2017 terjadi penurunan, penurunan produksi perikanan tangkap dipengaruhi faktor musim cuaca, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang masih tradisional serta masih adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

3.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

3.1.5.1. Potensi Sumberdaya dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, Pertambangan, industri dan kawasan budidaya perikanan.

A. Pertambangan

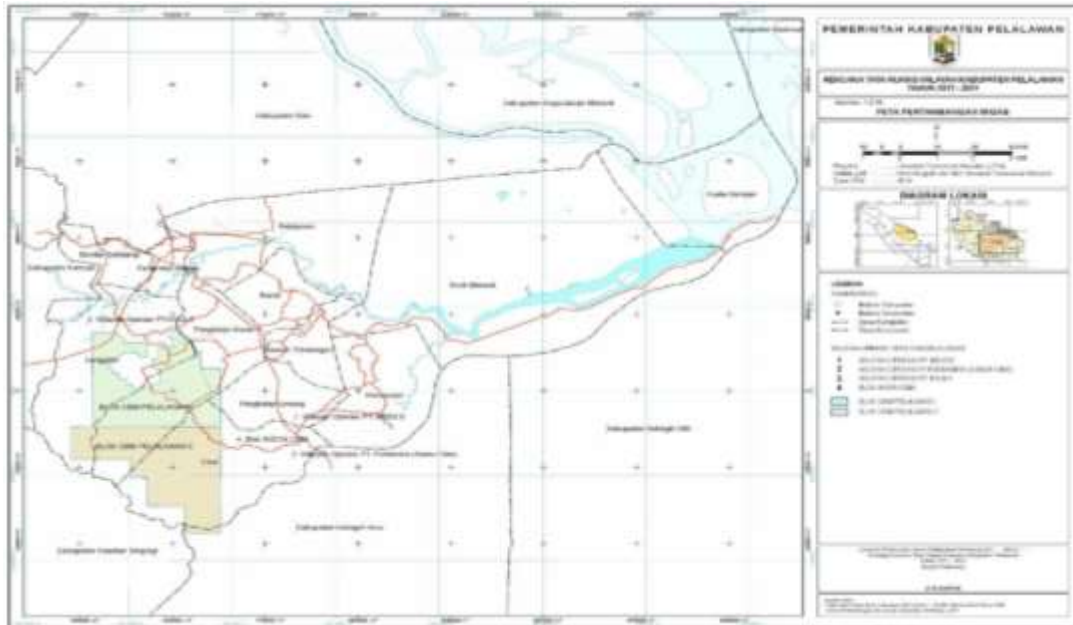
Potensi pertambangan di Kabupaten Pelalawan antara lain: minyak dan gas alam (migas) dan batubara (minerba) dan galian C. Namun sampai saat ini beberapa potensi pertambangan ini belum dikelola secara maksimal antara lain disebabkan kandungan potensinya belum mencapai nilai ekonomis. Potensi pertambangan yang belum dikelola ini berdampak kepada kecilnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Nilai Produk Domestik Regional Pertambangan (PDRB) yakni baru sebesar 1,98% pada Tahun 2017.

Minyak dan Gas bumi (Migas)

Pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Pelalawan terdiri atas pertambangan yang beroperasi hingga saat ini meliputi :

- a. Wilayah operasi PT Medco yang terletak di Kecamatan Kerumutan dan sekitarnya.
- b. Wilayah operasi PT Pertamina (Sumur Nira) yang terletak di Kecamatan Ukui dan sekitarnya.
- c. Wilayah operasi PT Kalila, yang terletak di Kecamatan Langgam dan sekitarnya.

Sementara lokasi pertambangan migas yang berada dalam proses pelelangan dikenal dengan; (i) Blok CBM Pelalawan I (di bagian utara), yang terkena dengan wilayah kecamatan- kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, dan Pangkalan Lesung. (ii) Blok CBM Pelalawan II (di bagian selatan), yang terkena dengan wilayah kecamatan- kecamatan: Ukui, Pangkalan Kuras, dan Langgam. Khusus untuk Blok CBM Pelalawan II ini terdapat Taman Nasional Tesso Nilo. Letak atau lokasi kegiatan dan potensi pertambangan migas di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada Gambar berikut.



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.29. Peta Pertambangan di Kabupaten Pelalawan

B. Mineral dan batubara (Minerba)

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Minerba di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan Gambar berikut ini.



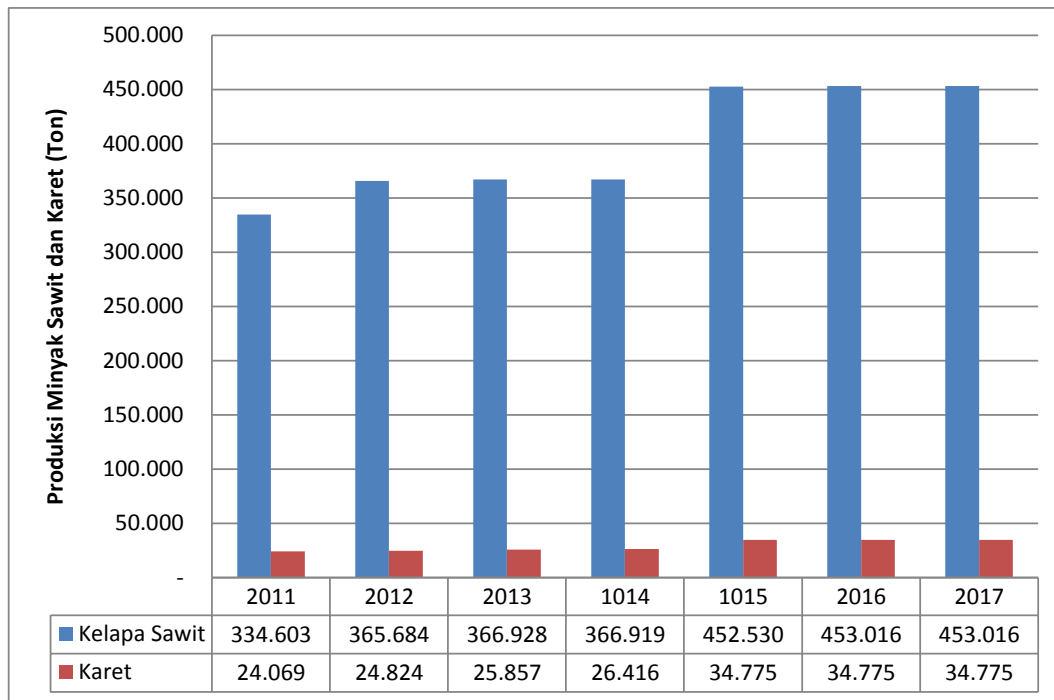
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.30. Peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Minerba di Kabupaten Pelalawan

C. Industri

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu sentra produksi minyak sawit (CPO) dan karet alam di Provinsi Riau. Produksi minyak sawit Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat yaitu dari 334.603 ton pada Tahun 2011 meningkat menjadi 453.016 juta ton

pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,42 per tahun. Pada masa yang sama, produksi karet alam (KKK) juga meningkat, yaitu sebesar 24.069 ribu ton pada Tahun 2011, meningkat menjadi 34.775 ton pada Tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan produksi sebesar 5,40% per tahun. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit (CPO) dan gKaret (KKK) pertahun di Kabupaten Pelalawan ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

Gambar 3.31. Perkembangan Produksi Minyak Sawit (CPO) dan Karet (KKK) di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 - 2017

Produksi minyak sawit dalam bentuk CPO dan karet yang diproduksi Kabupaten Pelalawan dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah dinkmati oleh daerah lain dan/atau negara lain. CPO yang dihasilkan di Kabupaten Pelalawan diolah di Kabupaten/Provinsi atau diekspor untuk diolah menjadi di produk-produk bernilai tambah tinggi di pabrik refinery dan oleochemical. Karet alam dalam bentuk ojol dibawa ke Indragiri Hulu atau Kuantan Singingi atau Pekanbaru atau Bangkinang untuk diolah di Pabrik Crumb Rubber menjadi karet remah Standard Indonesian Rubber (SIR) yang kemudian di ekspor ke negara konsumen

D. Kawasan Budidaya Perikanan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu wilayah produsen ikan air tawar yang dibudidayakan baik di sungai dan danau. Perikanan budidaya untuk jenis-jenis ikan bernilai jual tinggi seperti baung dan tapah telah berkembang baik dan hasilnya dipasarkan ke Pekanbaru dan wilayah sekitarnya. Potensi kawasan budidaya perikanan disungai seluas 189,31 hektar dan 29,50 hektar belum digunakan secara optimal dan berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi pada budidaya perikanan air tawar. Kawasan pengembangan sektor perikanan sesuai dengan RTRW Kabupaten Pelalawan seluas 13.483 Ha. Secara historis Kabupaten Pelalawan penghasil ikan terbesar terdapat pada Kecamatan Langgam dan Kuala Kampar. Adapun wilayah-wilayah yang berpotensi untuk

pengembangan budidaya perikanan sungai dan danau hampir merata pada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan

E. Pariwisata

Kabupaten Pelalawan memiliki empat unggulan destinasi pariwisata yaitu: Ombak Bono di Kecamatan Teluk Meranti, Tesso Nilo di Kecamatan Ukui, Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan di Kecamatan Kerumutan, dan Danau Kajuit di Kecamatan Langgam.

1. Ombak Bono

Destinasi wisata 'bakudo' bono yang sudah dikenal dunia, dimana bono merupakan fenomena alam yang merupakan pertemuan arus laut dan sungai yang menciptakan ombak besar yang bisa mencapai ketinggian 6 – 10 meter. Bono ini berada di hilirnya Sungai Kampar tepatnya di Kecamatan Teluk Meranti Ombak Bono inilah dimanfaatkan wisatawan manca negara untuk berselancar.

2. Taman Nasional Tesso Nilo

Hutan Tesso Nilo merupakan salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini terbentang di empat Kabupaten, yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kampar. Seluas 38.576 hektar hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada tanggal 19 Oktober 2009 dan kemudian Taman Tesso Nilo ini diperluas menjadi 83.068 hektar, dimana didalamnya terdapat berbagai flora dan fauna serta konservasi gajah sebanyak 80 – 90 ekor. Ekosistem TN Tesso Nilo (a) Flora, terdapat berbagai jenis flora yang dilindungi dan terancam punah seperti kayu bata, kempas, jelutung, kayu kulim, tembesu, gaharu, ramin, keranji, meranti, keruing, dan tumbuhan obat patalo/pasak bumi dan akar kayu kuning yang merupakan obat penyakit kuning. (b) Fauna, berdasarkan IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) terdapat jenis hewan rawan punah, diantaranya adalah Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Kijang Muncak (*Muntiacus muntjak*), Tapir Cipan (*Tapirus indicu*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Gajah (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau (*Panthera tigris sumatrae*) dan jenis burung beo Sumatera (*Gracula religiosa*) yang hampir punah. Wisata TNTN adalah petualangan rimba dengan menaiki gajah. Gambar berikut melihat aktivitas gajah dengan pengunjung.

3. Hutan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan

Hutan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan yang merupakan kawasan lindung seluas 1.332.169 hektar, yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna khususnya Harimau Sumatera. Ekosistem SM Kerumutan (a) Flora: tingkat biodiversity di kawasan ini masih tinggi, artinya kondisi kawasan masih bagus, dan adanya temuan dari kantung semar (*Nepenthes Spp*). Terdapat jenis spesies tumbuhan endemik di antaranya ramin, dan jenis *diptereocarpaceae*. Tumbuhan dominan di kawasan ini yaitu Meranti, Punak, Nipah, Rengas, dan Pandan. (b) Fauna, selain harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*) terdapat harimau dahan, beruang madu, burung enggang, monyet ekor panjang, kuntul putih, ikan arowana, itik liar, dan buaya sinyulong. SM Kerumutan juga merupakan wilayah singgah burung migran dan merupakan kawasan *Importan Bird Area (IBA)* dan *Endangered Bird Area (EBA)*.

4. Danau Kajuit

Danau Kajuit adalah danau yang berada di pinggir aliran Sungai Kampar terletak di Kecamatan Langgam yang selama ini milik dan dikelola oleh masyarakat adat Langgam. Danau Kajuit adalah wisata memancing dan pemandangan danau serta hutan rawa yang asri.

Dua dari empat destinasi wisata unggulan tersebut di atas informasinya sudah “mendunia”, yaitu Obak Bono dan Taman Nasional Teso Nilo. Disamping destinasi wisata unggulan tersebut, masih ada destinasi wisata lainnya seperti: wisata air panas di Desa Pangkalan Lesung, Danau Tanjung Putus di Desa Rantau Baru Bawah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Istana Sayap Kerajaan Pelalawan di Kecamatan Pelalawan dan objek wisata lainnya. Meski potensi destinasi wisata ini cukup besar, namun pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata relatif belum tersedia dengan baik.

3.1.6 Aspek Daya Dukung Daya Tampung (DDDTLH) Kabupaten Pelalawan

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi. Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*). Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Magetan ini, perhitungan nilai DDDTLH berbasis jasa ekosistem lebih ditekankan pada jasa ekosistem penyediaan bahan makanan dan penyediaan air bersih. Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
- b. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

- 1) Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- 2) Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12)

Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.

- 3) Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
- 4) Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi di atas, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki kesamaan substansi dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)

Salah satu hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem adalah menghasilkan nilai indeks. Nilai ini merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis jasa ekosistem pada suatu wilayah. Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (sangat rendah) 1 (sangat tinggi).

3.1.6.1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1)

Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan, sandang, dan papan. Pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Manusia diberi mandate atau tugas dan tanggungjawab secara hukum atau menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan pangan meliputi 26,5% tergolong Sangat Rendah, 18,7% tergolong Rendah, dan hanya 32% yang tergolong Sedang dan 11,3% yang tergolong Sangat Tinggi. Potensi lahan dalam penyediaan pangan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut.

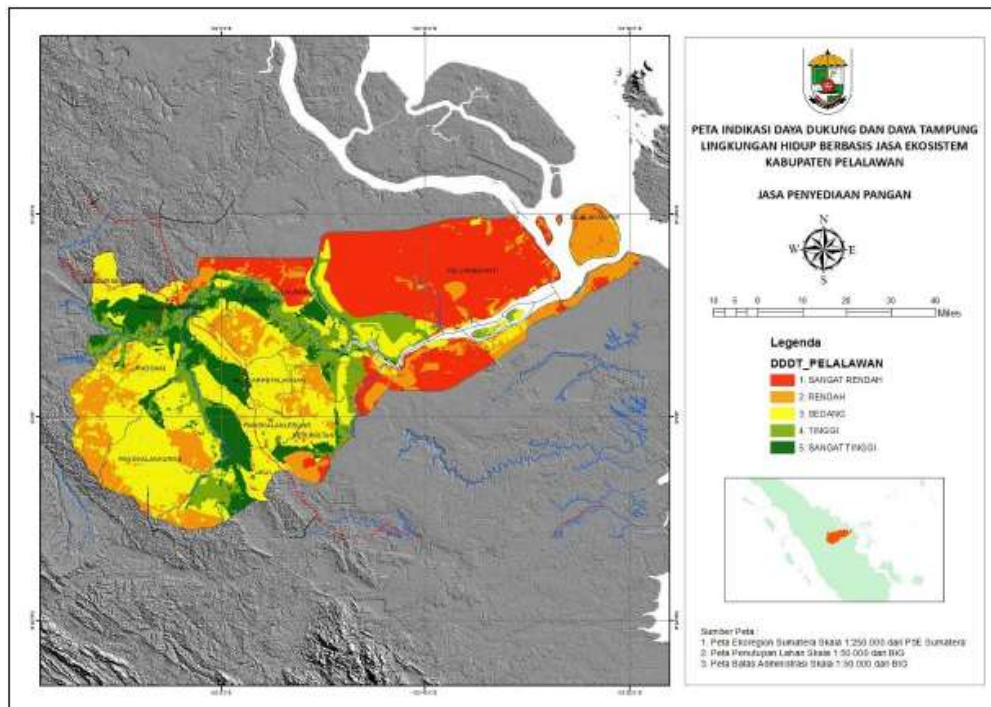
Tabel 3.49. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyedia Pangan Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)
1	Bandar Petalangan	121,0	0,5	933,2	3,6	23.378,5	90,9	144,4	0,6	1.141,1	4,4	25.718,2
2	Bandar Seikijang	51,0	0,1	1.547,7	3,2	21.032,1	43,9	6.720,5	14,0	18.596,0	38,8	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	18.460,8	41,9	15.233,6	34,6	2.945,9	6,7	7.251,0	16,5	44.007,6
4	Kerumutan	6.639,3	7,0	25.968,8	27,3	37.333,1	39,2	16.003,0	16,8	9.271,7	9,7	95.215,8
5	Kuala Kampar	6.650,6	13,4	40.802,7	82,5	2.009,0	4,1	-	-	-	-	49.462,3
6	Langgam	133,7	0,1	42.461,5	33,7	55.539,0	44,0	16.432,5	13,0	11.558,9	9,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.278,0	6,6	1.815,6	9,3	6.055,1	31,0	3.383,1	17,3	6.976,8	35,8	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	386,4	0,2	29.605,7	14,5	117.820,1	57,5	17.271,6	8,4	39.645,4	19,4	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	452,7	1,4	899,4	2,8	24.764,5	76,1	708,0	2,2	5.713,7	17,6	32.538,3
10	Pelalawan	31.131,8	29,0	11.480,7	10,7	16.743,2	15,6	27.707,3	25,8	20.196,1	18,8	107.259,1
11	Teluk Meranti	279.972,0	67,3	47.295,4	11,4	47.023,4	11,3	36.767,3	8,8	4.826,4	1,2	415.884,4
12	Ukui	639,5	0,9	9.472,8	14,0	28.022,1	41,4	15.350,4	22,7	14.276,0	21,1	67.760,8
	Grand Total	327.572,2	26,5	230.744,3	18,7	394.953,8	32,0	143.433,9	11,6	139.452,9	11,3	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong kelas Sangat Rendah dan Rendah dalam penyediaan pangan, masing-masing dengan proporsi luas 67,3% dan 11,4%. Kondisi yang hampir sama, sebagian besar (29,0%) luas Kecamatan Pelalawan tergolong dalam kelas Sangat Rendah dan sebagian besar (82,5%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah. Hal ini karena sebagian besar wilayah pesisir ini merupakan lahan gambut dengan kondisi lahan yang marginal untuk pertanian dan perkebunan, kecuali di daerah pasang surut yang memungkinkan dikembangkan sebagai lokasi persawahan.

Beberapa wilayah yang mempunyai kelas Sangat Tinggi berada di pinggir Sungai Kampar bagian tengah dan hulu dan Sungai Nilo, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bunut, Bandar Sei Kijang, Bandar Petalangan, Pangkalan Lesung, dan Ukui yang diusahakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Wilayah dengan kelas Tinggi diantaranya berada di sebagian Pulau Muda dan di sekitar Sungai Kutub yang mempunyai jenis tanah alluvial.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.32. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Pelalawan

3.1.6.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (P2)

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia secara bersamaan dengan kebutuhan pangan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41/6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

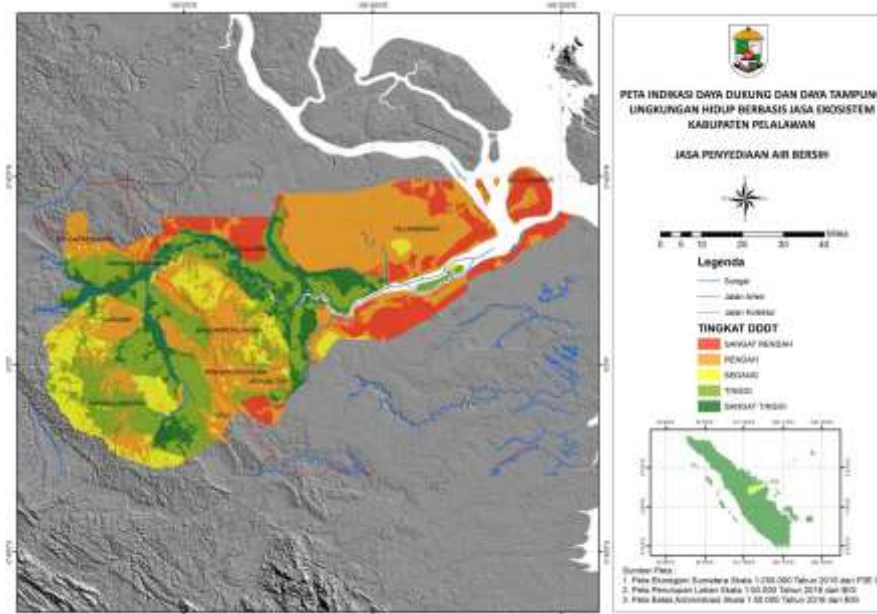
Manusia membutuhkan antara 20-50 liter air perharinya untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya mulai dari minum, memasak, hingga mandi. Lahan gambut sebagai basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar mampu menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Proses inilah yang disediakan oleh alam sebagai jasa ekosistem sebagai jasa pemurnan air bersih.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan air bersih meliputi 38,4% tergolong Rendah, 13,9% tergolong Sangat Rendah, dan hanya 26,2% tergolong Tinggi dan 10,6% yang tergolong Sangat Tinggi. Sebagian besar (71,7%) wilayah Kecamatan Kuala Kampar memiliki lahan dengan kelas Sangat Rendah dalam penyediaan air bersih. Hal ini karena sebagian besar wilayah pesisir ini merupakan lahan gambut dengan kondisi air tanah yang asam (pH air 2,5-4) sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Masyarakat memanfaatkan air gambut untuk mandi dan air irigasi pertanian. Wilayah yang mempunyai kelas Sangat Tinggi berada di sekitar aliran Sungai Kampar bagian tengah ke arah hulu, sekitar Sungai Kutub, Kerumutan, dan Sungai Nilo yang mempunyai jenis tanah alluvial, serta bagian timur TN. Tesso Nilo yang masih berhutan alam.

Tabel 3.50. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	21.502,9	83,6	1.055,5	4,1	3.159,9	12,3	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	-	-	19.426,3	40,5	1.631,3	3,4	19.928,5	41,6	6.961,1	14,5	47.947,3
3	Bunut	-	-	14.605,6	33,2	18.577,1	42,2	7.911,8	18,0	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	9.942,1	10,4	26.697,5	28,0	15.000,6	15,8	28.435,3	29,9	15.140,3	15,9	95.215,8
5	Kuala Kampar	35.485,8	71,7	13.975,3	28,3	1,2	0,0	-	-	-	-	49.462,3
6	Langgam	-	-	33.733,2	26,7	40.133,5	31,8	36.857,3	29,2	15.401,5	12,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.900,9	9,7	6.184,9	31,7	997,9	5,1	7.229,7	37,1	3.195,2	16,4	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	-	-	43.896,3	21,4	30.329,4	14,8	114.330,5	55,8	16.173,0	7,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	23.458,0	72,1	1.755,7	5,4	7.324,6	22,5	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	34.243,7	31,9	11.172,4	10,4	2.658,1	2,5	33.573,0	31,3	25.612,0	23,9	107.259,1
11	Teluk Meranti	90.357,9	21,7	240.412,1	57,8	12.630,7	3,0	40.034,1	9,6	32.449,6	7,8	415.884,4
12	Ukui	-	-	19.312,4	28,5	10.623,1	15,7	25.096,1	37,0	12.729,2	18,8	67.760,8
Grand Total		171.930,4	13,9	474.377,0	38,4	135.394,1	11,0	323.880,7	26,2	130.575,0	10,6	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.33. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Pelalawan

3.1.6.3. Jasa Penyedia Serat (P3)

Serat alami dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun proses geologis yang menghasilkan serat mineral, seperti logam dan karbon, yang menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical.

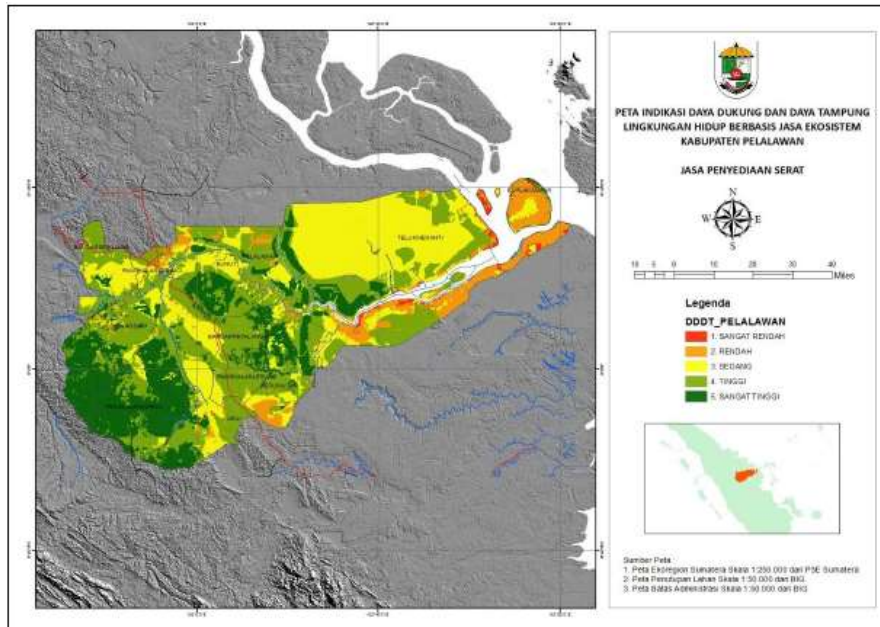
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan serat meliputi 22,5% tergolong Sangat Tinggi, 36,1% tergolong Tinggi, dan 32,0% tergolong Sedang. Potensi lahan dalam penyediaan serat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 5.3. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pangkala Kuras dan Langgam tergolong dalam kelas Sangat Tinggi dalam penyediaan serat, masing-masing dengan proporsi 49,5% dan 47,1%. Sementara itu, Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Sedang (225.772 ha), sedangkan dan sebagian besar (67%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah dalam penyediaan serat.

Tabel 3.51. Distribusi Luas Wilayah yang Mampu Mendukung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	68,6	0,3	122,5	0,5	1.259,6	4,9	21.647,3	84,2	2.620,3	10,2	25.718,2
2	Bandar Seikijang	156,9	0,3	160,4	0,3	20.125,9	42,0	25.899,4	54,0	1.604,6	3,3	47.947,3
3	Bunut	-	-	126,3	0,3	7.353,9	16,7	17.551,5	39,9	18.975,9	43,1	44.007,6
4	Kerumutan	398,0	0,4	9.903,6	10,4	20.930,2	22,0	35.611,9	37,4	28.372,2	29,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	4.910,0	9,9	33.255,9	67,2	8.173,7	16,5	1.999,9	4,0	1.122,7	2,3	49.462,3
6	Langgam	376,7	0,3	2.863,6	2,3	14.047,3	11,1	49.471,3	39,2	59.366,7	47,1	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	310,3	1,6	2.348,5	12,0	7.345,6	37,7	9.441,3	48,4	62,9	0,3	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	674,6	0,3	994,9	0,5	41.707,5	20,4	59.941,7	29,3	101.410,6	49,5	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	67,3	0,2	457,6	1,4	6.122,1	18,8	24.166,0	74,3	1.725,3	5,3	32.538,3
10	Pelalawan	466,1	0,4	8.841,4	8,2	28.403,9	26,5	56.118,3	52,3	13.429,3	12,5	107.259,1
11	Teluk Meranti	7.035,5	1,7	40.719,5	9,8	225.771,9	54,3	111.397,0	26,8	30.960,7	7,4	415.884,4
12	Ukui	205,1	0,3	2.774,1	4,1	14.319,4	21,1	32.532,3	48,0	17.929,9	26,5	67.760,8
	Grand Total	14.669,3	1,2	102.568,2	8,3	395.561,0	32,0	445.777,7	36,1	277.581,0	22,5	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa penyediaan serat yang Tinggi tersebar di areal ijin konsesi hutan tanaman di sekeliling lansekap Semenanjung Kampar yang dikelola oleh PT. RAPP dan Group Sinarmas Forestry dan hutan tanaman di lansekap Kerumutan yang dikelola oleh PT. Arara Abadi (Gambar 5-3). Sementara itu, jasa penyediaan serat yang Sangat Tinggi tersebar di hutan alam rawa gambut di sekitar Sungai Kutub, dan hutan tanaman di wilayah Kecamatan Bunut, Pangkalan Kuras, dan Ukui yang berada di lahan mineral.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.34. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Pelalawan

3.1.6.4. Jasa Penyedia Energi (P4)

Sumber penyediaan energi dewasa ini masih mengandalkan pada sumber energi fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan batu bara yang ada, ketersediaan sumberdaya energi berbasis biomassa menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Potensi sumberdaya hutan dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit merupakan sumberdaya potensial sebagai bahan baku bagi industri bioetanol dan biodiesel, untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.

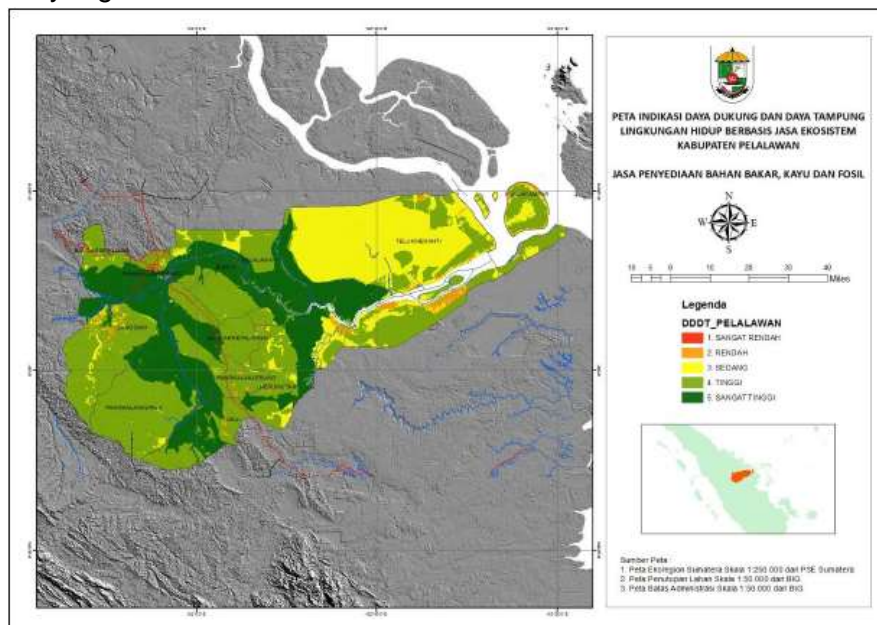
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan energi meliputi 47,9% tergolong Tinggi, dan 28,0% tergolong Sangat Tinggi. Potensi lahan dalam penyediaan energi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah sebagian besar wilayah Kecamatan Bandar Petalangan dan Pangkalan Lesung memiliki lahan dengan kelas Tinggi, dengan proporsi masing-masing 93,5% dan 76,8%. Sebagian besar (67%) luas Kecamatan Kuala Kampar juga tergolong dalam kelas Tinggi dalam penyediaan energi. Data ini menunjukkan bahwa jasa penyediaan energi di bagian hulu maupun wilayah pesisir ini masih baik. Hal ini karena wilayah Kabupaten Pelalawan secara merata mempunyai mempunyai tutupan hutan alam rawa gambut, hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit. Bagi masyarakat, ketersediaan kayu dari hutan dan kebun menjadi sumber energi untuk kayu bakar.

Tabel 3.52. Distribusi Luas Wilayah yang Mampu Mendukung Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	275,0	1,1	269,8	1,0	24.040,5	93,5	1.132,9	4,4	25.718,2
2	Bandar Seikijang	1,3	0,0	99,8	0,2	1.530,3	3,2	19.696,2	41,1	26.619,8	55,5	47.947,3
3	Bunut	-	-	126,3	0,3	102,9	0,2	33.518,0	76,2	10.260,4	23,3	44.007,6
4	Kerumutan	121,4	0,1	700,8	0,7	12.390,1	13,0	49.179,8	51,7	32.823,7	34,5	95.215,8
5	Kuala Kampar	239,5	0,5	2.611,9	5,3	13.419,8	27,1	33.191,1	67,1	-	-	49.462,3
6	Langgam	-	-	3.734,3	3,0	6.144,9	4,9	87.279,8	69,2	28.966,5	23,0	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	453,4	2,3	584,1	3,0	359,4	1,8	8.106,6	41,6	10.005,1	51,3	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	71,9	0,0	405,8	0,2	1.989,3	1,0	122.382,8	59,8	79.879,5	39,0	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	1.169,5	3,6	725,1	2,2	24.974,5	76,8	5.669,1	17,4	32.538,3
10	Pelalawan	61,8	0,1	44,1	0,0	7.230,1	6,7	41.607,6	38,8	58.315,6	54,4	107.259,1
11	Teluk Meranti	284,3	0,1	13.435,6	3,2	227.890,8	54,8	112.270,9	27,0	62.002,8	14,9	415.884,4
12	Ukui	-	-	1.154,8	1,7	43,4	0,1	36.037,4	53,2	30.525,2	45,0	67.760,8
Grand Total		1.233,6	0,1	24.342,0	2,0	272.095,9	22,0	592.285,1	47,9	346.200,6	28,0	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa penyediaan energi yang Tinggi tersebar di areal ijin konsesi hutan tanaman di sekeliling lansekap Semenanjung Kampar yang dikelola oleh PT. RAPP dan Grup Sinarmas Forestry dan hutan tanaman di lansekap Kerumutan yang dikelola oleh PT. Arara Abadi serta perkebunan kelapa rakyat (Gambar 5-4). Sementara itu, jasa penyediaan energi yang Sangat Tinggi tersebar di hutan alam rawa gambut di sekitar Sungai Kutub dan Sungai Kerumutan, serta hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit di lahan alluvial yang tersebar di sekitar Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur TN. Tesso Nilo yang masih berhutan alam.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.35. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Kabupaten Pelalawan

3.1.6.5. Jasa Penyedia Sumberdaya Genetik (P5)

Beraneka ragam sumber daya genetik tersedia dalam satu wilayah ekosistem yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Sumber daya genetik yang terlihat dari

keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya.

Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau megadiversity yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

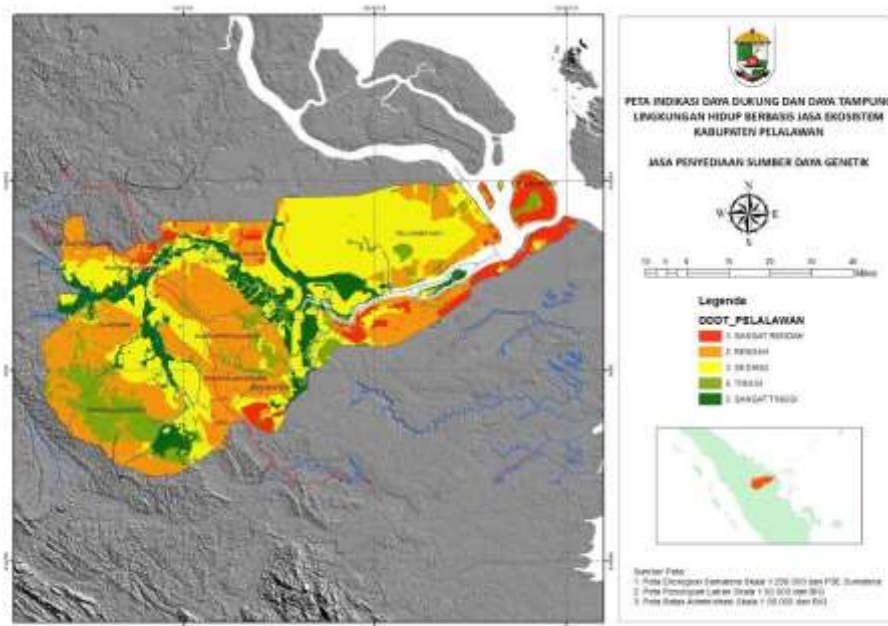
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam penyediaan sumber daya genetik meliputi : 36,4% tergolong Sedang, 35,2% tergolong Rendah, dan hanya 11,0% yang tergolong Tinggi dan 11,0% tergolong Sangat Tinggi. Potensi lahan dalam penyediaan sumber daya genetik pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 5.5. Sebagian besar (68%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah dalam penyediaan sumber daya genetik karena sebagian besar hutan di wilayah telah berubah penggunaannya untuk perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan, Bunut, dan Pangkalan Lesung sehingga >74% wilayahnya masing-masing termasuk dalam kelas Rendah.

Tabel 3.53. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)
1	Bandar Petalangan	121,0	0,5	22.243,1	86,5	1.251,4	4,9	2.102,7	8,2	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	51,0	0,1	19.474,1	40,6	21.345,0	44,5	111,1	0,2	6.966,0	14,5	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	32.963,5	74,9	7.450,2	16,9	531,7	1,2	2.945,9	6,7	44.007,6
4	Kerumutan	9.341,9	9,8	30.303,6	31,8	26.996,0	28,4	13.432,8	14,1	15.141,5	15,9	95.215,8
5	Kuala Kampar	33.414,1	67,6	6.729,0	13,6	3.217,2	6,5	6.102,1	12,3	-	-	49.462,3
6	Langgam	134,5	0,1	71.201,4	56,5	16.419,5	13,0	22.944,1	18,2	15.426,1	12,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.599,7	13,3	6.267,1	32,1	6.836,3	35,0	310,1	1,6	3.495,4	17,9	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	569,5	0,3	72.254,1	35,3	65.168,6	31,8	50.563,6	24,7	16.173,4	7,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	452,7	1,4	24.367,3	74,9	6.085,9	18,7	1.632,3	5,0	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	8.246,9	7,7	31.797,0	29,6	37.582,2	35,0	2.947,2	2,7	26.685,9	24,9	107.259,1
11	Teluk Meranti	23.697,1	5,7	88.065,8	21,2	239.365,1	57,6	28.532,6	6,9	36.223,8	8,7	415.884,4
12	Ukui	639,5	0,9	29.452,8	43,5	17.839,9	26,3	7.099,5	10,5	12.729,2	18,8	67.760,8
	Grand Total	79.384,2	6,4	435.118,7	35,2	449.557,5	36,4	136.309,7	11,0	135.787,2	11,0	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa penyediaan sumber daya genetik yang Tinggi hanya tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di tengah Pulau Mendol dan sekitar Sungai Serkap. Sementara itu, wilayah dengan jasa penyediaan sumber daya genetik yang Sangat Tinggi tersebar di hutan alam rawa gambut di sekitar Sungai Kutub dan Kerumutan, serta semak belukar di dataran alluvial yang tersebar di sekitar aliran Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berhutan alam.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.36. Presentase Luas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Pelalawan

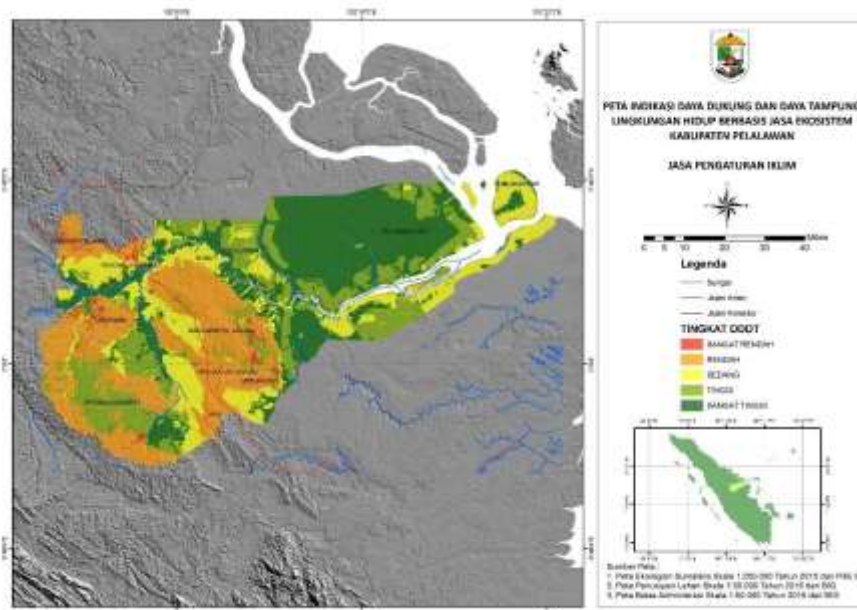
3.1.6.6. Pengatur Iklim (R1)

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan iklim meliputi: 30,6% tergolong Sangat Tinggi, 25,4% tergolong Rendah, dan 22,14% tergolong Tinggi. Data ini menunjukkan bahwa potensi lahan dalam pengaturan iklim di Kabupaten Pelalawan bervariasi, sebaran pada masing-masing kecamatan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Sangat Tinggi dalam pengaturan iklim (62,6%), sementara itu sebagian besar (79,7%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sedang. Hal ini karena Kecamatan Teluk Meranti memiliki tutupan lahan berupa hutan yang luas. Hutan mampu menyerap karbon dan menghasilkan oksigen, sehingga menyumbang besar jasa pengaturan iklim. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman, semakin rapat dan banyak jumlah vegetasi maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Selain itu, bentang lahan berupa lahan gambut yang luas di Kecamatan Teluk Meranti juga telah menyumbang peranan besar dalam pengaturan iklim melalui penyimpanan karbon.

Tabel 3.54. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Iklim Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	317,8	1,2	22.164,9	86,2	1.428,6	5,6	1.807,0	7,0	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	1.614,4	3,4	19.597,1	40,9	18.165,1	37,9	2.115,6	4,4	6.455,0	13,5	47.947,3
3	Bunut	229,2	0,5	32.953,5	74,9	7.251,0	16,5	660,8	1,5	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	4.856,0	5,1	29.172,6	30,6	19.630,3	20,6	19.207,1	20,2	22.349,8	23,5	95.215,8
5	Kuala Kampar	187,7	0,4	36,5	0,1	39.429,7	79,7	2.022,8	4,1	7.785,7	15,7	49.462,3
6	Langgam	5.036,8	4,0	69.153,5	54,8	14.716,0	11,7	22.678,1	18,0	14.541,1	11,5	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.169,2	6,0	5.991,6	30,7	8.321,9	42,7	784,2	4,0	3.241,7	16,6	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	2.518,8	1,2	71.766,9	35,1	41.007,8	20,0	73.459,8	35,9	15.975,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	941,4	2,9	24.295,4	74,7	6.062,2	18,6	1.239,2	3,8	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	328,7	0,3	5.660,0	5,3	29.343,4	27,4	39.618,7	36,9	32.308,4	30,1	107.259,1
11	Teluk Meranti	443,9	0,1	4.095,6	1,0	49.845,4	12,0	100.972,4	24,3	260.527,2	62,6	415.884,4
12	Ukui	892,7	1,3	29.243,4	43,2	16.390,6	24,2	8.524,4	12,6	12.709,7	18,8	67.760,8
Grand Total		18.536,5	1,5	314.131,0	25,4	251.591,9	20,4	273.090,2	22,1	378.807,6	30,6	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.37. Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Iklim Kabupaten Pelalawan

3.1.6.7. Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (R2)

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan tata aliran air dan banjir meliputi: 26,8% tergolong Tinggi, 26,5% tergolong Sedang, dan 18,3% tergolong Sangat Rendah. Data ini menunjukkan bahwa potensi lahan dalam pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Pelalawan bervariasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Tinggi dalam pengaturan tata aliran air dan banjir (60,5%), dan sebaliknya sebagian besar (83,3%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah. Hal ini karena Kecamatan Teluk Meranti memiliki tutupan lahan berupa hutan rawa gambut yang luas. Namun, lahan gambut yang telah diusahakan untuk hutan tanaman mengalami penurunan fungsi, sehingga mempunyai kelas

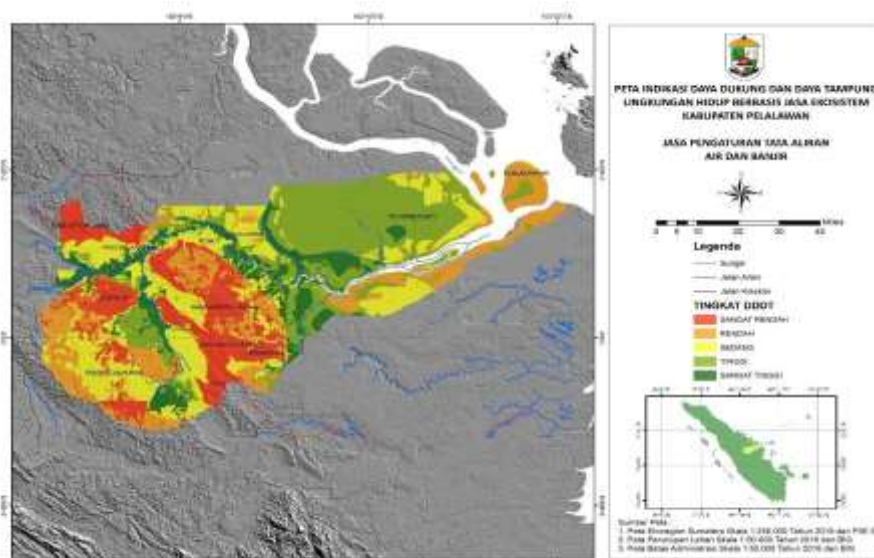
Sedang dalam pengaturan tata aliran air dan banjir karena infrastruktur kanal yang dibangun mengakibatkan pengeringan di lahan gambut. Sementara itu, wilayah Kecamatan Kuala Kampar yang sebagian merupakan lahan perkebunan mempunyai kelas Rendah karena kemampuannya menyimpan air dan mengendalikan banjir menurun Tajam.

Tabel 3.55. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	21.743,9	84,5	738,7	2,9	3.235,6	12,6	-	-	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	21.039,7	43,9	15,7	0,0	18.245,3	38,1	1.680,5	3,5	6.966,0	14,5	47.947,3
3	Bunut	14.834,8	33,7	18.347,9	41,7	7.782,7	17,7	129,1	0,3	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	24.089,0	25,3	18.890,9	19,8	20.564,0	21,6	16.530,3	17,4	15.141,5	15,9	95.215,8
5	Kuala Kampar	224,2	0,5	41.429,6	83,8	1.115,0	2,3	6.693,5	13,5	-	-	49.462,3
6	Langgam	39.891,3	31,6	33.929,4	26,9	33.558,8	26,6	3.319,9	2,6	15.426,1	12,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	6.941,9	35,6	1.749,6	9,0	7.038,2	36,1	601,3	3,1	3.177,6	16,3	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	45.806,4	22,4	29.079,3	14,2	89.410,8	43,7	24.259,3	11,8	16.173,4	7,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	24.983,7	76,8	249,0	0,8	7.301,5	22,4	4,2	0,0	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	4.197,1	3,9	11.005,4	10,3	45.683,8	42,6	20.147,6	18,8	26.225,2	24,5	107.259,1
11	Teluk Meranti	1.780,6	0,4	45.488,2	10,9	74.769,6	18,0	251.654,8	60,5	42.191,3	10,1	415.884,4
12	Ukui	20.505,5	30,3	9.630,2	14,2	18.855,3	27,8	6.040,7	8,9	12.729,2	18,8	67.760,8
Grand Total		226.038,2	18,3	210.553,9	17,0	327.560,5	26,5	331.061,2	26,8	140.943,5	11,4	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yang Sangat Tinggi berada di sekitar Sungai Kutub dan kawasan lindung HTI yang masih berhutan alam di Teluk Meranti, sempadan Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur dari Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berhutan alam.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.38. Presentase Luas Jasa Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Pelalawan

3.1.6.8. Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam (R3)

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam.

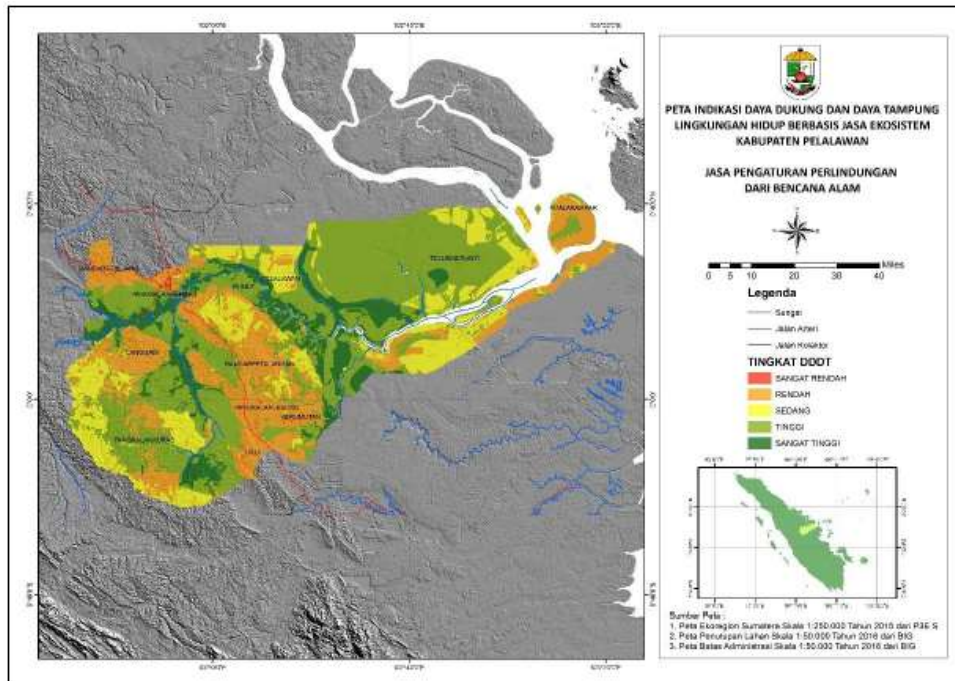
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam meliputi: 45,2% tergolong Tinggi, 24,4% tergolong Rendah, dan 18,8% tergolong Sedang. Potensi lahan dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.8. Sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Tinggi dalam pengaturan tata aliran air dan banjir (62,3%), dan sebaliknya sebagian besar (71,1%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah. Hal ini karena Kecamatan Teluk Meranti memiliki tutupan lahan berupa hutan rawa gambut yang luas sehingga mampu mencegah dan melindungi dari bencana banjir. Sementara itu, wilayah Kecamatan Kuala Kampar yang sebagian merupakan lahan perkebunan mempunyai kelas Rendah karena kemampuannya dalam mencegah banjir menurun tajam.

Tabel 3.56. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	121,0	0,5	21.631,0	84,1	1.026,3	4,0	2.939,9	11,4	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	51,0	0,1	21.003,3	43,8	160,6	0,3	20.198,8	42,1	6.533,5	13,6	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	14.718,5	33,4	18.347,9	41,7	7.911,8	18,0	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	465,0	0,5	32.503,1	34,1	11.949,4	12,5	35.222,3	37,0	15.076,1	15,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	224,2	0,5	35.189,9	71,1	6.240,9	12,6	7.807,4	15,8	-	-	49.462,3
6	Langgam	133,7	0,1	39.760,9	31,5	38.010,0	30,1	33.622,6	26,7	14.598,4	11,6	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.032,4	5,3	7.550,2	38,7	364,0	1,9	7.586,9	38,9	2.975,2	15,3	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	386,4	0,2	46.231,4	22,6	28.642,9	14,0	113.490,7	55,4	15.977,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	452,7	1,4	24.539,1	75,4	605,9	1,9	6.940,6	21,3	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	69,1	0,1	13.630,6	12,7	27.898,4	26,0	39.662,8	37,0	25.998,2	24,2	107.259,1
11	Teluk Meranti	281,2	0,1	25.187,7	6,1	89.597,4	21,5	258.999,6	62,3	41.818,6	10,1	415.884,4
12	Ukui	639,5	0,9	19.866,6	29,3	9.634,6	14,2	24.910,5	36,8	12.709,7	18,8	67.760,8
	Grand Total	3.972,5	0,3	301.812,1	24,4	232.478,2	18,8	559.293,8	45,2	138.600,6	11,2	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana yang Sangat Tinggi berada di sekitar Sungai Kutub dan kawasan lindung HTI yang masih berhutan alam di Teluk Meranti, sempadan Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur dari Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berhutan alam. Sementara itu, wilayah di bagian tengah lansekap Semenanjung Kampar yang masih berhutan alam mempunyai potensi Tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Selain itu, Ekoregion fluviomarin yang masih berhutan mangrove di Pulau Mendol bagian timur mempunyai potensi Tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, khususnya abrasi pantai.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.39. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

3.1.6.9. Pengatur Pemurnian Air (R4)

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam. Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/ evaporasi, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan.

Selanjutnya, secara biologis, pemurnian air dapat terjadi akibat adanya vegetasi dan aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Sementara pemurnian air secara kimia terjadi apabila muncul reaksi antar molekul yang berada di badan air, namun pemurnian air secara kimia tidak terjadi secara terus-menerus dan bergantung pada

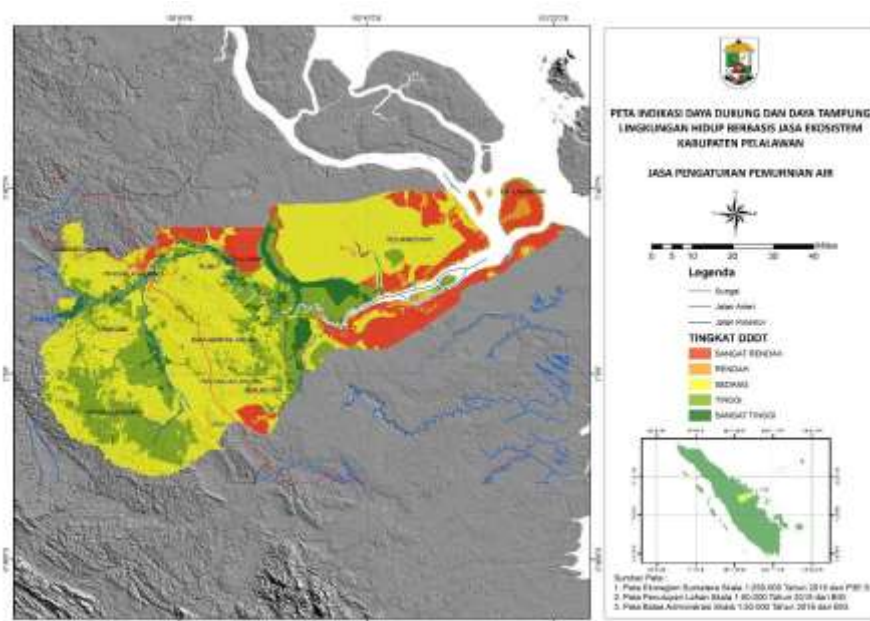
kandungan zat dalam badan air atau secara temporer tergantung kepada kondisi dan kemampuan lahan.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan pemurnian air meliputi: 54,6% tergolong Sedang, 22,6% tergolong Tinggi, dan hanya 4,7% yang tergolong Sangat Tinggi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Sedang dalam pengaturan pemurnian air (52,1%), dan sebagian besar (67,5%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah. Hal ini karena sebagian lahan gambut di Kecamatan Teluk Meranti telah diusahakan untuk hutan tanaman dan sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Kampar diusahakan untuk perkebunan.

Tabel 3.57. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	189,7	0,7	23.307,4	90,6	2.076,8	8,1	144,4	0,6	25.718,2
2	Bandar Seikijang	-	-	52,2	0,1	37.699,2	78,6	9.492,0	19,8	703,9	1,5	47.947,3
3	Bunut	-	-	116,3	0,3	40.247,2	91,5	3.570,5	8,1	73,5	0,2	44.007,6
4	Kerumutan	9.942,1	10,4	3.076,3	3,2	43.196,3	45,4	30.234,3	31,8	8.766,8	9,2	95.215,8
5	Kuala Kampar	33.385,5	67,5	9.737,1	19,7	3.706,4	7,5	2.633,4	5,3	-	-	49.462,3
6	Langgam	-	-	146,3	0,1	82.225,0	65,2	38.723,7	30,7	5.030,5	4,0	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.900,9	9,7	1.347,2	6,9	13.045,2	66,9	2.979,7	15,3	235,5	1,2	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	-	-	1.662,6	0,8	111.223,2	54,3	85.885,3	42,0	5.958,2	2,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	520,0	1,6	30.005,6	92,2	1.964,3	6,0	48,4	0,1	32.538,3
10	Pelalawan	34.249,6	31,9	3.784,6	3,5	30.222,1	28,2	26.819,4	25,0	12.183,4	11,4	107.259,1
11	Teluk Meranti	102.434,4	24,6	20.126,0	4,8	216.669,1	52,1	52.116,5	12,5	24.538,4	5,9	415.884,4
12	Ukui	-	-	844,2	1,2	43.504,4	64,2	23.388,2	34,5	24,0	0,0	67.760,8
	Grand Total	181.912,5	14,7	41.602,4	3,4	675.051,2	54,6	279.884,2	22,6	57.706,9	4,7	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.40. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Pelalawan

3.1.6.10. Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah (R5)

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.

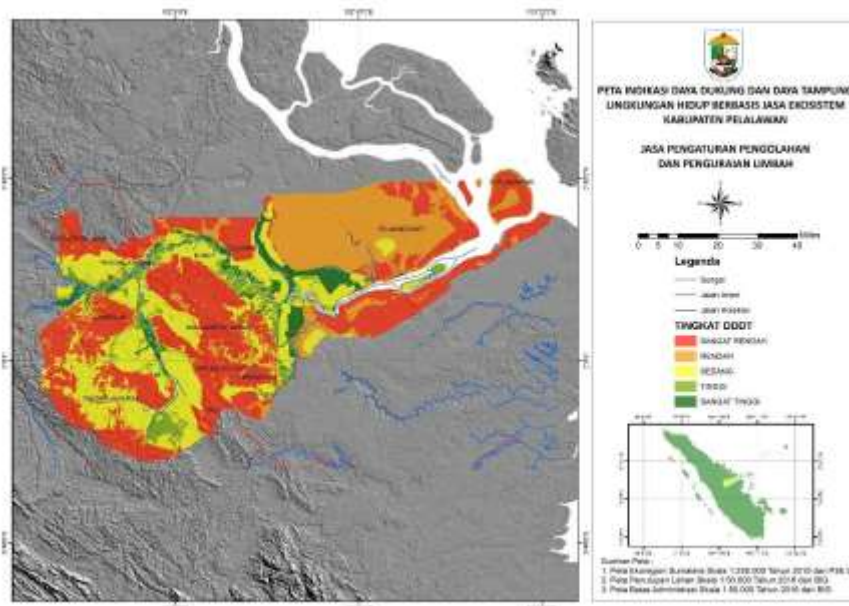
Berbeda dengan jasa ekosistem yang telah dibahas sebelumnya yang umumnya lebih mengacu pada daya dukung lingkungan, jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah lebih banyak mengacu pada konsep daya tampung lingkungan. Daya Tampung Lingkungan Hidup sendiri apabila diartikan, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Secara definisi, daya tampung lingkungan hidup memiliki komponen kedua daya dukung lingkungan sebagai kapasitas tampung limbah. Namun dalam analisis dan implementasinya, daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua aspek yang berbeda namun sangat terkait satu dengan lain sehingga sulit dipisahkan.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan penguraian limbah (R5) meliputi: 41,1% tergolong Sangat Rendah, 26,7% tergolong Sedang, dan hanya 6,5% yang tergolong Tinggi dan 4,6% Sangat Tinggi. Data ini menunjukkan bahwa potensi lahan dalam pengaturan penguraian limbah di Kabupaten Pelalawan tergolong rendah, sebaran pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.58. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	22.287,4	86,7	187,1	0,7	3.099,4	12,1	144,4	0,6	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	19.494,7	40,7	1.546,2	3,2	19.936,7	41,6	6.269,2	13,1	700,5	1,5	47.947,3
3	Bunut	33.079,8	75,2	102,9	0,2	7.879,0	17,9	2.872,3	6,5	73,5	0,2	44.007,6
4	Kerumutan	39.639,4	41,6	11.663,7	12,2	28.522,5	30,0	6.870,8	7,2	8.519,4	8,9	95.215,8
5	Kuala Kampar	38.143,1	77,1	8.684,6	17,6	1.511,9	3,1	1.122,7	2,3	-	-	49.462,3
6	Langgam	70.184,3	55,6	3.633,9	2,9	36.817,1	29,2	10.523,8	8,3	4.966,4	3,9	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	8.730,0	44,7	483,9	2,5	6.769,9	34,7	3.309,6	17,0	215,2	1,1	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	72.082,3	35,2	2.790,0	1,4	113.680,4	55,5	10.221,6	5,0	5.955,0	2,9	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	24.085,0	74,0	1.139,5	3,5	7.261,2	22,3	52,5	0,2	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	39.780,3	37,1	8.510,1	7,9	32.237,8	30,1	14.548,3	13,6	12.182,7	11,4	107.259,1
11	Teluk Meranti	111.705,3	26,9	220.823,9	53,1	46.862,8	11,3	11.885,0	2,9	24.607,4	5,9	415.884,4
12	Ukui	29.381,3	43,4	753,8	1,1	24.892,0	36,7	12.714,2	18,8	19,5	0,0	67.760,8
	Grand Total	508.592,8	41,1	260.319,9	21,1	329.470,6	26,7	80.534,4	6,5	57.239,6	4,6	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.41. Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Pelalawan

3.1.6.11. Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara (R6)

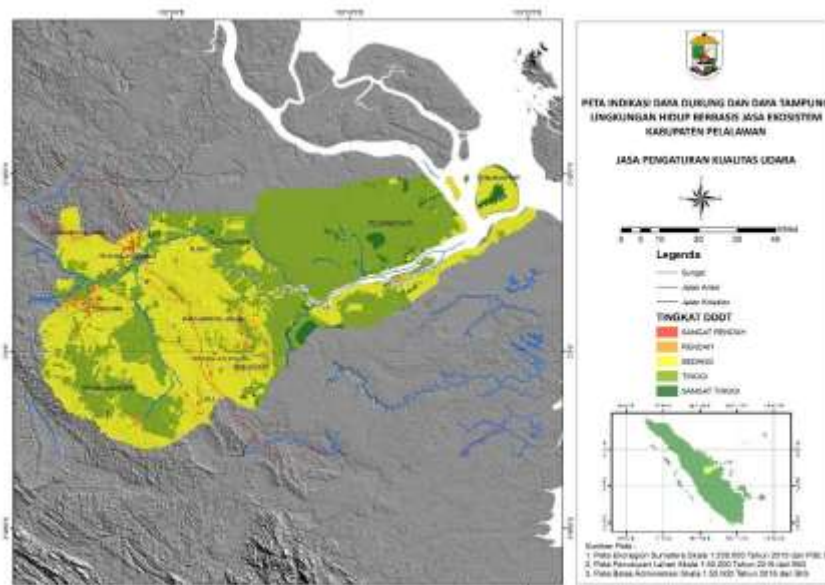
Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara apabila vegetasi masih berupa hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Pada wilayah non vegetasi sudah berupa tanah terbuka atau pemukiman memiliki jasa pengaturan kualitas udara sangat rendah.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6) meliputi: 50,4% tergolong Tinggi, 45,1% tergolong Sedang, dan 2,6% yang tergolong Sangat Tinggi. Potensi lahan dalam pengaturan pemeliharaan kualitas udara pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.59. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	199,3	0,8	118,5	0,5	23.297,8	90,6	2.102,7	8,2	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	240,2	0,5	1.545,0	3,2	38.094,2	79,5	8.067,8	16,8	-	-	47.947,3
3	Bunut	126,3	0,3	102,9	0,2	40.204,5	91,4	3.573,9	8,1	-	-	44.007,6
4	Kerumutan	472,4	0,5	4.491,4	4,7	47.965,1	50,4	39.847,0	41,8	2.439,9	2,6	95.215,8
5	Kuala Kampar	224,2	0,5	-	-	39.445,0	79,7	3.691,1	7,5	6.102,1	12,3	49.462,3
6	Langgam	2.916,0	2,3	3.715,3	2,9	79.412,1	63,0	40.082,2	31,8	-	-	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.170,5	6,0	2,2	0,0	14.506,9	74,4	3.553,6	18,2	275,4	1,4	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	1.084,5	0,5	1.515,5	0,7	112.528,8	55,0	89.600,5	43,8	-	-	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	533,0	1,6	1.104,5	3,4	29.300,7	90,0	1.600,1	4,9	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	345,1	0,3	64,7	0,1	35.101,3	32,7	69.609,6	64,9	2.138,4	2,0	107.259,1
11	Teluk Meranti	327,2	0,1	1.558,5	0,4	52.376,5	12,6	339.847,0	81,7	21.775,3	5,2	415.884,4
12	Ukui	849,7	1,3	919,5	1,4	44.772,3	66,1	21.219,2	31,3	-	-	67.760,8
Grand Total		8.488,4	0,7	15.138,0	1,2	557.005,1	45,1	622.794,6	50,4	32.731,0	2,6	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.42. Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pelalawan

3.1.6.12. Pengaturan Penyerbukan Alami (R7)

Penyerbukan atau polinasi merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Penyerbukan yang sukses akan diikuti segera dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Di bakal biji terjadi peristiwa penting berikutnya yaitu pembuahan. Penyerbukan alami dilakukan melalui bantuan spesies tertentu, yang keberadaannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang alami, khususnya hutan, membuat proses penyerbukan berjalan baik karena serangga dan spesies pembantu penyerbukan lainnya dapat ditemukan dalam jumlah yang memadai.

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan penyerbukan alami (R7) meliputi: 45,8% tergolong Tinggi, 36,4% tergolong Sedang, dan 11,1% yang tergolong

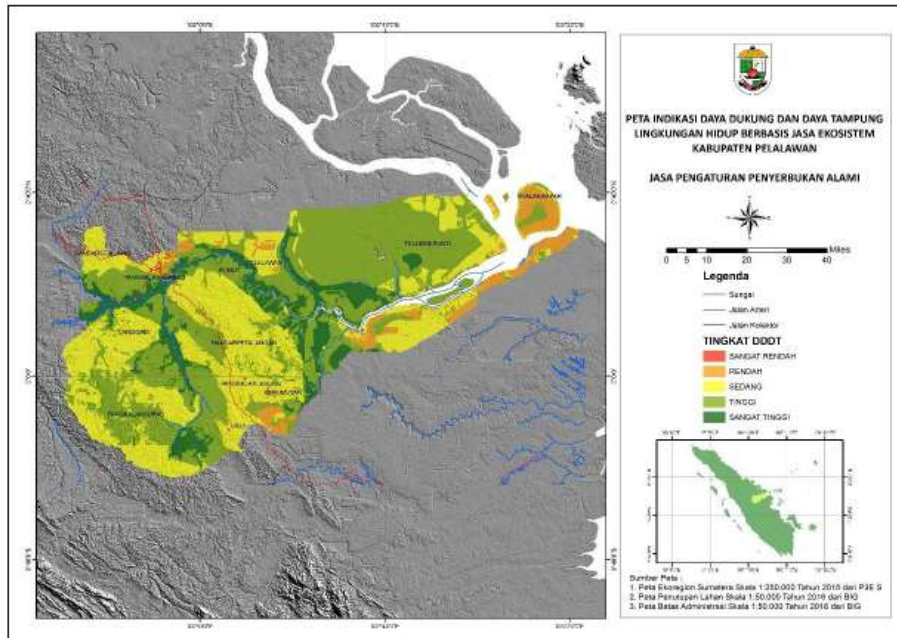
Sangat. Data ini menunjukkan bahwa kualitas lahan dalam pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Pelalawan tergolong baik, sebaran pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.12. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Tinggi dalam pengaturan penyerbukan alami (62,8%), namun sebagian besar (67,1%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah. Hal ini karena sebagian besar lahan gambut di Kecamatan Teluk Meranti mempunyai tutupan lahan berupa hutan alam, sementara sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Kampar telah berubah menjadi areal perkebunan.

Tabel 3.60. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	129,2	0,5	68,6	0,3	22.429,2	87,2	3.091,2	12,0	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	65,5	0,1	434,0	0,9	21.065,8	43,9	19.927,0	41,6	6.455,0	13,5	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	-	-	33.066,4	75,1	7.911,8	18,0	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	557,6	0,6	8.947,5	9,4	34.930,8	36,7	35.705,0	37,5	15.074,9	15,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	225,3	0,5	33.189,9	67,1	8.239,7	16,7	7.807,4	15,8	-	-	49.462,3
6	Langgam	141,7	0,1	840,3	0,7	73.757,7	58,5	36.844,7	29,2	14.541,1	11,5	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.064,4	5,5	1.823,7	9,3	6.286,4	32,2	7.367,7	37,8	2.966,3	15,2	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	401,5	0,2	857,0	0,4	73.825,9	36,1	113.669,0	55,5	15.975,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	460,8	1,4	71,5	0,2	24.752,9	76,1	7.253,1	22,3	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	106,5	0,1	8.539,4	8,0	32.981,3	30,7	40.268,8	37,5	25.363,1	23,6	107.259,1
11	Teluk Meranti	1.027,7	0,2	23.832,8	5,7	88.938,6	21,4	261.112,7	62,8	40.972,6	9,9	415.884,4
12	Ukui	640,1	0,9	224,2	0,3	29.295,4	43,2	24.891,4	36,7	12.709,7	18,8	67.760,8
	Grand Total	4.936,6	0,4	78.829,0	6,4	449.570,1	36,4	565.849,8	45,8	136.971,7	11,1	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa pengaturan penyerbukan alami yang Tinggi tersebar di bagian tengah lansekap Semenanjung Kampar yang masih ditutupi oleh hutan alam dan areal konsesi hutan tanaman di sekitar Sungai Kutub dan di Teluk Meranti. Selain itu, keberadaan bentang lahan alluvial di Pulau Muda dan fluviomarine di pesisir timur Pulau Mendol juga mempunyai kelas Tinggi hingga Sangat Tinggi dalam pengaturan penyerbukan alami karena mendukung tumbuhnya hutan mangrove dan vegetasi lainnya yang lebih baik. Sementara itu, areal hutan tanaman lainnya di lahan gambut mempunyai kelas Sedang dalam pengaturan penyerbukan alami. Jasa pengaturan penyerbukan alami yang Sangat Tinggi masih dapat ditemukan di hutan alam rawa gambut di sekitar Sungai Kutub dan kawasan lindung HTI di Teluk Meranti, sempadan Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur dari Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berhutan alam.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.43. Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

3.1.6.13. Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit (R8)

Alam sudah menyediakan agen hayati untuk pengendalian hama dan penyakit. Agen hayati memiliki peranan dalam pengaturan dan pengendalian populasi hama, sehingga dapat mempertahankan populasi hama dan penyakit pada aras keseimbangan umum. Alam menyediakan spesies serangga tertentu atau patogen penyebab penyakit untuk menyerang kompleks komunitas serangga lainnya. Alam juga menyediakan ular dan burung hantu untuk mengurangi hama tikus di perkebunan.

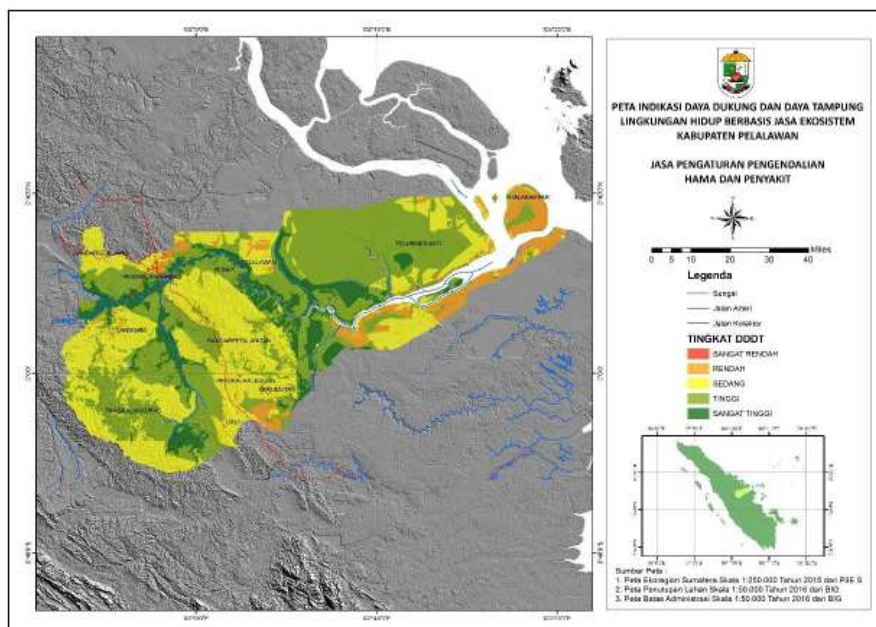
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit (R8) meliputi: 45,7% tergolong Tinggi, 35,0% tergolong Sedang, dan 11,4% yang tergolong Sangat Tinggi. Potensi lahan dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Kecamatan Teluk Meranti tergolong dalam kelas Tinggi dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit (62,1%), namun sebagian besar (71,2%) luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah. Hal ini karena sebagian besar lahan gambut di Kecamatan Teluk Meranti mempunyai tutupan berupa hutan alam, sementara sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Kampar telah berubah menjadi areal perkebunan.

Tabel 3.61. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	129,2	0,5	70,1	0,3	22.283,4	86,6	3.235,6	12,6	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	65,5	0,1	18,6	0,0	21.127,4	44,1	20.275,9	42,3	6.459,8	13,5	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	10,0	0,0	33.056,4	75,1	7.911,8	18,0	2.913,1	6,6	44.007,6
4	Kerumutan	467,2	0,5	8.971,2	9,4	34.683,6	36,4	36.017,7	37,8	15.076,1	15,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	224,2	0,5	35.198,9	71,2	6.231,9	12,6	7.807,4	15,8	-	-	49.462,3
6	Langgam	136,2	0,1	2.415,7	1,9	71.638,4	56,8	37.364,0	29,6	14.571,2	11,6	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.035,4	5,3	1.620,0	8,3	6.314,3	32,4	7.564,2	38,8	2.974,8	15,2	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	399,8	0,2	671,5	0,3	73.829,0	36,1	113.850,9	55,6	15.977,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	460,8	1,4	68,0	0,2	24.708,1	75,9	7.301,5	22,4	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	73,8	0,1	8.321,4	7,8	33.003,4	30,8	39.862,4	37,2	25.998,2	24,2	107.259,1
11	Teluk Meranti	270,7	0,1	36.896,3	8,9	76.705,1	18,4	258.361,5	62,1	43.650,9	10,5	415.884,4
12	Ukui	640,1	0,9	209,3	0,3	29.286,8	43,2	24.915,0	36,8	12.709,7	18,8	67.760,8
Grand Total		4.019,1	0,3	94.470,9	7,6	432.867,7	35,0	564.467,8	45,7	140.331,6	11,4	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit yang Tinggi tersebar di bagian tengah lansekap Semenanjung Kampar yang masih ditutupi oleh hutan alam dan areal konsesi hutan tanaman di sekitar Sungai Kutub dan di Teluk Meranti. Sementara itu, areal hutan tanaman lainnya mempunyai kelas Sedang dalam pengaturan penyerbukan alami. Jasa penyediaan serat yang Sangat Tinggi masih dapat ditemukan di hutan alam rawa gambut di sekitar Sungai Kutub dan kawasan lindung HTI di Teluk Meranti, sempadan Sungai Kampar dan Sungai Nilo, serta bagian timur dari Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berhutan alam. Selain itu, keberadaan bentang lahan alluvial di Pulau Muda dan fluviomarine di pesisir timur Pulau Mendol juga mempunyai kelas Tinggi hingga Sangat Tinggi dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit karena mendukung tumbuhnya hutan mangrove dan vegetasi lainnya yang lebih baik.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.44. Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

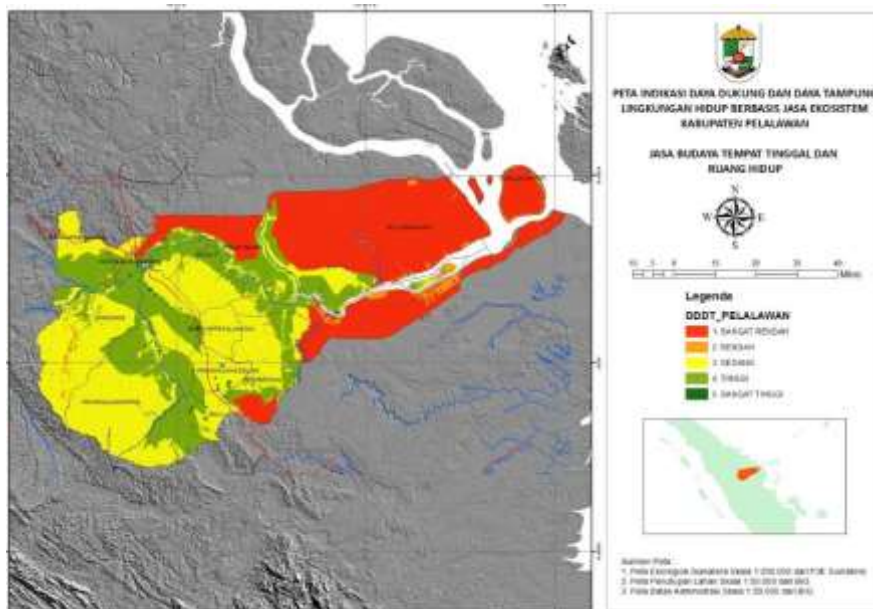
3.1.6.14. Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup (C1)

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Lingkungan dengan daratan yang berbukit dan bergelombang memberikan ruang untuk tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan daratan yang datar dan berupa rawa tergenang. Tempat tinggal berupa lingkungan fisik sekitarnya dan rumah sebagai tempat tinggal, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Undang-undang No. 4 tahun 1992 menyatakan bahwa ada kewajiban dari orang dewasa untuk membina anak-anak yang ada di dalam rumah mereka. Jadi rumah adalah tempat tinggal yang dijadikan tempat berlindung keluarga serta menjadi tempat pembinaan keluarga. Didalam rumah juga dilakukan pembentukan watak, karakter dan budaya menciptakan sebuah rasa untuk berlama-lama di dalam rumah tersebut. Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk tempat tinggal dan ruang hidup meliputi: 35,0% tergolong Sangat Rendah, 37,9% tergolong Sedang, dan hanya 24,7% yang tergolong Tinggi dan 0,4% tergolong Sangat Tinggi. Distribusi luas jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.62. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	151,3	0,6	24.242,8	94,3	1.134,4	4,4	189,7	0,7	25.718,2
2	Bandar Seikijang	-	-	-	-	21.180,1	44,2	26.716,2	55,7	50,9	0,1	47.947,3
3	Bunut	-	-	-	-	33.694,4	76,6	10.196,9	23,2	116,3	0,3	44.007,6
4	Kerumutan	17.476,0	18,4	548,0	0,6	51.683,5	54,3	25.054,2	26,3	454,1	0,5	95.215,8
5	Kuala Kampar	45.690,4	92,4	3.532,5	7,1	203,0	0,4	36,5	0,1	-	-	49.462,3
6	Langgam	-	-	3.659,2	2,9	93.080,4	73,8	29.145,6	23,1	240,3	0,2	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.010,1	10,3	86,5	0,4	6.474,3	33,2	10.222,7	52,4	715,0	3,7	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	-	-	358,7	0,2	129.123,6	63,1	74.269,2	36,3	977,8	0,5	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	312,5	1,0	25.339,9	77,9	6.333,7	19,5	552,2	1,7	32.538,3
10	Pelalawan	41.261,8	38,5	24,7	0,0	18.673,9	17,4	47.029,8	43,8	268,9	0,3	107.259,1
11	Teluk Meranti	325.877,6	78,4	15.756,2	3,8	31.314,9	7,5	42.438,4	10,2	497,3	0,1	415.884,4
12	Ukui	-	-	-	-	33.380,2	49,3	33.165,9	48,9	1.214,6	1,8	67.760,8
	Grand Total	432.315,9	35,0	24.429,7	2,0	468.391,1	37,9	305.743,5	24,7	5.277,1	0,4	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.45. Peta Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup Kabupaten Pelalawan

3.1.6.15. Budaya Rekreasi dan *Tourism* (C2)

Ekosistem menyediakan fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekowisata.

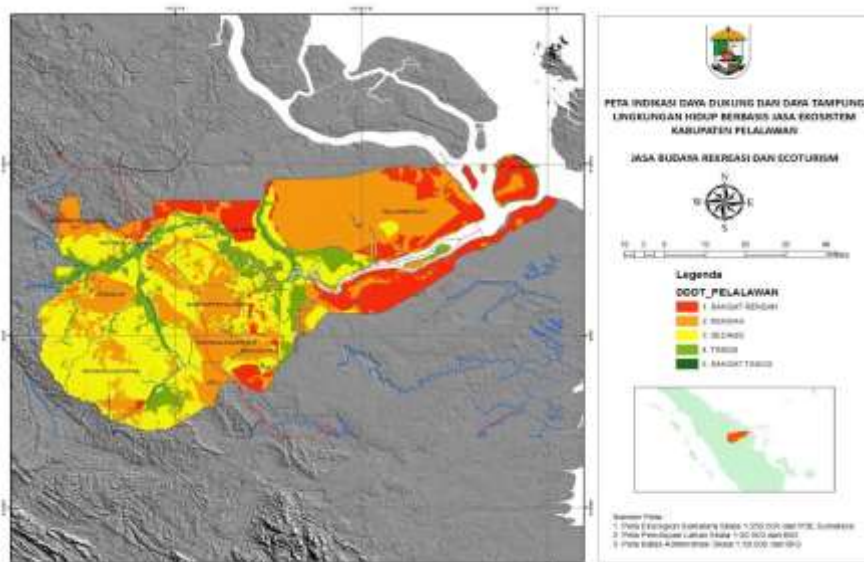
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk rekreasi dan ekoturisme meliputi: 37,8% tergolong Rendah, 33,9% tergolong Sedang, dan hanya 11,7% yang tergolong Tinggi dan Sangat Tinggi. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.63. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Budaya Rekreasi Dan *Tourism* Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	118,5	0,5	21.702,2	84,4	3.601,9	14,0	295,7	1,1	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	1.531,5	3,2	19.615,5	40,9	19.830,9	41,4	6.969,3	14,5	-	-	47.947,3
3	Bunut	102,9	0,2	14.731,9	33,5	26.226,9	59,6	2.945,9	6,7	-	-	44.007,6
4	Kerumutan	14.509,2	15,2	27.652,3	29,0	37.117,3	39,0	15.937,0	16,7	-	-	95.215,8
5	Kuala Kampar	38.106,7	77,0	6.684,7	13,5	1.511,9	3,1	2.036,4	4,1	1.122,7	2,3	49.462,3
6	Langgam	2.485,7	2,0	37.841,5	30,0	66.648,9	52,8	19.149,4	15,2	-	-	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.266,3	11,6	6.819,6	35,0	6.899,2	35,4	3.523,5	18,1	-	-	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	1.702,5	0,8	45.379,2	22,2	141.112,3	68,9	16.535,3	8,1	-	-	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	412,6	1,3	24.678,7	75,8	7.086,1	21,8	360,9	1,1	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	34.484,7	32,2	11.978,3	11,2	34.060,8	31,8	26.735,2	24,9	-	-	107.259,1
11	Teluk Meranti	108.688,8	26,1	226.841,1	54,5	43.608,2	10,5	36.746,3	8,8	-	-	415.884,4
12	Ukui	43,4	0,1	23.167,9	34,2	31.815,8	47,0	12.733,7	18,8	-	-	67.760,8
Grand Total		204.452,8	16,5	467.092,9	37,8	419.520,3	33,9	143.968,6	11,6	1.122,7	0,1	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Sebagian besar (54,5%) wilayah Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Rendah, dan 77% dari luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah, serta 32,2% dari luas Kecamatan Pelalawan tergolong Sangat Rendah untuk rekreasi dan ekoturisme. Hal ini karena sebagian besar wilayah ini didominasi oleh ekoregion lahan gambut yang sebagian sudah diusahakan untuk hutan tanaman sehingga kurang menarik bagi wisatawan dibandingkan dengan daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang lebih mudah dijangkau. Meskipun demikian, ada fenomena alam yang punya potensi untuk dikembangkan untuk rekreasi dan ekoturisme, yaitu gelombang pasang bono di muara Sungai Kampar. Fenomena ini tergolong langka karena mempunyai jarak tempuh yang cukup panjang sehingga menarik peselancar dunia untuk datang dan mencoba tantangan berselancar di Sungai Kampar.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.46. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Budaya Rekreasi Dan *Tourism*

3.1.6.16. Budaya Estetika (C3)

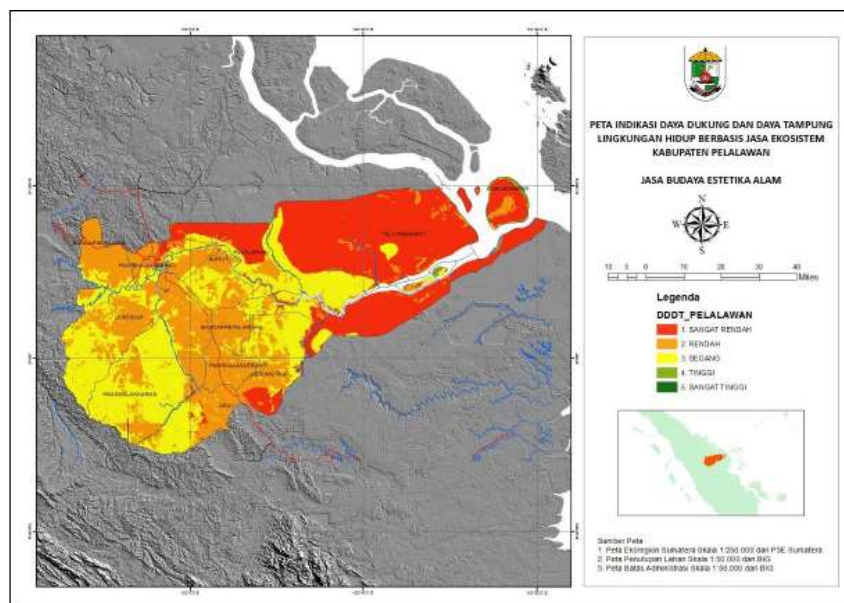
Secara umum, jasa ekosistem estetika Kabupaten Pelalawan memiliki nilai estetika Sangat Rendah hingga Sedang. Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk rekreasi dan ekoturisme meliputi: 34,4% tergolong Sedang, 34,0% tergolong Sangat Rendah, 30,9% tergolong Rendah, dan hanya 0,7% yang tergolong Tinggi dan Sangat Tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan dominasi ekoregion gambut, topografi datar dengan ketinggian dari permukaan laut yang rendah sehingga pemandangan kurang bervariasi dan tidak menarik estetika. Data sebaran jasa ekosistem budaya estetika Kabupaten Pelalawan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.64. Distribusi Luas Jasa Ekosistem Budaya Estetika Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	22.754,3	88,5	2.819,5	11,0	144,4	0,6	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	92,9	0,2	39.041,4	81,4	8.298,6	17,3	440,6	0,9	73,7	0,2	47.947,3
3	Bunut	-	-	21.959,5	49,9	22.048,1	50,1	-	-	-	-	44.007,6
4	Kerumutan	15.640,2	16,4	35.266,6	37,0	43.995,0	46,2	314,1	0,3	-	-	95.215,8
5	Kuala Kampar	39.790,3	80,4	5.001,1	10,1	1.511,9	3,1	3.064,3	6,2	94,8	0,2	49.462,3
6	Langgam	327,5	0,3	48.025,9	38,1	76.823,0	60,9	918,4	0,7	30,7	0,0	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.266,3	11,6	13.017,0	66,7	3.986,0	20,4	216,8	1,1	22,6	0,1	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	853,5	0,4	85.459,1	41,7	118.215,9	57,7	200,7	0,1	-	-	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	30.231,7	92,9	2.258,3	6,9	48,4	0,1	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	40.044,0	37,3	26.830,9	25,0	39.480,3	36,8	902,6	0,8	1,3	0,0	107.259,1
11	Teluk Meranti	318.596,7	76,6	20.142,0	4,8	74.887,5	18,0	2.231,2	0,5	27,1	0,0	415.884,4
12	Ukui	2.130,1	3,1	34.117,4	50,3	31.489,3	46,5	24,0	0,0	-	-	67.760,8
Grand Total		419.741,4	34,0	381.846,9	30,9	425.813,3	34,4	8.505,4	0,7	250,2	0,0	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa ekosistem estetika yang Tinggi dan Sangat Tinggi hanya tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Pulau Muda dan di pinggir Pulau Mendol yang masih mempunyai hutan mangrove yang diidentifikasi mempunyai jenis tanah alluvial. Sementara wilayah lembah antar perbukitan dataran alluvial yang ditutui hutan alam, hutan tanaman, semak belukar, dan perkebunan, termasuk di Taman Nasional Tesso Nilo hanya tergolong ke dalam kelas Sedang untuk jasa estetika.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.47. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Nilai Estetika Kabupaten Pelalawan

3.1.6.17. Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (S1)

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan meliputi: 46,9% tergolong Sedang, 17,9% tergolong Sangat

Rendah, dan hanya 13,3% yang tergolong Tinggi dan 7% tergolong Sangat Tinggi. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.65. Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Kesuburan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	121,0	0,5	21.699,6	84,4	1.939,3	7,5	1.958,3	7,6	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	51,0	0,1	21.004,4	43,8	18.229,6	38,0	2.207,3	4,6	6.455,0	13,5	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	14.718,5	33,4	25.598,9	58,2	628,0	1,4	2.945,9	6,7	44.007,6
4	Kerumutan	9.614,5	10,1	24.681,7	25,9	24.110,8	25,3	21.733,9	22,8	15.074,9	15,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	40.128,9	81,1	1.526,0	3,1	2.798,7	5,7	5.008,7	10,1	-	-	49.462,3
6	Langgam	133,7	0,1	39.778,2	31,5	45.008,3	35,7	26.664,1	21,1	14.541,1	11,5	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.521,5	12,9	6.314,1	32,4	6.895,6	35,3	493,3	2,5	3.284,1	16,8	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	386,4	0,2	46.096,6	22,5	67.853,4	33,1	74.417,0	36,3	15.975,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	452,7	1,4	24.606,3	75,6	5.927,5	18,2	1.551,7	4,8	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	8.231,3	7,7	30.541,3	28,5	26.930,2	25,1	15.732,6	14,7	25.823,8	24,1	107.259,1
11	Teluk Meranti	43.264,8	10,4	67.891,2	16,3	215.272,8	51,8	57.053,8	13,7	32.401,9	7,8	415.884,4
12	Ukui	639,5	0,9	20.071,3	29,6	23.685,8	35,0	10.654,5	15,7	12.709,7	18,8	67.760,8
	Grand Total	105.661,6	8,5	318.929,4	25,8	464.250,7	37,6	218.103,4	17,6	129.212,1	10,5	1.236.157,2

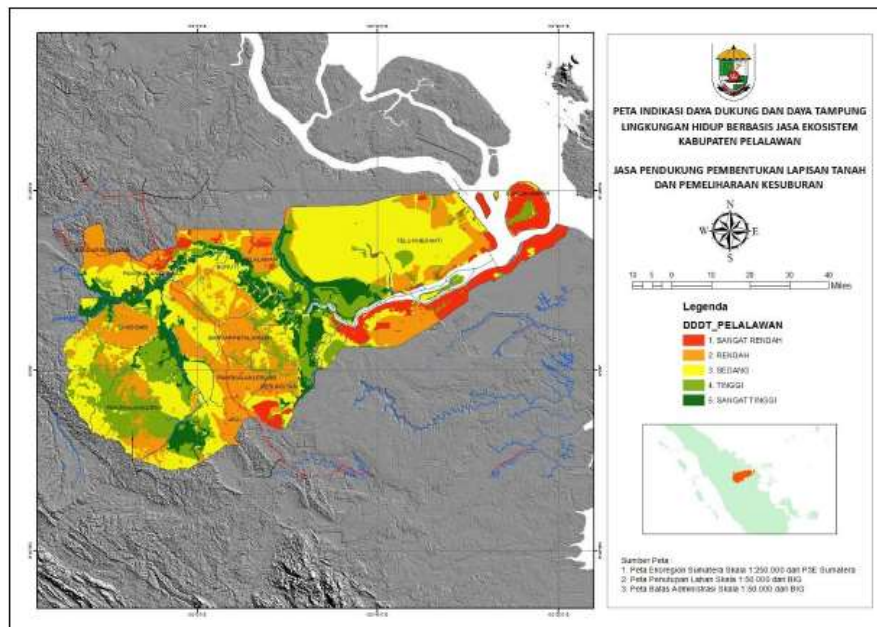
Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Sebagian besar (51,8%) wilayah Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Sedang, dan 81,1% dari luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah. Data ini menunjukkan bahwa jasa pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di wilayah pesisir ini tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar wilayah ini didominasi oleh ekoregion lahan gambut dengan jenis tanah organik yang miskin unsur hara dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya karena kondisinya anaerob. Di sisi lain, jenis tanah ini tergolong rentan terhadap gangguan hidrologis yang dapat berakibat kering tak balik apabila mengalami drainase berlebihan. Dampak ikutan yang khawatirkan dari akibat ini adalah terjadinya subsidensi permukaan tanah sehingga meningkatkan luas daerah banjir.

Secara genetik, material penyusun gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 1986). Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum (lapisan di bawahnya) berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada

bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh. Wilayah dengan jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang Tinggi hanya tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di sekitar Sungai Kutub, sebagian Pulau Mendol, dan Pulau Muda yang diidentifikasi mempunyai jenis tanah alluvial. Sementara itu, wilayah dengan jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan Sangat Tinggi hanya

terdapat di sekitar Sungai Kutub yang mempunyai jenis tanah alluvial dengan tutupan hutan rawa gambut yang masih baik.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.48. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Kesuburan Kabupaten Pelalawan

3.1.6.18. Pendukung Siklus Hara (S2)

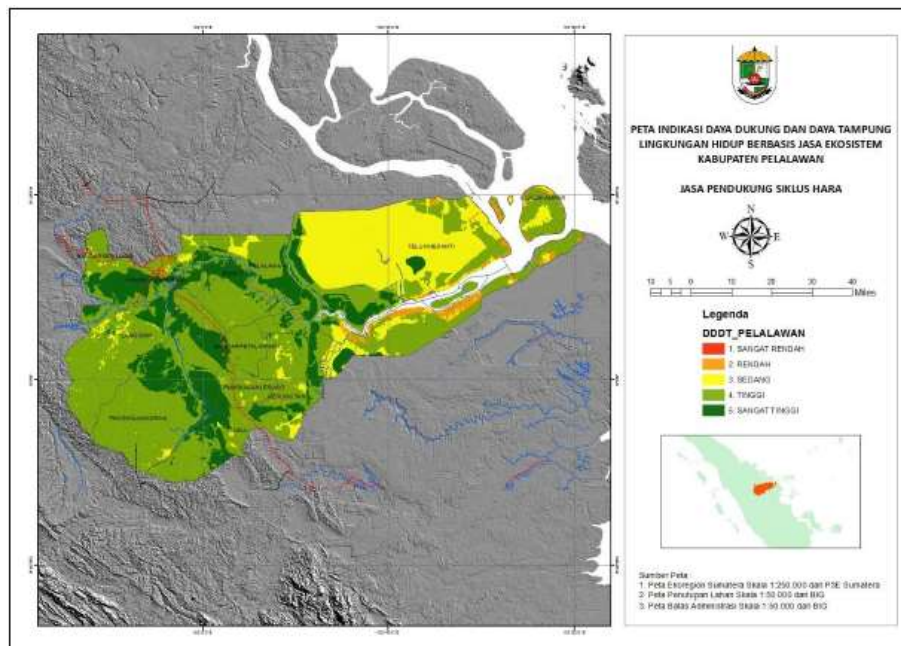
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk pendukung siklus hara meliputi: 49,1% tergolong Sedang, 36,6% tergolong Tinggi, dan 8,5% yang tergolong Sangat Tinggi. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.18. Sebagian besar (53%) wilayah Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Sedang, dan 71,1% dari luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas juga Tinggi. Data ini menunjukkan bahwa jasa pendukung siklus hara di wilayah pesisir ini tergolong sedang - tinggi. Hal ini karena sebagian besar wilayah ini didominasi oleh ekoregion lahan gambut yang ditutupi oleh hutan alam dan hutan tanaman sehingga terjadi siklus hara tertutup.

Wilayah dengan jasa ekosistem pendukung siklus hara yang Tinggi tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di hutan tanaman di sekeliling lansekap Semenanjung Kampar yang dikelola PT. RAPP dan grup Sinarmas Forestry dan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit di perkebunan campuran rakyat di sebelah selatan Sungai Kampar, Pulau Muda, dan di sekeliling Pulau Mendol. Sementara itu, wilayah dengan jasa ekosistem pendukung siklus hara Sangat Tinggi hanya terdapat di hutan tanaman di sekitar dan muara Sungai Kutub.

Tabel 3.66. Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung pendukung siklus hara Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	-	-	129,2	0,5	188,6	0,7	24.123,2	93,8	1.277,3	5,0	25.718,2
2	Bandar Seikijang	1,3	0,0	496,7	1,0	1.564,0	3,3	26.144,8	54,5	19.740,5	41,2	47.947,3
3	Bunut	-	-	116,3	0,3	112,9	0,3	36.431,1	82,8	7.347,3	16,7	44.007,6
4	Kerumutan	105,2	0,1	806,6	0,8	11.665,0	12,3	64.706,9	68,0	17.932,0	18,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	225,3	0,5	6.255,0	12,6	7.807,4	15,8	35.174,6	71,1	-	-	49.462,3
6	Langgam	2,0	0,0	964,7	0,8	6.036,3	4,8	105.432,7	83,6	13.689,9	10,9	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	459,5	2,4	863,3	4,4	331,6	1,7	10.989,0	56,3	6.865,2	35,2	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	73,6	0,0	706,6	0,3	2.002,1	1,0	138.235,3	67,5	63.711,7	31,1	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	-	-	460,8	1,4	1.144,4	3,5	25.215,6	77,5	5.717,5	17,6	32.538,3
10	Pelalawan	72,5	0,1	480,4	0,4	7.087,3	6,6	66.257,7	61,8	33.361,3	31,1	107.259,1
11	Teluk Meranti	975,9	0,2	19.425,4	4,7	220.539,2	53,0	135.314,4	32,5	39.629,6	9,5	415.884,4
12	Ukui	-	-	659,5	1,0	758,3	1,1	48.542,3	71,6	17.800,6	26,3	67.760,8
Grand Total		1.915,2	0,2	31.364,5	2,5	259.237,1	21,0	716.567,5	58,0	227.072,9	18,4	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.49. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Siklus Hara Kabupaten Pelalawan

3.1.6.19. Pendukung Produksi Primer (S3)

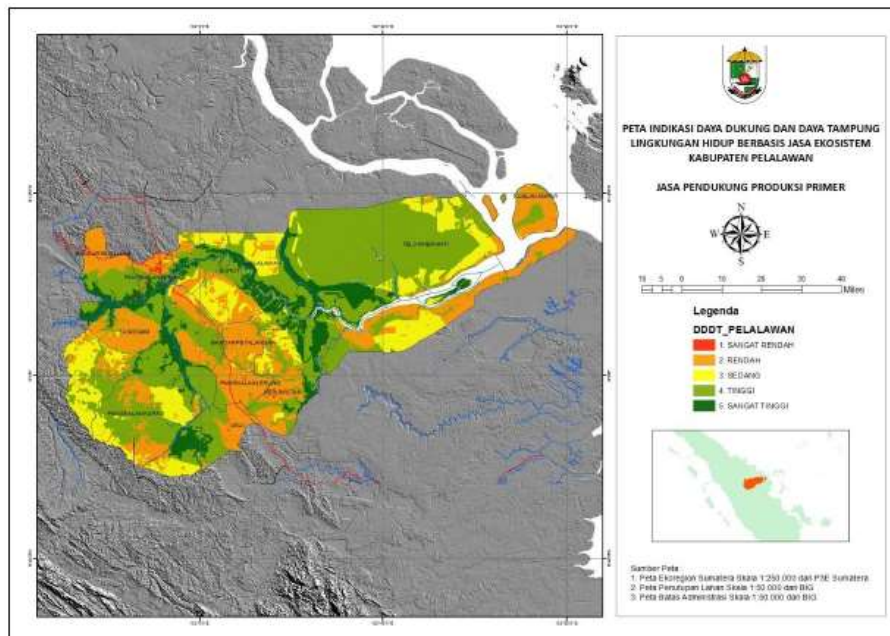
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk pendukung siklus hara meliputi: 58,8% tergolong Tinggi, 18% tergolong Rendah, dan 15,4% tergolong Sedang. Sebagian besar (64%) wilayah Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Tinggi, namun 81% dari luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Rendah dalam mendukung produksi primer. Hal ini karena sebagian besar wilayah Kecamatan teluk Meranti masih ditutupi oleh hutan alam sementara sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Kampar telah berubah menjadi perkebunan.

Tabel 3.67. Distribusi Luas Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	129,2	0,5	21.691,5	84,3	806,3	3,1	3.091,2	12,0	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	65,5	0,1	20.989,9	43,8	3,7	0,0	20.354,6	42,5	6.533,5	13,6	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	14.718,5	33,4	18.347,9	41,7	7.879,0	17,9	2.945,9	6,7	44.007,6
4	Kerumutan	467,2	0,5	32.687,1	34,3	11.216,2	11,8	35.769,2	37,6	15.076,1	15,8	95.215,8
5	Kuala Kampar	224,2	0,5	39.918,9	80,7	1.511,9	3,1	7.807,4	15,8	-	-	49.462,3
6	Langgam	136,2	0,1	39.770,3	31,5	33.978,4	26,9	37.642,3	29,8	14.598,4	11,6	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	1.033,2	5,3	7.531,8	38,6	402,9	2,1	7.247,8	37,2	3.293,0	16,9	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	399,8	0,2	46.081,6	22,5	28.407,5	13,9	113.862,5	55,6	15.977,9	7,8	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	460,8	1,4	24.598,2	75,6	226,1	0,7	7.253,1	22,3	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	71,4	0,1	12.549,5	11,7	28.758,7	26,8	39.420,6	36,8	26.458,9	24,7	107.259,1
11	Teluk Meranti	281,2	0,1	43.985,0	10,6	69.972,1	16,8	265.807,1	63,9	35.839,1	8,6	415.884,4
12	Ukui	640,1	0,9	20.070,7	29,6	9.429,4	13,9	24.910,9	36,8	12.709,7	18,8	67.760,8
Grand Total		4.025,1	0,3	324.593,1	26,3	203.061,0	16,4	571.045,7	46,2	133.432,4	10,8	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Wilayah dengan jasa ekosistem pendukung primer yang Tinggi tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di bagian tengah lansekap Semenanjung Kampar yang tertutup hutan alam rawa gambut, di tengah Pulau Mendol yang tertutup perkebunan rakyat, dan areal konsesi hutan tanaman di sekitar Sungai Kutub. Sementara itu, wilayah dengan jasa ekosistem pendukung produksi primer Sangat Tinggi terdapat di sekitar Sungai Kutub dan kawasan lindung HTI di Teluk Meranti yang tertutup oleh hutan alam.



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.50. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Pelalawan

3.1.6.20. Pendukung Biodiversitas (S4)

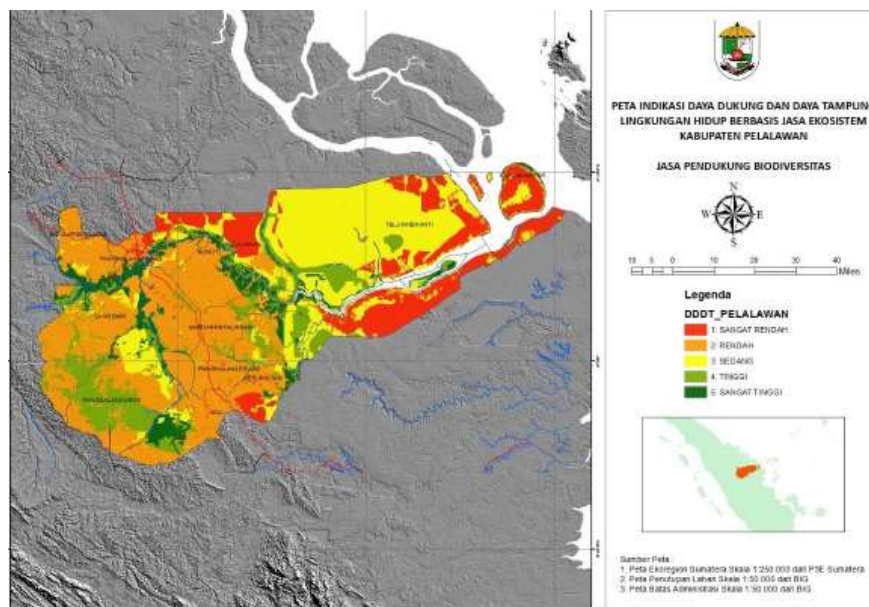
Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan untuk pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) meliputi: 55,5% tergolong Sedang, 29,2% tergolong Sangat Rendah, dan

hanya 8,8% yang tergolong Tinggi, dan 2,9% tergolong Sangat Tinggi. Sebagian besar (60%) wilayah Kecamatan Teluk Meranti memiliki lahan dengan kelas Sedang, dan 67,6% dari luas Kecamatan Kuala Kampar tergolong dalam kelas Sangat Rendah dalam mendukung biodiversitas. Hal ini karena sebagian besar wilayah pesisir ini merupakan ekoregion lahan gambut yang sebagian sudah diusahakan untuk hutan tanaman dan perkebunan. Secara alami, keanekaragaman hayati di hutan rawa gambut lebih rendah dibandingkan dengan hutan dataran rendah (lahan mineral). Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan perkebunan semakin menurunkan keanekaragaman hayati di wilayah ini.

Tabel 3.68. Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	1. Sangat Rendah		2. Rendah		3. Sedang		4. Tinggi		5. Sangat Tinggi		Total Luas (ha)
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
1	Bandar Petalangan	197,8	0,8	23.299,3	90,6	118,5	0,5	2.102,7	8,2	-	-	25.718,2
2	Bandar Seikijang	66,7	0,1	37.528,9	78,3	3.274,6	6,8	374,3	0,8	6.702,7	14,0	47.947,3
3	Bunut	116,3	0,3	40.214,5	91,4	199,3	0,5	605,2	1,4	2.872,3	6,5	44.007,6
4	Kerumutan	10.398,4	10,9	38.449,9	40,4	20.233,1	21,2	19.445,6	20,4	6.688,8	7,0	95.215,8
5	Kuala Kampar	33.421,9	67,6	4.721,2	9,5	8.685,8	17,6	1.576,1	3,2	1.057,2	2,1	49.462,3
6	Langgam	148,8	0,1	81.764,4	64,8	5.936,1	4,7	26.958,7	21,4	11.317,5	9,0	126.125,5
7	Pangkalan Kerinci	2.900,9	14,9	12.726,7	65,2	350,9	1,8	31,3	0,2	3.498,9	17,9	19.508,6
8	Pangkalan Kuras	1.061,4	0,5	111.194,8	54,3	25.737,8	12,6	56.319,3	27,5	10.415,9	5,1	204.729,3
9	Pangkalan Lesung	528,1	1,6	29.965,3	92,1	444,9	1,4	1.600,1	4,9	-	-	32.538,3
10	Pelalawan	34.540,5	32,2	24.808,6	23,1	20.415,3	19,0	12.088,3	11,3	15.406,4	14,4	107.259,1
11	Teluk Meranti	102.486,8	24,6	12.264,1	2,9	249.511,7	60,0	39.208,1	9,4	12.413,7	3,0	415.884,4
12	Ukui	844,8	1,2	43.133,0	63,7	4.324,8	6,4	6.729,1	9,9	12.729,2	18,8	67.760,8
Grand Total		186.712,4	15,1	460.070,6	37,2	339.232,8	27,4	167.038,7	13,5	83.102,8	6,7	1.236.157,2

Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: Dokumen Kajian DDDTLH DLH Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Gambar 3.51. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Pelalawan

3.2. Analisis Ekonomi dan Fiskal Daerah

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Pelalawan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2017. Secara berturut-turut pada sub-bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan Kabupaten Pelalawan, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

1) Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015 – 2019 rata-rata tumbuh sebesar 6,87 persen. Ditahun 2015 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 1,31 triliun dan terus meningkat hingga diahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,70 triliun. Ditahun 2017 hingga tahun 2018 realisasi pertumbuhan pendapatan daerah walaupun masih positif namun cenderung menurun yaitu dari 4,32 persen menjadi sebesar 0,25 persen dan meningkat relatif tinggi ditahun 2019 sebesar 15,80 persen. Selama tahun 2015-2019 lebih kurang terdapat sebanyak 14 OPD sebagai penghasil sumber Pendapatan Daerah. Organisasi perangkat daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan antara lain Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu.

Tabel 3.69. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	49.439.117.112,00	0,00	14.434.298,00
2	Dinas Kesehatan	8.495.270.750,00	9.328.974.575,00	31.928.373.531,00	32.924.092.047,00	36.212.284.785,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	10.786.939.714,00	17.631.213.067,46			
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1.736.723.000,00	1.697.773.250,00	1.349.661.420,00	978.570.100,00	907.362.000,00
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	116.270.000,00	121.705.000,00			
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00		
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1.820.004.564,00	1.437.903.843,00	1.936.464.824,00	1.274.896.142,84	2.274.776.712,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	168.183.000,00	473.828.000,00	461.455.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00		
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00		
11	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00		
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00		
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	322.600.000,00	318.800.000,00	723.369.280,00	1.085.622.280,00	603.160.000,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2.402.331.570,00	8.168.164.904,00	6.603.977.482,00	1.605.368.298,00	1.531.780.987,09
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00		
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	0,00	0,00	0,00		
17	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00		
18	DPRD	0,00	0,00	0,00		
19	KDH & Wakil KDH	0,00	0,00	0,00		
20	Sekretariat Daerah	1.256.646.816.344,30	1.330.146.599.447,78	21.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00		

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0,00	0,00	0,00		
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00		
24	Inpektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00		
25	Kecamatan Pelalawan	0,00	0,00	0,00		2.406,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci	0,00	0,00	0,00		87.879,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang	0,00	0,00	0,00		2.282,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras	0,00	0,00	0,00		
29	Kecamatan Kuala Kampar	0,00	0,00	0,00		3.740,00
30	Kecamatan Teluk Meranti	0,00	0,00	0,00		39.436,00
31	Kecamatan Ukui	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Kecamatan Bandar Petalangan	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Kecamatan Langgam	0,00	0,00	0,00		11.689,00
34	Kecamatan Bunut	0,00	0,00	0,00		
35	Kecamatan Pangkalan Lesung	0,00	0,00	0,00		
36	Kecamatan Kerumutan	0,00	0,00	0,00		
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.961.193.893,46	35.892.441.992,47	1.372.568.076.793,88	1.430.450.683.997,29	1.658.879.174.860,95
38	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00		
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0,00	0,00			
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00		
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00		
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00		
43	Dinas Peternakan	5.184.000,00	5.040.000,00			
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	626.749.000,00	185.173.000,00	252.125.000,00
45	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00			
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00			
47	Dinas Perikanan dan Kelautan	10.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	30.462.000,00	37.660.000,00
	JUMLAH	1.311.303.333.835,76	1.404.762.616.079,71	1.465.379.972.442,88	1.469.020.695.865,13	1.701.183.861.075,04

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019

Tidak dapat dipungkiri ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selama tahun 2015-2019 sumber keuangan daerah Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Dana Perimbangan/transfer pemerintah pusat mencapai sebesar Rp. 6,2 triliun. Jenis sumber pendapatan daerah lainnya yang cukup besar adalah transfer pemerintah provinsi yang selama periode 2015-2019 mencapai sebesar Rp. 335,90 milyar. Sementara itu, tingkat kemandirian fiskal selama periode 2015-2019 yang tercermin dari ratio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 9,39 persen. Total Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2019 mencapai sebesar Rp. 590,36 milyar. Jenis Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi cukup besar adalah Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp. 326,73 milyar. Kontribusi Pajak Daerah mencapai sebesar Rp. 274,72 milyar dan kontribusi Retribusi Daerah mencapai sebesar Rp. 33,00 milyar, serta kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai sebesar Rp. 55,91 milyar.

Berbagai jenis sumber pendapatan daerah dikelola oleh beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Pelalawan. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh OPD Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, dimana selama tahun 2015-2019 total pajak daerah yang terhimpun mencapai sebesar Rp. 274,72 milyar. Pemungutan Retribusi Daerah dipungut oleh beberapa OPD antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sekretariat Daerah, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan dengan total realisasi Retribusi Daerah yang dipugut selama tahun 2015-2019 sebesar Rp. 33,00 milyar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikontribusi oleh Sekretariat Daerah dengan total nilai yang dikontribusi mencapai Rp. 55,91 milyar selama tahun 2015-2019. Lain-lain PAD yang sah dipungut oleh beberapa OPD antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan OPD lainnya.

Tabel 3.70. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD dan Jenis Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	Dinas Pendidikan			0,00	49.453.551.410,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan			0,00	118.888.995.688,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih			0,00	28.418.152.781,46	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		237.975.000,00	0,00	6.670.089.770,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan							
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi		8.736.159.721,00	0,00	7.886.364,84	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup		1.103.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kesejahteraan Sosial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		2.414.885.000,00	0,00	638.666.560,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu		20.300.421.241,09	0,00	11.202.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DPRD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KDH & Wakil KDH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah		83.500.000,00	23.228.320.809,45	63.621.190.840,61	2.372.696.739.727,89	127.206.164.414,13	0,00
21	Sekretariat DPRD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inpektorat Kabupaten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Pelalawan			0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci			0,00	87.879,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang			0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Kuala Kampar			0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Teluk Meranti			0,00	39.436,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Ukui			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Bandar Petalangan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Langgam			0,00	11.689,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Bunut			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pangkalan Lesung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Kerumutan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	274.716.175.106,22		32.683.752.893,00	57.967.090.908,65	3.829.157.316.064,73	208.691.887.370,27	123.535.349.195,18
38	Badan Kepegawaian Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			0,00	1.051.205.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Dinas Peternakan		23.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dinas Pertambangan dan Energi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	dan Olahraga							
47	Dinas Perikanan dan Kelautan		107.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	274.716.175.106,22	33.006.594.962,09	55.912.073.702,45	326.728.178.755,56	6.201.854.055.792,62	335.898.051.784,40	123.535.349.195,18

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Trend Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015-2019 menunjukkan pelambatan. Ditahun 2015 belanja daerah mencapai sebesar Rp. 1,68 triliun dan turun menjadi sebesar Rp. 1,64 triliun ditahun 2016. Penurunan belanja daerah terus terjadi hingga ditahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1,10 triliun ditahun 2018 dan meningkat ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,52 triliun.

Distribusi belanja daerah terbesar dialokasikan untuk urusan Pendidikan, pekerjaan umum, dan pelayanan pemerintahan umum. Realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan ditahun 2015 mencapai sebesar Rp. 432,02 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 455,32 milyar ditahun 2016. Ditahun 2017 realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan relatif lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 413,29 milyar demikian juga ditahun 2018 realisasi belanja dinas Pendidikan menjadi sebesar Rp. 386,93 milyar. Ditahun 2019 realisasi belanja Dinas Pendidikan meningkat menjadi sebesar Rp. 439,68 milyar. Realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditahun 2015 mencapai sebesar Rp. 361,22 milyar dan cenderung turun hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 133,92 milyar. Demikian juga pada Sekretariat Daerah realisasi belanja turun dari sebesar Rp. 291,64 milyar turun menjadi sebesar Rp. 60,39 milyar ditahun 2019. Realisasi Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset meningkat dari sebesar Rp. 14,45 milyar menjadi sebesar Rp. 260,49 milyar ditahun 2019.

Tabel 3.71. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dinas Pendidikan	432.016.764.733,83	455.320.180.439,03	413.286.957.695,58	386.928.312.118,68	439.684.356.145,99
2	Dinas Kesehatan	68.738.130.606,04	86.199.453.988,48	174.147.393.367,46	145.122.395.903,20	203.874.214.021,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	55.488.611.822,72	67.747.099.837,08			
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	361.221.296.583,30	349.338.504.112,72	176.661.483.329,57	124.197.695.549,32	133.923.876.797,49
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	30.017.911.489,31	19.211.095.169,82			
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.444.683.448,75	11.122.578.768,00	10.865.718.040,00	10.739.527.326,00	11.643.765.582,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	16.891.904.089,92	15.435.995.647,13	25.955.547.429,77	22.410.901.418,57	32.187.594.560,24
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.693.512.377,15	6.095.039.008,80	18.651.764.944,93	16.497.167.352,00	21.860.937.324,51
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.987.744.039,00	6.920.372.905,00	8.958.012.890,00	9.613.988.422,00	9.825.402.896,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.360.858.275,63	9.401.819.130,00	10.780.691.338,42	11.389.825.335,00	7.161.185.991,00
11	Dinas Kesejahteraan Sosial	8.268.628.532,65	7.431.237.143,60	6.925.660.955,00	5.592.484.067,00	7.721.283.472,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.750.979.088,00	6.222.474.390,76	5.373.120.917,00	4.243.856.886,00	5.201.578.122,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	20.311.648.969,95	15.219.925.928,74	15.578.724.142,44	10.739.835.960,31	7.726.142.210,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	10.961.913.985,00	10.594.310.287,00	9.377.751.930,00	8.796.576.722,00	11.842.971.463,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.802.196.943,00	5.284.828.105,00	5.380.461.145,00	5.103.659.552,00	6.023.596.297,00
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	11.336.589.885,81	6.876.186.163,00	6.073.714.250,00	7.580.943.120,00	6.341.247.921,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	18.522.204.340,00	18.152.587.820,00	19.734.744.593,00	26.219.488.232,00	21.181.390.499,89
18	DPRD	11.060.325.334,00	11.397.081.617,00	14.158.767.629,00		
19	KDH & Wakil KDH	316.892.294,00	413.310.938,00	463.559.876,00	471.697.526,00	466.876.376,00
20	Sekretariat Daerah	291.642.012.924,00	263.363.708.356,00	60.937.014.060,00	53.573.695.718,00	60.387.982.011,00
21	Sekretariat DPRD	43.235.994.537,55	44.043.553.588,00	43.988.891.620,00	55.972.698.130,45	60.569.687.647,00
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.935.247.025,00	1.860.420.668,00	2.115.943.170,00	1.665.928.650,00	1.971.576.174,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.371.692.682,00	5.792.634.130,00	5.851.013.404,00	4.817.845.846,00	5.976.989.842,00
24	Inpektorat Kabupaten	10.168.047.701,00	11.092.627.671,00	11.001.501.044,00	11.426.338.176,00	15.043.922.666,00

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
25	Kecamatan Pelalawan	3.556.401.152,00	3.612.102.458,00	4.124.545.201,00	3.146.754.581,00	5.020.871.483,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci	6.730.609.569,00	6.669.196.554,00	8.284.453.028,68	8.053.719.565,88	10.131.072.516,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang	3.892.980.954,00	3.837.348.702,00	4.257.789.502,00	4.039.973.620,00	4.734.752.539,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras	4.388.616.843,00	4.620.243.661,00	5.248.142.976,00	5.105.779.353,11	5.686.681.016,00
29	Kecamatan Kuala Kampar	3.372.362.727,00	3.578.467.334,00	4.428.072.656,00	3.981.315.204,00	4.888.471.146,00
30	Kecamatan Teluk Meranti	3.844.053.008,00	3.637.773.292,00	4.384.999.289,20	4.102.625.815,00	4.949.444.576,00
31	Kecamatan Ukui	3.589.510.558,00	3.838.309.429,00	4.436.484.768,79	4.052.681.891,00	4.391.446.387,98
32	Kecamatan Bandar Petalangan	4.054.874.499,00	3.770.151.305,00	4.049.839.002,00	3.798.590.876,00	4.687.879.915,00
33	Kecamatan Langgam	5.130.742.667,00	4.754.888.658,00	5.711.410.910,00	4.900.677.765,00	5.953.904.562,00
34	Kecamatan Bunut	4.423.025.979,00	4.455.777.530,00	4.687.210.597,00	4.083.441.171,00	4.940.948.796,00
35	Kecamatan Pangkalan Lesung	3.837.118.335,00	3.668.686.740,00	4.394.527.903,00	4.062.015.413,00	4.777.111.750,34
36	Kecamatan Kerumutan	3.560.836.785,00	3.759.835.336,00	4.430.789.626,00	3.731.836.747,00	4.348.630.938,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.446.153.394,00	12.931.121.451,00	227.625.401.548,76	37.719.491.959,00	260.489.304.018,84
38	Badan Kepegawaian Daerah	11.356.856.265,00	11.993.927.465,00	9.485.197.041,00	7.362.882.308,00	11.313.695.557,00
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	10.484.537.581,00	10.074.239.909,95			
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	23.253.890.079,85	19.123.747.809,38	16.613.824.263,62	9.712.667.906,00	18.689.663.560,31
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.828.308.116,00	2.828.840.332,00	4.682.657.481,00	5.678.185.098,00	6.565.317.979,87
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	20.970.643.705,41	21.124.966.752,58	22.520.928.152,69	18.473.456.158,00	20.673.506.229,74
43	Dinas Peternakan	17.357.270.268,00	11.264.549.663,00			
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.681.607.523,89	23.185.931.286,51	22.008.610.873,00	18.584.585.427,00	33.598.110.860,51
45	Dinas Pertambangan dan Energi	29.477.301.807,74	15.334.837.563,05			
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	18.719.811.480,76	16.058.126.867,98	19.750.904.055,76	15.066.091.644,51	25.465.299.070,98
47	Dinas Perikanan dan Kelautan	12.660.738.492,09	10.473.398.333,00	7.270.661.339,00	7.680.029.074,00	8.582.999.395,00
	JUMLAH	1.684.164.043.497,35	1.639.133.494.244,61	1.434.664.887.985,67	1.096.441.663.587,03	1.520.505.690.317,21

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada bidang Kesehatan, namun juga telah berdampak pada bidang ekonomi dan sosial lainnya. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan daerah secara nasional turun 15,81 persen akibat pandemi covid-19. Rata-rata pendapatan dari 530 daerah tersebut hanya Rp1.042,69 triliun. Dampak Pandemi Covid 19 juga dirasakan oleh Kabupaten Pelalawan beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan. Selama tahun 2015-2019 rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan tumbuh sebesar 6,87 persen. Ditahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan yang telah mencapai sebesar Rp. 1,70 triliun diperkirakan dengan adanya pandemic covid 19 ditahun 2020 akan terkoreksi dan jika menggunakan asumsi koreksinya nasional sebesar 15,00 persen maka diperkirakan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan ditahun 2020 turun menjadi sekitar Rp. 1,45 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2021-2025 rata-rata sebesar 5,20 persen maka dapat diestimasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan akan dapat meningkat dari sebesar Rp. 1,52 triliun ditahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1,86 triliun ditahun 2025.

Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam menghasilkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD yang akan memiliki peranan terbesar dalam menghimpun pendapatan daerah. Diperkirakan pada tahun 2021 pendapatan daerah yang dihimpun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai sebesar Rp. 1,11 triliun dan diharapkan akan dapat terus ditingkatkan hingga ditahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 1,26 triliun. Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Pelalawan yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah yang besar adalah Sekretariat Daerah, dimana pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 361,27 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 542,59 milyar ditahun 2025. Sumber pendapatan daerah lainnya juga diharapkan dapat berasal dari OPD pada urusan Kesehatan dengan perkiraan pendapatan daerah yang disumbangkan ditahun 2021 sebesar Rp. 31,27 milyar dan diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga ditahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 45,21 milyar.

Tabel 3.72. Estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)

No.	Usuran Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dinas Pendidikan	9.759,44	9.538,83	9.297,91	9.034,73	8.747,05
2	Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	31.269,24	34.307,52	37.625,32	41.249,89	45.211,68
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	1.266,08	1.071,90	859,86	628,21	375,01
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1.819,60	1.938,57	2.068,48	2.210,41	2.365,54
6	Dinas Lingkungan Hidup	277,83	373,86	478,73	593,29	718,51
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	644,44	701,14	763,05	830,68	904,61
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.736,72	3.189,49	2.591,92	1.939,09	1.225,53
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KDH & Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah - Kecamatan	361.271,53	197.862,22	187.544,63	500.508,36	542.589,31
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Inpektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Pelalawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Pangkalan Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Bandar Seikijang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pangkalan Kuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Kuala Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Teluk Meranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Ukui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bandar Petalangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
31	Kecamatan Langgam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Bunut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pangkalan Lesung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kerumutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.105.100,92	1.341.878,38	1.432.313,98	1.206.876,10	1.260.464,16
36	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan	244,06	293,14	346,73	405,29	469,29
42	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dinas Perikanan dan Kelautan	24,73	30,27	36,33	42,95	50,19
	JUMLAH	1.515.414,58	1.591.185,31	1.673.926,95	1.764.319,00	1.863.120,87

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan asumsi bahwa kebijakan belanja daerah adalah berimbang yaitu perkiraan besarnya belanja daerah sama dengan perkiraan besarnya pendapatan daerah, maka untuk perencanaan jangka menengah kedepan, maka besarnya perkiraan belanja daerah ditahun 2021 hingga tahun 2025 sama dengan besarnya perkiraan pendapatan daerah untuk tahun tersebut. Dengan demikian besarnya belanja daerah ditahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1,52 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp. 1,59 triliun ditahun 2022. Dampak Pandemic Covid 19 terhadap perekonomian diperkirakan pemulihannya masih akan dirasakan hingga tahun 2023, maka hal ini akan menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan akan mengalami pelambatan. Seiring dengan pelambatan pendapatan daerah, maka akan diikuti dengan pelambatan belanja daerah. Belanja daerah ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 1,67 triliun dan akan terus bergerak naik menjadi sebesar Rp. 1,86 triliun ditahun 2019.

Belanja daerah Kabupaten Pelalawan dalam jangka menengah kedepan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pelayanan umum. Estimasi Belanja Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan diperkirakan ditahun 2021 sebesar Rp. 429,53 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 464,67 milyar. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur diharapkan kedepan akan ditingkatkan melalui peningkatan penyediaan anggaran pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun perkiraan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang ditahun 2021 sebesar Rp. 256,43 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 407,05 milyar ditahun 2025. Anggaran Pelayanan umum melalui Sekretariat daerah diperkirakan akan meningkat dari sebesar Rp. 161,62 milyar ditahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 296,20 milyar ditahun 2025.



Tabel 3.73. Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dinas Pendidikan	429.532,91	437.189,32	445.550,11	454.683,96	464.667,59
2	Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	160.000,07	159.506,49	158.967,49	158.378,66	157.735,05
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	256.428,64	289.250,36	325.091,68	364.246,94	407.045,10
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.209,03	11.294,81	11.388,49	11.490,83	11.602,69
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	22.205,43	21.510,27	20.751,14	19.921,83	19.015,36
6	Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pertambangan dan Energi	24.343,78	26.258,38	28.349,13	30.633,19	33.129,75
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.283,65	7.951,09	7.587,94	7.191,21	6.757,57
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.448,24	9.128,48	8.779,30	8.397,83	7.980,87
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	7.355,91	7.670,83	8.014,73	8.390,43	8.801,08
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.715,77	6.010,69	6.332,74	6.684,56	7.069,12
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.362,01	15.199,23	16.113,48	17.112,25	18.203,95
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	10.475,05	10.775,53	11.103,66	11.462,12	11.853,94
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.557,32	5.629,22	5.707,74	5.793,51	5.887,27
14	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	7.766,97	8.001,65	8.257,93	8.537,90	8.843,91
15	Satuan Polisi Pamong Praja	20.223,05	19.212,89	18.109,80	16.904,71	15.587,51
16	DPRD - Sekretariat DPRD	56.826,63	56.716,50	56.596,23	56.464,84	56.321,23
17	KDH & Wakil KDH	418,69	404,12	388,21	370,83	351,84
18	Sekretariat Daerah	161.628,86	190.953,15	222.975,28	257.958,23	296.195,88
19	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.925,43	1.954,68	1.986,62	2.021,51	2.059,65
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.376,49	5.403,56	5.433,13	5.465,44	5.500,75
21	Inpektorat Kabupaten	11.721,20	11.673,80	11.622,04	11.565,49	11.503,69
22	Kecamatan Pelalawan	3.930,76	4.003,15	4.082,20	4.168,55	4.262,94
23	Kecamatan Pangkalan Kerinci	7.896,03	7.750,27	7.591,10	7.417,21	7.227,15
24	Kecamatan Bandar Seikijang	4.144,92	4.130,60	4.114,95	4.097,86	4.079,18



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
25	Kecamatan Pangkalan Kuras	4.971,07	4.898,32	4.818,88	4.732,09	4.637,23
26	Kecamatan Kuala Kampar	4.018,12	3.958,87	3.894,17	3.823,49	3.746,23
27	Kecamatan Teluk Meranti	4.164,61	4.128,68	4.089,44	4.046,58	3.999,73
28	Kecamatan Ukui	4.037,15	3.991,16	3.940,94	3.886,07	3.826,11
29	Kecamatan Bandar Petalangan	4.086,99	4.114,59	4.144,73	4.177,66	4.213,65
30	Kecamatan Langgam	5.297,65	5.311,39	5.326,38	5.342,76	5.360,67
31	Kecamatan Bunut	4.545,36	4.596,47	4.652,28	4.713,26	4.779,91
32	Kecamatan Pangkalan Lesung	4.130,72	4.098,54	4.063,39	4.025,00	3.983,04
33	Kecamatan Kerumutan	3.960,58	3.949,69	3.937,80	3.924,82	3.910,62
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	109.443,85	107.197,97	104.745,46	102.066,19	99.137,65
35	Badan Kepegawaian Daerah	10.616,39	11.204,60	11.846,92	12.548,63	13.315,63
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	18.316,01	19.885,02	21.598,38	23.470,16	25.516,09
37	Kantor Arsip dan Perpustakaan	4.572,88	4.303,42	4.009,17	3.687,72	3.336,36
38	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan	25.745,10	27.395,42	29.197,57	31.166,35	33.318,31
39	Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan	31.871,25	34.748,06	37.889,54	41.321,48	45.072,72
40	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.237,09	19.658,83	20.119,36	20.622,48	21.172,41
41	Dinas Perikanan dan Kelautan	9.622,94	10.165,23	10.757,41	11.404,34	12.111,46
	JUMLAH	1.515.414,58	1.591.185,31	1.673.926,95	1.764.319,00	1.863.120,87

Sumber : Data Olahan, 2020



3.3 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

Peran para pihak dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari *Stakeholder* Aktif misalnya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan BKM, sedangkan ASOSIASI / FORUM / ORMAS / LSM yang masih aktif dan berkontribusi untuk Kabupaten Pelalawan. Dalam konteks ini, aktif yang dimaksud adalah masih melakukan aktifitas program dan kegiatan secara rutin sesuai bidangnya. Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian dari indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap daerah di Indonesia. Artinya, para pihak ini sudah berkontribusi dan membantu Pemerintah Kabupaten dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Akan tetapi, masih terdapat indikator yang dapat dilakukan oleh para pihak selain organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini, Kabupaten Pelalawan dapat memberdayakan para pihak yang saat ini keberadaannya kurang aktif dengan cara membangkitkan kembali para pihak yang sudah tidak aktif dengan cara memberikan arahan program dan kegiatan untuk membantu Kabupaten Pelalawan dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator TPB. Adapun peran parapihak Kabupaten Pelalawan dalam Pencapaian TPB disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 3.74. Peran Para Pihak Kabupaten Pelalawan dan Pencapaian TPB

No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
1	PT. Gandaerah Hendana	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
2	PT. Makmur Andalan Sawit	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
3	PT. Guna Setia Pratama	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
4	PT. Agrita Sari Prima	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
5	PT.Cakra Alam Sejati	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
6	PT.Jalur Pusaka Sakti Kumala	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
7	PT.Mitra Hutani Jaya	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
8	PT. Musim Mas	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
9	PT.Nusa Prima Manunggal	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
10	PT.Sawit Mas Nusantara	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">Kec. Langgam
11	PT. Bumi Siak Pusako	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci (Tahun 2017)Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten PelalawanBantuan Pemasangan Lampu Hias dan Aksesoris Lainnya Ruang Publik Kreatif (RPK)	<ul style="list-style-type: none">Kec. Pkl.Kerinci, dan Kec. Langgam
12	PT. EMP Bentu Ltd	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci (Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none">Kec. Pkl.Kerinci



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
13	PT. Serikat Putera	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci dan Kec. Langgam
14	PT. Langgam Inti Hibrida	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci dan Kec. Langgam
15	PT. Safari Riau	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tpb 3	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan Bantuan Cuci Parit Kebun Milik Masyarakat Bantuan Honor Kepala Desa Harapan Jaya Bantuan CSR Tetap/Rutin per 3 bulan Bantuan gorong-gorong di Sekolah TK & SD Bantuan pembuatan sumur bor Mushola Al Fatah Btn Al Qur'an & Pengurus Masjid Sfr. Ramadhan Btn. Kabel Listrik untuk Mengalirkan Arus PLN Bantuan Pembangunan Jembatan Penghubung Bantuan Honor Kepala Desa Bantuan Greader Perawatan Jalan Desa Bantuan Turnamen Pencak Silat Bantuan Honor Kepala Desa Bantuan Honor Kepala Desa Bantuan Rutin/CSR Tetap per bulan B. Transportasi & Penginapan Kegiatan Konvensi Safari Ramadhan di Desa Palas Ikatan Pelajar & Mahasiswa Pelalawan Bersatu Ikatan Pelajar & Mahasiswa Kec. Pkl. Kuras Bantuan Pelantikan Pengurus IPM-PB 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci Kec. Langgam, IPM-PB IPM-KPK Ikatan Pelajar & Mahasiswa PB Al-Qasimiyah Sorek Nabil FC Pelalawan LBH Tuah Negeri Nusantara Ikatan Pemuda Karya Cup Gerakan Pemuda Plwn Sehat Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) Laskar Melayu



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Sarana Yayasan Pendidikan Islam Bantuan Football Club Bantuan organisasi Lembaga Bantuan Hukum Bantuan Lomba Dayung Perahu Naga Bantuan Penanggulangan Demam Berdarah Bantuan Bea Siswa Sampai Selesai (Periode Tahun 2018/2 semester) Bantuan Turnamen Cup Bantuan Tiang Listrik untuk Pemasangan Aliran Listrik PLN Bantuan Pembangunan Taman Median Jalan Bantuan MTQ Tingkat Kecamatan Bantuan HUT RI Ke-73 Tingkat Kecamatan Lmba PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Bantuan Operasional Rumah Ibadah Bantuan HUT RI Desa Harapan Jaya Bantuan HUT RI Desa Sialang Indah Bantuan HUT RI Desa Palas Bantuan HUT RI Desa Kemang Bantuan Kontrak Gedung Sekretariat Bantuan Kegiatan Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Bersatu Tokoh Masyarakat T. Manuk (Bpk. Jantan) Kota P. Kerinci Kab. Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras Kecamatan Pangkalan Kuras Kecamatan Pangkalan Kuras Ikatan Pelajar Mhs Kec. P. Kuras Ikatan Peljr Mhs Pellwn Bersatu
16	PT. Sinar Siak Dian Permai	TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> Renovasi Ruang Kelas (pemasangan keramik, daun jendela dan pintu) SDN 001 Bdr. Seikijang Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa ST2P Kab. Pelalawan Partisipasi kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Partisipasi kegiatan kunjungan menteri ke Pelalawan Bantuan paket prasejahtera untuk masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Langgam Kec. Langgam Kec. Bdr.Seikijang SMKN Bdr. Seikijang, SMK Kimia Pkl. Kerinci, SMKN



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			rangka peringatan hari raya idul fitri • Bantuan Sapi Kurban Hari Raya Idul Adha • • Bantuan Sembako dalam rangka kegiatan suluk • Perayaan Maulid Nabi SAW • Bantuan Notebook utk polsek Seikijang • Bantuan Sembako Korban Banjir Kab.Pelalawan melalui Dinas Sosial • Bantuan Bahan Bangunan untuk pembangunan Mushola Ubudiyah Suluk Kec. Bdr. Seikijang • Kesempatan Magang pelajar dan Mahasiswa • Partisipasi dalam kegiatan MTQ • Partisipasi dalam Pelalawan Expo • Pemberdayaan Kontraktor lokal utk pengembangan janjangan kosong • Pemberdayaan Bumdes Muda Amanah untuk Penjualan Solid • Renovasi Ruang Kelas (pemasangan keramik, daun jendela dan pintu) SDN 001 Bdr. Seikijang • Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa ST2P Kab. Pelalawan • Partisipasi kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) • Partisipasi kegiatan kunjungan menteri ke Pelalawan • Bantuan paket prasejahtera untuk masyarakat dalam rangka peringatan hari raya idul fitri • Bantuan Sapi Kurban Hari Raya Idul Adha • Bantuan Sembako dalam rangka kegiatan suluk • Perayaan Maulid Nabi SAW • Bantuan Notebook utk polsek Seikijang	6 Pekanbaru, UIR dan UNRI • Kab. Pelalawan • Kab. Pelalawan • Kec. Langgam • Kec. Langgam • Kec. Bdr.Seikijang • SMKN Bdr. Seikijang,SMK Kimia Pkl. Kerinci, SMKN 6 Pekanbaru, UIR dan UNRI • Kab. Pelalawan • Kab. Pelalawan • Kec. Langgam



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Sembako Korban Banjir Kab.Pelalawan melalui Dinas Sosial Bantuan Bahan Bangunan untuk pembangunan Mushola Ubudiyah Suluk Kec. Bdr. Seikijang Kesempatan Magang pelajar dan Mahasiswa Partisipasi dalam kegiatan MTQ Partisipasi dalam Pelalawan Expo Pemberdayaan Kontraktor lokal utk pengembangan janjangan kosong Pemberdayaan Bumdes Muda Amanah untuk Penjualan Solid 	
17	PT. Bank Riau - Kepri	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci
18	PT. Surya Brantasena	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci Pembinaan Instansi Bantuan Pendidikan Bantuan Non Program Sosial dan Kepemudaan (Proposal) Bantuan Pembinaan (Tanah Kas Desa) Pembuatan Bloking Kanal Manual Bantuan Alat Berat (Grader, Compactor, Excavator) Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa ST2P Kab. Pelalawan 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci Kec. Langgam
19	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pkl.Kerinci	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci
20	PT. Sumber Sawit Sejahtera	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci
	PT.Sari Lembah Subur	TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci (Tahun 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci Kec. Langgam



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
		Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa ST2P Kab. Pelalawan 	
21	PT. Guna Dodos	TPB 1. Tanpa Kemiskinan TPB 4 Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Santunan Fakir Miskin Santunan Fakir Miskin Santunan Fakir Miskin Santunan Anak Yatim Santunan Anak Yatim Santunan Anak Yatim Santunan Orang Jompo Santunan Orang Jompo Santunan Masyarakat Sekitar Mesjid Nurul Hijrah-Lobuk Ogung Mesjid Nurul Hijrah-Kiyap Jaya Mesjd Al Rahman P. Kayu Arang Mushola Al Ikhlas Muda Setia Mesjid Nurul Hidayah P. Kayu Arang Mushola Al Ikhlas Seikijang Paket Gula/Kopi/the utk15 rmh ibadah di Kec. Bdr.Seikijang TK Karya Bunda Sekijang SMKN 1 Bdr.Seikijang TPQ Ishalul Ummah Desa Muda Setia Ponpes Almuslimin Bdr.Seikijang Pembukaan Jalan Baru (8m) menuju ke Pemakaman Umum Kel. Sei kijang 	<ul style="list-style-type: none"> Kel. Seikijang
22	PT. Pesawoan Raya	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Mesjid An Nur Km. 05 Mesjid Nurul Usmani Pembangunan Mesjid Kampung Agung Bantuan Organisasi Kepemudaan 	



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
23	PT. Selaras Abadi Utama	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Kuala Tolam
24	PT. Stellindo Wahana Perkasa	TPB15. Ekosistem Daratan TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Compact jalan Desa Nilo & By Pemuda DS Nilo By.u/Warga yang Kebanjiran Desa Kuala Tolam By.u/Pemb.BBM mesin pompong sbg transportasi anak akibat jembatan putus By.U/Natal Ld Mutiara Tahun 2017 By.bangunan kantor Pemuda Lubuk Mas By.Untuk Maulid Nabi Muhammad SAW SP2 By.Turnament Sepak Bola By.Untuk Balap Sepeda By.Untuk kegiatan Olah Raga By.Kompetisi Liga Sungai Buluh By.Ikatan Pemuda Sungai Buluh By.Perlombaan Panjat Pinang By.U/Pembelian alat olah raga Ikatan pemuda dusun Pekan Tua By.U/HUT RI Ke 73 Karang Taruna Sumber Jaya SP2 By.Padamkan Api & Konsumsi U/Damkar Diluar HGU By.Padamkan Api & Bahan Bakar U/Damkar di desa batang Nilo 	
25	PT. Cipta Daya Sejati Luhur	TPB 4. Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan Pemberian Honor Guru Bantuan Isra' Miraj 1439 H Bantuan Honor Pengurus Masjid Raya Seikijang Bantuan Pembelian Hewan Kurban Kel.Seikijang Kegiatan MTQ di Kabupaten Pelalawan 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci Kec. Langgam Kec. Bdr. Seikijang



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Biaya Umroh Bpk. H.Salim Bantuan Perayaan Natal Remaja HKBP Bdr. Seikijang Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar"Pelalawan Bershalawat" Bantuan Renovasi Bangunan, Tempat Wuduk dan MCK, Masjid Paripurna Nurul iman Bantuan Proposal Masyarakat dan Lain-lain 	
26	PT. Peputra Supra Jaya	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Honor Guru Ngaji di Masjid Langkan dan Gondai Bantuan Proposal dari masyarakat dan organisasi dll Bantuan Acara Pelalawan Expo di Kerinci Tahun 2018 Bantuan MTQ Kabupaten Pelalawan Bantuan Pameran Riau ExpoTahun 2018 Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Langgam Kec. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan Kec. Langgam
27	PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan Bantuan Bibit Jambu Madu Bantuan Pupuk Bantuan bibit Ikan gurami Bantuan Sarana Produksi Pertanian ;Bibit Tanaman, Pupuk, Pestisida, Benih Ikan,Pakan Ikan dan Tenda Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha UMKM Beasiswa tingka SMU Beasiswa Tingkat Sarjana (S1) Beasiswa Ikatan Dinas (ATPK&Instiper) Bantuan Meja Kursi Sekolah Bantuan AC untuk ruang kelas dan guru Bantuan material renovasi dan peralatan sarana sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pkl.Kerinci Kec. Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kec. Ukui, Kec. Teluk Meranti, Kec. Langgam Kec. Pelalawan



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Paket Makanan Tambahan,berkolaborasi dengan POSYANDU• Sunatan Massal• Bantuan sarana dan Fasilitas Kesehatan Masyarakat• Bantuan Banjir• Bantuan Sembako/ pasar murah• Bantuan Peralatan Olah raga untuk pemuda• Pembangunan sarana air bersih• Pembangunan Tempat Ibadah• Pembangunan Pos Penjagaan Polres Pelalawan• Perbaikan sarana Jalan• Renovasi rumah warga• Pemangunan Jembatan dan Gorong-gorong• Pembangunan /renovasi tempat ibadah, balai adat, Kantor Desa, Lapangan Desa dan bantuan kebudayaan• Pelatihan Atlit• Gotong Royong karyawan dan masyarakat memperbaiki sarana sosial desa	
28	PT. Satria Perkasa Agung (Unit KTH Sinar Perawang)	TPB 4. Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Unit KTH Perawang• Prasarana dan Subsidi Pendidikan• Sosial Kemasyarakatan• Kepemudaan dan Olahraga• Hari Besar Agama• Ceramah Agama dan MTQ• Sarana/Peralatan Ibadah• BBMPenerangan Mesjid• Perbaikan Jalan• Unit Serapung	<ul style="list-style-type: none">• Sekitar Operasional Perusahaan



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none">• Fee Kayu Program Tanaman Kehidupan• Honor Tenaga Pendamping Program DMPA• Sosial Kemasyarakatan• Kepemudaan dan Olahraga• Sarana dan Prasarana Keagamaan• Hari Raya Agama dan MTQ• Perbaikan Jalan dan Cuci Kanal• Sarana dan Prasarana Desa/masyarakat• Desa-desa Wilayah Kabupaten Pelalawan• Honor Guru• Beasiswa Mahasiswa• Usaha Perikanan• Usaha Peternakan• Honor Tenaga Pendamping Program DMPA• Sosial Kemasyarakatan• Kepemudaan dan Olahraga, HUT RI ke 71• Sarana/Peralatan Ibadah• Ceramah Agama dan MTQ• Hari Raya Keagamaan• Pembangunan/ Perbaikan Jalan Parit	
29	PT. ARARA ABADI	TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB 4. Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Taman Median Jalan dan Trotoar Jalan Pkl. Kerinci• Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa ST2P Kab. Pelalawan• Fasilitas Penunjang Pendidikan• Bantuan Subsidi Pendidikan• Honor Guru• Beasiswa• Usaha Penyiraman Jalan	<ul style="list-style-type: none">• Kec. Pkl. Kerinci• Kec. Langgam• Desa di Sekitar dan diluar operasional perusahaan



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none">• Usaha KSO Truk• Usaha Transportasi• Usaha Pertanian• Usaha Perikanan• Usaha Perternakan• Wirausaha• Honor Pendamping Program DMPA• Pelayanan Kesehatan• Sosial Kemasyarakatan• Santunan Anak Yatim• Kepemudaaan, Olahraga dan HUT RI ke71• Sarana/ Peralatan Ibadah• Ceramah Agama dan MTQ• Hari Raya Keagamaan• BBM untuk Penerangan Mesjid• Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit, Embung Air• Pembangunan Prasarana Desa• Peralatan Masyarakat Peduli Api	
30	PT. ADEI PLANTATION DAN INDUSTRY	TPB 4. Pendidikan Berkualitas TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB. 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB15. Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan Beasiswa Mahasiswa ST2P Kabupaten Pelalawan• Hari Kemerdekaan, Hari Guru dan kegiatan lainnya• Total teacher salary, THR & Bonus• Transportasi untuk Siswa ke sekolah• Kegiatan yang berhubungan dengan Perayaan Keagamaan dan Penyelenggaraan Seni Budaya• Pembuatan kantin Sekolah• Program Penyediaan bibit sawit ke petani setempat Desa Ring 1• Bantuan perbaikan dan perawatan Masjid di sekitar	



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 1500 bibit • Memperbaiki Jalan di Kecamatan Pangkalan Kuras • Pelebaran Badan Jalan kiri dan kanan dengan sirtu di Desa Telayap • Bantuan fasilitas olahraga dan bantuan dana acara olahraga untuk pemuda desa Btg Nilo, Sg Buluh, Telayap • Memberikan bantuan untuk kesejahteraan dan fasilitas Kesehatan Desa • Bantuan kegiatan lainnya • Pembangunan Taman Jalan di Kota Pangkalan Kerinci • Biaya Siram Pakai air untuk Jalan Poros KNB ke KNT • Biaya Pembelian Bibit Tanaman Hutan untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 1200 batang • Bantuan dana untuk acara lingkungan bertema "Green Clean Life" • Kegiatan karyawan dalam rangka memperingati May Day dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia • Kegiatan operasional Serikat Pekerja yang ada di sekitar PT 	
31	PT. Sinar Agro Raya	TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB. 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Kegiatan Shuluk Khalawat, Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim, Isra' miraj, Idul adha • Bantuan Organisasi Kepemudaan • Bantuan Rakerda Forum Wartawan Legislatif Riau • Bantuan Dana untuk kegiatan operasional aliansi masyarakat pedulil ingkungan • Bantuan Dana untuk pembelian tiang bendera kepada DAMKAR dan SatpolPP • Kegiatan HUT RI, HUT PMI, HUT Kodim 0313/KPR 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Bdr. Sekijang



No.	Nama Lembaga	Bantuan	Bantuan	Lokasi
			<p>2018, HUT Satpamke 38, HUT Harganas</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Pelalawan Expo Kab.Pelalawan• Kegiatan MTQ tingkat Kab. Pelalawan• Pengadaan Meubelier SDN 005 Desa KiyapJaya• Pengadaan Cat untuk TK Halimah Desa KiyapJaya• Pengadaan Keramik SDN 002 Desa KiyapJaya• PT.Sinar AgroPeduli Pendidikan untuk SDN002 Desa Kiyap Jaya• PT.Sinar AgroPeduli Pendidikan untuk SDN005 Desa Kiyap Jaya• Pengadaan Meubelier PDTA Almuthalib Desa Kiyap Jaya• Pengadaan Material untuk pembangunan mesjid Nurul Ikhsan, mesjid Baiturahim• Pengadaan Material untuk halaman kantor desa kiyap jaya• Pengadaan Cat Pagar kantor desa kiyap jaya• Pengadaan Material untuk pembangunan tempat parkir mesjid Baiturahim• Pengadaan Material untuk pembangunan Musholah Nurul Iman Desa Kiyap Jaya• Bantuan Bibit Bawang Merah Kepada Kelompok Tani Rantau Jaya• Bantuan pengadaan sumur bor untuk klpk tani rantau jaya (1 UNIT)• Pembangunan Kebun Kemitraan Kas Desa KiyapJaya (msh tahap ganti rugi lahan)	

BAB 4

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Kebijakan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. TPB pada dasarnya mengadopsi kebijakan global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perpres No. 59 Tahun 2017 memuat: (1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; dan (3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap *stakeholder* non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, Presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, *stakeholder* kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan ketentuan indikator RPJMD (4).



4.1 Analisis Pencapaian TPB

Indikator TPB Kabupaten Pelalawan sebanyak 220 Indikator. Selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data

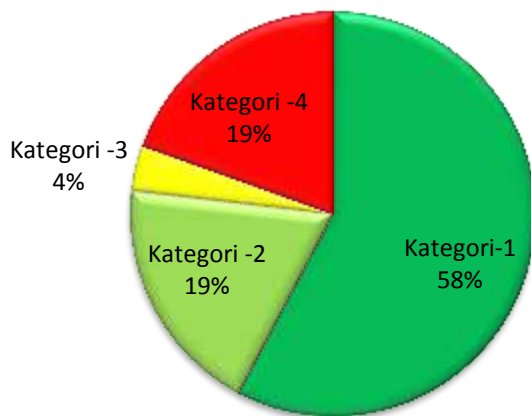
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa kategori TPB Kabupaten Pelalawan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional berjumlah **127 indikator**, kategori yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional berjumlah **42 indikator**, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak **8 indikator** dan kategori tidak/belum ada data (NA) berjumlah **43 indikator**. Pencapaian TPB di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Capaian indikator TPB di Kabupaten Pelalawan

Kategori	Kategori-1	Kategori-2	Kategori-3	Kategori-4	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	13	5	1	5	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	10	0	0	1	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	28	3	0	3	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	11	1	0	1	13
TPB 5. Kesenjangan Gender	7	4	1	2	14
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	3	4	3	18
TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	11	4	0	4	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	7	4	0	2	13
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	6	1	0	4	11
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	4	3	0	6	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	1	3	0	1	5
TPB 13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
TPB 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan	0	0	0	0	0
TPB 15. Pelestarian Ekosistem Darat	1	0	0	3	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	13	3	1	4	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	5	8	1	2	16
Jumlah	127	42	8	43	220

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Rincian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap indikator nasional berdasarkan kategori dapat dilihat pada Gambar 4.1.

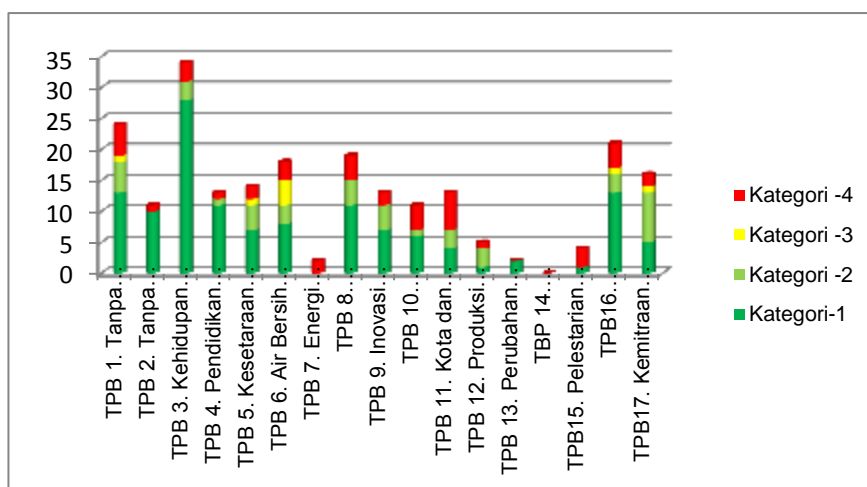


Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.1 Persentase Capaian TPB Kabupaten Pelalawan

Secara umum, gambaran pencapaian TPB Kabupaten Pelalawan sudah mencapai target nasional. Dari total 220 indikator TPB, Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 58%. Sedangkan sebanyak 19% belum tercapai tapi sudah dilakukan. Target yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 3% dan kategori yang belum/tidak ada data yaitu 19%. Khusus kategori-3 dan kategori-4, data ini dapat saja bergeser menjadi sudah tercapai atau mungkin sudah dilakukan tapi belum tercapai, asalkan tersedia data yang cukup untuk menghitung tingkat ketercapaian masing-masing target.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Pelalawan terhadap target nasional, terdapat TPB yang memiliki jumlah indikator terbanyak yaitu TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) sebanyak 34 indikator, diikuti TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) sebanyak 24 indikator, TPB 16 (Perdamaian dan Keadilan) dengan jumlah indikator sebanyak 21 indikator. Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar 4.2.



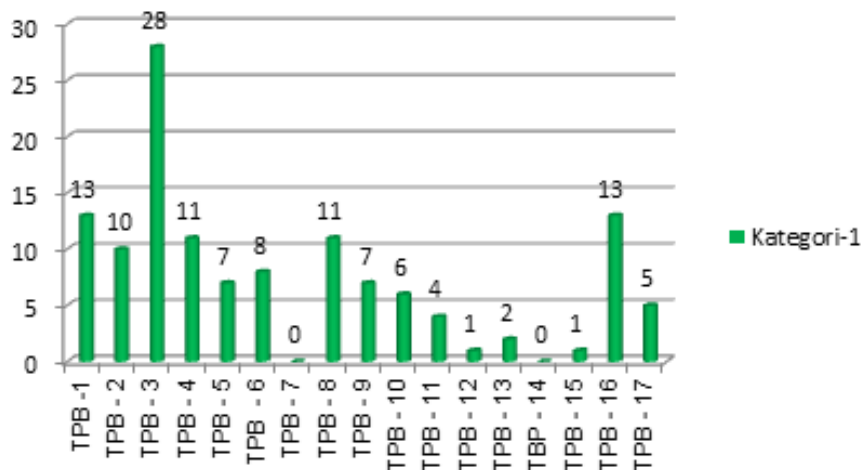
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.2 Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Pelalawan



4.1.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan Target TPB Nasional yang relevan untuk Kabupaten Pelalawan (220 indikator), sebanyak 127 indikator sudah tercapai atau sebesar 58%. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) merupakan indikator TPB paling banyak pada kategori ini yaitu 28 indikator. Selengkapnya disajikan pada Gambar 4.3.



Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.3 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Rincian tujuan TPB, target dan indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

No. TPB	Target	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan 1.3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	7 Indikator
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	3 Indikator
2	Tanpa Kelaparan 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	3 Indikator
	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	6 Indikator
	2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.	1 Indikator
3	Kehidupan Sehat 3.1 Pada Tahun 2030, Mengurangi Angka Kematian Ibu Hingga	3 Indikator



No. TPB	Target	Jumlah Indikator
dan Sejahtera	Kurang Dari 70 Per 100.000 Kelahiran Hidup	
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	4 Indikator
	3.3 Pada Tahun 2030, Mengakhiri Pandemi Aids, Tuberkulosis, Malaria, Dan Penyakit Tropis Yang Terabaikan Serta Memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber Air, Dan Penyakit Menular Lainnya	5 Indikator
	3.4 Pada Tahun 2030, Mengurangi Sepertiga Angka Kematian Dini Akibat Dari Penyakit Tidak Menular (Ncd), Melalui Pencegahan Dan Pengobatan, Serta Mempromosikan Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan	4 Indikator
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	1 Indikator
	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	5 Indikator
	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3 Indikator
	3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	1 Indikator
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	1 Indikator
	3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	1 Indikator
4 Pendidikan Berkualitas	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	5 Indikator
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	1 Indikator
	4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	1 Indikator
	4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	2 Indikator
	4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	1 Indikator



No. TPB	Target	Jumlah Indikator	
5	Kesetaraan Gender	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	1 Indikator
		5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	3 Indikator
		5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	1 Indikator
		5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	1 Indikator
		5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	1 Indikator
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1 Indikator
		6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	3 Indikator
		6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	4 Indikator
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	1 Indikator
		8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	2 Indikator
		8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	2 Indikator
		8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	1 Indikator
		8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5 Indikator
		9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	1 Indikator		
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	3 Indikator		
10	Berkurangnya Kesenjangan	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	3 Indikator



No. TPB	Target	Jumlah Indikator	
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya."	1 Indikator	
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	1 Indikator	
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	1 Indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	1 Indikator	
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.	1 Indikator	
	11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	1 Indikator	
12	Produksi Berkelanjutan	12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1 Indikator
13	Perubahan Iklim	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	2 Indikator
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	3 Indikator
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	1 Indikator	
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	6 Indikator	
	16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	3 Indikator	
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1 Indikator
	17.18 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	2 Indikator	
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	2 Indikator	

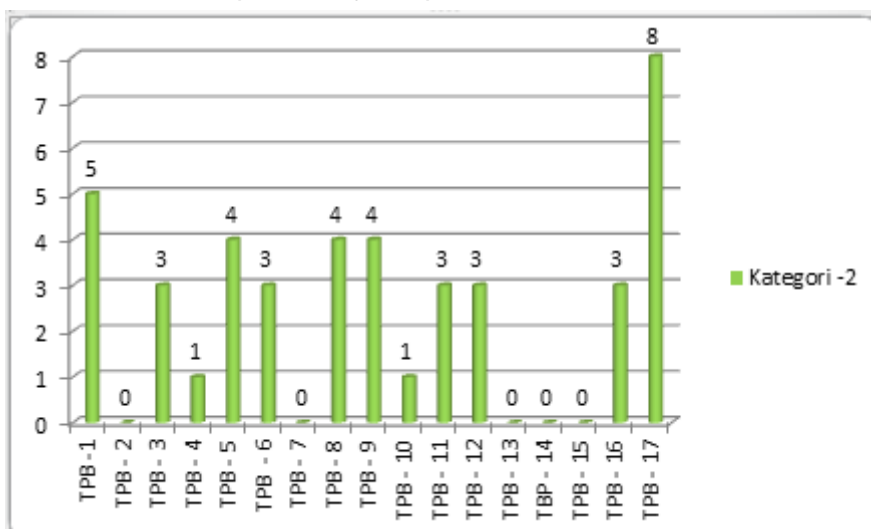
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

4.1.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 220 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional berjumlah 42



indikator (19%). TPB 17 (Kemitraan Berkelanjutan) memiliki indikator terbanyak dalam kategori ini yaitu 8 indikator seperti disajikan pada Gambar 4.4.



Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.4 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

Rincian tujuan TPB, target dan indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

No TPB	Target	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
4	Pendidikan Berkualitas	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
5	Kesetaraan Gender	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang



No TPB	Target	Jumlah Indikator
	dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	1 Indikator
	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	2 Indikator
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	
	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	2 Indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	1 Indikator
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1 Indikator
	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	1 Indikator
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	1 Indikator
	8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	1 Indikator
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	1 Indikator
	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	2 Indikator
	9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan	1 Indikator
10	Berkurangnya Kesenjangan	
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	1 Indikator
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	3 Indikator
12	Berkurangnya Kesenjangan	
	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	1 Indikator
	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi	1 Indikator

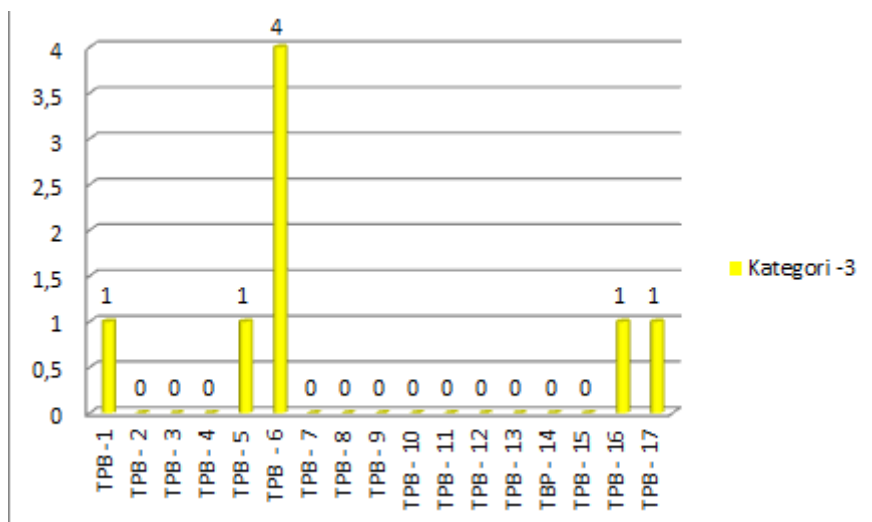


No TPB	Target	Jumlah Indikator
	limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	1 Indikator
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	2 Indikator
	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	
	16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	1 Indikator
17	Kemitraan Berkelanjutan	1 Indikator
	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	2 Indikator
	17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	2 Indikator
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	3 Indikator

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

4.1.3 Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional berjumlah 8 indikator (4%) dari seluruh target yang menjadi kewenangan Kabupaten Pelalawan. Indikator yang paling banyak pada kategori ini adalah TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) yaitu sebanyak 4 indikator seperti disajikan pada Gambar 4.5



Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.5 Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Rincian tujuan, target dan indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Indikator TPB yang belum dilakukan dan belum mencapai target nasional

NO TPB	Target	Jumlah Indikator
1	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1 Indikator
5	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	1 Indikator
6	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	2 Indikator
	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	2 Indikator
16	16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	1 Indikator
17	17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	1 Indikator

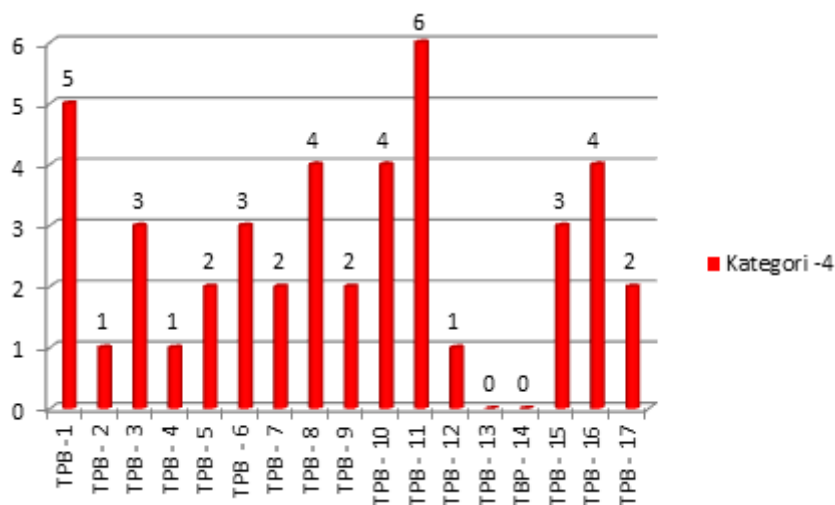
Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

4.1.4 Indikator yang belum/tidak ada data (NA)

Indikator yang belum/tidak ada data (NA) berjumlah 43 indikator (19%) dari seluruh target yang menjadi kewenangan Kabupaten Pelalawan. Indikator yang paling banyak pada



kategori ini adalah TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) yaitu 6 indikator. Selengkapnya disajikan pada Gambar 4.6.



Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 4.6 Indikator TPB yang belum/tidak ada data (NA)

Rincian tujuan, target dan indikator TPB yang belum yang belum/tidak ada data (NA) dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Indikator TPB yang belum/tidak ada data (NA)

No TPB	Target	Jumlah Indikator
1	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1 Indikator
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	3 Indikator
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1 Indikator
2	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1 Indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	1 Indikator
3	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	1 Indikator
	3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	1 Indikator
4	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	1 Indikator
5	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	1 Indikator
	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan	1 Indikator



No TPB	Target	Jumlah Indikator
	keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	2 Indikator
	6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	1 Indikator
7	Energi Bersih dan Terjangkau 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	1 Indikator
	7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	1 Indikator
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1 Indikator
	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	1 Indikator
	8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	2 Indikator
9	Inovasi Industri Infrastruktur 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	2 Indikator
10	Berkurangnya Kesenjangan 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	4 Indikator
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	2 Indikator
	11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	2 Indikator
	11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	1 Indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	1 Indikator
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	1 Indikator
15	Penanganan Perubahan Iklim 15.1 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	1 Indikator
	15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	1 Indikator
	15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	1 Indikator
16	Perdamaian, Keadilan, dan 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	1 Indikator



No TPB		Target	Jumlah Indikator
	Kelembagaan yang Tangguh	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	3 Indikator
17	Kemitraan Berkelanjutan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1 Indikator
		17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	1 Indikator

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020



BAB 5

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

5.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan hasil analisis pada setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan dengan total 220 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni 1) tercapainya indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2) indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 3) indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta 4) indikator yang belum/tidak ada data (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pilar pembangunan mempunyai tingkat pencapaian yang berbeda pada setiap pilar pembangunan berkelanjutan.

5.1.1. Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 96 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah Pilar Sosial

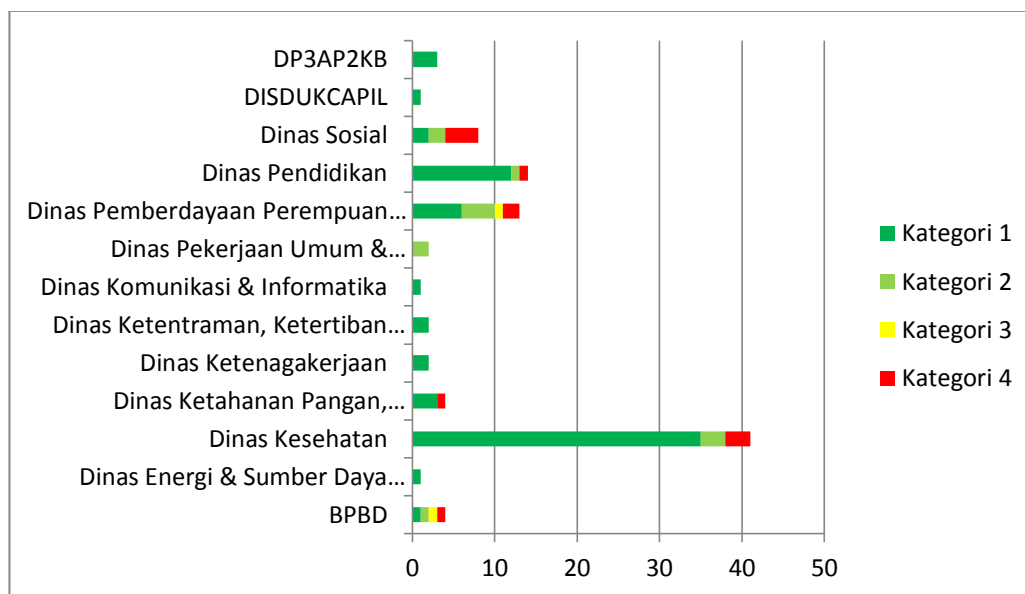
No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	BPBD	1	1	1	1	4
2	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	1	0	0	0	1
3	Dinas Kesehatan	35	3	0	3	41
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	3	0	0	1	4
5	Dinas Ketenagakerjaan	2	0	0	0	2
6	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2	0	0	0	2
7	Dinas Komunikasi & Informatika	1	0	0	0	1
8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	0	2	0	0	2
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan & perlindungan anak	6	4	1	2	13
10	Dinas Pendidikan	12	1	0	1	14
11	Dinas Sosial	2	2	0	4	8
12	DISDUKCAPIL	1	0	0	0	1
13	DP3AP2KB	3	0	0	0	3
	Total	69	13	2	12	96

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020



Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari 96 indikator yang terdapat pada pilar sosial terdapat 69 indikator atau 72% yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sedangkan indikator yang telah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional pada pilar sosial terdapat 13 indikator atau 14%. Sementara itu sebanyak 2 indikator atau 2% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan 12 indikator atau 12% yang belum/atau tidak memiliki data (NA).

Berdasarkan analisis tersebut, Dinas kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar Sosial yaitu sebanyak 41 indikator. Untuk melihat secara rinci grafik capaian indikator dalam sosial disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Kontribusi OPD dalam capaian indikator Pilar Sosial

5.1.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi Kabupaten Pelalawan berjumlah sebanyak 61 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah Pilar Ekonomi

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	BAPPEDA	1	0	0	0	1
2	BPKAD	1	1	0	1	3
3	BPS	2	3	0	2	7
4	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	2	2
5	Dinas Kesehatan	7	3	0	0	10
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	0	0	0	1	1
7	Dinas Komunikasi & Informatika	4	2	1	0	7
8	Dinas koperasi, usaha kecil &	0	0	0	2	2
	Dinas pariwisata	4	0	0	0	4
	Dinas Pemberdayaan	3	0	0	1	4

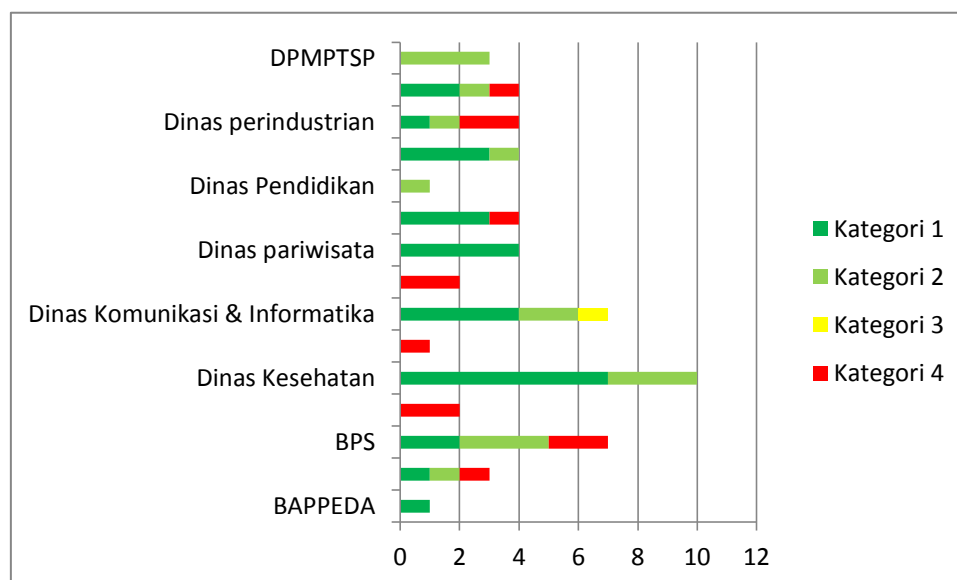


No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
	Perempuan & perlindungan anak					
9	Dinas Pendidikan	0	1	0	0	1
10	Dinas Perhubungan	3	1	0	0	4
11	Dinas perindustrian	1	1	0	2	4
	Dinas Sosial	2	1	0	1	6
	DPMPTSP	0	3	0	0	3
	Total	29	17	1	14	61

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 61 indikator di pilar ekonomi, terdapat 29 indikator atau 47% yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sebanyak 17 indikator atau 28% telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sementara itu terdapat 1 indikator atau 2% tergolong kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan sebanyak 14 indikator atau 23% tergolong belum ada data.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pilar Ekonomi yaitu sebanyak 10 indikator. Untuk melihat secara rinci Grafik capaian indikator disajikan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Kontribusi OPD dalam capaian indikator Pilar Ekonomi

5.1.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 42 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah Pilar Lingkungan

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Dinas Kehutanan Provinsi	0	0	0	1	1
2	Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan	4	3	0	0	7
3	Dinas lingkungan hidup	6	3	0	7	16

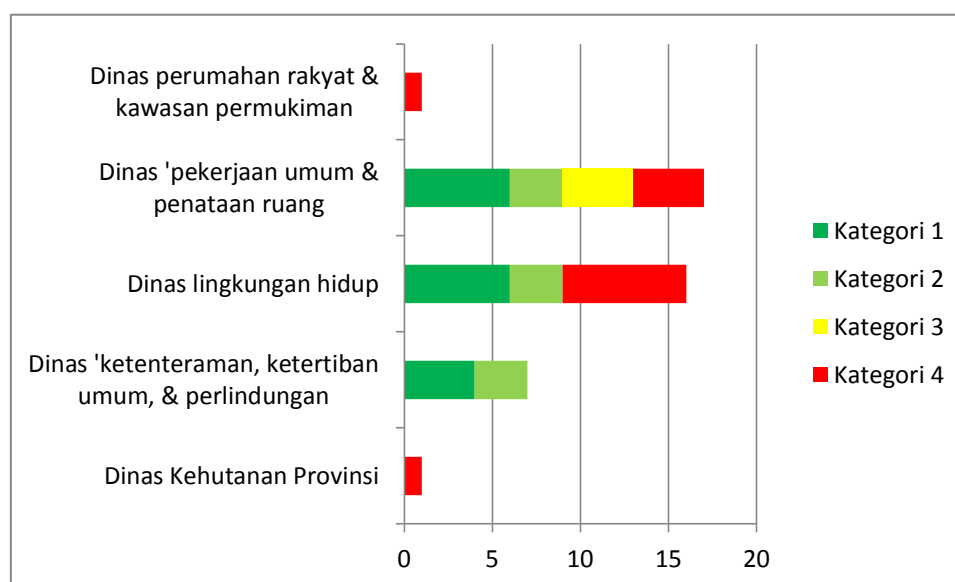


No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
4	Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang	6	3	4	4	17
5	Dinas perumahan rakyat & kawasan permukiman	0	0	0	1	1
	Total	16	9	4	13	42

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari total 42 indikator di pilar lingkungan, terdapat 16 indikator atau 38% yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sebanyak 9 indikator atau 21% telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sementara itu, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 4 indikator atau 10%. Sedangkan kategori yang belum/tidak memiliki data sebesar 13 indikator atau 31%.

PUPR memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan yaitu sebanyak 17 indikator. Grafik capaian indikator disajikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3. Kontribusi OPD dalam capaian indikator Pilar Lingkungan

5.1.4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah pilar Hukum dan Tata Kelola

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Balitbang Daerah	1	0	0	0	1
2	BPKAD	5	0	0	0	5
3	BPS	1	0	0	0	1
4	Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan	3	0	1	1	5
5	Dinas 'komunikasi & informatika	0	1	0	0	1

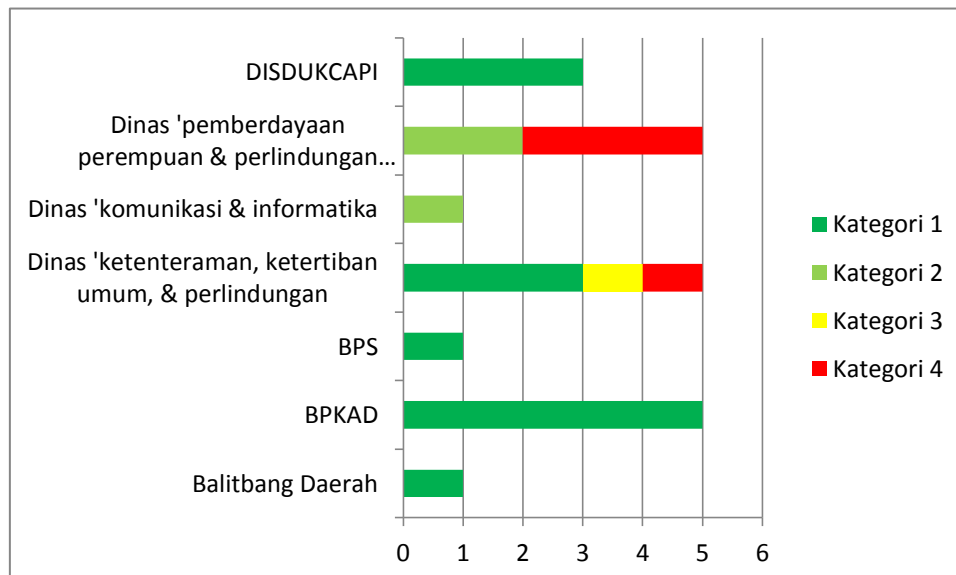


No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
6	Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	0	2	0	3	5
7	DISDUKCAPI	3	0	0	0	3
	Total	13	3	1	4	21

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 21 indikator di pilar hukum dan tata kelola, terdapat 13 indikator atau 62% yang telah dilakukan dan telah mencapai target nasional, dan 3 indikator atau 14% tergolong dalam kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Selanjutnya terdapat 1 indikator atau 5% tergolong indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan 4 indikator atau 19% adalah kategori yang belum/tidak memiliki data (NA).

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan BPKAD, DISDUKCAPI dan Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan yang memiliki indikator terbanyak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar hukum dan tata kelola yaitu sebanyak masing-masing 5 indikator. Untuk melihat secara rinci grafik capaian indikator dalam sosial disajikan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Kontribusi OPD dalam capaian indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola

5.2 Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pelalawan dan isu permasalahan Dokumen RPJMD. Rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB terdiri dari kategori 2 (sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target), kategori 3 (belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional), dan kategori 4 (belum/tidak ada data (NA)). Sedangkan kategori 1 TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target perlu untuk tetap dipertahankan kinerjanya. Rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.



5.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi maupun belum menjadi indikator yang belum/tidak ada data. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

No	TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
1	Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	<p>Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</p> <p>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</p> <p>Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</p> <p>Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)</p> <p>Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</p> <p>Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak. 2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikologi dan Jumlah daerah bencana alam yang mendapat pendidikan layanan khusus. 3. Tingginya Indeks risiko bencana dan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
2	Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<p>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
3	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	<p>Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.</p> <p>Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).</p> <p>Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis 2. Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta



No	TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Proporsi kematian akibat keracunan.	konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun.
4	Tujuan 4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	1. Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan
5	Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	1. Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

5.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan Tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

No	TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
1	Tujuan 7. Menjamin Akses Universal Layanan Energi Yang Terjangkau, Andal dan Modern.	Bauran energi terbarukan. Intensitas energi primer.	1. Rendahnya rasio energi terbarukan dan Intensitas energi primer



No	TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
2	Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	<p>Laju pertumbuhan PDB per kapita.</p> <p>PDB per kapita.</p> <p>Persentase tenaga kerja formal.</p> <p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.</p> <p>Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.</p> <p>Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).</p> <p>Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan 2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka
3	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	<p>Panjang jalur kereta api.</p> <p>Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.</p> <p>Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.</p> <p>Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</p> <p>Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.</p> <p>Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya panjang jalur kereta api 2. Rendahnya pertumbuhan PDB, tenaga kerja pada Industri Manufaktur dan anggaran riset pemerintah terhadap PDB 3. Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil
4	Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	<p>Koefisien Gini.</p> <p>Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.</p> <p>Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.</p> <p>Indeks Kebebasan Sipil.</p> <p>Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2. Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 3. Rendahnya upaya dalam meningkatkan penegakan hukum
5	Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	<p>Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</p> <p>Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</p> <p>Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan.</p> <p>Proporsi penduduk terlayani mobile broadband</p> <p>Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.</p> <p>Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</p> <p>Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik 2. Rendahnya layanan akses internet, ketersediaan data statistik dan data registrasi terkait kelahiran dan kematian 3. Belum optimanya



No	TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
		<p>Badan Usaha (KPBU).</p> <p>Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.</p> <p>Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.</p> <p>Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).</p> <p>Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</p>	kerjasama pemerintah dengan badan usaha

5.2.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Adapun Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

No	TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
1	Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	<p>Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</p> <p>Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</p> <p>Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).</p> <p>Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</p> <p>Kualitas air danau.</p> <p>Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</p> <p>Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</p>	<p>1. Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan</p> <p>2. Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan</p>
2	Tujuan 11.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses	1. Belum optimalnya



No	TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 	<ul style="list-style-type: none"> hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste 2. Belum optimalnya IRBI, sistem peringatan dini cuaca dan iklim dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
3	Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 	1. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri
4	Tujuan 15. Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 	1. Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

5.2.4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Adapun Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola disajikan pada Tabel 5.8.



Tabel 5.8. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

No	TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum dilaksanakan, belum ada data	Rumusan Isu strategis
1	Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	<p>Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</p> <p>Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</p> <p>Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.</p> <p>Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p> <p>Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p> <p>Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).</p> <p>Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.</p>	<p>1. Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM</p> <p>2. Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif</p>

Selanjutnya, selain dari pencapaian TPB, Isu Strategis juga dirumuskan berdasarkan isu permasalahan Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan. Adapun isu dari dokumen tersebut berjumlah 12 isu sebagai berikut.

Tabel 5.9. Kesesuaian isu strategis Dokumen RPJMD terhadap TPB Kabupaten Pelalawan

No	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pelalawan	Kesesuaian Terhadap TPB
1.	Kualitas Pendidikan.	<p>TPB 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. - Persentase angka melek aksara - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2.	Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja.	<p>TPB 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti



No	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pelalawan	Kesesuaian Terhadap TPB
		pelatihan (NEET). TPB 10: - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
3.	Tatanan Sosial Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa.	TPB 12 : Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat (SPM) yang teregister dan Pendidikan Muatan Lokal yang berwawasan Lingkungan
4.	Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan.	TPB 3: - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. - Unmet need pelayanan kesehatan. - Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
5.	Inovasi Daerah Dalam Pembangunan.	TPB 11: Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
6.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan.	TPB 9 : Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
7.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kelistrikan.	TPB 7 : - Rasio elektrifikasi - Konsumsi listrik per kapita
8.	Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.	TPB 16: Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
9.	Kemandirian Desa.	TPB 2: Jumlah Desa Mandiri Benih (Desa)
10.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan.	TPB 11: Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
11.	Pengelolaan Sumberdaya Pariwisata Berbasis Masyarakat	Belum tercakup di dalam TPB sehingga menjadi isu baru
12.	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	TPB 9 : Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021



5.3 Analisis Pencapaian TPB Berdasarkan Pertimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem merupakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan akan generasi akan datang. Pentingnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagai dasar pengkajian pembangunan berkelanjutan, selain itu menjadi pertimbangan dalam menentukan isu strategis dan menyusun skenario pembangunan berkelanjutan, serta juga menjadi komponen penjaminan kualitas KLHS RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem di Kabupaten Pelalawan, akan didapat isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan DDDTLH Kabupaten Pelalawan. Kondisi DDDTLH berbasis jasa ekosistem di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Persentase luasan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem di Kabupaten Pelalawan

Indikator Jasa Ekosistem	Luas (ha)					Nilai Jasa Layanan Ekosistem Optimal (%)	Kondisi
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi		
Jasa Penyediaan							
Penyedia Pangan (P1)	26.50	18.70	32.00	11.60	11.30	38.90	Sudah Terlampaui
Penyedia Air bersih(P2)	13.90	38.40	11.00	26.20	10.60	42.30	Sudah Terlampaui
Penyedia Serat (P3)	1.20	8.30	32.00	36.10	22.50	74.60	Belum Terlampaui
Penyedia Bahan Bakar, Kayu dan Fosil (P4)	0.10	2.00	22.00	47.90	28.00	86.90	Belum Terlampaui
Jasa Penyedia Sumber daya Genetik (P5)	6.40	35.20	36.40	11.00	11.00	40.20	Sudah Terlampaui
Jasa Pengaturan							
Iklim(R1)	1.50	25.40	20.40	22.10	30.60	62.90	Belum Terlampaui
Tata Aliran Air dan Banjir (R2)	18.30	17.00	26.50	26.80	11.40	51.45	Kritis
Perlindungan dari Bencana (R3)	0.30	24.40	18.80	45.20	11.20	65.80	Belum Terlampaui
Pemurnian Air (R4)	14.70	3.40	54.60	22.60	4.70	54.60	Kritis
Pengolahan dan Penguraian Limbah (R5)	41.10	21.10	26.70	6.50	4.60	24.45	Sudah Terlampaui
Kualitas Udara (R6)	0.70	1.20	45.10	50.40	2.60	75.55	Belum Terlampaui
Penyerbukan Alami (R7)	0.40	6.40	36.40	45.80	11.10	75.10	Belum Terlampaui
Pengendalian Hama dan Penyakit (R8)	0.30	7.60	35.00	45.70	11.40	74.60	Belum Terlampaui
Jasa Budaya							
Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup (C1)	35.00	2.00	37.90	24.70	0.40	44.05	Sudah Terlampaui
Budaya Rekreasi Dan Ecotourism (C2)	16.50	37.80	33.90	11.60	0.10	28.65	Sudah Terlampaui
Estetika (C3)	34.00	30.90	34.40	0.70	0.00	17.90	Sudah Terlampaui
Jasa Pendukung							
Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan(S1)	8.50	25.80	37.60	17.60	10.50	46.90	Sudah Terlampaui
Siklus Hara (S2)	0.20	2.50	21.00	58.00	18.40	86.90	Belum Terlampaui
Produksi Primer (S3)	0.30	26.30	16.40	46.20	10.80	65.20	Belum Terlampaui
Biodiversitas (S4)	15.10	37.20	27.40	13.50	6.70	33.90	Sudah Terlampaui

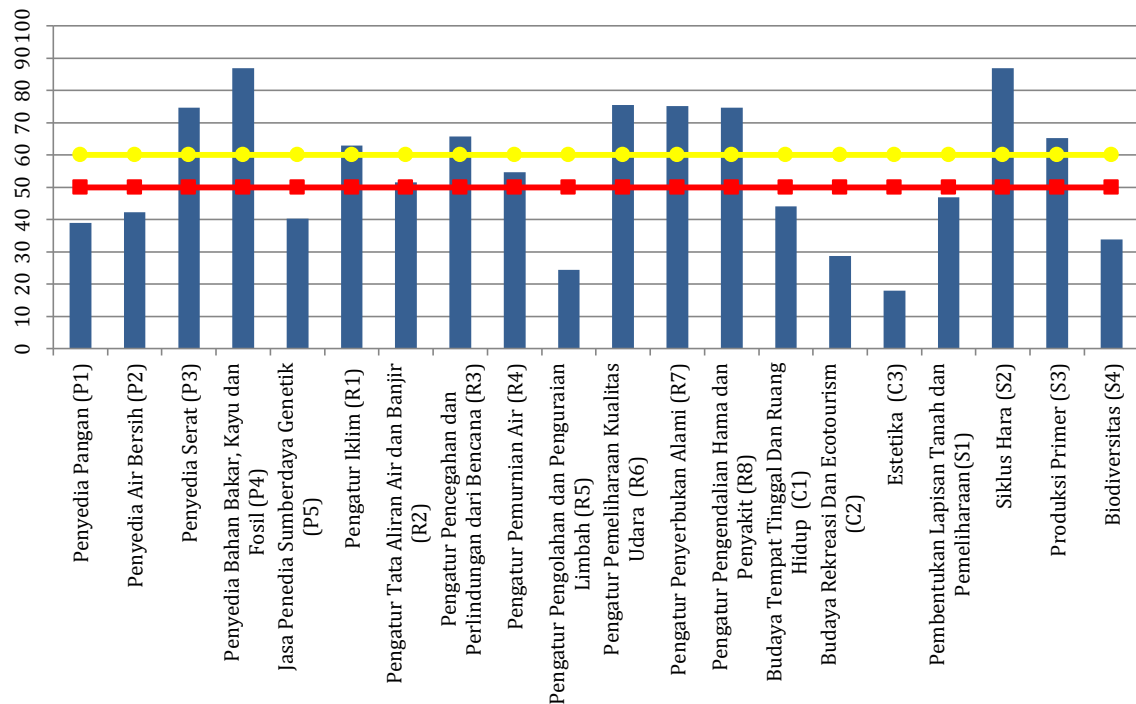
Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan 2020

Keterangan : SR = Sangat Rendah; R = Rendah; S = Sedang; T = Tinggi dan ST = Sangat Tinggi



Hasil analisis DDDTLH diperoleh melalui pendekatan spasial berdasarkan nilai jasa ekosistem. Perhitungan nilai jasa ekosistem direpresentasikan dalam bentuk data yang diklasifikasikan secara ordinal sebanyak 5 kelas, mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kesimpulan nilai DDDTLH tiap jasa ekosistem didapat dari nilai optimal, yang ditetapkan berdasarkan professional judgment.

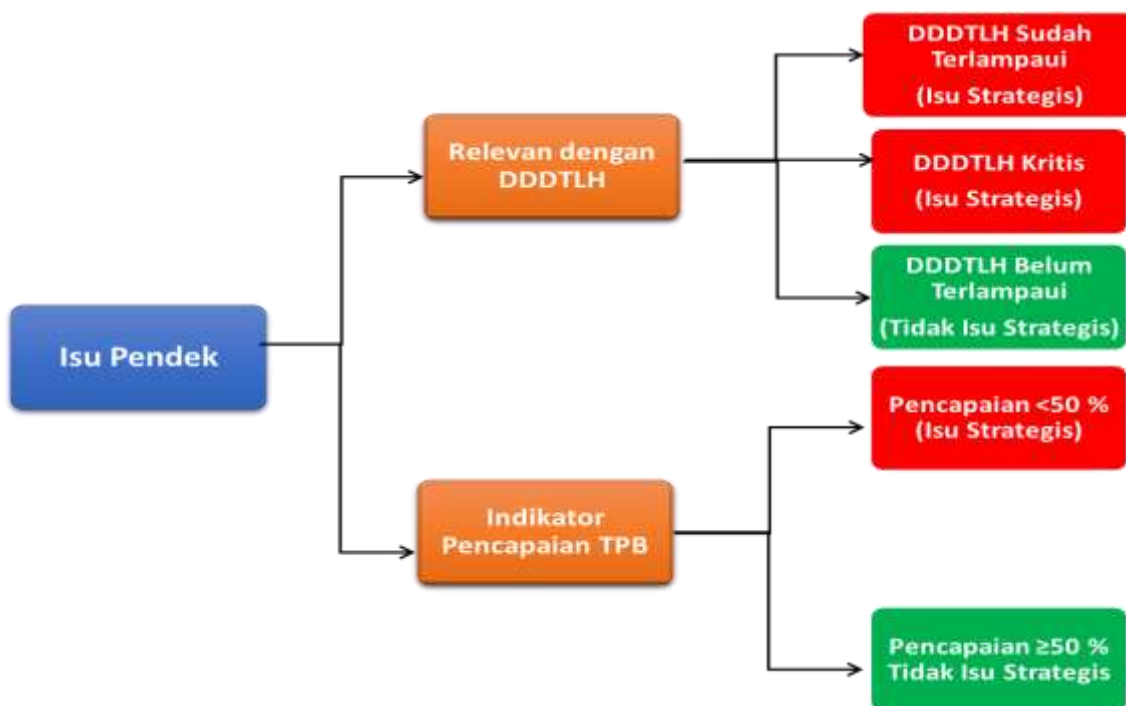
Untuk menentukan kapasitas DDDTLH dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan hidup pada pola ruang. Nilai jasa layanan ekosistem optimum didapatkan dari perbandingan besaran persentase luasan kemampuan jasa ekosistem dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah dengan penjumlahan kategori sangat tinggi, tinggi dan setengah dari nilai kategori sedang. Adapun nilai ambang batas jasa ekosistem dddtlh Kabupaten Pelalawan disajikan pada Gambar 5.5.



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 5.5. Nilai Ambang Batas Jasa Ekosistem DDDTLH Kabupaten Pelalawan

Selain itu, perumusan isu strategis juga mempertimbangkan relevansi dengan DDDTLH, Jika kondisi DDDTLH sudah terlampaui atau kritis, maka isu tersebut menjadi isu strategis. Sedangkan berdasarkan Indikator Pencapaian TPB, jika pencapaian <50 %, maka menjadi isu strategis. Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 5.6. Adapun rumusan isu strategis setiap jasa ekosistem di Kabupaten Pelalawan disajikan pada Tabel 5.11.



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 5.6. Penentuan Isu Strategis Berdasarkan DDDLH yang Relevan



Tabel 5.11. Rumusan Isu Strategis Tiap Jasa Ekosistem di Kabupaten Pelalawan

TPB	Rumusan Isu Strategis	DDDTLH yang Relevan	Kondisi DDDTLH	Keterangan
1. Tanpa Kemiskinan	Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak.	Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Sudah Terlampaui	√
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikologi dan Jumlah daerah bencana alam yang mendapat pendidikan layanan khusus	Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana	Belum Terlampaui	Bukan isu strategis
	Tingginya Indeks risiko bencana dan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana	Belum Terlampaui	Bukan isu strategis
2. Tanpa Kelaparan	Rendahnya Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Penyedia Pangan	Sudah Terlampaui	√
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis	Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Sudah Terlampaui	√
	Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun.	-	-	-
4. Pendidikan Berkualitas	Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan	-	-	-
5. Kesenjangan Gender	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	-	-	-
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan	Penyedia Air Bersih	Sudah Terlampaui	√
		Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah	Sudah Terlampaui	√
	Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan	Pengatur Tata Air dan banjir	Kritis	√
7. Energi bersih dan terjangkau	Rendahnya rasio energi terbarukan dan Intensitas energi primer	Produksi Primer	Belum Terlampaui	Bukan isu strategis
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan	-	-	-
	Tingginya tingkat pengangguran terbuka	-	-	-
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Belum optimalnya panjang jalur kereta api	-	-	-
	Rendahnya pertumbuhan PDB, tenaga kerja pada Industri Manufaktur dan anggaran riset pemerintah terhadap PDB			



TPB	Rumusan Isu Strategis	DDDTLH yang Relevan	Kondisi DDDTLH	Keterangan
	Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil			
10. Berkurangnya Kesenjangan	Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi			
	Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	-	-
	Rendahnya upaya dalam meningkatkan penegakan hukum	-	-	-
11. Kota Dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste	Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Sudah Terlampaui	√
		Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah	Sudah Terlampaui	√
	Belum optimalnya IRBI, sistem peringatan dini cuaca dan iklim dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Pengatur Iklim	Belum Terlampaui	Bukan isu strategis
		Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana	Belum Terlampaui	Bukan isu strategis
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri	Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah	Sudah Terlampaui	√
15. Ekosistem Daratan	Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Sudah Terlampaui	√
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kokoh	Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM	-	-	-
	Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif	-	-	-
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	-	-	-
	Rendahnya layanan akses internet, ketersediaan data statistik dan data registrasi terkait kelahiran dan kematian	-	-	-
	Belum optimanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha	-	-	-

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Keterangan:

(-) : Isu Tidak Relevan dengan Indikator Jasa DDDTLH

(√):Isu Strategis



Sedangkan isu strategis yang tidak relevan dengan DDDTLH Kabupaten Pelalawan, selanjutnya dianalisis berdasarkan Indikator Pencapaian TPB dengan kriteria pencapaian TPB <50% (isu strategis), ≥50% (bukan isu strategis), selengkapnya disajikan pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12. Isu Strategis Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Indikator Pencapaian TPB

TPB	Rumusan Isu Strategis	Indikator Pencapaian TPB
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun.	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
4. Pendidikan Berkualitas	Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
5. Kesetaraan Gender	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Tingginya tingkat pengangguran terbuka	Pencapaian TPB ≥50% sehingga tidak menjadi isu strategis
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Belum optimalnya panjang jalur kereta api	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Rendahnya pertumbuhan PDB, tenaga kerja pada Industri Manufaktur dan anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Pencapaian TPB ≥50% sehingga tidak menjadi isu strategis
	Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
10. Berkurangnya Kesenjangan	Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Rendahnya upaya dalam meningkatkan penegakan hukum	Pencapaian TPB ≥50% sehingga tidak menjadi isu strategis
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kokoh	Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis
	Rendahnya layanan akses internet, ketersediaan data statistik dan data registrasi terkait kelahiran dan kematian	Pencapaian TPB ≥50% sehingga tidak menjadi isu strategis
	Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha	Pencapaian TPB <50% sehingga menjadi isu strategis

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020



Berdasarkan hasil analisis identifikasi isu strategis di Kabupaten Pelalawan baik dilihat dari relevansi DDDTLH maupun pencapaian TPB, maka didapat isu strategis Kabupaten Pelalawan sebanyak 20 isu yang disederhanakan menjadi lebih pendek. Selengkapnya disajikan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13. Isu Strategis Kabupaten Pelalawan

TPB	Rumusan Isu Strategis	Isu Strategis
1. Tanpa Kemiskinan	Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak	1. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak
2. Tanpa Kelaparan	Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	2. Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis	3. Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis
	Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun	4. Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun
4. Pendidikan Berkualitas	Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan	5. Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan
5. Kesenjangan Gender	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	6. Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan	7. Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan
	Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan	8. Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan	9. Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Belum optimalnya panjang jalur kereta api	10. Belum optimalnya panjang jalur kereta api
	Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil	11. Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil
10. Berkurangnya Kesenjangan	Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi	12. Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi
	Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	13. Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste	14. Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri	15. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri
15. Ekosistem Daratan	Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	16. Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
16. Perdamaian, Keadilan Dan	Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik	17. Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus



TPB	Rumusan Isu Strategis	Isu Strategis
Kelembagaan Yang Kokoh	maupun psikologi dan diskriminasi HAM	kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM
	Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif	18.Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	19.Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
	Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha	20.Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan , 2020

5.4 Analisis Kerangka Pendanaan

Seiring upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka kebutuhan fiskal Daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum juga mengalami peningkatan. Namun demikian kemampuan kapasitas fiskal Daerah sebagai sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil cenderung dibawah kebutuhan fiskal daerah. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapisitas fiskal akan menimbulkan kesenjangan fiskal .Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip **value for money** serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip **stewardship dan accountability**.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015 – 2019 rata-rata tumbuh sebesar 6,87 persen. Ditahun 2015 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 1,31 triliun dan terus meningkat hingga diahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,70 triliun. Ditahun 2017 hingga tahun 2018 realisasi pertumbuhan pendapatan daerah walaupun masih positif namun cenderung menurun yaitu dari 4,32 persen menjadi sebesar 0,25 persen dan meningkat relatif tinggi ditahun 2019 sebesar 15,80 persen. Selama tahun 2015-2019 lebih kurang terdapat sebanyak 14 OPD sebagai penghasil sumber Pendapatan Daerah. Organisasi perangkat daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan antara lain Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu.



Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	49.439.117.112,00	0,00	14.434.298,00
2	Dinas Kesehatan	8.495.270.750,00	9.328.974.575,00	31.928.373.531,00	32.924.092.047,00	36.212.284.785,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	10.786.939.714,00	17.631.213.067,46			
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1.736.723.000,00	1.697.773.250,00	1.349.661.420,00	978.570.100,00	907.362.000,00
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	116.270.000,00	121.705.000,00			
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00		
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1.820.004.564,00	1.437.903.843,00	1.936.464.824,00	1.274.896.142,84	2.274.776.712,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	168.183.000,00	473.828.000,00	461.455.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00		
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00		
11	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00		
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00		
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	322.600.000,00	318.800.000,00	723.369.280,00	1.085.622.280,00	603.160.000,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2.402.331.570,00	8.168.164.904,00	6.603.977.482,00	1.605.368.298,00	1.531.780.987,09
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00		
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	0,00	0,00	0,00		
17	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00		
18	DPRD	0,00	0,00	0,00		
19	KDH & Wakil KDH	0,00	0,00	0,00		
20	Sekretariat Daerah	1.256.646.816.344,30	1.330.146.599.447,78	21.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00		



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0,00	0,00	0,00		
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00		
24	Inpektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00		
25	Kecamatan Pelalawan	0,00	0,00	0,00		2.406,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci	0,00	0,00	0,00		87.879,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang	0,00	0,00	0,00		2.282,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras	0,00	0,00	0,00		
29	Kecamatan Kuala Kampar	0,00	0,00	0,00		3.740,00
30	Kecamatan Teluk Meranti	0,00	0,00	0,00		39.436,00
31	Kecamatan Ukui	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Kecamatan Bandar Petalangan	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Kecamatan Langgam	0,00	0,00	0,00		11.689,00
34	Kecamatan Bunut	0,00	0,00	0,00		
35	Kecamatan Pangkalan Lesung	0,00	0,00	0,00		
36	Kecamatan Kerumutan	0,00	0,00	0,00		
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.961.193.893,46	35.892.441.992,47	1.372.568.076.793,88	1.430.450.683.997,29	1.658.879.174.860,95
38	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00		
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0,00	0,00			
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00		
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00		
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00		
43	Dinas Peternakan	5.184.000,00	5.040.000,00			
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	626.749.000,00	185.173.000,00	252.125.000,00
45	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00			
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00			
47	Dinas Perikanan dan Kelautan	10.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	30.462.000,00	37.660.000,00
	JUMLAH	1.311.303.333.835,76	1.404.762.616.079,71	1.465.379.972.442,88	1.469.020.695.865,13	1.701.183.861.075,04

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2021-2024



Tidak dapat dipungkiri ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selama tahun 2015-2019 sumber keuangan daerah Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Dana Perimbangan/transfers pemerintah pusat mencapai sebesar Rp. 6,2 triliun. Jenis sumber pendapatan daerah lainnya yang cukup besar adalah transfer pemerintah provinsi yang selama periode 2015-2019 mencapai sebesar Rp. 335,90 milyar. Sementara itu, tingkat kemandirian fiskal selama periode 2015-2019 yang tercermin dari ratio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 9,39 persen. Total Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015-2019 mencapai sebesar Rp. 590,36 milyar. Jenis Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi cukup besar adalah Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp. 326,73 milyar. Kontribusi Pajak Daerah mencapai sebesar Rp. 274,72 milyar dan kontribusi Retribusi Daerah mencapai sebesar Rp. 33,00 milyar, serta kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai sebesar Rp. 55,91 milyar.

Berbagai jenis sumber pendapatan daerah dikelola oleh beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Pelalawan. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh OPD Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, dimana selama tahun 2015-2019 total pajak daerah yang terhimpun mencapai sebesar Rp. 274,72 milyar. Pemungutan Retribusi Daerah dipungut oleh beberapa OPD antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sekretariat Daerah, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan dengan total realisasi Retribusi Daerah yang dipungut selama tahun 2015-2019 sebesar Rp. 33,00 milyar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikontribusi oleh Sekretariat Daerah dengan total nilai yang dikontribusi mencapai Rp. 55,91 milyar selama tahun 2015-2019. Lain-lain PAD yang sah dipungut oleh beberapa OPD antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan OPD lainnya.



Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD dan Jenis Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	Dinas Pendidikan			0,00	49.453.551.410,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan			0,00	118.888.995.688,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih			0,00	28.418.152.781,46	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		237.975.000,00	0,00	6.670.089.770,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan							
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi		8.736.159.721,00	0,00	7.886.364,84	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup		1.103.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kesejahteraan Sosial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		2.414.885.000,00	0,00	638.666.560,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu		20.300.421.241,09	0,00	11.202.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DPRD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KDH & Wakil KDH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah		83.500.000,00	23.228.320.809,45	63.621.190.840,61	2.372.696.739.727,89	127.206.164.414,13	0,00
21	Sekretariat DPRD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
23	Badan Penelitian dan Pengembangan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inpektorat Kabupaten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Pelalawan			0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci			0,00	87.879,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang			0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Kuala Kampar			0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Teluk Meranti			0,00	39.436,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Ukui			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Bandar Petalangan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Langgam			0,00	11.689,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Bunut			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pangkalan Lesung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Kerumutan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	274.716.175.106,22		32.683.752.893,00	57.967.090.908,65	3.829.157.316.064,73	208.691.887.370,27	123.535.349.195,18
38	Badan Kepegawaian Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			0,00	1.051.205.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Dinas Peternakan		23.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dinas Pertambangan dan Energi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Perikanan dan Kelautan		107.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	274.716.175.106,22	33.006.594.962,09	55.912.073.702,45	326.728.178.755,56	6.201.854.055.792,62	335.898.051.784,40	123.535.349.195,18

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2021-2024



Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Trend Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015-2019 menunjukkan pelambatan. Ditahun 2015 belanja daerah mencapai sebesar Rp. 1,68 triliun dan turun menjadi sebesar Rp. 1,64 triliun ditahun 2016. Penurunan belanja daerah terus terjadi hingga ditahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1,10 triliun ditahun 2018 dan meningkat ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,52 triliun.

Distribusi belanja daerah terbesar dialokasikan untuk urusan Pendidikan, pekerjaan umum, dan pelayanan pemerintahan umum. Realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan ditahun 2015 mencapai sebesar Rp. 432,02 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 455,32 milyar ditahun 2016. Ditahun 2017 realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan relatif lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 413,29 milyar demikian juga ditahun 2018 realisasi belanja dinas Pendidikan menjadi sebesar Rp. 386,93 milyar. Ditahun 2019 realisasi belanja Dinas Pendidikan meningkat menjadi sebesar Rp. 439,68 milyar. Realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditahun 2015 mencapai sebesar Rp. 361,22 milyar dan cenderung turun hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 133,92 milyar. Demikian juga pada Sekretariat Daerah realisasi belanja turun dari sebesar Rp. 291,64 milyar turun menjadi sebesar Rp. 60,39 milyar ditahun 2019. Realisasi Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset meningkat dari sebesar Rp. 14,45 milyar menjadi sebesar Rp. 260,49 milyar ditahun 2019.



Tabel 5.16. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dinas Pendidikan	432.016.764.733,83	455.320.180.439,03	413.286.957.695,58	386.928.312.118,68	439.684.356.145,99
2	Dinas Kesehatan	68.738.130.606,04	86.199.453.988,48	174.147.393.367,46	145.122.395.903,20	203.874.214.021,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	55.488.611.822,72	67.747.099.837,08			
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	361.221.296.583,30	349.338.504.112,72	176.661.483.329,57	124.197.695.549,32	133.923.876.797,49
5	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	30.017.911.489,31	19.211.095.169,82			
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.444.683.448,75	11.122.578.768,00	10.865.718.040,00	10.739.527.326,00	11.643.765.582,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	16.891.904.089,92	15.435.995.647,13	25.955.547.429,77	22.410.901.418,57	32.187.594.560,24
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.693.512.377,15	6.095.039.008,80	18.651.764.944,93	16.497.167.352,00	21.860.937.324,51
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.987.744.039,00	6.920.372.905,00	8.958.012.890,00	9.613.988.422,00	9.825.402.896,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.360.858.275,63	9.401.819.130,00	10.780.691.338,42	11.389.825.335,00	7.161.185.991,00
11	Dinas Kesejahteraan Sosial	8.268.628.532,65	7.431.237.143,60	6.925.660.955,00	5.592.484.067,00	7.721.283.472,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.750.979.088,00	6.222.474.390,76	5.373.120.917,00	4.243.856.886,00	5.201.578.122,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	20.311.648.969,95	15.219.925.928,74	15.578.724.142,44	10.739.835.960,31	7.726.142.210,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	10.961.913.985,00	10.594.310.287,00	9.377.751.930,00	8.796.576.722,00	11.842.971.463,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.802.196.943,00	5.284.828.105,00	5.380.461.145,00	5.103.659.552,00	6.023.596.297,00
16	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	11.336.589.885,81	6.876.186.163,00	6.073.714.250,00	7.580.943.120,00	6.341.247.921,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	18.522.204.340,00	18.152.587.820,00	19.734.744.593,00	26.219.488.232,00	21.181.390.499,89
18	DPRD	11.060.325.334,00	11.397.081.617,00	14.158.767.629,00		
19	KDH & Wakil KDH	316.892.294,00	413.310.938,00	463.559.876,00	471.697.526,00	466.876.376,00
20	Sekretariat Daerah	291.642.012.924,00	263.363.708.356,00	60.937.014.060,00	53.573.695.718,00	60.387.982.011,00
21	Sekretariat DPRD	43.235.994.537,55	44.043.553.588,00	43.988.891.620,00	55.972.698.130,45	60.569.687.647,00
22	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.935.247.025,00	1.860.420.668,00	2.115.943.170,00	1.665.928.650,00	1.971.576.174,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.371.692.682,00	5.792.634.130,00	5.851.013.404,00	4.817.845.846,00	5.976.989.842,00
24	Inpektorat Kabupaten	10.168.047.701,00	11.092.627.671,00	11.001.501.044,00	11.426.338.176,00	15.043.922.666,00



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2015	2016	2017	2018	2019
25	Kecamatan Pelalawan	3.556.401.152,00	3.612.102.458,00	4.124.545.201,00	3.146.754.581,00	5.020.871.483,00
26	Kecamatan Pangkalan Kerinci	6.730.609.569,00	6.669.196.554,00	8.284.453.028,68	8.053.719.565,88	10.131.072.516,00
27	Kecamatan Bandar Seikijang	3.892.980.954,00	3.837.348.702,00	4.257.789.502,00	4.039.973.620,00	4.734.752.539,00
28	Kecamatan Pangkalan Kuras	4.388.616.843,00	4.620.243.661,00	5.248.142.976,00	5.105.779.353,11	5.686.681.016,00
29	Kecamatan Kuala Kampar	3.372.362.727,00	3.578.467.334,00	4.428.072.656,00	3.981.315.204,00	4.888.471.146,00
30	Kecamatan Teluk Meranti	3.844.053.008,00	3.637.773.292,00	4.384.999.289,20	4.102.625.815,00	4.949.444.576,00
31	Kecamatan Ukui	3.589.510.558,00	3.838.309.429,00	4.436.484.768,79	4.052.681.891,00	4.391.446.387,98
32	Kecamatan Bandar Petalangan	4.054.874.499,00	3.770.151.305,00	4.049.839.002,00	3.798.590.876,00	4.687.879.915,00
33	Kecamatan Langgam	5.130.742.667,00	4.754.888.658,00	5.711.410.910,00	4.900.677.765,00	5.953.904.562,00
34	Kecamatan Bunut	4.423.025.979,00	4.455.777.530,00	4.687.210.597,00	4.083.441.171,00	4.940.948.796,00
35	Kecamatan Pangkalan Lesung	3.837.118.335,00	3.668.686.740,00	4.394.527.903,00	4.062.015.413,00	4.777.111.750,34
36	Kecamatan Kerumutan	3.560.836.785,00	3.759.835.336,00	4.430.789.626,00	3.731.836.747,00	4.348.630.938,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.446.153.394,00	12.931.121.451,00	227.625.401.548,76	37.719.491.959,00	260.489.304.018,84
38	Badan Kepegawaian Daerah	11.356.856.265,00	11.993.927.465,00	9.485.197.041,00	7.362.882.308,00	11.313.695.557,00
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	10.484.537.581,00	10.074.239.909,95			
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	23.253.890.079,85	19.123.747.809,38	16.613.824.263,62	9.712.667.906,00	18.689.663.560,31
41	Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.828.308.116,00	2.828.840.332,00	4.682.657.481,00	5.678.185.098,00	6.565.317.979,87
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	20.970.643.705,41	21.124.966.752,58	22.520.928.152,69	18.473.456.158,00	20.673.506.229,74
43	Dinas Peternakan	17.357.270.268,00	11.264.549.663,00			
44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.681.607.523,89	23.185.931.286,51	22.008.610.873,00	18.584.585.427,00	33.598.110.860,51
45	Dinas Pertambangan dan Energi	29.477.301.807,74	15.334.837.563,05			
46	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	18.719.811.480,76	16.058.126.867,98	19.750.904.055,76	15.066.091.644,51	25.465.299.070,98
47	Dinas Perikanan dan Kelautan	12.660.738.492,09	10.473.398.333,00	7.270.661.339,00	7.680.029.074,00	8.582.999.395,00
	JUMLAH	1.684.164.043.497,35	1.639.133.494.244,61	1.434.664.887.985,67	1.096.441.663.587,03	1.520.505.690.317,21

Sumber : LKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2015,2016,2017,2018 dan 2019



Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada bidang Kesehatan, namun juga telah berdampak pada bidang ekonomi dan sosial lainnya. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan daerah secara nasional turun 15,81 persen akibat pandemi covid-19. Rata-rata pendapatan dari 530 daerah tersebut hanya Rp1.042,69 triliun. Dampak Pandemi Covid 19 juga dirasakan oleh Kabupaten Pelalawan beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan. Selama tahun 2015-2019 rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan tumbuh sebesar 6,87 persen. Ditahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan yang telah mencapai sebesar Rp. 1,70 triliun diperkirakan dengan adanya pandemic covid 19 ditahun 2020 akan terkoreksi dan jika menggunakan asumsi koreksinya nasional sebesar 15,00 persen maka diperkirakan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan ditahun 2020 turun menjadi sekitar Rp. 1,45 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2021-2025 rata-rata sebesar 5,20 persen maka dapat diestimasi pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan akan dapat meningkat dari sebesar Rp. 1,52 triliun ditahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1,86 triliun ditahun 2025.

Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam menghasilkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD yang akan memiliki peranan terbesar dalam menghimpun pendapatan daerah. Diperkirakan pada tahun 2021 pendapatan daerah yang dihimpun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai sebesar Rp. 1,11 triliun dan diharapkan akan dapat terus ditingkatkan hingga ditahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 1,26 triliun. Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Pelalawan yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah yang besar adalah Sekretariat Daerah, dimana pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 361,27 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 542,59 milyar ditahun 2025. Sumber pendapatan daerah lainnya juga diharapkan dapat berasal dari OPD pada urusan Kesehatan dengan perkiraan pendapatan daerah yang disumbangkan ditahun 2021 sebesar Rp. 31,27 milyar dan diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga ditahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 45,21 milyar.



Tabel 5.17. Estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dinas Pendidikan	9.759,44	9.538,83	9.297,91	9.034,73	8.747,05
2	Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	31.269,24	34.307,52	37.625,32	41.249,89	45.211,68
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	1.266,08	1.071,90	859,86	628,21	375,01
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1.819,60	1.938,57	2.068,48	2.210,41	2.365,54
6	Dinas Lingkungan Hidup	277,83	373,86	478,73	593,29	718,51
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	644,44	701,14	763,05	830,68	904,61
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.736,72	3.189,49	2.591,92	1.939,09	1.225,53
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KDH & Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah - Kecamatan	361.271,53	197.862,22	187.544,63	500.508,36	542.589,31
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Inpektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Pelalawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Pangkalan Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Bandar Seikijang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pangkalan Kuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Kuala Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Teluk Meranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Ukui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bandar Petalangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
31	Kecamatan Langgam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Bunut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pangkalan Lesung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kerumutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.105.100,92	1.341.878,38	1.432.313,98	1.206.876,10	1.260.464,16
36	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan	244,06	293,14	346,73	405,29	469,29
42	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dinas Perikanan dan Kelautan	24,73	30,27	36,33	42,95	50,19
	JUMLAH	1.515.414,58	1.591.185,31	1.673.926,95	1.764.319,00	1.863.120,87

Sumber : Data Olahan, 2020



Dengan asumsi bahwa kebijakan belanja daerah adalah berimbang yaitu perkiraan besarnya belanja daerah sama dengan perkiraan besarnya pendapatan daerah, maka untuk perencanaan jangka menengah kedepan, maka besarnya perkiraan belanja daerah ditahun 2021 hingga tahun 2025 sama dengan besarnya perkiraan pendapatan daerah untuk tahun tersebut. Dengan demikian besarnya belanja daerah ditahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1,52 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp. 1,59 triliun ditahun 2022. Dampak Pandemic Covid 19 terhadap perekonomian diperkirakan pemulihannya masih akan dirasakan hingga tahun 2023, maka hal ini akan menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan akan mengalami pelambatan. Seiring dengan pelambatan pendapatan daerah, maka akan diikuti dengan pelambatan belanja daerah. Belanja daerah ditahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 1,67 triliun dan akan terus bergerak naik menjadi sebesar Rp. 1,86 triliun ditahun 2019.

Belanja daerah Kabupaten Pelalawan dalam jangka menengah kedepan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pelayanan umum. Estimasi Belanja Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan diperkirakan ditahun 2021 sebesar Rp. 429,53 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 464,67 milyar. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur diharapkan kedepan akan ditingkatkan melalui peningkatan penyediaan anggaran pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun perkiraan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang ditahun 2021 sebesar Rp. 256,43 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 407,05 milyar ditahun 2025. Anggaran Pelayanan umum melalui Sekretariat daerah diperkirakan akan meningkat dari sebesar Rp. 161,62 milyar ditahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 296,20 milyar ditahun 2025.



Tabel 5.18. Estimasi Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Urusan Pemerintahan/OPD Tahun 2021-2025 (Rp. Juta)

No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dinas Pendidikan	429.532,91	437.189,32	445.550,11	454.683,96	464.667,59
2	Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	160.000,07	159.506,49	158.967,49	158.378,66	157.735,05
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	256.428,64	289.250,36	325.091,68	364.246,94	407.045,10
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.209,03	11.294,81	11.388,49	11.490,83	11.602,69
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	22.205,43	21.510,27	20.751,14	19.921,83	19.015,36
6	Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pertambangan dan Energi	24.343,78	26.258,38	28.349,13	30.633,19	33.129,75
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.283,65	7.951,09	7.587,94	7.191,21	6.757,57
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.448,24	9.128,48	8.779,30	8.397,83	7.980,87
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	7.355,91	7.670,83	8.014,73	8.390,43	8.801,08
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.715,77	6.010,69	6.332,74	6.684,56	7.069,12
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.362,01	15.199,23	16.113,48	17.112,25	18.203,95
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	10.475,05	10.775,53	11.103,66	11.462,12	11.853,94
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.557,32	5.629,22	5.707,74	5.793,51	5.887,27
14	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	7.766,97	8.001,65	8.257,93	8.537,90	8.843,91
15	Satuan Polisi Pamong Praja	20.223,05	19.212,89	18.109,80	16.904,71	15.587,51
16	DPRD - Sekretariat DPRD	56.826,63	56.716,50	56.596,23	56.464,84	56.321,23
17	KDH & Wakil KDH	418,69	404,12	388,21	370,83	351,84
18	Sekretariat Daerah	161.628,86	190.953,15	222.975,28	257.958,23	296.195,88
19	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.925,43	1.954,68	1.986,62	2.021,51	2.059,65
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.376,49	5.403,56	5.433,13	5.465,44	5.500,75
21	Inpektorat Kabupaten	11.721,20	11.673,80	11.622,04	11.565,49	11.503,69
22	Kecamatan Pelalawan	3.930,76	4.003,15	4.082,20	4.168,55	4.262,94
23	Kecamatan Pangkalan Kerinci	7.896,03	7.750,27	7.591,10	7.417,21	7.227,15
24	Kecamatan Bandar Seikijang	4.144,92	4.130,60	4.114,95	4.097,86	4.079,18
25	Kecamatan Pangkalan Kuras	4.971,07	4.898,32	4.818,88	4.732,09	4.637,23
26	Kecamatan Kuala Kampar	4.018,12	3.958,87	3.894,17	3.823,49	3.746,23



No.	Urusan Pemerintahan/OPD	2021	2022	2023	2024	2025
27	Kecamatan Teluk Meranti	4.164,61	4.128,68	4.089,44	4.046,58	3.999,73
28	Kecamatan Ukui	4.037,15	3.991,16	3.940,94	3.886,07	3.826,11
29	Kecamatan Bandar Petalangan	4.086,99	4.114,59	4.144,73	4.177,66	4.213,65
30	Kecamatan Langgam	5.297,65	5.311,39	5.326,38	5.342,76	5.360,67
31	Kecamatan Bunut	4.545,36	4.596,47	4.652,28	4.713,26	4.779,91
32	Kecamatan Pangkalan Lesung	4.130,72	4.098,54	4.063,39	4.025,00	3.983,04
33	Kecamatan Kerumutan	3.960,58	3.949,69	3.937,80	3.924,82	3.910,62
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	109.443,85	107.197,97	104.745,46	102.066,19	99.137,65
35	Badan Kepegawaian Daerah	10.616,39	11.204,60	11.846,92	12.548,63	13.315,63
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	18.316,01	19.885,02	21.598,38	23.470,16	25.516,09
37	Kantor Arsip dan Perpustakaan	4.572,88	4.303,42	4.009,17	3.687,72	3.336,36
38	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan	25.745,10	27.395,42	29.197,57	31.166,35	33.318,31
39	Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan	31.871,25	34.748,06	37.889,54	41.321,48	45.072,72
40	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.237,09	19.658,83	20.119,36	20.622,48	21.172,41
41	Dinas Perikanan dan Kelautan	9.622,94	10.165,23	10.757,41	11.404,34	12.111,46
	JUMLAH	1.515.414,58	1.591.185,31	1.673.926,95	1.764.319,00	1.863.120,87

Sumber : Data Olahan, 2020

BAB 6

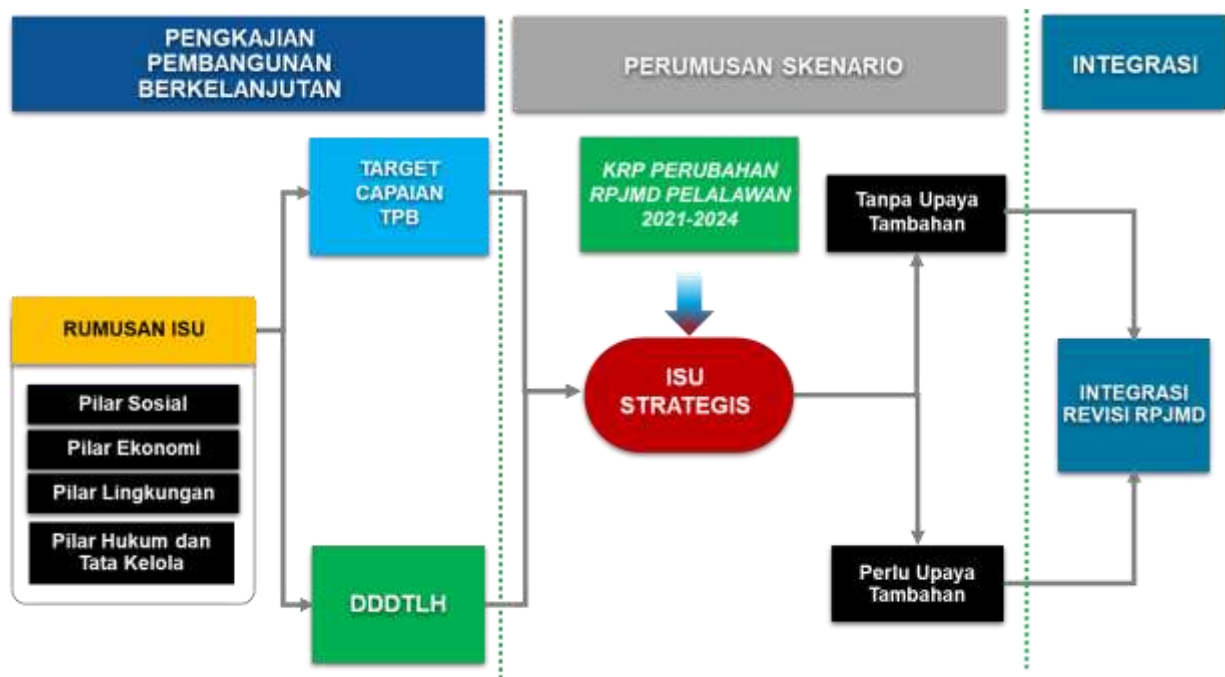
ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1 Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung daerah

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah;

- 1) Isu Utama
- 2) Indikator Pencapaian TPB
- 3) Kondisi DDDTLH Jasa Ekosistem di Kabupaten Pelalawan

Skenario menghasilkan dua pilihan utama, pelaksanaan TPB tanpa upaya tambahan dan pelaksanaan TPB dengan upaya tambahan yang akan menjadi integrasi RPJMD. Selengkapnya disajikan pada Gambar 6.1.



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

Gambar 6.1. Alur Analisis Perumusan Skenario

Isu utama dirumuskan pada saat dilakukan uji publik-1. Uji publik dihadiri oleh penyusun KLHS, OPD terkait, akademisi, LSM, filantropi, organisasi masyarakat dan perusahaan swasta. Isu utama didapatkan dengan mengumpulkan indikator-indikator TPB yang belum mencapai target nasional (RPJMN 2019) sebagai daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dilakukan penilaian dengan uji silang dengan 7 kriteria penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan penilaian silang dengan 7 kriteria (Pasal 23 ayat 4, P.69 MENLHK Tahun 2017) yang memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan:



- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 2) Prakiraan dampak dan resiko lingkungan hidup
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- 4) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
- 5) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- 6) Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- 7) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan tersebut, tim Penyusun KLHS RPJMD dan pemangku kepentingan merumuskan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas. Isu Pembangunan berkelanjutan prioritas ditentukan melalui diskusi kelompok yang diikuti oleh penyusun KLHS dan para pemangku kepentingan. Hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1. Penentuan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan

No.	No TPB	Isu Strategis	DDDT	Dampak dan Resiko LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Status Mutu dan Kualitas SDA	Dampak Terhadap Perubahan Iklim	Ketahanan dan Potensi KEHATI	Ancaman terhadap Kearifan Lokal	Jumlah	Isu Prioritas
1	1	Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak	3	3	3	2	2	2	1	2,3	Prioritas
2	2	Rendahnya prevalensi ketidakkukupan konsumsi pangan	3	2	2	3	1	2	1	2,0	Prioritas
3	3	Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis	2	1	2	1	1	1	1	1,3	Bukan Prioritas
4		Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Bukan Prioritas
5	4	Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan	1	1	1	1	1	1	2	1,14	Bukan Prioritas
6	5	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	1	1	1	1	1	1	1	Bukan Prioritas
7	6	Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan	3	2	3	3	1	3	1	2,29	Prioritas
8		Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan	3	1	2	2	1	2	1	1,71	Bukan Prioritas
9	8	Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan	2	1	1	1	1	1	3	1,43	Bukan Prioritas
10	9	Belum optimalnya panjang jalur kereta api	2	1	1	2	1	1	1	1,29	Bukan Prioritas
11		Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas



No.	No TPB	Isu Strategis	DDDT	Dampak dan Resiko LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Status Mutu dan Kualitas SDA	Dampak Terhadap Perubahan Iklim	Ketahanan dan Potensi KEHATI	Ancaman terhadap Kearifan Lokal	Jumlah	Isu Prioritas
		kecil									
12	10	Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi	1	1	1	1	1	1	2	1,14	Bukan Prioritas
13		Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	1	1	1	1	1	1	2	1,14	Bukan Prioritas
11	11	Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas
13	12	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri	1	2	2	2	2	1	1	1,57	Bukan Prioritas
14	15	Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	1	2	1	2	1	2	1,43	Bukan Prioritas
15	16	Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas
16		Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas
16	17	Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas



No.	No TPB	Isu Strategis	DDDT	Dampak dan Resiko LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Status Mutu dan Kualitas SDA	Dampak Terhadap Perubahan Iklim	Ketahanan dan Potensi KEHATI	Ancaman terhadap Kearifan Lokal	Jumlah	Isu Prioritas
		didanai oleh pajak domestik									
17		Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha	1	1	1	1	1	1	1	1,00	Bukan Prioritas

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

1. Tidak Berpengaruh, 2. Pengaruh Kecil, 3. Pengaruh Besar



Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan menggunakan penilaian silang dengan 7 kriteria, maka menghasilkan 3 isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak (**TPB 1**)
2. Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (**TPB 2**)
3. Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan (**TPB 6**)

Penilaian untuk menentukan isu utama dilakukan berdasarkan pasal 20 ayat (2) Permen LHK No. P 69/2017 yang disesuaikan dengan Permendagri 07/2018 dengan mempertimbangkan unsur-unsur (indikator) sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah;
2. Tingkat pentingnya potensi dampak;
3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
4. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.

Khusus muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak digunakan, hal ini disebabkan Kabupaten Pelalawan, bahkan di Provinsi Riau hingga saat ini belum memiliki dokumen RPPLH.

Metode penilaian isu utama dilakukan dengan matrik interaksi antara isu strategis dengan indikator Penentuan Isu Utama. Penilaian isu utama dilakukan menggunakan *professional judgement* dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:

Keterkaitan sangat tinggi	= 5
Keterkaitan tinggi	= 4
Keterkaitan sedang	= 3
Keterkaitan rendah	= 2
Keterkaitan sangat rendah	= 1

Hasil pembobotan dihitung nilai rata-rata pada tiap isu strategis sehingga diperoleh nilai skor pada setiap isu. Perhitungan skor disajikan pada persamaan berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\sum \text{isu strategis indikator Isu Prioritas}}{\text{Jumlah indikator Isu Prioritas}}$$

Jika:

Nilai rerata ≥ 3 : Isu Utama

Nilai rerata < 3 : Bukan Isu Utama

Penentuan isu utama berdasarkan *professional judgement* dengan mempertimbangkan bahwa nilai 3 merupakan nilai skor dengan tingkat keterkaitan (skor) tergolong sedang, sehingga nilai rata-rata ≥ 3 memiliki nilai keterkaitan dalam interval sedang hingga sangat tinggi, sedangkan nilai rata-rata < 3 memiliki nilai keterkaitan dalam interval rendah hingga tanpa keterkaitan. Hasil penentuan isu utama, dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2. Penentuan Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan

No	No TPB	Tujuan PB	Isu Prioritas	Telaah karakteristik wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar isu	Keterkaitan dengan muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya	Jumlah	Kriteria
				20%	30%	10%	20%	0%	20%		
1	1	Tanpa Kemiskinan	Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak	5	4	3	3	-	3	3,6	Utama
2	2	Tanpa Kelaparan	Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	4	4	3	3	-	3	3,4	Utama
3	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Terbatasnya akses air baku, layanan sanitasi layak dan belum optimalnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, air limbah terpusat	3	4	5	5	0	3	3.33	Utama

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020



Tabel 6.3. Rekomendasi Isu Utama dan Pencapaian TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan tetapi Belum Terakomodasi Permendagri 90

Isu Utama	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Gap	Permasalahan	Usulan Masukan Program Dan Kegiatan Non-Permendagri 90 Tahun 2019	Penyetaraan Dalam Permendagri 90 Tahun 2019
		Jabaran Isu Utama (1)					
Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%)	-	Dalam pelaksanaan, ini belum terlaksana dengan baik. Banyak masyarakat pengguna mengeluh dengan pelayanan yang diberikan.	Peningkatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial penyandang disabilitas yang miskin dan rentan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (1.06.04.2.01.01)
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	-	Belum optimalnya bantuan tunai yang telah diberikan	Peningkatan pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (1.06.05.2.02.02)
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	96,60	Belum optimalnya layanan sumber air minum layak yang diterima masyarakat	Peningkatan infra struktur dan pelayanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (1.03.03.1.01)
	1.4.1.(e)	Persentase rumah	Meningkatnya	68,84	Belum optimalnya	Peningkatan	Pembangunan Unit Air Baku



Isu Utama	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Gap	Permasalahan	Usulan Masukan Program Dan Kegiatan Non-Permendagri 90 Tahun 2019	Penyetaraan Dalam Permendagri 90 Tahun 2019
		tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%		layanan sanitasi layak yang diterima masyarakat	infrastruktur dan sanitasi layak dan berkelanjutan	(1.03.02.1.01.08)
		Jabaran Isu Utama (2)					
Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	Tidak optimalnya pengelolaan pangan.	Peningkatan infrastruktur sumber daya pangan berkelanjutan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (2.09.03.1.01)
		Jabaran Isu Utama (3)					
Terbatasnya akses air baku, layanan sanitasi layak dan belum optimalnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, air limbah terpusat	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60	-	Belum optimalnya pelayanan	Peningkatan infrastruktur sumber daya air, drainase dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional (1.03.05.1.01)



Isu Utama	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Gap	Permasalahan	Usulan Masukan Program Dan Kegiatan Non-Permendagri 90 Tahun 2019	Penyetaraan Dalam Permendagri 90 Tahun 2019
			pulau.				
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%)	-	Belum optimalnya akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (1.03.031.01.02)
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%)	32,28	Belum optimalnya akses layanan sanitasi layak	Peningkatan pelayanan sanitasi layak	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (1.03.05.101)
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota	-	Belum ada kegiatan terkait limbah dengan sistem terpusat skala kota	Peningkatan infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan	Penyediaan Prasarana IPLT (1.03.05.1.01)
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	Belum ada kegiatan pengelolaan rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat	Peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah terpusat	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (1.03.05.1.01.12)
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui	-	Belum ada kegiatan yang dilakukan terkait pengelolaan lumpur tinja perkotaan	Peningkatan infrastruktur sumber daya air, drainase dan irigasi yang memadai untuk	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (1.03.05.1.01.04)



Isu Utama	No. Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Gap	Permasalahan	Usulan Masukan Program Dan Kegiatan Non-Permendagri 90 Tahun 2019	Penyetaraan Dalam Permendagri 90 Tahun 2019
		tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota			mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Meningkat (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	Belum ada kegiatan terkait rumah tangga dengan pelayanan sistem pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan pelayanan terhadap program sistem pengelolaan lumpur tinja.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1.03.05.1.01.05)

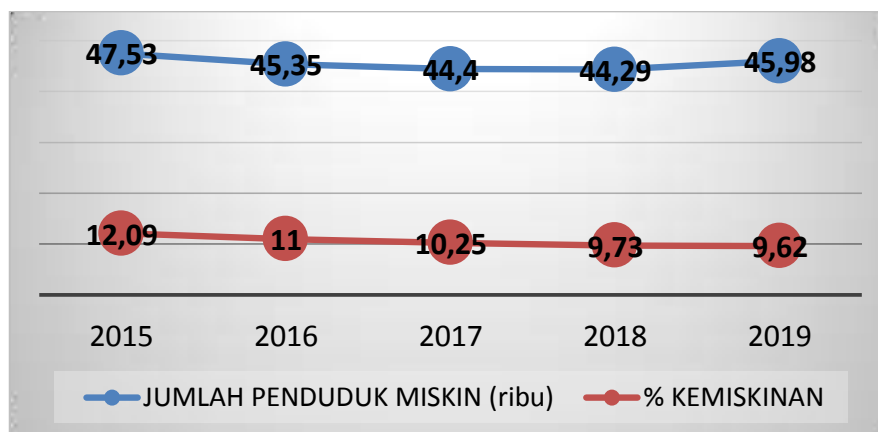


Hasil penentuan isu utama yang didasarkan pada penentuan isu strategis berdasarkan pasal 20 ayat (2) PP 69/2017 adalah:

1. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak

a). Tingginya kemiskinan

Selama periode 2015–2019, jumlah penduduk miskin relatif stagnan yaitu dari 47,53 ribu jiwa pada tahun 2015, menurun menjadi 45,98 ribu jiwa tahun 2019. Jumlah penduduk miskin yang relatif stagnan selama 5 tahun terakhir dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penanganannya. Hal ini dimungkinkan karena kemiskinan yang dihadapi jauh lebih parah dan lebih dalam sehingga perlu penanganan khusus atau juga karena besarnya arus migrasi penduduk miskin dari luar Pelalawan. Pada Tahun 2020, data penerima Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial sebanyak 4.259 Jiwa, Bantuan Pemerintah Non Tunai sebanyak 3.875 KPM serta Bantuan Langsung Tunai dari Provinsi Riau sebanyak 6.498 KK.



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

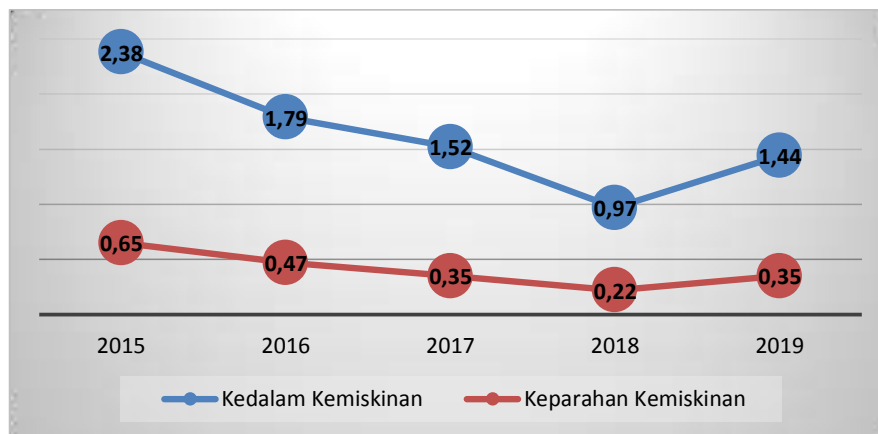
Gambar 6.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015 – 2019

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan mengalami tren yang positif dari tahun 2015 s.d 2019. Jumlah mengalami peningkatan, namun secara persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Permasalahan peningkatan penduduk yang cukup tinggi sebesar yakni 6,71 pertahunnya disebabkan karena adanya migrasi penduduk yang rata-rata tingkat perekonomiannya rendah dengan tujuan untuk mengadu nasib di Kabupaten Pelalawan. Besarnya pertumbuhan penduduk ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan masih sangat tinggi, diatas 1 yakni sebesar 1,44 pada Tahun 2019. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis



kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,35.



Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015 – 2019.

Gambar 6.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pelalawan, Tahun 2015 – 2019

Melihat kondisi tahun 2019 serta pandemi di tahun 2020, anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya perlu ditingkatkan serta program perlindungan jaminan sosial seperti BOS, BLT, PKH, KUBE dan lain sebagainya harus tetap dipertahankan.

b). Sanitasi dan sumber air minum

Sanitasi yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya bagi masyarakat. Pada tahun 2017 jenis penyakit Infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas adalah paling banyak di derita oleh penduduk di Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 26.813 penderita seperti disajikan pada tabel berikut ini.

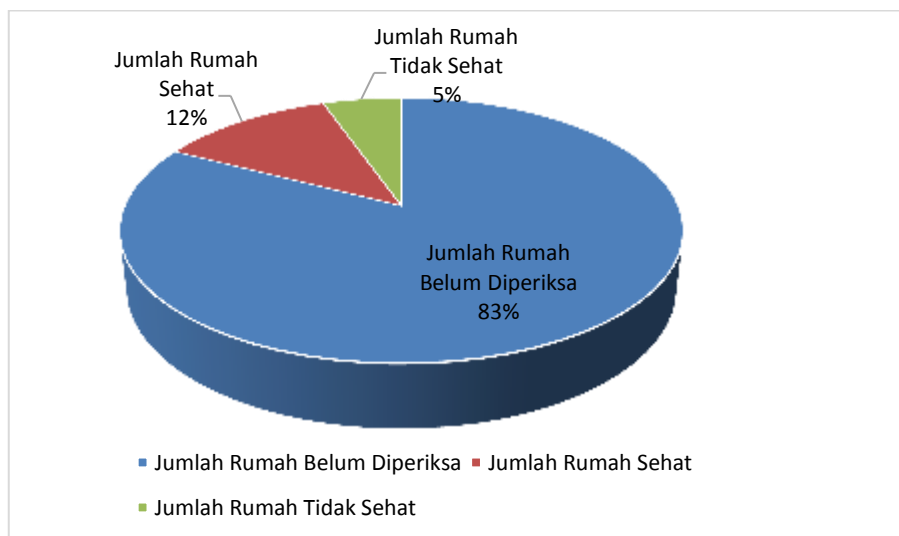
Tabel 6.4. Sepuluh Penyakit dengan Penderita Terbanyak di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Jenis Penyakit/ Kind of Disease	Jumlah Penderita	Presentase (%)
1	Infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas	26.813	29
2	Diare dan gastroenteritis	7.959	9
3	Gastritis	10.324	11
4	Hipertensi primer	9.715	10
5	Demam yang tidak diketahui sebabnya	9.368	10
6	Influenza	6.291	7
7	Batuk	6.900	6
8	Dispersia	5.829	
9	Diabetes Militus Bergantung Insulin	4.757	
10	Rheumatoid arthritis	5.410	5
	Jumlah total 2017	81.709	87

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

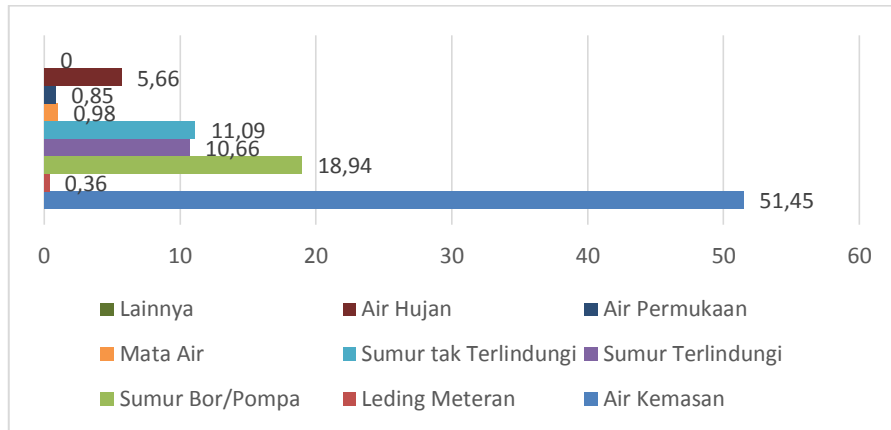


Sanitasi ditangani oleh Perangkat Daerah secara lintas sektor BLH, Kesehatan, dan PUPR. Adapun kriteria sehat bersanitasi sanitasi total berbasis masyarakat, terdiri dari stop buang air besar sembarangan, pengolahan air bersih, pengelolaan sampah, limbah rumah tangga dan cuci tangan pakai sabun. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014. Program dinas terkait rumah sehat mendata rumah sehat studi EHRA (En Health Risk Ass). 83% rumah di Kabupaten Pelalawan belum diperiksa kondisinya apakah masuk dalam kategori sehat atau tidak sehat. Hanya 18% rumah yang sudah disurvei. 12% rumah dinyatakan dalam kondisi sehat dan 5% tidak sehat. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6.4. Rumah Sehat Tahun 2017

Pada tahun 2019 masih terdapat 2 kawasan kumuh di Kabupaten Pelalawan dengan luas kawasan sekitar 0,12%. Kondisi rumah tangga dengan sanitasi layak hanya sebesar 91,81 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun perlu ditingkatkan. Luas RTH masih minim hanya 13% di wilayah perkotaan (*RKPD Kab. Pelalawan Tahun 2021*). Sampai dengan tahun 2019 ini, jumlah SR terpasang adalah sebesar 3359 Sambungan Rumah, tidak ada penambahan SR dari tahun 2018. Tidak adanya penambahan SR untuk UPT-SPAM Kabupaten Pelalawan, karena secara teknis, seluruh sistem SPAM saat ini rata-rata berusia diatas 10 tahun. Unit pengolah sudah banyak yang perlu dilakukan rehabilitasi berat. Pipa jaringan dan pipa distribusi sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan aliran air, walau masih ada idle kapasitas. Jika pressure ditingkatkan, kemungkinan yang terjadi adalah pipa akan pecah.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau

Gambar 6.5. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2019

Tabel 6.5. Pengelolaan Air Bersih Unit Pengelola Teknis Sistem Penyediaan Air Minum

No.	SUB UPT SPAM	Uraian	2018	2019
1	Pangkalan Kerinci	Kapasitas liter/detik)	20,0	20,0
		SR Kapasitas (Unit)	1.280	1.280
		SR Eksisting (Unit)	1.442	1.497
		Idle Kapasitas (Unit)	162	217
2	Bandar Seikijang	Kapasitas liter/detik)	2,5	2,5
		SR Kapasitas (Unit)	160	160
		SR Eksisting (Unit)	86	86
		Idle Kapasitas (Unit)	(74)	(74)
3	Langgam	Kapasitas liter/detik)	5,0	5,0
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	86	86
		Idle Kapasitas (Unit)	(234)	(234)
4	Pelalawan	Kapasitas liter/detik)	5,0	5,0
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	71	71
		Idle Kapasitas (Unit)	(249)	(249)
5	Pangkalan Kuras	Kapasitas(liter/detik)	5,0	5,0
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	175	175
		Idle Kapasitas (Unit)	(145)	(145)
6	Bandar Petalangan	Kapasitas(liter/detik)	10,0	10,0
		SR Kapasitas (Unit)	640	640
		SR Eksisting (Unit)	74	74
		Idle Kapasitas (Unit)	(566)	(566)
7	Pangkalan Lesung	Kapasitas liter/detik)	5,0	5,0
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	76	76
		Idle Kapasitas (Unit)	(244)	(244)
8	Ukui	Kapasitas liter/detik)	10,0	10,0
		SR Kapasitas (Unit)	640	640
		SR Eksisting (Unit)	600	600
		Idle Kapasitas (Unit)	(40)	(40)
9	Bunut	Kapasitas liter/detik)	5,0	5,0



No.	SUB UPT SPAM	Uraian	2018	2019
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	117	117
		Idle Kapasitas (Unit)	(203)	(203)
10	Teluk Meranti	Kapasitas liter/detik	2,5	2,5
		SR Kapasitas (Unit)	160	160
		SR Eksisting (Unit)	63	63
		Idle Kapasitas (Unit)	(97)	(97)
11	Kerumutan	Kapasitas liter/detik	10,0	10,0
		SR Kapasitas (Unit)	640	640
		SR Eksisting (Unit)	337	337
		Idle Kapasitas (Unit)	(303)	(303)
12	Kuala Kampar	Kapasitas liter/detik	5,0	5,0
		SR Kapasitas (Unit)	320	320
		SR Eksisting (Unit)	177	177
		Idle Kapasitas (Unit)	(143)	(143)

Sumber: UPT-SPAM Dinas PUPR, 2019 (diolah)

2. Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

Perkembangan rasio pangan yang diuraikan meliputi perkembangan rasio beras, jagung, Kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, daging dan ikan. Rasio dihitung dari perbandingan antara produksi dengan kebutuhan di Kabupaten Pelalawan dan menurut Kecamatan.

Pada Tabel dibawah menerangkan bahwa produksi beras di Kabupaten Pelalawan memiliki trend menurun yaitu dari 27.540 ton pada Tahun 2012 menjadi 21.697,16 ton pada Tahun 2017. Kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat sejalan dengan penambahan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 4,07% per tahun selama periode 2010 – 2014 dengan target konsumsi berkisar antara 94,40/kgap/tahun – 99,3 kg/kgap/tahun. Selama periode 2012 – 2017, kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan sebesar 34.909 ton pada Tahun 2012, meningkat menjadi 46.217 ton Tahun 2017. Selama periode ini, Kabupaten Pelalawan mengalami defisit beras dengan tren terus membesar yaitu dari 34.909 ton pada Tahun 2012 menjadi 46.217 ton Tahun 2017. Selama periode ini rasio produksi terhadap konsumsi beras di Kabupaten Pelalawan bergerak dari 0,79 – 0,39 dengan kategori defisit. Rasio beras sebesar 0,79 berarti bahwa produksi beras Kabupaten Pelalawan hanya mencukupi sebesar 21% dari kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Pelalawan, sisanya sebesar 0,79 (79%) harus didatangkan dari luar Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan yang memiliki potensi lahan sawah dan lahan kering yang cukup luas untuk budidaya tanaman padi. Pengembangan lahan potensial untuk tanaman padi sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk berswasembada pangan bahkan berkedaulatan pangan.



Tabel 6.6. Perkembangan Rasio Produksi Terhadap Kebutuhan Beras, Jagung dan Kedelai di Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 – 2017

No	Komoditas	Tahun (Ton)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi						
	a. Beras	27,540	26,684	23,905	21,515	30,113	18,186
	b. Jagung	1,542	1,566	1,543	1,358	7,013	3,496
	c. Kedelai	0.10	2.30	1.00	1.00	-	2.10
2	Kebutuhan						
	a. Beras	34,909	35,412	36,156	37,079	41,865	46,217
	b. Jagung	821	883	968	1,006	366	334
	c. Kedelai	2,856	3,162	3,561	3,891	2,524	2,880
3	Rasio						
	a. Beras	0.79	0.75	66.00	0.58	0.71	0.39
		defisit	defisit	defisit	defisit	defisit	defisit
	b. Jagung	1.88	1.77	1.59	1.35	19.16	10.46
		surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus
	c. Kedelai	0.00004	0.00073	0.00028	0.00026	-	-

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan (2016-2021)

3. Terbatasnya akses air baku, layanan sanitasi layak dan belum optimalnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, air limbah terpusat

a) Kualitas Air

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pada tahun 2019, persentase tingkat kualitas air yang memenuhi baku mutu air sebesar 40%, Capaian persentase tingkat kualitas air yang memenuhi baku mutu air sudah diatas target. Kondisi yang sama dengan persentase tingkat kualitas udara perkotaan yang memenuhi baku mutu udara ambien juga telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%

b) Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah di Pelalawan baru ditangani untuk wilayah perkotaan, Analisa timbulan sampah yang dapat dilayani berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah angkutan yang ada untuk Kota Pangkalan Kerinci. Berdasarkan SNI Untuk kota kecil (Pangkalan Kerinci), sampah yang dihasilkan : $81.393 \text{ jiwa} \times 0.6 \text{ kg/jiwa/hari} = 48.836 \text{ kg/hari}$ atau $48,84 \text{ ton/hari}$ atau $48,84 \text{ ton/hari} = 195,34 \text{ m}^3/\text{hari}$ $0,25 \text{ ton/ m}^3$.

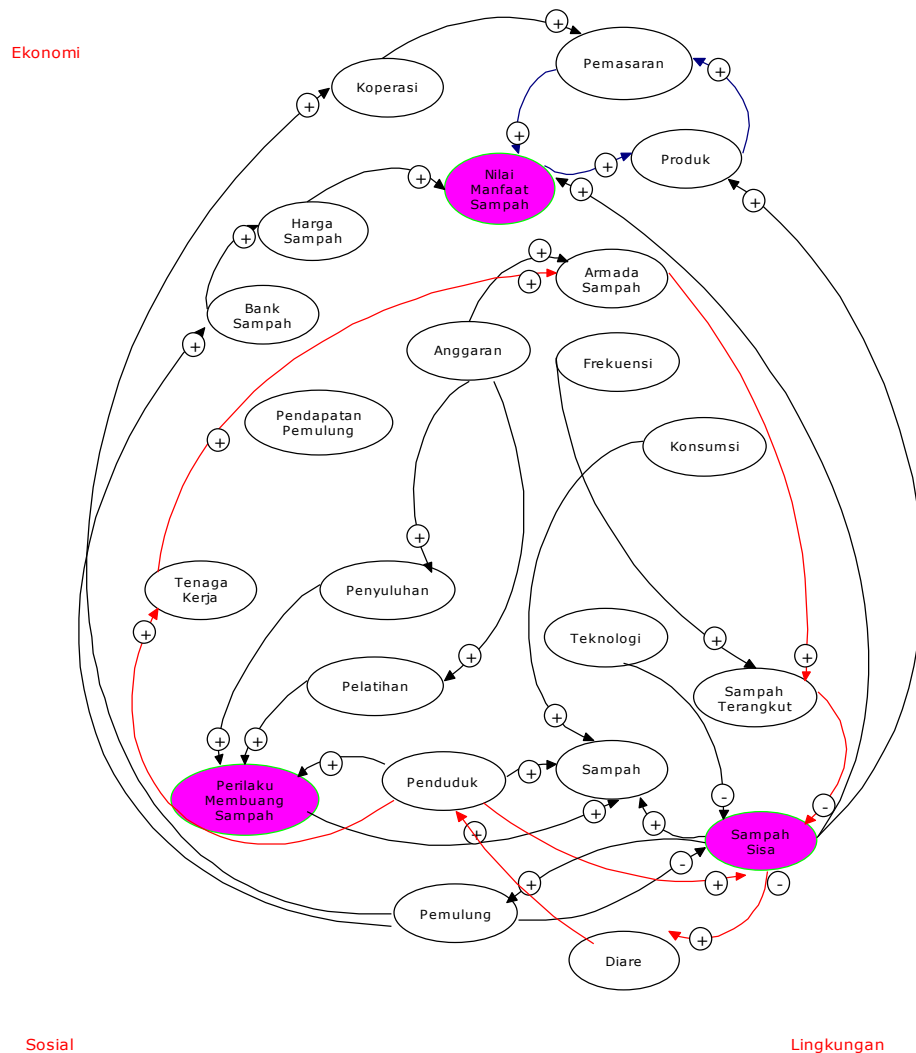
Pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan masih pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*). Dari timbulan sampah dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara), *bin container*, tong/tempat sampah, lalu diangkut dengan *dumpruck* dan amroll langsung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan sistem *open dumping*. Sistem *Sanitary Landfill* di TPA Kemang belum



dioperasionalkan secara optimal, karena masih proses melengkapi infrastruktur pelengkapannya. Selain itu juga disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahun, ketersediaan armada pengangkut sampah, personil dan sarana pendukung lainnya.

Berdasarkan model yang dikembangkan menggunakan *system dynamics* terhadap timbulan sampah dan sampah dikelola di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa perkiraan sampah sampai dengan 2030 mencapai 91.172.287,92 kg/tahun. Asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan penduduk yang mencapai 4,7 %. Peningkatan persentase layanan sampah harus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Sampah dikelola di Kabupaten Pelalawan tahun 2017 baru mencapai 57,44%.

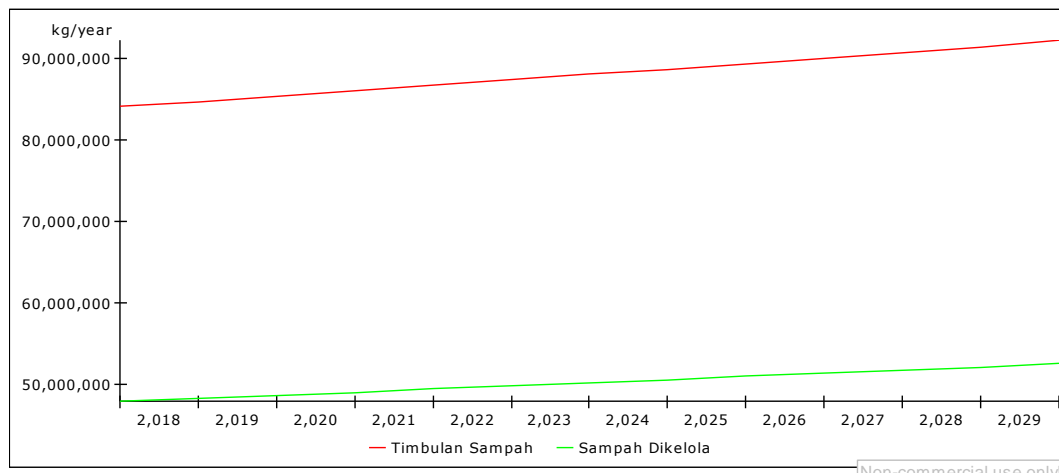
Prinsip dasar dalam mengembangkan sistem dinamik adalah hubungan sebab akibat, pengaruh balik dan dinamika waktu. Hubungan sebab akibat merupakan hal dasar dalam menyederhanakan cara berfikir. *Causal loop* dapat dibangun dengan mengilustrasikan hubungan variable dalam system. berikut *Causal loop* pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan disajikan pada Gambar dibawah.



Gambar 6.6. Causal Loop Pengelolaan Sampah



Bussiness As Usual (BAU) timbulan sampah dan sampah yang dikelola di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-2030 disajikan pada Gambar 6.2.



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Gambar 6.7. Model Dinamik Timbulan Sampah di Kabupaten Pelalawan

Perkiraan timbulan sampah dan sampah yang dikelola berdasarkan model sitem dinamik di Kabupaten Pelalawan disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.7. Perkiraan Timbulan Sampah dan Sampah (kg) dikelola di Kabupaten Pelalawan

year	Timbulan Sampah	Sampah Dikelola
2,018	84,092,350.00	47,932,639.50
2,019	84,737,727.41	48,300,504.62
2,020	85,388,057.85	48,671,192.97
2,021	86,043,379.33	49,044,726.22
2,022	86,703,730.16	49,421,126.19
2,023	87,369,148.94	49,800,414.89
2,024	88,039,674.56	50,182,614.50
2,025	88,715,346.21	50,567,747.34
2,026	89,396,203.39	50,955,835.93
2,027	90,082,285.89	51,346,902.96
2,028	90,773,633.82	51,740,971.28
2,029	91,470,287.59	52,138,063.93
2,030	92,172,287.92	52,538,204.11

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Beberapa data TPA di Kabupaten Pelalawan telah melampaui usia teknis, sehingga secara teknis sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehingga untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah di atas maka perlu dikembangkan beberapa strategi antara lain sebagai berikut :

- a) Peningkatan layanan sampah diatas 57,44%.Penambahan luasan TPA untuk menggantikan TPA yang telah habis operasi
- b) Penambahan kapasitas TPA dengan *sanitary/controlled landfill*



- c) Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah, TPS 3R dan TPST
- d) Mereduksi sampah di TPA dengan menerapkan teknologi *Waste to Energy*

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan sudah menerapkan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum dibuang ke TPA yaitu melalui kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

Selanjutnya timbulan sampah yang lolos dari pengurangan sampah 3R dikumpulkan di TPS (Tempat Penampungan Sementara), bin container, tong/tempat sampah, lalu diangkut dengan dump truck dan armroll truck ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

TPA di Kabupaten Pelalawan ada 3 lokasi yaitu TPA Kemang dengan luas 6 Ha dengan wilayah pelayanan Perkotaan Pangkalan Kerinci, TPA Sorek dengan luas 1,8 Ha dengan wilayah pelayanan Perkotaan Sorek serta TPA Ukui dengan luas 0,5 Ha dengan wilayah pelayanan Perkotaan Ukui dan Perkotaan Pangkalan Lesung.

Tabel 6.8. Pengurangan Sampah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Lokasi	Volume Sampah yang Dikurangi Melalui Kegiatan 3R (Kg)		
			2017	2018	2019
1	Pemilahan Sampah di TPA Kemang	TPA Kemang	355.538	366.692	t.a.d
2	Lapak Pengepul Karah-karah / Besi Tua	Se-Kec. Pkl. Kerinci	t.a.d	1.082.200	1.324.150
3	Bank Sampah	Se-Kab. Pelalawan	74.526	16.250	19.318
4	Pengomposan, Rumah Kompos, Komposting, Komposter	Workshop/ TPST Perkotaan, Pasar Baru, TPA Kemang	10.800	94.110	423.027
5	Sekolah Adiwiyata	Se-Kab. Pelalawan	t.a.d	38.880	38.885
6	Domestic Waste Management PT.RAPP	Kec. Bandar Seikijang	504.234	2.256.710	1.975.800
			945.098	3.854.842	3.781.180

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Sampah Tahun 2017, 2018, 2019



6.2 Indikator TPB yang Perlu Upaya Tambahan

Indikator TPB yang perlu upaya tambahan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan atau belum ada data (NA)
- 2) Integrasi Indikasi KRP Hasil RPJMD Kabupaten Pelalawan

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Pelalawan 2016-2021 dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pencapaian KRP di Kabupaten Pelalawan. Secara ringkas berikut disajikan beberapa KRP RPJMD Kabupaten Pelalawan.

Tabel 6.9. Identifikasi P- RPJMD Kabupaten Pelalawan

No	Bentuk KRP	RPJMD Kabupaten Pelalawan 2016-2021
1	Visi	Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)
2	Misi	7 Misi
3	Tujuan	13 Tujuan
4	Sasaran	19 Sasaran
		48 Strategi
5	Program	211 Program

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021



Tabel 6.10. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024

VISI: INOVASI MENUJU PELALAWAN EMAS (EKONOMI MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu		
Meningkatkan kualitas Pendidikan (Pelalawan CERDAS)	Meningkatkannya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.
		Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.
		Menyelenggarakan pendidikan masyarakat di Luar Sekolah dan pemberian dukungan beasiswa serta pendidikan tinggi
Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Budaya
	Terjaminnya Kebebasan, Kenyamanan dan Motivasi dalam Beribadah	Peningkatan Pemahaman Keagamaan, Keimanan dan Ketaqwaan
Misi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan		
Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
		Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelalawan Sehat
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran Air, Udara dan Tanah
		Melaksanakan Konservasi Lingkungan
Pelibatan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan		
Misi III : Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi		
Mewujudkan Inovasi Daerah dalam Pembangunan (Pelalawan INOVATIF)	Meningkatnya ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung penyediaan dan pemanfaatan teknologi/inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	Peningkatan Budaya Inovasi Pemerintah dan Masyarakat
		Peningkatan Penguasaan Teknologi dan Inovasi
		Desiminasi Teknologi dan Pembangunan Pusat Keunggulan
Misi IV : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur		
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastuktur Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
	Meningkatnya keselamatan	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat



VISI: INOVASI MENUJU PELALAWAN EMAS (EKONOMI MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
(Pelalawan LANCAR)	dan kelancaran transportasi	
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kelistrikan (Pelalawan TERANG)	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	Meningkatkan penyediaan listrik pedesaan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lainnya dan kawasan strategis	Meningkatnya pembangunan infrastruktur publik lainnya dan penataan ruang	Peningkatan penyediaan gedung pemerintah dan prasarana publik
		Peningkatan penataan lingkungan pemukiman
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
		Percepatan pembangunan infrastruktur utama kawasan teknopolitan
		Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan objek wisata unggulan
Misi V : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa		
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	Penegakan disiplin ASN
		Pencegahan KKN
		Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
Mewujudkan Kemandirian Desa	Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan
		Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa
		Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa
		Penguatan kelembagaan masyarakat desa
Misi VI : Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan		
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
		Peningkatan daya saing industri usaha kecil menengah
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan promosi investasi
		Pemberian kemudahan dan insentif investasi
		Peningkatan ketersediaan pangan
		Pembentukan cadangan pangan
		Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
		Pelibatan perempuan dalam penyediaan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga
Mewujudkan Pengelolaan	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	Peningkatan daya tarik destinasi wisata



VISI: INOVASI MENUJU PELALAWAN EMAS (EKONOMI MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Sumberdaya Pariwisata Berbasis Masyarakat (Pelalawan EKSOTIS)		
Misi VII : Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan		
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Menurunnya tingkat kriminalitas	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas
		Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial
		peningkatan kesiapsiagaan bencana
		Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021



Tabel 6.11. Indikator TPB yang perlu upaya tambahan

No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Isu Strategis TPB 1:				
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak 				
Upaya Tambahan:				
Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Tata Lingkungan • Program Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan • Program Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi • Program Pengembangan Lingkungan Sehat • Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
2	IV	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lainnya dan kawasan strategis	Meningkatnya pembangunan infrastruktur publik lainnya dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Kawasan Kumuh
Isu Strategis (TPB 2)				
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan 				
Upaya Tambahan:				
Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	VI	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan • Program Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Hortikultura • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Hortikultura



No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian • Program Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Pertanian
			Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan • Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan • Program Fasilitasi Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Perikanan • Program Peningkatan Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Perikanan
Isu Strategis (TPB 3) <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis • Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun 				
Upaya Tambahan: Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan layanan penyakit tropis, penanganan angka kematian bunuh diri dan keracunan serta pengonsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun				
1	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program upaya kesehatan masyarakat • Program Dukungan Manajemen Dan Sistem Informasi Kesehatan • Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular • Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan • Program Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya • Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya • Program Pengawasan Obat Dan Makanan • Program Sumber Daya Kesehatan Dan Kefarmasian • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan • Program Peningkatan Pelayanan Blud • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar • Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit • Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit



No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit • Program Upaya Kesehatan Perorangan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kesehatan Rujukan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medik Kesehatan Rujukan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Kesehatan Rujukan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Medik Kesehatan Rujukan • Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan • Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat • Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak • Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu Dan Anak Serta Kesehatan Lingkungan • Program Keluarga Berencana • Program Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perkawinan Remaja
Isu Strategis (TPB 4)				
Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan				
Upaya Tambahan:				
Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	I	Meningkatkan kualitas Pendidikan (Pelalawan CERDAS)	Meningkatkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah PertamaPeningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan • Program Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Isu Strategis (TPB 5)				
Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan				
Upaya Tambahan:				
Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	VII	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Menurunnya tingkat kriminalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan • Program Penguatan kelembagaan pelindungan perempuan dan anak • Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan



No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				perempuan
Isu Strategis (TPB 6) <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan • Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan 				
Upaya Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air • Penyediaan IPAL komunal untuk limbah domestik 				
1	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi • Program Pengembangan Lingkungan Sehat • Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
2	IV	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kelistrikan (Pelalawan TERANG)	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Sistem Elektrifikasi, Telekomunikasi Desa dan Sumber Daya Air
Isu Strategis (TPB 8) <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	IV	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan (Pelalawan LANCAR)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program Dukungan Peralatan dan Perbekalan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lainnya dan kawasan strategis	Meningkatnya pembangunan infrastruktur publik lainnya dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan • Program Peningkatan Pembangunan Gedung /Bangunan Pemerintah/Publik • Program Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
			Meningkatkan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Kawasan Teknopolitan dan Kawasan Strategis



Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Teknopolitan • Program Penataan Kawasan Wisata Bono • Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Pariwisata • Program Pengelolaan Pertanahan Kawasan Teknopolitan
2	VI	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Pariwisata Berbasis Masyarakat (Pelalawan EKSOTIS)	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program pengembangan destinasi pariwisata • Program pengembangan Kemitraan Pariwisata • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Industri Pariwisata • Program Sarana Prasarana objek wisata dan Ekonomi Kreatif • Program Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif • Program pembinaan sumber daya Pariwisata
Isu Strategis (TPB 9) <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya panjang jalur kereta api • Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	III	Mewujudkan Inovasi Daerah dalam Pembangunan (Pelalawan INOVATIF)	Meningkatnya ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung penyediaan dan pemanfaatan teknologi/inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penguatan Inovasi Daerah • Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Pembangunan Fungsi Penunjang, Inovasi Daerah, Data dan Informasi • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Peningkatan Pembangunan Teknopolitan Pelalawan • Program Peningkatan Kualitas Informasi Perizinan dan Non Perizinan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan TTG Desa
2	VI	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Program Penataan Struktur Industri • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Isu Strategis (TPB 10) <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi • Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	III	Mewujudkan Inovasi Daerah dalam Pembangunan (Pelalawan INOVATIF)	Meningkatnya ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung penyediaan dan pemanfaatan teknologi/inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan TTG Desa
2	IV	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kelistrikan (Pelalawan TERANG)	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan System Elektrifikasi, Telekomunikasi Desa dan Sumber Daya Air
3	V	Mewujudkan Kemandirian Desa	Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa • Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa • Program pengembangan ekonomi pedesaan • Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa • Program Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa



No	Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024			
	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan dan Administrasi Kewilayahan Desa • Program Kaderisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa • Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa • Program Percepatan Pembangunan Desa • Program Peningkatan Ekonomi Pedesaan • Program Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan SDA Desa
4	V	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Reformasi Birokrasi • Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kinerja • Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan • Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Program Pengendalian dan Evaluasi Penerapan SPM • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan • Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah • Program pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan OPD • Peningkatan Tata Kelola Keuangan Sesuai SAP • Program Peningkatan dan pengelolaan aset daerah • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Isu Strategis (TPB 11) <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	VI	Mewujudkan Pertumbuhan	Meningkatnya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Iklim dan Kemudahan Investasi



Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
		Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)		<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Program Peningkatan Pelayanan Perijinan • Program Peningkatan Tata Kelola Perizinan • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perizinan
2	V	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Reformasi Birokrasi • Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kinerja • Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan • Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Program Pengendalian dan Evaluasi Penerapan SPM • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan • Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah • Program pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah • Program Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan OPD • Peningkatan Tata Kelola Keuangan Sesuai SAP • Program Peningkatan dan pengelolaan aset daerah • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Isu Strategis (TPB 12) <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
		dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)		<ul style="list-style-type: none"> • Program Kebersihan dan Persampahan • Program Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Lingkungan Sehat • Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
2	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Kebersihan dan Persampahan • Program Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Isu Strategis (TPB 15) <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 				
Upaya Tambahan: Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD				
1	II	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pembinaan dan Pengembangan Penghargaan Lingkungan Hidup • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Kebersihan dan Persampahan • Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan (DBH-DR) • Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan • Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan • Program Pemeliharaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Tata Lingkungan • Program Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 • Program Penataan Hukum Lingkungan



Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
				<ul style="list-style-type: none"> Program Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan
Isu Strategis (TPB 16) <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif 				
Upaya Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum Penerapan program sadar hukum melalui Sosialisasi kepada parapihak (Korporasi, Masyarakat) 				
1	V	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kinerja Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Penerapan SPM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan OPD Peningkatan Tata Kelola Keuangan Sesuai SAP Program Peningkatan dan pengelolaan aset daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Isu Strategis (TPB 17) <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha 				
Upaya Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> Penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanaan). Ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak 				



Kesesuaian terhadap KRP P-RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (<i>tax compliance</i>)• Mengoptimalkan erjasama pemerintah dengan badan usaha				
1	VI	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)	Meningkatnya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Iklim dan Kemudahan Investasi• Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi• Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan• Program Peningkatan Pelayanan Perijinan• Program Peningkatan Tata Kelola Perizinan• Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perizinan

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020



6.3 Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan

Berdasarkan indikator pencapaian TPB, dapat diketahui indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019). Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 127. Dengan demikian indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik selama lima tahun terakhir. Indikator TPB yang dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021-2024 tanpa upaya tambahan disajikan Tabel berikut.



Tabel 6.12. Indikator TPB yang Dapat Dilaksanakan Dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021-2024 Tanpa Upaya Tambahan

NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).		9,73	9,62				Dinas 'sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019		57,07	62,61				Dinas 'kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).		12,02	53,60				Dinas 'sosial



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya di terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%		87,16	89				Dinas 'kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.		76,14	92,34				Dinas 'kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	67837	76495	80284				Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
				alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).		93,83	99,09			Dinas 'pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).		70,23	87,86			Dinas 'pendidikan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.		100	100				DISDUKCAPIL
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.		84,16	88,27	88,50			Dinas energi & sumber daya mineral
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		9					Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).		12	12	12		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		Ada	Ada	Ada		BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).		23,16	21	5,6		Dinas 'kehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan kondisi rentan, pada Skala Pengalaman	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		3	3			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
				terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		Kerawanan Pangan.								
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).		Na	7,22				Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		29,15	25,09				Dinas 'kehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).		37,12	35,08				Dinas 'kehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		7,15	5,6	Na		Dinas 'kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).		11,16	0,9	-		Dinas 'kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).		75,21	78,09	-		Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).		PPH (83,10)	PPH (89,48) Konsumsi Ikan (36)	PPH (91,74) Konsumsi Ikan (36.5)			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		12,43	10,88				Dinas Ketenagakerjaan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	6	12	10			Dinas Kesehatan	



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).		89,16	89,78				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).		89,1	91,17				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	43	50	27				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	43	48	25				Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	43	50	26			Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	76,02	91	93,8			Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	27	27	3			Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	702	775	642			Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		32	17	0			Dinas 'kehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		5 Filariasis, 3 kusta	0 Filariasis, 1 Kusta				Dinas 'kehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	25	26	26				Dinas 'kehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).		0	1,12				Dinas 'kehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).		18,03	15,39				Dinas 'kehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).		73,12	72				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kot a yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	12	14	14				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).		0,0216	0,0203	Na			Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	10%	28%	45%	45%			DP3AP2KB



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	83%	71%	59%	59%		DP3AP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	27%	16%	59%	59%		DP3AP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	65,634 8	80,419 0	79,939 8			Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	6,5635	8,0419	7,9940			Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).		0	5	4		Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			97640(JKNPBI), JKN PNS(2059 + 2760), JKN MANDIRI (68700) , JKN KETEN AGAKE RJAAN (25600)	JKN PBI 107131 , JKN PNS 2069+2871, JKN MANDIRI 71981, JKN KETEN AGAKE RJAAN 41600		Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).		25,16	49				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		Data Tidak Pernah dilakukan Pengukuran	31,47% (Statistik Kesejahteraan Pelalawan 2018)				Dinas 'kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya,	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12	14	14				Dinas 'kesehatan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
				menyediakan akses obat bagi semua.										
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		69,13	72,04				Dinas 'kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		100	100	100			Dinas 'pendidikan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).			78,20	79,10		Dinas 'pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).		98,73	102,15			Dinas 'pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).		66,57	90,57			Dinas 'pendidikan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).		9,11	9,35				Dinas Pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).		24	32,57				Dinas Pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)							Dinas Ketenagakerjaan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.		SD (93,83) SMP (70,23)	SD (99,09) SMP (87,86)				Dinas 'pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).		100	100	100			Dinas 'pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.		100	100	100			Dinas 'pendidikan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	48%	50%	55%	60%	70%	Dinas 'pendidikan
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).		1	1	2		Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,0014	0,0027	0,0013	0,0043		Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	0,0693	0,1214	0,0685	0,0520		Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).		100	100	100		Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	65,634 8	80,419 0	79,939 8			Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	0	0	0	2	2	Dinas 'pemberdayaan perempuan & perlindungan anak



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		82	84	86		Dinas 'komunikasi & informatika
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).		77,34	83,77			Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		37,18	39,02			Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).		8,47	21,19	-		Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		68,15	95,6% (Indikator kesehatan Pelalawan 2018)	-			Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas lingkungan hidup	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	Dinas lingkungan hidup	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang	



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
						danau.								
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas lingkungan hidup	



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.		-1,37	-1,51			Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,57	4,87	4,87			Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,98	5,56	7,33			Dinas Ketenagakerjaan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	217.64 8,00	235.60 3,90	256.12 5,07			Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	30,79	38,00	33,76			Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.			93,6% (2017: RPJM Pel.2016-2021)	94%		Dinas Ketenagakerjaan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	11,06	8,19	21,72			Dinas pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	22.000	24.000	26.000	27.000	28.000	Dinas pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	Dinas pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	\$ 0,50	\$ 0,51	\$ 0,60	\$ 0,62		Dinas pariwisata



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	350	400	450	480	500	Dinas Ketenagakerjaan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	0	0	121			Dinas Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	55	55	55	55	55	Dinas Perhubungan



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	48,91	49,00	49,01			Dinas perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		60,13	64,25	68,2		Dinas 'komunikasi & informatika



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	81	83	84	86		Dinas 'komunikasi & informatika
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	60	62	64	66		Dinas 'komunikasi & informatika
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	10,25	9,73	9,62			Dinas 'sosial



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	Na	4	1	0		Dinas pemberdayaan masyarakat & desa
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Na	4	1	0		Dinas pemberdayaan masyarakat & desa



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	0	4	4	20		Dinas pemberdayaan masyarakat & desa
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100		Dinas 'sosial



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).		100	100	100		Dinas 'sosial
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		0	0	0		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).		38,13	49,58			Dinas lingkungan hidup



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.		19	19	19		Dinas 'pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		ada	ada	ada		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			62,6	75		Dinas lingkungan hidup



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.		Ada	ada	ada		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		0	0	0		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).		1,8242 498	1,8242 498			Dinas lingkungan hidup



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2	4	3	Na		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	0	0		Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,0100 28	0,0019 53	0,0057 90			Dinas 'ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	3,71	3,66	3,7	3,84		BPS
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	91,44	84,12	86,06			BPKAD
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 41%).	WTP	WTP	WTP	WTP		BPKAD



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).		B	B	B			BPKAD
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).		85,67	78,94				BPKAD



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).		Na	38,47				BPKAD
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	80	85	90	90			Balitbang Daerah



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		85	90	95		DISDUKCAPIL
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.		85	90	95		DISDUKCAPIL
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).		85	90	95		DISDUKCAPIL



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD	
								2017	2018	2019	2020	2021		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		0,0029	0,0032				BPKAD
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			64	66			Dinas 'komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	65,91	65,91	65,91	94,55	95,45		BAPPEDA



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Target (Tahun)					Pelaksana/OPD
								2017	2018	2019	2020	2021	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5340	6241	9951			BPS
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	98,4	94,42	97,78			BPS

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2020

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isu Utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan, yaitu :
 - a. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak
 - b. Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan
 - c. Terbatasnya akses air baku, layanan sanitasi layak dan belum optimalnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, air limbah terpusat
2. Pencapaian TPB Kabupaten Pelalawan berdasarkan indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional mencapai 127 indikator (58%) dari total 220 indikator. Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional berjumlah 42 indikator (19%). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional berjumlah 8 indikator (4%) dan indikator yang belum/tidak ada data berjumlah 43 indikator (19%). Indikator ini juga menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan.
3. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 20 isu strategis, yaitu:
 - a. Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak
 - b. Rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan
 - c. Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis
 - d. Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun
 - e. Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan
 - f. Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - g. Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan
 - h. Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan
 - i. Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan
 - j. Belum optimalnya panjang jalur kereta api

- k. Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi
 - l. Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
 - m. Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste
 - n. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri
 - o. Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
 - p. Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM
 - q. Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif
 - r. Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
 - s. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha
4. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Upaya tambahan program yang telah direkomendasikan perlu penyesuaian dengan RPJMD sebelumnya, agar penanganan isu lebih fokus kepada stakeholder terkait. Skenario rekomendasi penyempurnaan Kebijakan Rencana Program merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Pelalawan, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021 – 2024. Perumusan skenario dalam bab sebelumnya memprakirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum ada data (NA). Untuk indikator yang sudah mencapai target nasional (Perpres Nomor 59 Tahun 2017) rekomendasi terkait dengan rumusan isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021 – 2024 dapat mengacu pada rumusan isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Pelalawan 2021 – 2024. Rekomendasi yang dihasilkan disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

TPB	Isu Strategis	Upaya Tambahan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, sanitasi dan sumber air minum layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
2	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD

TPB	Isu Strategis	Upaya Tambahan
3	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan intervensi penyakit tropis • Belum optimalnya penanganan terhadap kematian bunuh diri, keracunan serta konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan layanan penyakit tropis, penanganan angka kematian bunuh diri dan keracunan serta pengonsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun
4	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akreditasi SMP/MTs dan terbatasnya akses pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
5	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
6	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan • Rendahnya kualitas air danau, air sungai dan Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air • Penyediaan IPAL komunal untuk limbah domestik
8	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pertumbuhan PDRB, tenaga kerja formal, akses UMKM, dan infrastruktur perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
9	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya panjang jalur kereta api • Belum optimalnya pinjaman dan nilai tambah terhadap industri kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
10	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya koefisien gini dan rata-rata pertumbuhan ekonomi • Tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
11	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya hunian yang layak terjangkau, perkotaan metropolitan yang memenuhi SPP, Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dan penerapan green waste 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
12	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 daur ulang sampah, penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dan registrasi produk ramah lingkungan oleh sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
15	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya proporsi tutupan hutan, ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah termuat di dalam KRP Dokumen RPJMD
16	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan terhadap tingkat keamanan, kasus kekerasan fisik maupun psikologi dan diskriminasi HAM • Rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi dan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, lembaga eksekutif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum • Penerapan program sadar hukum melalui Sosialisasi kepada parapihak (Korporasi, Masyarakat)
17	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik • Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan). • Ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak • Memperkuat institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (<i>tax compliance</i>) • Mengoptimalkan erjasama pemerintah dengan badan usaha

6. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ke dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024.
 - b. Melakukan penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan dalam rangka pencapaian target indikator TPB Kabupaten Pelalawan.
 - c. Melakukan penyetaraan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
7. Perumusan skenario penanganan sebagai bentuk upaya tambahan dilakukan dengan memprakirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum ada data (NA). Skenario penanganan sebagai bentuk upaya tambahan yang diperlukan untuk pencapaian target TPB di Kabupaten Pelalawan.

7.2 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan masukan terkait penyusunan Dokumen KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024 adalah :

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik :
 - a. Agar melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan dan analisis kontribusi (pembagian peran) antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.
 - b. Perlu peningkatan kapasitas tim penyusun KLHS dari Organisasi Perangkat Daerah dan perguruan tinggi terkait dalam melakukan analisis baseline dan pengkajian capaian indikator TPB agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2. Penggunaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai basis program kegiatan yang diusulkan :
 - a. Perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman OPD terkait dalam melakukan penyetaraan Program dan Kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan indikator dan target capaian TPB Kabupaten Pelalawan;
 - b. Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu menyediakan dan mengembangkan sistem data dan informasi daerah agar dapat digunakan dalam penyusunan KLHS dan perencanaan pembangunan daerah.
3. Perspektif terhadap indikator-indikator di dalam pilar ekonomi, sosial, lingkungan serta tata kelola dan hukum dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan:
 - a. Perlu peningkatan kapasitas Tim Penyusun KLHS dalam memahami indikator-indikator TPB pada masing-masing pilar : ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola.
 - b. Beberapa indikator TPB perlu disetarakan atau disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Program yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2024.